



INDEKS DAYA SAING DAERAH BERKELANJUTAN

Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia

2022



INDEKS DAYA SAING DAERAH BERKELANJUTAN

**Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia
2022**

Principal Investigator

Analisis Kebijakan

Editor & Desain

Tim Kerja

Herman N. Suparman

Eduardo Edwin Ramda

Sarah Nita Hasibuan

Ditha Mangiri

Nathania Michico Tambunan

Yulius Wahyu Tri Utomo

KATA PENGANTAR

Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP27) dan G20 pada tahun 2022 berada dalam satu tarikan napas yang sama: mengakarkan paradigma inklusif dan berkelanjutan dalam tata kelola pembangunan. Komitmen ini tidak muncul dari ruang kosong, terutama bagi Indonesia yang berperan protagonis dalam dua peristiwa akbar tersebut. Selain beragam masalah lingkungan hidup dan aneka fakta eksklusi sosial, turbulensi ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir membangunkan kesadaran negara-negara, termasuk Indonesia, yang terlelap panjang dalam glorifikasi pembangunanisme. Muncul kesadaran bahwa pembangunan tanpa fondasi berkelanjutan, berkesimbangan, dan berkeadilan secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagaikan merancang-bangun istana pasir bagi generasi mendatang.

Komitmen menjangkarkan semangat inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan merupakan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan ke depan. Tanggung jawab besar ini berada di semua pundak pemangku kepentingan, mulai pemerintah (pusat/daerah), masyarakat sipil, akademisi (perguruan tinggi), dunia usaha dan pekerja sampai kaum muda. Bak gayung bersambut, dengan dukungan the Packard Foundation, kajian pemeringkatan ini menyediakan gambaran faktual kinerja implementasi paradigma berkelanjutan dalam pengembangan daya saing daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah selama tahun 2022. Sama seperti hasil penelitian sebelumnya (2020), studi ini masih menunjukkan bahwa profil derajat daya saing daerah berada di level sedang, kinerja pilar-pilar daya saing (ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola) belum berada pada posisi yang seimbang-setara, dan sebaran daya saing belum merata antar-wilayah.

Hasil studi ini diharapkan menjadi referensi bagi semua stakeholders sebagai materi diskursus dalam tata kelola kebijakan publik terkait, mulai dari perancangan, implementasi dan monitoring-evaluasi dan arena saling belajar antar-daerah

untuk menduplikasi dan/atau menggali praktik baik dari daerah lain. Untuk itu, kajian ini tidak berhenti di publikasi laporan, tetapi diseminasi hasil merupakan langkah lanjut yang mesti diselesaikan. KPPOD bersama Terra Komunika dan Kinara Indonesia melalui dukungan the Packard Foundation, akan melakukan sejumlah rangkaian komunikasi, advokasi, dan asistensi teknis untuk optimalisasi penggunaan hasil kajian oleh seluruh pemangku kepentingan. Akhir kata, semoga kajian ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan semua pihak dalam membangun daerah dan Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2023

Herman N. Suparman

Direktur Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Daya saing daerah secara berkelanjutan merupakan manifestasi komitmen bangsa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Benang merah atas kesepakatan pada dua agenda global (KTT G20 dan COP 27) menekankan adanya keharusan untuk mewujudkan kelestarian pembangunan yang berdampak pada penguatan ekonomi antar bangsa. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam menderivasikan spirit keberlanjutan di level daerah. Namun, hingga kini daya saing Indonesia masih berada pada level sedang dan belum dibangun di atas prinsip berkelanjutan. Mengalir dari problematika tersebut, KPPOD melakukan pemutakhiran “Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB)” sebagai lanjutan dari IDSDB 2020 untuk mengukur capaian keberhasilan daerah dalam penguatan daya saing secara berkelanjutan.

Daya saing daerah berkelanjutan dimaknai sebagai keunggulan kompetitif daerah yang terbentuk dari interaksi institusi, kebijakan, dan kinerja dalam jangka panjang guna menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan keberlanjutan ekonomi, mewujudkan inklusi sosial, serta pelaksanaan tata kelola berkelanjutan. IDSDB dibentuk empat pilar yang saling menunjang: lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan. Empat pilar tersebut menjadi sokoguru manifestasi daya saing daerah berkelanjutan yang idealnya dapat dilaksanakan oleh daerah secara konkret. Empat pilar DSDB dibentuk atas porsi bobot yang setara, yakni dua puluh lima persen (25 persen). IDSDB dikalkulasikan secara komposit pada seluruh pilar (17 variabel dan 34 indikator) melalui metode rata-rata geometrik (*geomean*).

Sebagian besar indikator belum bekerja optimal dalam penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Hanya tujuh indikator (44 persen) yang memiliki capaian dengan status sangat tinggi dan tinggi. Indikator yang memiliki kinerja sangat

tinggi antara lain kondusivitas keamanan, partisipasi masyarakat, dan ketenagakerjaan. Sedangkan yang berkinerja tinggi adalah akuntabilitas, kesetaraan gender, infrastruktur ekonomi, dan ekosistem investasi. Kinerja yang rendah ditunjukkan indikator kemampuan fiskal daerah.

Raihan daya saing daerah berkelanjutan pada umumnya berada pada level sedang (capaian skor 30 sd 60) . Capaian kinerja tersebut juga didominasi daerah-daerah di Kawasan Indonesia Barat (94 daerah) dan Kawasan Indonesia Tengah (33 daerah). Capaian tingkat daya saing daerah berkelanjutan daerah Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan torehan capaian antar pilar dimana dari empat pilar yang diamati, tidak semuanya menunjukkan kinerja yang tinggi. Misalnya, daerah yang memiliki keunggulan pada pilar lingkungan lestari relatif memiliki persoalan serius pada pilar ekonomi berkelanjutan, demikian juga sebaliknya.

Kinerja Daya Saing Daerah Berkelanjutan mengalami ketimpangan antar kawasan. Pautan yang lebar ini menunjukkan fenomena yang sama dengan temuan kajian sebelumnya. Kesenjangan antar wilayah terlihat dimana daerah dengan kategori daya saing tinggi didominasi oleh wilayah Jawa-Bali, sedangkan pada regio yang lain nampak hanya sebagian kecil daerah yang memiliki daya saing dengan level tinggi. Citra ini sejalan dengan realitas bahwa persoalan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Kajian ini menghadirkan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai akselerator implementasi komitmen global terkait SDGs. Pada pilar lingkungan lestari, diharapkan hal ini menjadi agenda prioritas ke depan terutama dalam mendukung pembangun berkelanjutan di daerah. Sedari dini, pembangunan daerah mulai memprioritaskan pemeliharaan lingkungan dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim dan dinamika risiko bencana di daerah. Refleksi atas kinerja pilar ekonomi berkelanjutan menuntut daerah untuk melakukan daya

dukung wilayah, optimalisasi sektor basis lestari, kemandirian fiskal menjadi agenda prioritas dalam peningkatan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan.

Kick off penguatan DSDB dapat dimulai dari pembenahan secara struktural dan komprehensif pada pilar inklusi sosial dan tata kelola berkelanjutan. Pekerjaan rumah daerah untuk pilar inklusi sosial ialah penguatan Infrastruktur kesehatan sebagai bagian dari penguatan kualitas SDM. Di sisi lain, perempuan diberikan akses yang lebih luas dalam perumusan kebijakan publik dan aktivitas penguatan daya saing daerah berkelanjutan. Terakhir, perbaikan yang perlu dilakukan dalam pilar tata kelola berkelanjutan ialah pengembangan inovasi dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pada sisi praktis. Pemerintah pusat menerbitkan aturan yang mendorong daerah untuk memprioritaskan kebijakan dan realisasi investasi hijau.

Catatan kajian DSDB memberikan peta jalan internalisasi dan implementasi agenda global tersebut hingga level daerah. Penguatan kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkelanjutan pada aspek kewenangan, keuangan, hingga pembinaan dan pengawasan merupakan langkah teknokratis untuk penguatan DSDB daerah. Selain itu, penting bagi daerah untuk melakukan penguatan sistem penyediaan data (Pusat dan Daerah) sebagai “profil dan portofolio investasi” daerah. Pada akhirnya, daya saing daerah berkelanjutan merupakan peta jalan pertobatan ekologis dalam pembangunan daerah.

Daftar Isi

i KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF

1 1. pendahuluan

Latar Belakang
Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Signifikansi Studi
Ruang Lingkup Studi

7 2. KERANGKA TEORITIS

Desentralisasi dan Kesejahteraan
Daya Saing Daerah Berkelanjutan
Kerangka Konseptual

37 3. METODE PENELITIAN

Jenis Data
Metode Analisis Data
Sumber data, Satuan dan Sifat DSDB
Teknik Analisis Dokumen Perencanaan
dan Kebijakan Daerah

47 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum
IDSDB (Kelengkapan data 100 persen)
IDSDB (Kelengkapan data 80 persen)

199

5. REPORTASE DAERAH

Badung (Bali)
Trenggalek (Jawa Timur)
Klungkung (Bali)
Malinau (Kalimantan Utara)
Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)
Sukoharjo (Jawa Tengah)
Sanggau (Kalimantan Barat)
Deli Serdang (Sumatera Utara)
Pohuwato (Gorontalo)
Ngada (NTT)
Jayapura (Papua)
Bangkalan (Jawa Timur)
Cirebon (Jawa Barat)
Cianjur (Jawa Barat)

217

6. PENDUKUNG & PENGHAMBAT

Determinan Pendukung
Determinan Penghambat
Keterbatasan Data

229

7. PENUTUP

Kesimpulan
Catatan Akhir

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Daya Saing Daerah Berkelanjutan	27
Gambar 3.1 Bobot Pilar IDSDB	38
Gambar 4.1 Level Daya Saing Daerah Berkelanjutan	47
Gambar 4.2 Kelengkapan Data pada 416 Kabupaten di Indonesia	48
Gambar 4.3 <i>Spider Web Top Ten DSDB</i>	50
Gambar 4.4 <i>Spider Web Bottom Ten DSDB</i>	51
Gambar 4.5 Rerata Kinerja Indikator IDSDB	52
Gambar 4.6 Kinerja DSDB (183 Kabupaten)	54
Gambar 4.7 Kinerja DSDB dan Pilar Lingkungan Lestari	55
Gambar 4.8 Kinerja DSDB dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan	57
Gambar 4.9 Kinerja DSDB dan Pilar Inklusi Sosial	59
Gambar 4.10 Kinerja DSDB dan Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	61
Gambar 4.11 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lingkungan Lestari	63
Gambar 4.12 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan	66
Gambar 4.13 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Inklusi Sosial	68
Gambar 4.14 Capaian pada daerah yang memiliki capaian tinggi pada setiap pilar	71
Gambar 4.15 Capaian pada daerah berdaya saing sedang yang memiliki capaian tinggi pada tiga pilar	72
Gambar 4.16 Kinerja Pilar Lingkungan Lestari	74
Gambar 4.17 <i>Spider Web Top Five (A) dan Bottom Five (B)</i> Pilar Lingkungan Lestari	75
Gambar 4.18 <i>Kinerja Pilar Ekonomi Berkelanjutan</i>	79
Gambar 4.19 <i>Spider Web Top Five & Bottom Five</i> Pilar Ekonomi Berkelanjutan	81
Gambar 4.20 Kinerja Pilar Inklusi Sosial	92
Gambar 4.21 <i>Spider Web Top Five (A) & Bottom Five (B)</i> Pilar Inklusi Sosial	92

Gambar 4.22 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	103
Gambar 4.23 <i>Spider Webb Top Five (A) & Bottom Five (B)</i> Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	103
Gambar 4.24 Ketidaktersediaan data per indikator	126
Gambar 4.25 Kinerja DSDB (387 Kabupaten)	127
Gambar 4.26 <i>Spider Web Top Ten DSDB</i>	128
Gambar 4.27 <i>Rerata Kinerja Indikator DSDB</i>	129
Gambar 4.28 Kinerja DSDB dan Pilar Lingkungan Lestari	130
Gambar 4.29 Kinerja DSDB dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan	132
Gambar 4.30 Kinerja DSDB dan Pilar Inklusi Sosial	134
Gambar 4.31 Kinerja DSDB dan Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	136
Gambar 4.32 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lingkungan Lestari	138
Gambar 4.33 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan	140
Gambar 4.34 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Inklusi Sosial	142
Gambar 4.35 Capaian pada daerah yang memiliki capaian tinggi pada setiap pilar	145
Gambar 4.36 Capaian pada daerah berdaya saing sedang yang memiliki capaian tinggi pada tiga pilar	146
Gambar 4.37 Capaian pada daerah berdaya saing rendah	147
Gambar 4.38 Kinerja Pilar Lingkungan Lestari	149
Gambar 4.39 <i>Spider Web Top Five</i> Pilar Lingkungan Lestari	150
Gambar 4.40 <i>Spider Web Bottom Five</i> Pilar Lingkungan Lestari	150
Gambar 4.41 Kinerja Pilar Ekonomi Berkelanjutan	157
Gambar 4.42 <i>Spider Web Top Five</i> Pilar Ekonomi Berkelanjutan	158
Gambar 4.43 <i>Spider Web Bottom Five</i> Pilar Ekonomi Berkelanjutan	158
Gambar 4.44 Kinerja Pilar Inklusi Sosial	165
Gambar 4.45 <i>Spider Web Top Five</i> Inklusi Sosial	166
Gambar 4.46 <i>Spider Web Bottom Five</i> Inklusi Sosial	166
Gambar 4.47 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	173
Gambar 4.48 <i>Spider Web Top Five</i> Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	174
Gambar 4.49 <i>Spider Web Bottom Five</i> Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	174

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Matriks Definsi Operasional Variabel (DOV) dan Definsi Operasional Indikator (DOI) Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan	28
Tabel 3.1. Matriks Data Set Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan	42
Tabel 3.2. Teknik Analisis Kebijakan Berkelanjutan	44
Tabel 4.1 Nilai Rerata Indikator Pilar Lingkungan Lestari	73
Tabel 4.2 Nilai Rerata Indikator Pilar Ekonomi berkelanjutan	80
Tabel 4.3 Nilai Rerata Indikator Pilar Inklusi Sosial	91
Tabel 4.4 Nilai Rerata Indikator Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	101
Tabel 4.5 Nilai Rerata Indikator Pilar Lingkungan Lestari	151
Tabel 4.6 Nilai Rerata Indikator Pilar Ekonomi Berkelanjutan	156
Tabel 4.7 Nilai Rerata Indikator Pilar Inklusi Sosial	164
Tabel 4.8 Nilai Rerata Indikator Pilar Tata Kelola Berkelanjutan	172
Lampiran 1 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan	241
Lampiran 2 Pilar Lingkungan Lestari IDSDB	246
Lampiran 3 Pilar Ekonomi Berkelanjutan IDSDB	251
Lampiran 4 Pilar Inklusi Sosial IDSDB	256
Lampiran 5 Pilar Tata Kelola Berkelanjutan IDSDB	261
Lampiran 6 IDSDB– Indonesia Barat	266
Lampiran 7 IDSDB– Indonesia Tengah	270
Lampiran 8 IDSDB Kelengkapan Data 80 persen	273
Lampiran 9 IDSDB – Indonesia Barat (Data 80 persen)	288
Lampiran 10 IDSDB – Indonesia Tengah (Data 80 persen)	296
Lampiran 11 IDSDB – Indonesia Timur (Data 80 persen)	302

I. PENDAHULUAN



Latar Belakang

Penguatan daya saing merupakan kunci mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai *ultimate goal* otonomi daerah.¹ Pada era desentralisasi, penguatan tersebut memiliki fondasi struktural yang kuat. Sebab Pemerintah Daerah (pemda) mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi modal bagi pemda untuk berinovasi dan berkompetisi maupun dalam merespon perkembangan eksternal (global dan lokal/domestik).

Persoalannya, daya saing Indonesia hari ini masih rendah pada level nasional maupun daerah. *Global Competitiveness Index* menyajikan peringkat Indonesia yang menurun lima peringkat dari tahun 2018 (peringkat 45) menjadi peringkat ke-50 tahun 2019. *World Bank* dalam laporan *Ease of Doing Business* (2020) memperlihatkan penurunan kemudahan berusaha Indonesia, khususnya pada tahap memulai usaha (*World Economic Forum*, 2020). Pada aras daerah, hasil studi KPPOD (2020) menunjukkan bahwa profil daya saing Indonesia berada pada level sedang (96,91 persen daerah) dan timpang secara kewilayahan (71,94 persen) berada di kawasan Indonesia barat sedangkan sebagian kecil sisanya berada di belahan timur Indonesia.

Selain itu, daya saing Indonesia secara empiris belum dibangun di atas pilar pembangunan berkelanjutan. Hasil

¹ Bdk. Consideration UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pengukuran *Environmental Performance Index* (EPI-metode untuk mengukur kinerja lingkungan dari kebijakan suatu negara) memperlihatkan kinerja kita dalam pemenuhan aspek keberlanjutan lingkungan: peringkat ke-105 dari 180 negara pada tahun 2016, dan mengalami penurunan ke posisi 164 pada tahun 2022. Penurunan tersebut terutama terjadi pada kategori sumber daya air, area hutan dan emisi polusi. Hasil studi KPPOD (2020) menunjukkan bahwa pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial dan tata kelola berkelanjutan, belum berada pada posisi yang setara. Kajian tersebut menunjukkan fakta bahwa daerah memiliki persoalan kelestarian lingkungan meski memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi.

Atensi terhadap prinsip berkelanjutan menjadi juga agenda penting pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Bencana kesehatan ini mengejutkan semua negara dan tidak ada daerah (ekonomi) yang luput dari dampak negatifnya. Peningkatan daya saing daerah pun menjadi bagian integral dari pemulihan ekonomi. Tata kelola kesehatan masyarakat turut menentukan keberhasilan penguatan daya saing suatu daerah. Sebab, negara-negara yang dapat merencanakan dan mengkoordinasikan langkah-langkah kesehatan dengan lebih baik dengan kebijakan fiskal dan sosial relatif lebih berhasil dalam mengurangi dampak krisis (*World Economic Forum, 2020*). Selain itu, ketahanan ekonomi suatu daerah bergantung pada komitmen dan konsistensi implementasi kebijakan dalam agenda penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Idealnya, penguatan daya saing daerah harus sejalan dengan atensi terhadap kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi dan tata kelola secara integral (KPPOD, 2020).

Lebih dari itu, penguatan daya saing daerah berkelanjutan menjadi kata kunci dalam pengendalian dampak perubahan iklim. Indikasi perubahan iklim yang terlihat dari perubahan curah hujan di Indonesia menjadi *alarm* bagi pemerintah dan masyarakat akan sejumlah dampak negatif di masa mendatang. Dalam kasus Jakarta, peningkatan suhu sebesar 1,6 derajat celsius dalam seabad terakhir memberikan dampak terhadap intensitas

hujan yang tidak pasti (*Kompas*, 2022). Perlu ada perubahan tata kelola aktivitas perekonomian secara berkelanjutan, sebab risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh perubahan hujan, namun ada peran serta kapasitas tata kelola lingkungan di dalamnya.

Diskursus terkait perubahan iklim menjelma sebagai narasi primer dalam kerangka pembangunan ekonomi pada aras global hingga lokal. Ratifikasi *Paris Agreement* sebagai wujud komitmen untuk pemeliharaan lingkungan menjadi modalitas utama untuk re-orientasi agenda penguatan daya saing daerah di masa mendatang. Idealnya, agenda penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan terintegrasi dengan pemeliharaan lingkungan guna meminimalisir dampak perubahan iklim di Indonesia. Keseimbangan *people, planet*, dan *prosperity* menjadi prinsip kunci di tengah pertentangan klasik: dilema ekonomi vs lingkungan (Kambewa, 2007).

Daya saing daerah secara berkelanjutan tentunya merupakan manifestasi komitmen bangsa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Kesepakatan sejumlah negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *the Conference of Parties (COP) 27* telah mendorong adanya pendanaan baru untuk kerugian dan kerusakan kepada negara miskin atau berkembang yang rentan dan mengalami kerugian akibat perubahan iklim (*United Nations Climate Change*, 2022). Pada saat yang bersamaan, negara-negara yang tergabung dalam G20 menghasilkan Deklarasi Bali dimana salah satu poin di dalamnya menekankan tindakan konkret dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). Benang merah atas dua agenda global ini menekankan adanya keharusan untuk mewujudkan kelestarian pembangunan yang berdampak pada penguatan ekonomi antar bangsa.

Sejalan dengan komitmen global tersebut, pada konteks nasional, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan dalam menderivasikan spirit keberlanjutan di level daerah. Pemerintah menerbitkan terutama Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan diperbaharui dalam PERPRES Nomor 111 Tahun 2022. Hadirnya regulasi ini bertujuan untuk memastikan perwujudan kesejahteraan, keberlanjutan, inklusivitas, dan tata kelola berkelanjutan dalam pelaksanaan TPB. Daya saing daerah diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut sebagai manifestasi dari upaya menjaga kinerja keseimbangan antar aspek. Maka, dalam melihat keberhasilan aktualisasi TPB dalam kerangka daya saing daerah berkelanjutan, diperlukan adanya kerangka evaluatif sebagai suatu alat ukur.

Pemerintah turut bergerak pada aras regulasi dan fiskal sebagai langkah nyata penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Proses penyusunan RUU Daya Saing Daerah yang diinisiasi DPD RI menjadi bagian dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Eksistensi rancangan kebijakan ini bertujuan mendorong daya saing dan inovasi dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pada aras fiskal, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing melalui instrumen alokasi dan insentif guna mendukung akselerasi daya saing berbasis inovasi, penguatan kualitas SDM, serta pemeliharaan mutu lingkungan.

KPPOD merespon inisiatif tersebut melalui upaya pemutakhiran “Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB)” yang bertujuan untuk mengukur capaian keberhasilan daerah dalam penguatan daya saing secara berkelanjutan. Penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan daerah. Pada aras proses, penyusunan indeks daya saing daerah akan berjalan dengan pendekatan kolaboratif-multipihak dengan acuan substansi yang relevan.

Indeks ini merupakan hasil kontribusi sejumlah dokumen serta temuan dari berbagai instansi yang dikompositkan. Proses perhitungan indeks komposit ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi daya saing daerah berkelanjutan pada suatu wilayah secara menyeluruh. Tujuan perumusan indeks

ini nantinya sebagai referensi bagi wilayah yang bersangkutan dapat menentukan fokus yang perlu dibenahi dalam konteks penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Muaranya, daerah dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang memperkuat daya saing secara berkelanjutan demi tercapainya *ultimate goal* otonomi daerah: kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah

Rumusan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membentuk kerangka indeks daya saing daerah berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimana mengukur peringkat daya saing daerah berkelanjutan di seluruh kabupaten di Indonesia?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari daya saing daerah berkelanjutan di tingkat kabupaten di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Daya Saing Daerah Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kerangka indeks daya saing daerah berkelanjutan di Indonesia;
2. Melakukan pengukuran indeks daya saing daerah berkelanjutan di seluruh kabupaten di Indonesia; dan
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat bagi penguatan daya saing daerah berkelanjutan pada tingkat kabupaten di Indonesia.

Signifikansi Studi

1. **Bagi Pemerintah Pusat:** Kerangka dan hasil indeks daya saing daerah berkelanjutan menjadi referensi bagi pengembangan metode pengukuran dan kerangka kebijakan daya saing daerah di masa depan. Kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Daya Saing Daerah yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI). Selain itu, kerangka dan hasil indeks yang dihasilkan dalam kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan di level legislatif (DPR RI) dan eksekutif (Pemerintah dan Kementerian/Lembaga).
2. **Bagi Pemerintah Daerah:** Indeks daya saing daerah berkelanjutan berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.
3. **Bagi Pelaku Usaha dan Asosiasi Pelaku Usaha:** Indeks daya saing daerah berkelanjutan menjadi referensi untuk mengetahui ekosistem investasi dan sumber informasi (materi) untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan daya saing daerah berkelanjutan.
4. **Bagi Elemen-elemen masyarakat sipil (NGO dan Media Massa):** Indeks daya saing daerah berkelanjutan bisa memperkaya materi kerja dalam advokasi perbaikan daya saing daerah berkelanjutan.
5. **Akademia:** Indeks ini memperkaya referensi akademis bagi peneliti dan masyarakat kampus dalam diskursus daya saing daerah berkelanjutan.

Ruang Lingkup Studi

Studi ini dilakukan guna mengukur daya saing berkelanjutan seluruh kabupaten di Indonesia. Kabupaten dipilih sebagai yurisdiksi dan entitas administrasi pemerintahan yang menempati 80 persen wilayah Indonesia. Kabupaten dalam studi ini adalah kabupaten yang memiliki SDA (hutan, migas, minerba, pertanian) yang melimpah dan menjadi sektor-sektor strategis di daerah tersebut.



II KERANGKA TEORITIS

Desentralisasi dan Kesejahteraan

1. Hakikat Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat (Koesoemahatmadja, 1979:14). Secara etimologis desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Namun, definisi tersebut tidak dapat dimaknai secara harafiah sebagai upaya daerah untuk berdiri sendiri dan merdeka dari ikatan negara. Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah otonom. Secara spesifik, desentralisasi dimaknai sebagai perpindahan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi bidangnya, unit administratif daerah, semi otonomi dan organisasi parastatal, pemerintahan daerah, atau organisasi-organisasi nonpemerintah (G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli, 1992).

Desentralisasi termanifestasikan dalam empat dimensi integral yang saling mendukung satu sama lain. Dimensi tersebut terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) (Kalin, 2001). Keempatnya saling berkaitan erat satu sama lain, dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama, agar berbagai tujuan otonomi daerah, misalnya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terbengkalai. Tujuan desentralisasi pada konteks Indonesia

bertujuan untuk: 1) mengurangi peran pemerintah pusat dalam masalah-masalah yang dapat ditangani sendiri oleh pemerintah daerah, 2) meningkatkan pengertian dan dukungan rakyat dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi, 3) menyusun program perbaikan sosial ekonomi secara lebih realistis pada tingkat daerah; 4) melatih rakyat untuk mengatur urusannya sendiri; dan 5) membina kesatuan nasional (Dedi Supriadi & Faisal Jalal, 2001).

Desentralisasi diejawantahkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.² Sebab pemda atau pranata administrasi lokal yang memperoleh kewenangan, memiliki ruang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dari ruang belakang (perencanaan dan penganggaran) sampai pada sisi depan pembangunan daerah (pelayanan publik). Pengurusan dan pengaturan secara otonom tersebut bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan daya saing daerah.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah berjalan selama dua dekade. Kerangka pemerintahan ini disusun sebagai kerangka kebijakan yang mendukung akselerasi pembangunan bagi perwujudan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan, sebagai *ultimate goal* otonomi, hanya akan terwujud jika desentralisasi memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan sosial dan spasial, dan seterusnya.

Hakikat desentralisasi dan otonomi daerah menekankan kapabilitas daerah otonom untuk sebesar mungkin mengurus rumah tangganya secara mandiri. Penyerahan kewenangan pada aspek administratif, fiskal, politik, hingga ekonomi dengan mempertimbangkan kriteria pembagian

² Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni *autos* (sendiri) dan *nomos* (aturan). Pada mulanya, otonomi berarti membuat aturan (perundang-undangan) sendiri (*zelfwetgeving*). Seiring perkembangan zaman, konsepsi otonomi daerah turut mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Konsep otonomi lain yang dikembangkan oleh C. W. Vander memaknai otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri) (Huda, 2010)

kewenangan (efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas) bertujuan untuk memperkuat kemandirian daerah. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik tentunya akan menghasilkan *otuput* dan *outcome* yang bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* membutuhkan kecakapan pemerintah daerah agar kewenangan yang telah didistribusikan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Daya Saing: Jalan Menuju Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan *ultimate goal* dari pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi 1998. Amanat konstitusi UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum menuntut adanya gerak dan upaya konkret entitas pemerintahan untuk mewujudkan hal tersebut. Corak sentralistik yang kental di era Orde Baru terbukti meninggalkan jejak kesenjangan antar wilayah dan ketimpangan daya saing. Implementasi otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Prinsip otonomi seluas-luasnya memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang telah ditentukan (urusan konkuren sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam UU No. 23/2014 dilaksanakan dengan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Pendekatan eksternalitas dilaksanakan dengan mempertimbangkan proses pembagian kewenangan berdasarkan cakupan dampak yang ditimbulkan dari pembagian urusan pemerintahan tersebut. Pendekatan akuntabilitas bertumpu pada penyerahan urusan pemerintahan kepada satuan terdekat dari dampak yang ditimbulkan dari pembagian urusan pemerintahan tersebut. Terakhir, pendekatan

efisiensi dijalankan dengan harapan penanganan dampak suatu urusan berhasil manakala dikerjakan oleh satuan pemerintahan tertentu (Kaho, 2012).

Pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efektivitas mengamanatkan tanggung jawab penguatan ekonomi wilayah kepada Pemerintah Daerah. Pasal 258 UU No. 23/2014 secara jelas menegaskan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan yang diberikan untuk memperkuat daya saing daerah. Secara umum, komponen desentralisasi dapat mendukung daya saing pemerintah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Darmawan, 2008).

Peran desentralisasi dalam penguatan daya saing daerah hadir sebagai determinan yang mendorong produktivitas dan penggunaan faktor produksi secara efisien. Kewenangan daerah yang luas dalam mengembangkan daerahnya ditransmisikan sebagai suplemen penunjang daya saing daerah. Hakekat desentralisasi sebagai manifestasi kekuasaan daerah diharapkan mampu menggerakkan penguatan daya saing daerah guna mewujudkan *ultimate goal* otonomi daerah, yakni kesejahteraan masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berpandangan bahwa inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut (Ristek-BRIN, 2020).

Daya Saing Daerah Berkelanjutan

1. Daya Saing

Pemaknaan daya saing oleh *World Economic Forum (WEF)* merujuk pada kemampuan suatu entitas perekonomian (negara/daerah) guna mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. Tingkat produktivitas, efisiensi dan probabilitas merupakan manifestasi kemampuan pencapaian ikhtiar tersebut sebagai indikator pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (*World Bank*, 1995). Segenap komponen tersebut diarahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai jalan menuju perwujudan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan, 2014).

Daya saing dalam pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI)* merupakan atribut dan kualitas ekonomi yang memungkinkan penggunaan faktor-faktor produksi secara lebih efisien. Dasar konsep ini adalah teori akuntansi pertumbuhan yang mengukur pertumbuhan sebagai jumlah pertumbuhan faktor-faktor produksi—yaitu, tenaga kerja dan modal—dan dari produktivitas faktor total (TFP), yang mengukur faktor-faktor yang tidak dapat dijelaskan oleh tenaga kerja, modal, atau masukan lainnya. Indeks daya saing global sendiri melakukan pengukuran terhadap determinan yang mendorong TFP (Schwab, 2018).

Konsep yang diusung *Global Competitiveness Index* bertumpu pada eksistensi daya saing sebagai penunjang *Total Factor Productivity (TFP)*. Gagasan ini identik dengan konsep ekonomi mikro, yakni produktivitas dalam fungsi Cobb-Dougllass sehingga daya saing yang dijabarkan lebih mengedepankan kemampuan sektor swasta dengan peran pemerintah yang minim. Konsep ini terlihat identik

dengan dominasi pemegang modal sebagai penentu roda perekonomian. Tentu, pemaknaan ini tidak sepenuhnya relevan dengan Indonesia mengingat peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan paradigma produktivitas yang diusung GCI.

Dalam konteks Indonesia, daya saing memiliki definisi tersendiri dengan menekankan kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK BI) memaknai daya saing sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional. Demikian halnya dengan BRIN yang menekankan daya saing sebagai interaksi yang kompleks antara faktor *input*, *output* dan *outcome* yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian (Ristek-BRIN, 2020).

Esensi daya saing dapat dilihat dari upaya untuk memperoleh capaian optimum dalam tata kelola ekonomi daerah. Konsep yang diusung BRIN dan PPSK BI memasukkan unsur peran pemerintah sebagai aktor penting dalam penguatan daya saing daerah di Indonesia. Daya saing sendiri merupakan hasil pengolahan atas kapasitas suatu negara berinovasi, berbasis sektor-sektor kunci yang ada (Porter, 1991). Secara parsial (level daerah), daya saing suatu daerah menjadi output atas tata kelola beragam sumberdaya (ekonomi, sosial dan lingkungan) untuk peningkatan taraf hidup masyarakat serta daya kompetitif daerah itu sendiri. Muaranya, investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (KPPOD, 2005).

Pada dasarnya, daya saing memiliki definisi yang beragam. Praktik kalkulasi daya saing yang diinisiasi setiap lembaga

memiliki perbedaan sesuai dengan semangat pemaknaan daya saing yang hendak diusung. Paul Krugman bahkan mengatakan bahwa daya saing bukanlah istilah ekonomi, melainkan gagasan kebijakan (Krugman, 1996). Ketiadaan konsep daya saing yang baku pada akhirnya memberikan ruang bagi setiap negara untuk merefleksikan konsep daya saing sesuai konteks yang berlaku di negara tersebut. Paradigma daya saing yang dikembangkan di Indonesia tentu membentuk karakter ontologis tersendiri sehingga membutuhkan kerangka pengukuran yang berbeda dari pengukuran daya saing yang berlaku secara global.

Beranjak dari telaah pustaka tersebut, KPPOD mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan daerah guna menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kinerja perekonomian daerah menuju perwujudan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sebagai *ultimate goal* otonomi daerah akan tercapai jika tata kelola dijadikan sebagai roda perekonomian daerah yang bergerak secara progresif dan produktif. Daya produktivitas daerah berupa dukungan tata kelola sebagai input serta output penunjang daya saing yang saling berkaitan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) satu sama lain sebagai generator pertumbuhan lokal. Karakter ontologis definisi ini menekankan interaksi antara peran pemerintah menghadirkan kinerja pembangunan sebagai keseimbangan integral antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Menurut WEF, daya saing suatu negara terbentuk atas dua belas pilar. Komponen tersebut merefleksikan luas dan kompleksitas pendorong produktivitas dan ekosistem daya saing yang saling berkaitan. Dua belas pilar tersebut meliputi: (1) Institusi; (2) Infrastruktur; (3) Adopsi TIK; (4) Stabilitas ekonomi makro; (5) Kesehatan; (6) Keterampilan; (7) Pasar Produk; (8) Pasar Tenaga Kerja; (9) Sistem keuangan; (10) Ukuran pasar; (11) Dinamisme Bisnis; dan (12) Kemampuan Inovasi (*World Economic Forum*, 2018). Contoh korelasi tersebut dapat dilihat, misalnya pada pilar kemampuan inovasi, tentu sulit tercapai apabila dukungan kinerja kesehatan, pendidikan dan pelatihan kerja yang bermuara pada penciptaan teknologi

yang handal tidak tersedia. Senada dengan WEF, *International Institute of Management and Development* (IMD) menilai tinggi empat pilar berikut: kinerja perekonomian, efisiensi pemerintah, efisiensi dunia usaha, dan infrastruktur dalam publikasi *The World Competitiveness Yearbook* (IMD, 2021).

Daya saing daerah dimaknai sebagai kinerja akumulatif sumber daya daerah sebagai bagian dari perkembangan daerah. Perkembangan kemajuan suatu daerah ditentukan oleh empat faktor: (1) kesempatan kerja; (2) basis pembangunan daerah; (3) aset lokasi berupa keuntungan kompetitif daerah didasarkan pada kualitas lingkungan; dan (4) sumber daya pengetahuan (Blakely, 1989). Tentunya, penguatan daya saing tidak bisa dilepaskan dari empat faktor Blakely sehingga perlu ada harmonisasi arah gerak pembangunan daerah yang mengakomodir keempat faktor tersebut.

Sejumlah lembaga nasional turut merilis gagasan dan kerangka konseptual terkait daya saing daerah di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki indeks daya saing daerah yang dibangun atas empat aspek, yakni: (1) aspek faktor penguat (infrastruktur, kelembagaan perekonomian daerah); (2) aspek sumber daya manusia; (3) aspek pasar; dan (4) aspek ekosistem inovasi (Ristek-BRIN, 2020). Sementara Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dalam studi pengembangan Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) menyebut lima aspek yang mesti dilihat secara integral, yakni Perencanaan dan Penetapan Tujuan, Ketangguhan Ekonomi, Ketangguhan Sosial, Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dan Insentif untuk masyarakat di kabupaten (LTKL, 2019).

Menurut KPPOD (2001-2005), daya saing investasi daerah terbentuk atas komposit lima faktor dan 14 indikator, yaitu: (1) Faktor kelembagaan: kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan pemda, kepemimpinan lokal; (2) Faktor keamanan, politik, dan sosial budaya; (3) Faktor ekonomi daerah yaitu potensi ekonomi dan struktur ekonomi; (4) Faktor tenaga kerja terdiri dari: ketersediaan

tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja; (5) Faktor infrastruktur fisik (ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik) (KPPOD, 2005).

Merujuk sejumlah kajian di atas, saripati konseptual komponen pembentuk daya saing terekstraksi ke dalam 3 elemen utama berikut: *endowment* (faktor anugerah), struktur, dan perilaku. Manifestasi komponen tersebut diwujudkan dalam 4 pilar meliputi: pilar ekonomi berkelanjutan, pilar inklusi sosial, pilar tata kelola berkelanjutan dan pilar lingkungan lestari. Idealnya, empat pilar tersebut mesti ditempatkan pada bobot yang proporsional serta tidak dibenturkan secara *vis a vis*, misalnya antara ekonomi dengan lingkungan. Kajian daya saing daerah berkelanjutan hendak melibatkan eksistensi pilar lingkungan sebagai penguat, bukan lagi dipandang sebagai penghambat dalam mewujudkan daerah berdaya saing.

2. Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan merujuk pada rantai proses perubahan yang meliputi seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya, arah investasi, perubahan kelembagaan, dan lain-lain secara proporsional guna menghasilkan pertumbuhan, baik masa kini maupun masa datang. Daya dukung bumi menjadi penguat produktivitas yang berbasis prinsip: (a) tindakan masa kini bagi keselamatan masa depan kehidupan manusia; (b) kesadaran akan jasa-jasa lingkungan bagi keutuhan ciptaan; (c) kewaspadaan khusus akan Risiko kerentanan aspek lingkungan. Dimensi keberlanjutan dibangun sebagai bagian dari konsep keberlanjutan, meliputi: dimensi waktu (proyeksi dan rekayasa masa depan) dan dimensi interaksi antara ekonomi dan sumberdaya alam/ lingkungan (Fauzi, 2004). Interaksi dua dimensi tersebut membangun relasi yang dimanifestasikan dalam lima pilar: ekonomi (*prosperity*), lingkungan (*planet*), sosial (*people*), perdamaian (*peace*), dan kemitraan (*partnership*).

Dalam pola “pembangunan berkelanjutan”, tidak ada *trade off* antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan ataupun dengan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi frase yang menarik di kalangan pegiat dan pakar lingkungan dan ekonomi karena gagasan ini menjembatani dua hal yang selama ini dipandang bertentangan. Identifikasi dan spesifikasi yang cermat dari interaksi lingkungan-ekonomi yang relevan sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mempertahankan kualitas lingkungan (Byrne, 1997).

Penyeimbangan terhadap kedua aspek ini menjadi agenda penting di tengah isu perubahan iklim yang mempertaruhkan masa depan generasi di masa mendatang. Konsep ekonomi donat menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh melewati toleransi ekologis yang akan menambah buruknya perubahan iklim, dan aktivitas tidak boleh mencederai kebutuhan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berarti akan memicu konflik sosial (Raworth, 2017). Beranjak dari konsep tersebut, perlu ada pengejawantahan konsep ekonomi donat dalam kerangka pikir pembangunan daerah guna menjaga keberlanjutan daerah.

Perubahan iklim sebagai konsekuensi atas peningkatan aktivitas manusia membutuhkan pengendalian demi terjaganya kualitas lingkungan di masa mendatang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hadir sebagai kerangka global untuk keberlanjutan pembangunan dan menetapkan target yang dapat memandu negara-negara dalam perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Dengan demikian, upaya peningkatan pertumbuhan sesungguhnya harus berjalan secara integral dengan upaya pemeliharaan iklim.

Tata kelola iklim menjadi agenda keberlanjutan yang perlu menjadi atensi sebagai bagian dari kerangka penguatan daya saing daerah. Tata kelola iklim multilevel adalah

proses diskusi dan negosiasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai kelompok pemerintah nasional dan lokal, organisasi internasional, sektor swasta, LSM, dan aktor sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk mempromosikan peluang dan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Proses pengambilan keputusan dan diskusi ini mungkin formal atau informal, fleksibel dan adaptif, dan berlangsung di berbagai tingkatan: lokal, nasional, regional atau internasional (González & Numer, 2020).

Kolaborasi dalam memelihara keberlanjutan pembangunan merupakan kunci dalam mendukung penguatan daya saing daerah³. Kolaborasi multi-pemangku kepentingan tepat jika dialog memungkinkan dan jika ada potensi untuk mendengarkan, merekonsiliasi kepentingan yang bertentangan atau bersaing, serta mengintegrasikan perspektif ke dalam pengembangan strategi kolektif (Kuenkel et al., 2020). Komitmen terhadap prinsip keberlanjutan akan membutuhkan perubahan transformatif, yang didukung oleh tingkat ambisi, koordinasi dan kemauan politik yang serupa, atau bahkan lebih besar (Dasgupta, 2021).

Implementasi prinsip keberlanjutan di Indonesia membutuhkan kerangka regulasi sebagai jaminan komitmen pemerintah. Konsep pembangunan berkelanjutan yang terejawantahkan dalam 17 tujuan SDGs telah terintegrasi secara substansi dan aksi ke dalam dokumen resmi pemerintah RI melalui RPJP dan RPJMN 2020-2024. Integrasi dan internalisasi prinsip tersebut merupakan langkah penting sebagai konsideran basis dalam penentuan

³ *The Paris Agreement* (Perjanjian Paris) hadir sebagai instrumen kesepakatan global yang hendak merespon tuntutan pemeliharaan iklim pada era ini. Perjanjian Paris dibuat oleh UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan tujuan: mengarahkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu rata-rata planet ini (UNICEF, 2020). Perjanjian yang ditandatangani pada di Paris pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016 mengikat negara-negara untuk melakukan tindakan iklim yang ambisius sehubungan dengan mitigasi, adaptasi, kerugian, dan kerusakan. Internalisasi Perjanjian Paris perlu dikawal pada tataran kebijakan hingga implementasi di daerah. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan ini melalui Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2016. Perjanjian Paris adalah instrumen utama untuk mematuhi Agenda 2030 dan SDGs mengingat bahwa tanggapan dan tindakan perubahan iklim terkait erat dengan akses yang adil terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (UNICEF, 2020). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam mengintegrasikan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai pendekatan eksplisit dalam proyek regenerasi perkotaan: (1) kebijakan dan (2) alokasi anggaran (Andreucci et al., 2021). Dengan demikian, proses penguatan daya saing perlu memperhatikan keberlanjutan pada aspek pemenuhan komitmen terhadap pemeliharaan iklim.

penganggaran, program/kegiatan hingga *monev* dan pengendalian pembangunan pada aras nasional maupun daerah. Landasan konseptual dan yuridis *existing* menjadi acuan dan kerangka logis dalam membangun indeks daya saing daerah berkelanjutan (Indeks DSDB).

Dalam entitas yang berkelanjutan, diperlukan kekuatan yang seimbang antara pilar-pilar pendukung keberlanjutan itu sendiri. Ketidakseimbangan kekuasaan antara individu, kelompok, dan entitas selalu mengarah pada efisiensi yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Efisiensi rendah berarti biaya keseluruhan lebih tinggi, manfaat lebih sedikit. Apa yang mungkin tampak kompetitif sekarang (misalnya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan), tetapi tidak untuk masa depan, tidak kompetitif.

Faktor lingkungan nampaknya belum diperhitungkan sebagai bagian dari daya dukung kinerja perekonomian suatu daerah. Kecenderungan aspek ekonomi dan lingkungan yang dihadapkan secara *vis a vis* menyebabkan adanya *opportunity cost* yang timbul dalam melihat eksistensi dua aspek ini. Padahal, aktivitas ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan daya dukung lingkungan, *vice versa*. Diskursus pembangunan berkelanjutan dalam upaya penguatan daya saing daerah idealnya memasukan aspek lingkungan sebagai pilar yang setara guna menjaga keberlangsungan kehidupan di masa mendatang.

Pada akhirnya, daya saing yang tidak berkelanjutan bukanlah daya saing. Dalam entitas yang berkelanjutan, ekonomi tidak bertentangan dengan alam dan/atau komunitas/masyarakat. Semua dimensi entitas semuanya berjalan secara paralel dalam interaksi yang saling menguntungkan. Dasar-dasar itu membuat ekonomi, masyarakat, dan lingkungan alam tempat kedua hal di atas beroperasi/tinggal, berinteraksi secara seimbang (Of & World, 2021). Interaksi yang seimbang sesungguhnya menjadi patron ideal dalam proses penguatan daya saing daerah pada aras kebijakan hingga kinerja.

Daya saing daerah berkelanjutan dapat dimaknai sebagai penunjang produktivitas daerah yang terbentuk dari interaksi institusi, kebijakan, dan kinerja dalam jangka panjang guna menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan ketangguhan ekonomi, mewujudkan inklusi sosial, serta pelaksanaan tata kelola berkelanjutan. Indeks DSDB menempatkan upaya perbaikan kualitas hidup manusia sesuai daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) sebagai suatu cita-cita yang luhur. Indeks DSDB membangun peta jalan metodis secara integral dalam rangka menilai derajat kemajuan intra daerah dan kapasitas bersaing antardaerah dalam menjalankan pembangunan lokal berbasis pilar-pilar keberlanjutan.

Kerangka Konseptual

1. Esensi Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Daya saing dalam konteks kedaerahan di Indonesia tidak mendegradasi esensi daya dukung produktivitas yang sudah dikenal secara umum. Dengan beragam persoalan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial di daerah, tentu upaya peningkatan produktivitas tersebut jangan sampai menimbulkan ketidakseimbangan antara ketiga aspek di atas. Daya saing daerah sebagai kemampuan daerah diharapkan mampu menciptakan produktivitas yang dihasilkan dari proses menjaga kelestarian lingkungan, kondisi sosial yang inklusif dan harmonis dengan melibatkan praktik tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Pada akhirnya, daya saing daerah berkelanjutan diharapkan mampu memberikan implikasi positif terhadap kehidupan masa kini dan masa mendatang dengan memperhatikan keseimbangan 3 P (*Planet, People, Profit*).

Kristalisasi atas varian perspektif dan metodologi rujukan menghasilkan konsep pemetaan indeks DSDB yang dibangun atas empat pilar, meliputi: (1) lingkungan lestari (*sustainable environmental*); (2) ekonomi berkelanjutan (*robust economy*); (3) inklusi sosial (*social inclusion*); dan (4) tata kelola berkelanjutan (*good governance*). Dalam rantai proses, pilar tata kelola berkelanjutan ditempatkan sebagai *input* dan proses, sedangkan tiga pilar lainnya merupakan *output*. Secara metodologis, pilar-pilar tersebut ditakar dalam bobot yang setara sebagai perwujudan keseimbangan kebijakan dalam tatanan pembangunan berkelanjutan.

2. Kerangka Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Pada dasarnya, daya saing daerah merupakan hasil interaksi antara input, proses, dan output yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Faktor input dan proses dipandang sebagai faktor pembentuk daya saing daerah berkelanjutan melalui tata kelola governansi, yang kemudian akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari dukungan lingkungan lestari, inklusi sosial, dan ekonomi berkelanjutan. Potret profil daya saing daerah menggambarkan realita daerah dengan melihat faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta realisasi potensi dari faktor tersebut oleh daerah⁴.

Pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial yang menjadi modalitas output karena penguatan tiga pilar tersebut bergantung pada intervensi kebijakan dari pilar tata kelola. Kinerja pada pilar-pilar tersebut menjadi cerminan dalam melihat keberhasilan pemda melakukan tata kelola sebagai input. Intervensi melalui instrumentasi kebijakan sebagai tahapan input dan output pada akhirnya

⁴ Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (2007). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran profil dan pemetaan daya saing ekonomi daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2005. Pemetaan daya saing daerah dibagi ke dalam tiga pemetaan utama, yaitu pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan; pemetaan daya saing daerah berdasarkan indikator input; dan pemetaan daya saing daerah berdasarkan output.

akan bermuara pada output yang mendorong daya saing daerah berkelanjutan secara agregat. Berikut adalah rincian variabel dan indikator pada empat pilar IDSDB:

a. Lingkungan Lestari

Lingkungan lestari merupakan perwujudan tata kelola SDA sebagai aset terbatas yang memiliki jasa lingkungan sebagai bagian integral dari aktualisasi kualitas hidup lintas generasi. Pada tataran implementasi, pembangunan berkelanjutan menjamin kualitas lingkungan, efisiensi pengelolaan, dan ketahanan (*resilience*) daerah terhadap risiko bencana yang ditimbulkan alam dan manusia dalam agenda pembangunan daerah. Pilar lingkungan lestari terbentuk atas 3 variabel dan 6 indikator⁵, yakni:

- 1) Kualitas lingkungan hidup: kualitas air; kualitas udara; dan kualitas tutupan lahan
- 2) Manajemen sumber daya lingkungan: intensitas sampah
- 3) Resiliensi lingkungan: kapasitas daerah dan Risiko bencana

b. Ekonomi berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan adalah rangkaian proses dan hasil kapitalisasi potensi ekonomi, kemampuan fiskal, ketersediaan ekosistem investasi, serta infrastruktur. Ketangguhan ekonomi terefleksikan pada kinerja makroekonomi daerah meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi modal, kontribusi sektoral, daya beli, dst. Eksistensi pertumbuhan ekonomi menjadi determinan atas upaya penciptaan kesempatan ekonomi dan lapangan kerja yang turut berkontribusi terhadap pembentukan kekayaan daerah dan ekonomi berdaya saing. Pilar ekonomi berkelanjutan terdiri atas 5 variabel dan 8 indikator⁶ sebagai berikut:

⁵ Esensi sejumlah variabel lingkungan lestari ini merupakan saripati dari beberapa inisiatif yang berhubungan dengan lingkungan seperti Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD)-LTKL (LTKL, 2019), TERPERCAYA-INOBU (INOBU, 2020), dan Indikator TPB Global. Selain itu tambahan referensi yang digunakan adalah (Miller & Spoolman, 2016) berkaitan dengan kualitas dan pengelolaan SDA

⁶ Sejumlah variabel pada pilar ekonomi ini dirangkum dari sejumlah studi: tata kelola ekonomi daerah (TKED-KPPD), GCI-WEE, IDSDB-Kemenristek, Indeks pembangunan ekonomi inklusif-Bappenas, dll.

- 1) Daya dukung ekonomi berkelanjutan: sektor basis lestari⁷ dan daya dukung wilayah
- 2) Kemampuan keuangan daerah: kemandirian fiskal daerah
- 3) Ekosistem investasi: pertumbuhan investasi daerah
- 4) Ketenagakerjaan: pertumbuhan angkatan kerja
- 5) Ketersediaan infrastruktur ekonomi: kualitas jalan; rasio elektrifikasi; dan ketersediaan internet

c. Inklusi Sosial

Pilar inklusi sosial merupakan kualitas modal manusia dan akses kepada kesempatan ekonomi dalam upaya peningkatan mutu hidup (kesejahteraan). Tujuan pembangunan sosial-inklusif ialah meningkatkan keberdayaan seseorang sebagai hasil dari layanan negara maupun capaian mandiri atas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan semua dimensi krusial guna mencapai perbaikan kesejahteraan. Pilar ini terdiri atas 4 variabel dan 10 indikator yang meliputi⁸:

- 1) Keunggulan SDM: harapan lama sekolah; prevalensi stunting; harapan hidup; dan indeks gini.
- 2) Kesetaraan gender: pembangunan gender
- 3) Kondusivitas keamanan: tingkat kriminalitas
- 4) Ketersediaan infrastruktur sosial: infrastruktur pendidikan SD; ketersediaan fasilitas kesehatan; ketersediaan sanitasi layak; dan akses terhadap air minum layak

d. Tata kelola berkelanjutan

Tata kelola berkelanjutan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumberdaya ekonomi, lingkungan, dan sosial secara efisien dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya

⁷ Sektor basis lestari merupakan kategorisasi sektor basis berdasarkan daftar taksonomi hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI).

⁸ Variabel pilar sosial diolah dari beberapa inisiatif seperti Indeks Keadilan Sosial Indonesia, GCI-WEF, KDSD-LTKL, RUU Daya Saing Daerah, TKED-KPPOD, dan Global SDGs Indikator. Dari GCI dan KDSD diperoleh perspektif terkait penyediaan pendidikan dan kesehatan berkualitas, sementara dari studi TKED dipelajari variabel keamanan dan ketenagakerjaan, serta modal sosial diadopsi dari Naskah Akademik dan RUU DSD

saing daerah secara berkelanjutan. Proses pendayagunaan tersebut termanifestasikan dalam interaksi siklikal mulai dari perencanaan, kebijakan, inovasi, hingga kinerja kelembagaan. Daerah-daerah yang inovatif akan menjadikan tata kelola sebagai instrumen untuk bersaing dan mengejar ketertinggalan.

Sejumlah daerah dengan kondisi keterbatasan sumberdaya terbukti mampu untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas. Hal itu tercapai berkat adanya desain kebijakan, tata kelembagaan dan tata layanan publik yang dibangun secara kolaboratif pada tataran implementasi. Pilar ini juga mengelaborasi pendekatan yurisdiksi yang terdiri atas elemen dokumen perencanaan, kemudian ada kerangka peraturan, kelembagaan multipihak untuk mengatur prioritas bersama, dan terakhir ada juga untuk pemantauan dan pelaporan⁹ (Lingkar Temu Kabupaten Lestari, 2019).

Pilar tata kelola berkelanjutan menjadi input dalam upaya peningkatan daya saing daerah mengingat tata kelola akan menentukan bagaimana arah dan kebijakan yang relevan dalam rangka pencapaian upaya tersebut. Pilar ini menjadi kunci dan sekaligus menjadi penentu kinerja dari pilar lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan. Tata kelola berkelanjutan menghendaki perubahan perilaku setiap aktor (*market, state, society*) yang berimplikasi pada *trust and confidence*, kesetaraan dan keadilan, kerjasama dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Penguatan tata kelola berkelanjutan akan bermuara pada peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Variabel dan Indikator yang disusun pada pilar ini didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tata kelola berkelanjutan menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) terdiri atas Partisipasi;

⁹ *Jurisdiction Approach* (JA) adalah pendekatan yang dirancang untuk mempromosikan kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah administrasi.

Akuntabilitas; Kepastian Hukum; Transparansi; Efektif dan Efisien; Kesetaraan dan Inklusif; Responsif, dan Berorientasi Konsensus. Disisi lain, kajian IDSDB ini mengedepankan prinsip keberlanjutan yang diintegrasikan dalam upaya penguatan daya saing daerah, sehingga perlu memasukan variabel keberlanjutan dalam mengukur tata kelola pemerintahan daerah. Kristalisasi atas sejumlah variabel di atas diterjemahkan dalam pilar tata kelola berkelanjutan dimana pilar ini terdiri atas pada 5 variabel dan 10 indikator meliputi¹⁰:

- 1) Partisipasi: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
- 2) Akuntabilitas: Kewajaran Informasi Keuangan, Pengendalian dan Pencegahan Korupsi, dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
- 3) Transparansi: Integritas
- 4) Efektivitas: Inovasi Daerah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 5) Berkelanjutan: Kebijakan Berkelanjutan, Implementasi Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE), Kerjasama Antar Daerah

Kristalisasi atas hasil telaah pustaka di atas membentuk kerangka konseptual pengukuran daya saing daerah berkelanjutan daerah. Visualisasi atas kerangka konseptual tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 sebagai berikut:

¹⁰ Variabel ini diolah dari kajian TKED-KPPOD, *Indonesia green governance index* (IGGI-LIPI), MCP KPK RI, Indeks Inovasi daerah-Kemendagri RI, Kemenkeu RI, Kemenpan-RB RI, Komisi Informasi Pusat.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Tabel 2. 1 Matriks Definisi Operasional Variabel (DOV) dan Definisi Operasional Indikator (DOI)
Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Pilar	Variabel	DOV	Indikator	DOI	Tujuan Bernegara	SDGs GOALS	Keterangan
Lingkungan Lestari	Kualitas Lingkungan Hidup	Kemampuan sumber daya alam secara kualitas dan kuantitas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.	Kualitas Air	Rasio kuantifikasi yang digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut.	Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia	6	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs. Dalam perhitungannya indikator ini menggunakan satu indeks komposit yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Kualitas Udara	Angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.	Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia	11	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs. Dalam perhitungannya indikator ini menggunakan satu indeks komposit yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Kualitas Tutupan Lahan	Tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.	Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia	15	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs. Dalam perhitungannya indikator ini menggunakan satu indeks komposit yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Manajemen Sumber Daya Lingkungan	Pengelolaan sumber daya lingkungan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan lingkungan dari eksternalitas negatif yang ditimbulkan aktivitas ekonomi	Intensitas sampah	Rerata sampah perkapita yang dihasilkan di suatu daerah.	Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia	11	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs.
	Resiliensi Lingkungan	Kemampuan daerah menghadapi risiko lingkungan, perubahan, konflik, atau keterbatasan sumber daya alam.	Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah luas lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.	Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia	11	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs. Data diambil dari BNPB

Pilar	Variabel	DOV	Indikator	DOI	Tujuan Bernegara	SDGs GOALS	Keterangan
			Risiko Bencana	Riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia yang diukur dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia	11	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs. Data diambil dari BNPB
Ekonomi berkelanjutan	Daya Dukung Ekonomi	Kemampuan ekonomi daerah untuk dikembangkan sehingga terus berkembang dan menjadi sumber penghidupan masyarakat.	Daya Dukung Wilayah	Nilai yang memformulasikan hubungan sumberdaya alam, jumlah penduduk dan kualitas lingkungan hidup. Semakin tinggi daya dukung wilayah menggambarkan kemampuan untuk mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk.	Memajukan Kesejahteraan Umum	-	Indikator ini belum digunakan dalam indeks daya saing dan indeks lainnya yang mengukur capaian kinerja pemerintah.
			Sektor Basis Lestari	Sektor yang mampu mengekspor barang dan jasa keluar batas daerahnya atau sektor yang memiliki peranan relatif besar dibandingkan sektor-sektor lain dan tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan lestari. Sektor unggulan tersebut akan dikaitkan dengan potensi tingkat pencemaran/polusi dari sektor tersebut atau sektor yang bergerak di sektor-sektor hijau. Suatu sektor dikatakan sektor basis lestari apabila memenuhi 2 syarat sebagai berikut: Jika $LQ > 1$ maka daerah tersebut semakin unggul dalam hal kegiatan ekonomi yang melayani pasar domestik maupun pasar luar daerah. Termasuk dalam daftar taksonomi hijau OJK yang dielaborasi dengan list yang dirilis oleh NDC	Memajukan Kesejahteraan Umum	-	Indikator ini belum digunakan dalam indeks daya saing dan indeks lainnya yang mengukur capaian kinerja pemerintah.
	Keuangan Daerah	Kemampuan finansial daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian. Kemampuan daerah yang baik akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang berimplikasi pada semakin baiknya aktivitas perekonomian daerah.	Kemandirian Fiskal Daerah	Nilai yang dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Semakin kecil celah fiskal menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah.	Memajukan Kesejahteraan Umum	10, 17	Indikator ini belum digunakan dalam indeks daya saing dan indeks lainnya yang mengukur capaian kinerja pemerintah.

Pilar	Variabel	DOV	Indikator	DOI	Tujuan Bernegara	SDGs GOALS	Keterangan
	Eko-sistem Investasi	Ekosistem investasi merupakan konduktivitas suatu lingkungan usaha dengan menciptakan iklim usaha yang produktif. Iklim investasi yang baik akan mendakangkan lebih banyak input kedalam proses produksi, pada akhirnya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Investasi Daerah	Kemampuan daerah dalam menaikkan investasi daerah. Semakin tinggi pertumbuhan investasi daerah maka akan meningkatkan sumber-sumber ekonomi, mengurangi pengangguran sehingga memajukan perekonomian dalam jangka panjang. Selain itu dimasa depan green funding menjadi sangat potensial terutama dalam investasu publik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.	Memajukan Kesejahteraan Umum	17	Indikator ini belum digunakan dalam indeks daya saing dan indeks lainnya yang mengukur capaian kinerja pemerintah.
	Tenaga Kerja	Input tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Komponen terkait tenaga kerja menjadi perhatian dalam daya saing daerah mengingat tenaga kerja merupakan subjek dari pembangunan.	Pertumbuhan Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja. Manusia adalah subjek dan objek dalam suatu pembangunan, sehingga semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja sehingga bermuara pada meningkatnya daya saing	Memajukan Kesejahteraan Umum	8	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Daya Saing Daerah BRIN
	Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi	Ketersediaan infrastruktur ekonomi berkaitan dengan penyediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas perekonomian. Ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing daerah, khususnya sebagai determinan pertumbuhan ekonomi daerah.	Kualitas Jalan	Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik terhadap luas wilayah. Semakin tinggi persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik mencerminkan keterjangkauan infrastruktur jalan dan aktivitas ekonomi yang lebih lancar.	Memajukan Kesejahteraan Umum	9	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas RI
			Rasio Elektrifikasi	Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik listrik PLN maupun Non-PLN dengan keseluruhan rumah tangga. Tingkat elektrifikasi menggambarkan perluasan akses dan manfaat ekonomi karena aktivitas ekonomi berjalan cepat jika ketersediaan listrik sudah merata untuk semua masyarakat.	Memajukan Kesejahteraan Umum	7	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas RI

Pilar	Variabel	DOV	Indikator	DOI	Tujuan Bernegara	SDGs GOALS	Keterangan
			Ketersediaan Internet	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap internet. Penggunaan internet menjadi sarana pendukung untuk pemerataan dan perkembangan ekonomi.	Memajukan Kesejahteraan Umum	17	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas RI
Inklusi sosial	Keunggulan SDM	Keberhasilan pembangunan salah satunya ditunjukkan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan suatu daerah. Manusia yang berkualitas akan mampu berkontribusi pada percepatan pencapaian pembangunan yang mensejahterakan. Akses, partisipasi dan kesetaraan terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari upaya membangun manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Rerata Lama Sekolah	Waktu yang dihabiskan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi angka rerata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai masyarakat.	Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	1 & 4	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas RI
			Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata tambahan umur hidup seseorang yang diharapkan untuk terus hidup, dengan kata lain angka harapan hidup mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat. Semakin tinggi AHH maka menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang muaranya kepada perbaikan kualitas kesehatan SDM sehingga daya saing akan semakin tinggi.	Memajukan Kesejahteraan Umum	-	Indikator ini belum digunakan dalam indeks daya saing, laporan SDGs, dan indeks lainnya yang mengukur capaian kinerja pemerintah.
			Prevalensi stunting	Persentase yang menggambarkan kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita (di bawah 5 tahun)	Memajukan Kesejahteraan Umum	2	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs
			Indeks Gini	Parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai indeks gini maka semakin merata distribusi pendapatan.	Memajukan Kesejahteraan Umum	10	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas RI

Pilar	Variabel	DOV	Indikator	DOI	Tujuan Bernegara	SDGs GOALS	Keterangan
	Kondusivitas Keamanan	Keamanan suatu daerah merupakan nilai tambah atau peluang bagi daerah untuk masuknya investasi, aspek keamanan dinilai penting untuk dilihat mengingat pelaku usaha dan masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu kegiatan usaha di daerah tersebut.	Tingkat Kriminalitas	Banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi dalam satu tahun. Semakin tinggi tingkat kriminalitas mencerminkan daya saing yang rendah, hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya karena semakin banyaknya jumlah pengangguran. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kriminalitas disuatu wilayah.	Memajukan Kesejahteraan Umum	16	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) KPPOD
	Kesetaraan Gender	Kesetaraan Gender merupakan pemenuhan hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki.	Pembangunan Gender	Pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender sebagaimana diukur oleh BPS (lihat tabel 3.1)."	Memajukan Kesejahteraan Umum	5	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs
	Ketersediaan Infrastruktur Sosial	Ketersediaan infrastruktur Sosial berkaitan dengan penyediaan infrastruktur yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan infrastruktur Sosial akan berimplikasi pada upaya peningkatan daya saing daerah dari segi pembentukan struktur sosial.	Infrastruktur Pendidikan (SD)	Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Semakin tinggi ratio maka semakin tinggi daya tampung usia sekolah SMP.	Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	-	Indikator ini belum digunakan dalam indeks daya saing daerah
			Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	Persentase puskesmas terhadap jumlah kecamatan menunjukkan mudahnya akses kesehatan pada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu indikasi kemudahan masyarakat menjangkau sarana dan prasarana kesehatan dalam peningkatan kualitas hidup.	Memajukan Kesejahteraan Umum	3	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs
			Ketersediaan Sanitasi Layak	Perbandingan rumah tangga memiliki fasilitas buang air sendiri dengan rumah tangga seluruhnya. Sanitasi yang baik akan mengurangi prevalensi penyakit, meningkatkan produktivitas dan mengurangi polusi air. Sanitasi layak juga menggambarkan salah satu indikator kelayakan hidup dan kesejahteraan.	Memajukan Kesejahteraan Umum	3 & 6	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas RI

Pilar	Variabel	DOV	Indikator	DOI	Tujuan Bernegara	SDGs GOALS	Keterangan
			Akses Terhadap Air Minum Layak	Perbandingan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk memamntau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas yag aman untuk diminum masyarakat.	Memajukan Kesejahteraan Umum	6	Referensi mengacu pada penggunaan indikator ini pada indikator SDGs dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas RI
Tata kelola berkelanjutan	Partisipasi	Keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dewan perwakilan rakyat daerah	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (Musrembang/ RKPD) dan/atau kebijakan publik di daerah.	Memajukan Kesejahteraan Umum	16	Penilaian Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bappenas RI
	Akuntabilitas	Kemampuan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan menurut standar tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan	Kewajaran Informasi Keuangan	Pernyataan profesional pemeriksa terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Memajukan Kesejahteraan Umum	16	Badan Pemeriksa Keuangan RI
			Pengendalian dan Pencegahan Korupsi	Pengendalian dan pencegahan tindakan pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimilisasi pajak daerah, manajemen asset daerah, dan tata kelola keuangan desa)	Memajukan Kesejahteraan Umum	16	KPK RI
			Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Memajukan Kesejahteraan Umum	16	Ombudsman RI
	Transparansi	Keterbukaan akses dan ketersediaan sistem yang responsif bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Integritas	Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan jujur serta minim akan potensi risiko korupsi	Memajukan Kesejahteraan Umum	16	KPK RI

Pilar	Variabel	DOV	Indikator	DOI	Tujuan Bernegara	SDGs GOALS	Keterangan
	Efektivi- tas	Ketepatan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan penyeleng- garaan pemerinta- han daerah.	Inovasi Daerah	Semua bentuk pembaha- ruan dalam penyelengga- raan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, per- baikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, beroreantasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggung- jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.	Memajukan Kese- jahteraan Umum dan Mencer- daskan Kehidupan Bangsa	17	Indeks Inovasi Daerah Kemente- rian Dalam Negeri RI
			Sistem Pemer- intahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan pemerin- tahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan ko- munikasi untuk menyeleng- garakan pelayanan publik kepada masyarakat.	Memajukan Kesejahter- aan Umum	-	Kemempu- an-RB
		Ketersediaan sis- tem dan kebijakan yang menjamin lingkungan le- stari, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial.	Kebijakan Berkelan- jutan	Kebijakan/program yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah berkelanjutan (RKDP, Perda, Perkada).	Memajukan Kesejahter- aan Umum	15, 6, 11	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah KPPOD
			Imple- mentasi TAKE	Penerapan Transfer Ang- garan Kabupaten berbasis Ekologis di daerah	Memajukan Kesejahter- aan Umum	-	Direktorat Jender- al Kementerian Keuangan RI
			Kerjasa- ma Antar Daerah	Usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemer- intah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenu- han pelayanan publik serta saling menguntungkan	Memajukan Kesejahter- aan Umum	17	Portal Daerah

A photograph of a volcanic landscape. In the foreground, there is a field of green, leafy plants, possibly a type of rice or similar crop, growing in rows. A person wearing a colorful headscarf and a patterned shirt is working in the field, bending over to tend to the plants. To the left, another person in a dark jacket is also working. In the background, a large, grey, conical volcano rises against a clear blue sky with a few white clouds. The volcano's summit is visible, and there is a small plume of smoke or steam rising from it. The overall scene is a mix of agricultural activity and a natural volcanic environment.

III METODE PENELITIAN

Jenis dan Data

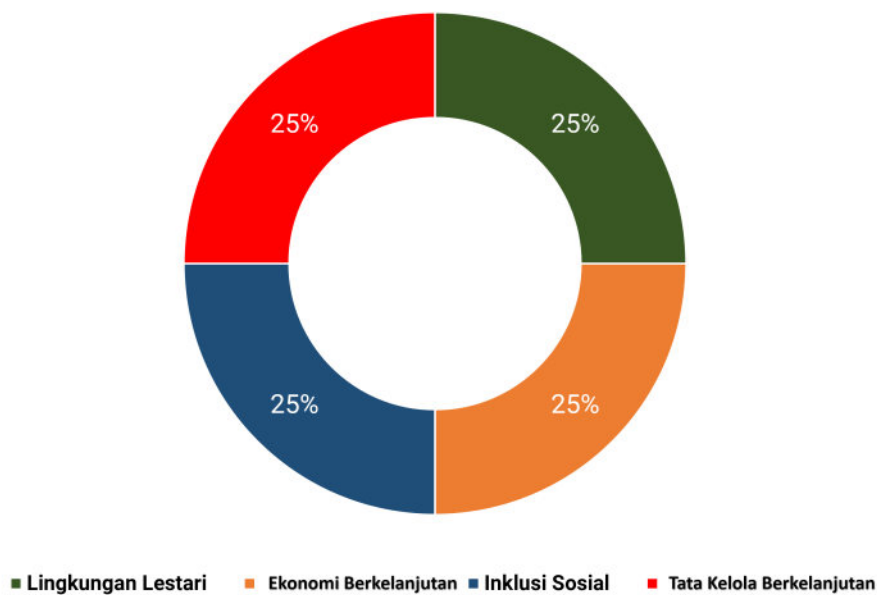
Unit analisis dari studi ini adalah daerah kabupaten di Indonesia (N=415). Pertimbangan memilih kabupaten, antara lain, didasari fakta ketersediaan data sebagai indikator daya saing daerah berkelanjutan yang cukup lengkap. Dari setiap kabupaten dikumpulkan jenis data-data sekunder, yakni data statistik ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, demografi, lingkungan, dokumen perencanaan daerah, dst. baik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pemda maupun dari kementerian dan lembaga terkait (K/L). Periode data yang digunakan untuk menakar daya saing daerah berkelanjutan adalah tahun 2021. Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) pada akhirnya merupakan komposit atas sejumlah indeks (*poll of polls*) yang dirilis dari berbagai lembaga.

Metode Analisis Data

Kajian pengukuran daya saing daerah berkelanjutan di Indonesia bertitik tumpu pada upaya untuk menilik prioritas yang perlu diperhatikan. Berdasar hasil identifikasi, pemahaman studi literatur, masukan para ahli serta hasil studi pemeringkatan sebelumnya, **Indeks DSDB merupakan komposit empat pilar meliputi lingkungan lestari, ekonomi unggul, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan** yang diagregasikan dalam 4 pilar, 17 variabel dan 34 indikator. Seluruh indikator yang digunakan dalam studi ini berasal dari berbagai indeks dan sumber data yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Daya Saing Daerah Berkelanjutan (DSDB) merupakan resultan kinerja empat pilar yakni lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan. Empat pilar DSDB dibentuk atas porsi bobot yang setara, yakni dua puluh lima persen (25 persen). Kesetaraan nilai bobot dalam

indeks ini menunjukkan bahwa setiap pilar memiliki derajat pengaruh yang setara, saling berkaitan, serta tidak saling mengungguli dalam pembentukan daya saing daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks DSDB merupakan akumulasi nilai seluruh pilar (yang terdiri atas variabel dan indikator) melalui metode rata-rata geometrik (*geomean*). Desain kesetaraan bobot pada pilar pembentuk DSDB dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Bobot Pilar IDSDB

Sebagai indeks komposit, kalkulasi indeks daya saing daerah berkelanjutan bergantung pada ketersediaan data sekunder yang terpublikasikan pada sejumlah sumber resmi.

Kelengkapan data pada setiap indikator menjadi prasyarat utama yang harus terpenuhi, sebab proses kalkulasi indeks dengan metode *geomean* bergantung pada jumlah titik data, yakni kabupaten yang memenuhi kriteria kelengkapan data. Perubahan pada jumlah titik data akan mempengaruhi nilai indeks dimana nilai *min* dan *max* dalam penilaian ini memiliki perbedaan pada derajat titik data yang berbeda.

Studi ini melakukan perhitungan pemeringkatan daya saing daerah berkelanjutan menggunakan pendekatan

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan rata-rata geometrik (*geomean*). Artinya pilar, variabel dan indikator penyusun indeks daya saing daerah berkelanjutan memiliki bobot yang sama. Terdapat beberapa langkah dalam proses perhitungan IDSDB ini, yakni sebagai berikut:

1. **Penyempurnaan indikator DSDB berdasarkan hasil evaluasi IDSBD 2020,** sehingga membentuk variabel dan indikator yang relevan dengan kondisi daerah; serta memastikan ketersediaan indikator yang dibutuhkan masing-masing daerah untuk melakukan pemeringkatan.

2. **Normalisasi Data.** Normalisasi data dilakukan untuk memberikan ukuran yang sebanding pada masing-masing indikator DSDB. Setiap indikator pembentuk daya saing daerah berkelanjutan distandarisasi dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum sebelum indikator digunakan untuk proses menghitung indeks. Nilai maksimum dan minimum diperoleh dari masing-masing indikator di seluruh kabupaten di Indonesia. Jika indikator merupakan indikator “searah” dengan DSDB rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Indikator}_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

Dimana, x_i diperoleh dari masing-masing indikator IDSDB. Untuk indikator yang merupakan indikator” berlawanan/ terbalik” dalam artian tidak searah (Tabel 3.1) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indikator}_i = 100 - \left[\left(\frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \right) \times 100 \right] \dots \dots \dots (2)$$

3. **Perhitungan Variabel.** Nilai/hasil perhitungan variabel diperoleh dari setiap indikator daya saing daerah berkelanjutan yang sudah di standarisasi, kemudian hasil standarisasi dirata-ratakan untuk memperoleh nilai pada masing-masing variabel menyokong pilar IDSDB. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Variabel}_i = \frac{\text{indikator A} + \text{Indikator B} + \text{indikator C} + \text{indikator D}}{4} \times 100 \dots \dots \dots (3)$$

4. **Perhitungan Pilar.** Berbagai variabel komposit dalam setiap indikator daya saing daerah berkelanjutan dirata-ratakan untuk memperoleh nilai masing-masing pilar. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Variabel}_i = \frac{\text{Variabel A} + \text{Variabel B} + \text{Variabel C} + \text{variabel D} + \text{Variabel E}}{5} \times 100 \dots \dots \dots (4)$$

5. **Perhitungan Indeks DSDB.** Indeks daya saing dihitung sebagai rata-rata geometrik dari masing-masing pilar. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun indeks dapat diartikan bahwa capaian satu pilar tidak dapat ditutupi oleh capaian pada dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan kinerja daya saing secara optimal dan berkelanjutan, ke-empat pilar harus memperoleh perhatian yang sama besar lantaran nilainya sama penting. Berikut adalah mekanisme/rumus untuk menghitung IDSDB:

$$\text{IDSDB} = \sqrt[4]{\text{Pilar Lingkungan} * \text{Pilar Ekonomi} * \text{Pilar Sosial} * \text{Pilar Tata Kelola}} \dots \dots \dots (5)$$

6. **Kategori dan klasifikasi peringkat.** Pengelompokan hasil pemeringkatan daya saing daerah berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi lima kelompok, yakni DSDB sangat tinggi, DSDB tinggi, DSDB sedang, DSDB rendah dan DSDB sangat rendah. Kemudian akan ada kategorisasi peringkat berdasarkan karakteristik geografis daerah. Guna menjawab tujuan penelitian terkait elemen pendukung dan penghambat daya saing, metode pengumpulan data eskriptif-kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

7. Analisis tipologi antar pilar dan keterkaitan pilar dengan IDSDB. Pasca kategorisasi IDSDB tuntas, langkah berikutnya adalah dengan melakukan analisis tipologi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pengembangan DSDB di masing-masing daerah. Analisis tipologi pilar dan IDSDB dilakukan dengan menempatkan daerah pada klasifikasi tipologi sebagai berikut:

1. Kuadran I (kinerja pilar rendah namun kinerja IDSDB tinggi)
2. Kuadran II (kinerja pilar dan IDSDB tinggi)
3. Kuadran III (kinerja pilar tinggi namun kinerja IDSDB rendah)
4. Kuadran IV (kinerja pilar dan IDSDB rendah)

Analisis tipologi juga dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pilar input (tata kelola berkelanjutan) dan pilar output (lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial). Tipologi yang tersaji dalam analisis ini membentuk kategori sebagai berikut:

1. Kuadran I (kinerja pilar output rendah namun kinerja pilar input tinggi)
2. Kuadran II (kinerja pilar output dan input tinggi)
3. Kuadran III (kinerja pilar output tinggi namun kinerja pilar input rendah)
4. Kuadran IV (kinerja pilar output dan pilar input rendah)

8. Tipologi elemen pendukung dan penghambat IDSDB. Dalam rangka mengetahui tipologi masalah, KPPOD melakukan penggalan data dan informasi di tiga (3) kabupaten peringkat teratas dan tiga (3) kabupaten peringkat terbawah peringkat daya saing daerah secara umum dan penggalan 1 wilayah teratas dan terbawah berdasarkan karakteristik wilayahnya (Indonesia Barat-Tengah-Timur dan daratan-kepulauan).

Sumber data, Satuan dan Sifat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Kerangka kerja pembentukan daya saing dalam kajian ini bersandar kepada kinerja setiap variabel yang merefleksikan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai. Sementara pemilihan indikator didasarkan pada ketersediaan data dan diarahkan pada data kuantitatif yang tersedia. Dalam perhitungan indeks terlebih dahulu ditentukan “sifat” masing-masing indikator: searah/positif atau berlawanan/negatif. Rincian sumber data, satuan, dan sifat hubungan terhadap daya saing daerah berkelanjutan dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Matriks Data Set Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Pilar	Variabel	Indikator	Satuan	Sumber data	Sifat
Lingkungan Lestari	Kualitas Lingkungan	Kualitas Air	Indeks	KLHK	Searah
		Kualitas Udara	Indeks	KLHK	Searah
		Kualitas Gambut	Indeks	KLHK	Searah
		Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	KLHK	Searah
	Manajemen Sumber Daya Lingkungan	Intensitas Sampah	Persen	Podes/BPS	Berlawanan
	Resiliensi Lingkungan	Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah	satuan	BNPB	Searah
Risiko Bencana		Indeks	BNPB	Berlawanan	
Ekonomi berkelanjutan	Daya Dukung Ekonomi	Daya Dukung Wilayah	Persen	BPS	Searah
		Sektor Basis Lestari	Jumlah	BPS	Searah
	Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	BPK	Searah
	Ekosistem investasi	Pertumbuhan investasi daerah	Persen	BKPM	Searah
	Ketenagakerjaan	Pertumbuhan Angkatan Kerja	Persen	BPS	Searah
	Infrastruktur ekonomi	Kualitas Jalan	Persen	BPS	Searah
		Rasio Elektrifikasi	Rasio	BPS	Searah
		Ketersediaan internet	Persen	Statistik Telekomunikasi Indonesia	Searah
Sosial Inklusif	Keunggulan SDM	Rerata Lama Sekolah	Tahun	BPS	Searah
		Harapan Hidup	Tahun	BPS	Searah
		Prevalensi Stunting	Persen	Kemenkes	Berlawanan
		Indeks Gini	Indeks	BPS	Berlawanan

	Kesetaraan Gender	Pembangunan Gender	Indeks	BPS	Searah
	Keamanan	Tingkat Kriminalitas	Jumlah kasus	BPS	Berlawanan
	Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Infrastruktur Pendidikan (SMP)	Rasio	BPS	Searah
		Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	Persen	BPS	Searah
		Ketersediaan Sanitasi Layak	Persen	BPS	Searah
	Akses Terhadap Air minum layak	Persen	BPS	Searah	
Tata kelola berkelanjutan	Partisipasi	Partisipasi Masyarakat	Indeks	Bappenas RI	Searah
	Akuntabilitas	Kewajaran Informasi Keuangan	Rasio	BPK RI	Searah
		Pengendalian dan Pencegahan Korupsi	Indeks	KPK RI	Searah
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks	Ombudsman RI	Searah
	Transparansi	integritas	Indeks	KPK RI	Searah
	Efektivitas	Inovasi Daerah	Indeks	Ke-mendagri RI	Searah
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Kemendagri RI	Searah
	Berkelanjutan	Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Skor	JDIH Pemda	Searah
		Implementasi TAKE	Skor	Kemenkeu RI	Searah
		Kerjasama Antar Daerah	Jumlah	Website Pemda	Searah

Teknik Analisis Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Daerah

Daya saing daerah berkelanjutan memiliki relevansi yang erat terhadap perencanaan dan kebijakan daerah. Keberadaan indikator ini menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan manifestasi tata Kelola pemerintahan yang baik sebagai input. Pengukuran indeks dengan menganalisis dokumen perencanaan daerah dan kebijakan daerah memiliki teknik analisis khusus berbasis studi dokumentasi. *Scoring* atas substansi kedua dokumen tersebut didasarkan pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2. Teknik Analisis Kebijakan Berkelanjutan

Indikator	Jenis Regulasi	Klasifikasi	Skor
Kebijakan Lingkungan Lestari	Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persampahan Limbah Penanggulangan Bencana	Perda Perkada Perka Dinas	Perda: Ada (2) Tidak (0) Perkada: Ada (1) Tidak (0) Tidak Ada (0)
Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan	Kemudahan Berusaha Turunan (tindak lanjut) Cipta Kerja	Perda Perkada Perka Dinas	Perda: Ada (2) Tidak (0) Perkada: Ada (1) Tidak (0) Tidak Ada (0)
Kebijakan Inklusi Sosial	Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI)	Perda Perkada Perka Dinas	Perda: Ada (2) Tidak (0) Perkada: Ada (1) Tidak (0) Tidak Ada (0)
Kerjasama Antar Daerah	Antar Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dengan Swasta/ Kampus Pemerintah Daerah dengan Pihak Asing	-	Ada (1) Tidak (0)

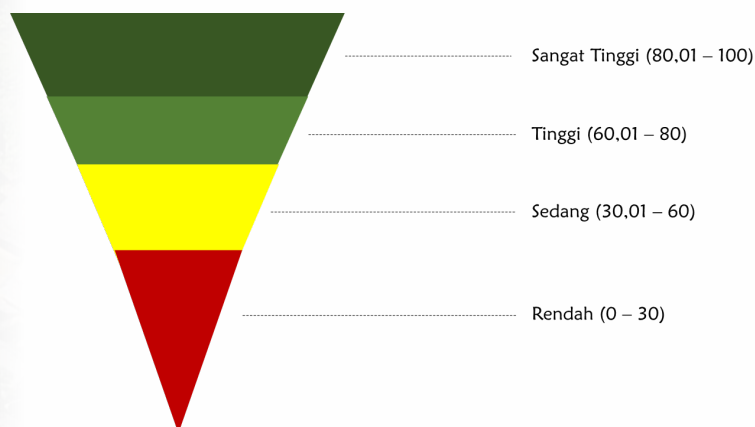


IV TEMUAN & PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Indeks daya saing daerah berkelanjutan merupakan alat ukur untuk menilai upaya daerah dalam meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Sejatinya, indeks ini tidak berada dalam posisi menempatkan malaikat sebagai “malaikat” atau “iblis”. Namun, eksistensinya diharapkan mampu menjadi instrumen yang membantu daerah dalam melihat kembali sejauh mana penguatan daya saing telah berjalan. Dengan demikian, pemeringkatan yang tersaji dalam daerah ini tidak sekadar menempatkan suatu daerah lebih baik daripada daerah yang lain. Lebih dari itu, hal utama yang harus dilihat adalah sejauh mana posisi daya saing daerah secara berkelanjutan telah tercapai.

Dalam menjawab ikhtiar tersebut, Indeks ini membagi kondisi daya saing daerah ke dalam empat kategori. Kategori tersebut menyesuaikan dengan standar Kemenristek/BRIN pada tahun 2019 yang mengklasifikasikan daya saing ke empat level sebagaimana tertera dalam gambar 4.1. rendah (00-30,00), sedang (30,01 – 60,00), tinggi (60,01 – 80,00), sangat tinggi (80,01 – 100). Penting bagi *stakeholder* untuk tidak hanya melihat posisi suatu daerah berdasarkan peringkat saja, namun memperhatikan status daya saing itu sendiri. Sebab, hal yang paling utama dalam pembangunan adalah tercapainya perbaikan status ke arah yang lebih baik.



Gambar 4.1 Level Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Persoalan yang terjadi dalam proses kalkulasi indeks adalah data pada setiap indikator yang tidak terpenuhi secara lengkap.

Sebagai *poll of polls*, indeks ini bertumpu pada ketersediaan data sekunder yang tersaji dalam publikasi kementerian serta lembaga negara terkait. Fakta problematiknya, tidak semua kabupaten memiliki derajat publisitas data yang mumpuni. Selain itu, beberapa indeks nasional juga mengalami persoalan ketidaklengkapan pemenuhan data di seluruh kabupaten. Dampaknya, pemenuhan data turut mempengaruhi proses dan hasil dari kalkulasi indeks, mengingat penggunaan metode *geomean* bertumpu pada nilai minimal (*min*) dan maksimal (*max*).



Gambar 4.2 Kelengkapan Data pada 416 Kabupaten di Indonesia

Kelengkapan data merupakan tantangan utama dalam proses pengukuran terutama untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa daerah dengan kelengkapan data 100 persen (peta berwarna hijau) terlihat dominan di Pulau Jawa, namun semakin mengalami perubahan warna ketika melihat kondisi di Indonesia Timur. Peta berwarna kuning menunjukkan bahwa daerah tersebut berada pada kategori kelengkapan data 80 persen. Selebihnya, peta berwarna putih menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak masuk dalam opsi kalkulasi dengan kelengkapan 80 persen maupun 100 persen. Beranjak dari persoalan ini, tim indeks menghadirkan

sajian IDSDB dengan dua opsi, yakni (1) Opsi kelengkapan data setiap indikator terpenuhi (kelengkapan data 100 persen) dan (2) Opsi kelengkapan data per indikator terpenuhi minimal 80 persen (kelengkapan data 80 persen). Angka 80 persen dipilih berdasarkan proses *executive review* oleh pakar dalam proses perumusan IDSDB.

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (Kelengkapan data 100 persen)

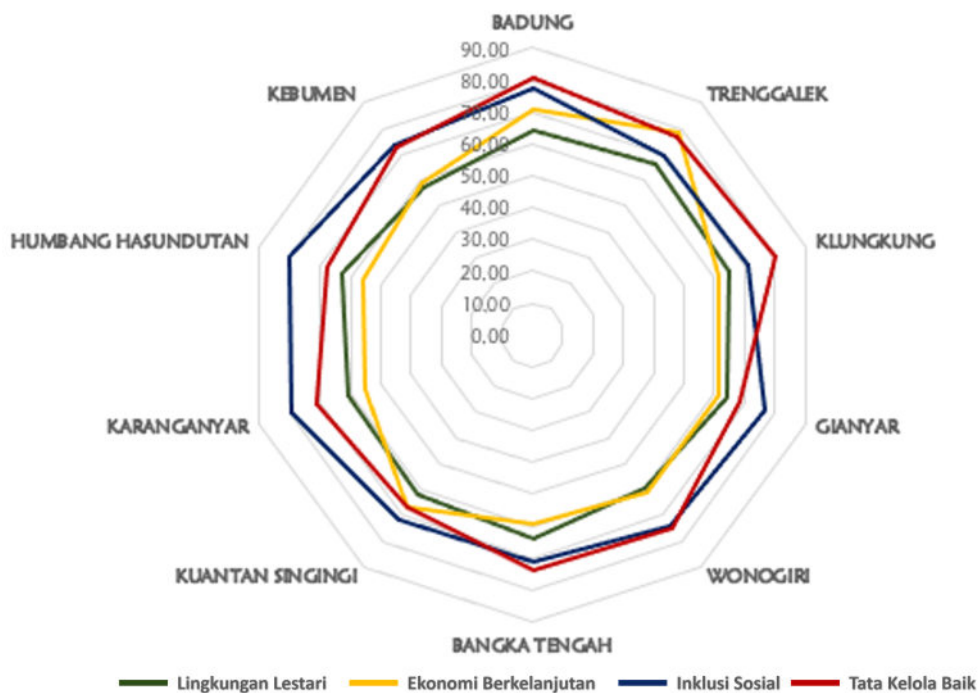
1. Hasil Pengukuran Umum

Pengukuran kinerja DSDB di Indonesia dilakukan pada seratus delapan puluh tiga (183) kabupaten. Sejatinya, studi ini menjangkau seluruh kabupaten di Indonesia (416 kabupaten) sebagai unit analisis. Dalam perkembangannya, hanya terdapat 183 kabupaten dengan ketersediaan data seratus persen (100 persen). Artinya data tersedia pada seluruh variabel dan indikator. Justifikasi pengambilan unit analisis sebesar 100 persen mengedepankan prinsip kesetaraan dalam proses pengukuran. Prinsip ini berdampak pada cakupan regio unit analisis kajian sebab kriteria ini mengeliminasi wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Wilayah paling timur dalam kajian ini adalah Kabupaten Minahasa Utara (pada sisi utara) dan Kabupaten Ngada (pada sisi selatan).

Hasil perhitungan akhir menunjukkan raihan daya saing kabupaten pada umumnya berada pada level sedang. Temuan ini tampak dalam skor DSDB yang berkisar antara 42,32 s.d. 72,96 dengan rerata nasional sebesar 56,34. Secara umum, hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 92 kabupaten dengan nilai IDSDB di atas rerata nasional. Jika berkaca pada

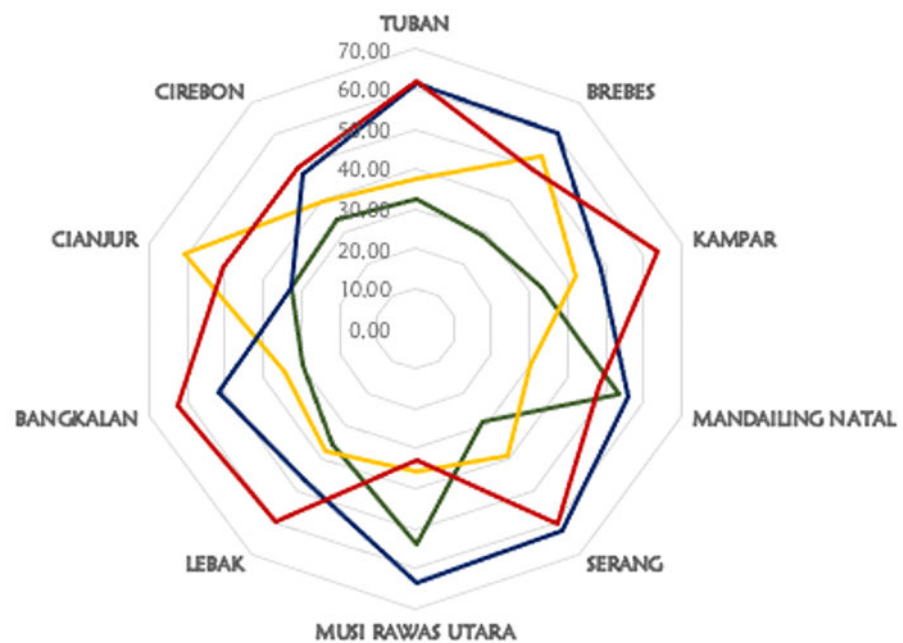
hasil IDSDB 2020 (dimana rentang nilai IDSDB adalah 40,59 sampai 68,30 dengan rerata nasional 52,57) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas daya saing daerah berkelanjutan di daerah.

Karakteristik wilayah yang menempati posisi Top Ten memiliki kinerja yang bervariasi pada setiap pilar (Gambar 4.3). Kabupaten yang menempati sepuluh besar dalam pemeringkatan klaster ini ialah: Badung (Bali), Trenggalek (Jawa Timur), Klungkung (Bali), Gianyar (Bali), Wonogiri (Jawa Tengah), Bangka Tengah (Bangka Belitung), Kuantan Singgigi (Riau), Karanganyar (Jawa Tengah), Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), dan Kebumen (Jawa Tengah). Satu-satunya daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan ialah Trenggalek. Kemudian, daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar inklusi sosial adalah Karanganyar, Humbang Hasundutan, Gianyar, dan Kuantan Singgigi. Empat daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah Badung, Klungkung, Wonogiri, dan Bangka Tengah. Dari sepuluh daerah tersebut, tidak ada daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar lingkungan lestari.



Gambar 4.3 Spider Web Top Ten DSDB

Pada aras lain, karakteristik wilayah yang menempati posisi *Bottom Ten* memiliki struktur keunggulan pilar yang berbeda dan relative ekstrim antar pilar. Bila merujuk pada kategorisasi daya saing daerah berkelanjutan (bdk. Gambar 4.4), maka terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat daya saing pilar yang tinggi. Pada pilar ekonomi berkelanjutan, terdapat Cianjur (Jawa Barat) dengan skor pilar 60,52 dan termasuk dalam *Top 45* pilar ini, namun memiliki masalah pada capaian pilar lingkungan lestari dan inklusi sosial. Selain itu, pada pilar inklusi sosial terdapat empat daerah dengan skor di atas 60, yakni Tuban (Jawa Tengah), Brebes (Jawa Tengah), Serang (Banten), dan Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan). Pada pilar tata kelola berkelanjutan, terdapat dua daerah dengan skor di atas 60, yakni Tuban dan Serang. Daerah pada *bottom ten* memiliki persoalan yang serius, yakni capaian pilar lingkungan lestari yang berada pada kategori rendah, khususnya Bangkalan dan Brebes.

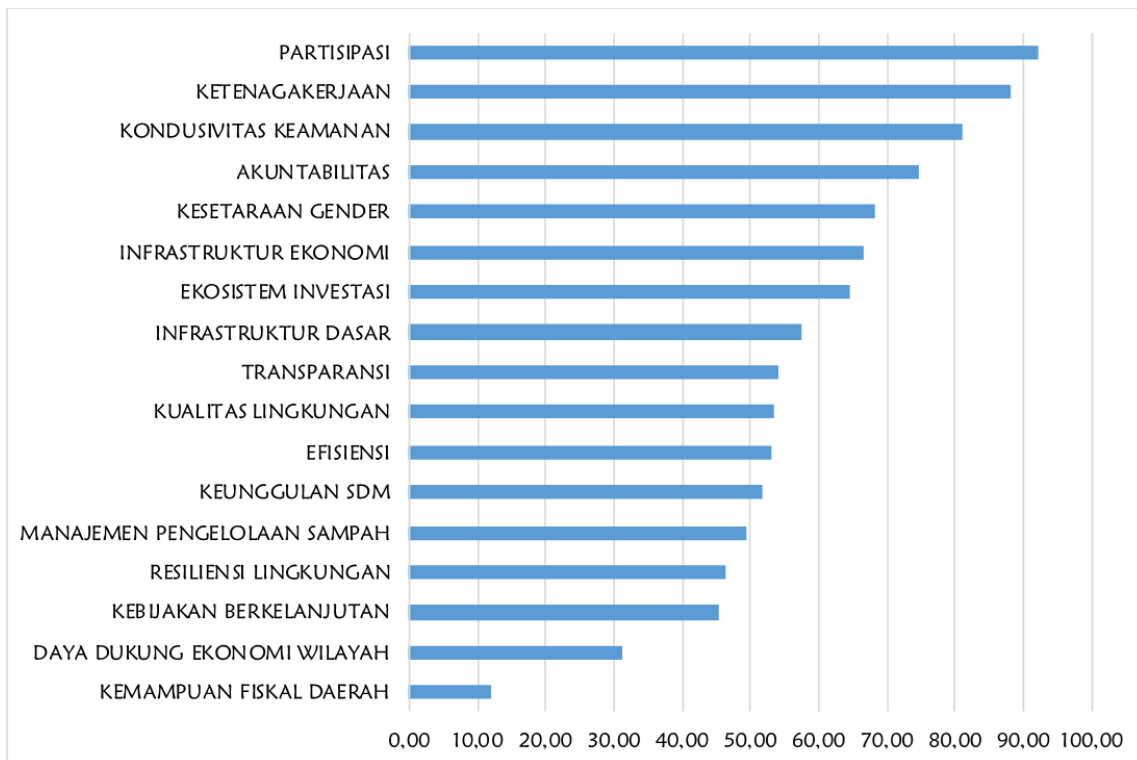


Gambar 4.4 Spider Web Bottom Ten DSDB

Hasil pengukuran IDSDB pada klaster ini membentuk tipologi sebagai berikut:

a. Daya Saing Daerah Belum Dibangun Secara Berkelanjutan

Sebagian besar indikator belum bekerja optimal dalam penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan (bdk. Gambar 4.5). Hanya tujuh variabel (44 persen) yang memiliki capaian dengan status sangat tinggi dan tinggi. Indikator yang memiliki kinerja sangat tinggi antara lain kondusivitas keamanan, partisipasi masyarakat, dan ketenagakerjaan. Sedangkan yang berkinerja tinggi adalah akuntabilitas, kesetaraan gender, infrastruktur ekonomi, dan ekosistem investasi. Kinerja yang rendah ditunjukkan indikator kemampuan fiskal daerah.



Gambar 4.5 Rerata Kinerja Indikator IDSDB

Upaya penguatan daya saing daerah di Indonesia belum dibangun secara utuh di atas prinsip berkelanjutan. Gambaran tersebut tampak dalam kinerja yang tidak optimal pada indikator lingkungan seperti resiliensi lingkungan, kebijakan berkelanjutan, manajemen pengelolaan sampah, kualitas lingkungan, hingga manajemen pengelolaan sampah. Capaian

yang diraih indikator tersebut masih jauh dari kriteria minimal status tinggi (60). Dampaknya, kerusakan lingkungan menjadi harga yang harus dibayar mahal oleh daerah yang belum bisa menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan di atas prinsip keberlanjutan.

B. Daya Saing Daerah Berkelanjutan Berada Pada Level Sedang

Raihan daya saing daerah berkelanjutan pada umumnya berada pada level sedang (69 persen), sisanya berada pada level tinggi (31 persen). Capaian kinerja tersebut juga didominasi daerah-daerah di Kawasan Indonesia Barat (94 daerah) dan Kawasan Indonesia Tengah (33 daerah). Capaian tingkat daya saing daerah berkelanjutan daerah Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan torehan capaian antar pilar dimana dari empat pilar yang diamati, tidak semuanya menunjukkan kinerja yang tinggi. Misalnya, daerah yang memiliki keunggulan pada pilar lingkungan lestari relatif memiliki persoalan serius pada pilar ekonomi berkelanjutan, demikian juga sebaliknya.

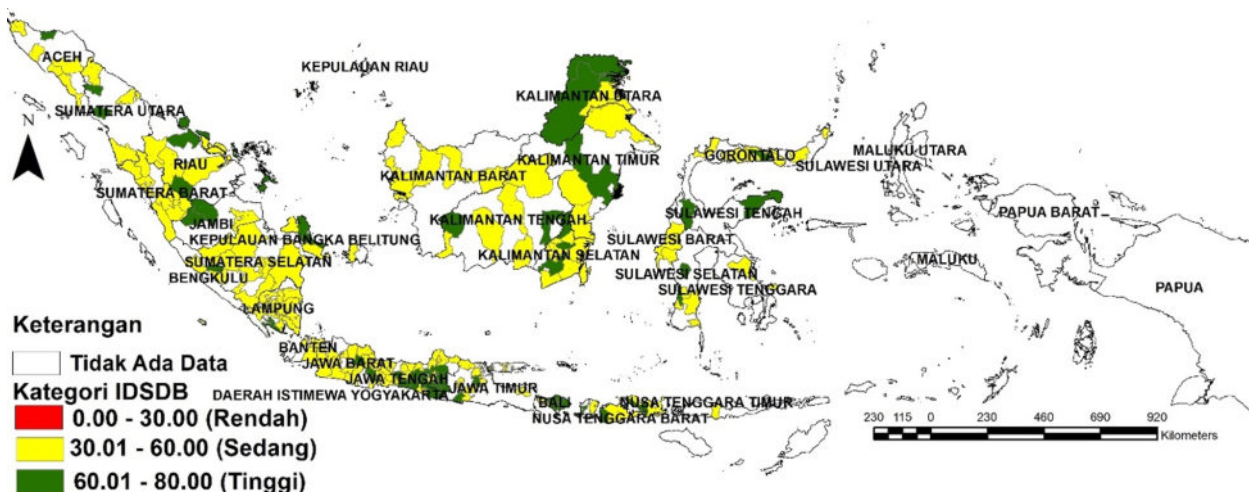
Gambaran kinerja antarkawasan (kecuali Indonesia Timur) menunjukkan profil yang sama: didominasi dengan tingkat DSDB sedang. Dominasi sedang pada setiap kawasan menunjukkan bahwa derajat DSDB Indonesia belum menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja. Meski demikian, di setiap kawasan tetap memiliki daerah dengan berkinerja tinggi. Menariknya, daerah-daerah di Provinsi Bali didominasi kabupaten yang berkinerja tinggi (kecuali Jembrana). Keberadaan daerah dengan berkinerja tinggi ini menjadi peluang bagi daerah-daerah sekitarnya untuk mempelajari dan menduplikasi praktik-praktik baik tersebut.

Pada level yang berbeda, daerah yang berkinerja IDSD tinggi hanya berjumlah 56 kabupaten (31 persen). Dari jumlah tersebut, 36 kabupaten berada di Kawasan Barat, sedangkan 20 daerah di Kawasan Tengah. Kinerja DSDB tinggi pada daerah-

daerah tersebut disebabkan oleh capaian yang berstatus tinggi pada empat pilar (terdapat 9 daerah) serta tidak adanya capaian rendah pada salah satu pilar DSDB. Bila diselami lebih jauh, daerah dengan DSDB tinggi relatif memiliki kinerja pilar tata kelola berkelanjutan yang tinggi. Pada klaster ini, daerah dengan DSDB tinggi tidak memiliki capaian yang rendah pada salah satu pilar DSDB.

c. Ketimpangan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Antar Kawasan

Kinerja Daya Saing Daerah Berkelanjutan mengalami ketimpangan antar kawasan. Pautan yang lebar ini menunjukkan fenomena yang sama dengan temuan kajian sebelumnya. Kesenjangan antar wilayah tersaji dengan jelas pada Gambar 4.6 dimana daerah dengan kategori daya saing tinggi didominasi oleh wilayah Jawa-Bali, sedangkan pada region yang lain tampak hanya sebagian kecil daerah yang memiliki daya saing dengan level tinggi. Citra ini sejalan dengan realitas bahwa persoalan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah serius di Indonesia.



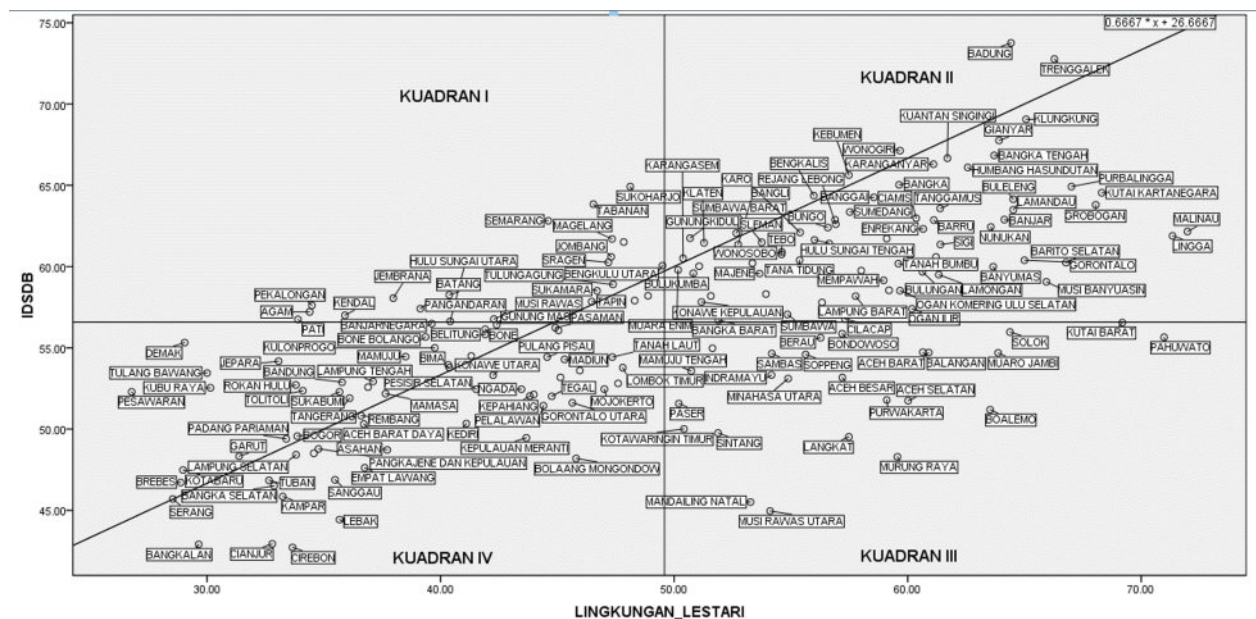
Gambar 4.6 Kinerja DSDB (183 Kabupaten)

2. Analisis Kuadran

2.1 Kaitan IDSDB dan Kinerja Pilar

a. Kinerja IDSDB dan Pilar Lingkungan Lestari

Kinerja pilar lingkungan lestari memiliki korelasi yang positif terhadap DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung berada pada kuadran II (capaian pilar lingkungan lestari dan capaian IDSDB tinggi). Sebaliknya, daerah dengan capaian DSDB sedang (*bottom three*) seperti Bangkalan, Cianjur, dan Cirebon berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan. Pada aras komposisi, daerah yang berada pada kuadran I dan kuadran III lebih sedikit dibandingkan daerah pada kuadran II dan IV (lihat Gambar 4.7).



Gambar 4.7 Kinerja DSDB dan Pilar Lingkungan Lestari

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja DSDB tinggi namun memiliki performa pilar lingkungan lestari yang rendah dengan jumlah 18 daerah (10 persen). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada daerah yang berkinerja tinggi namun memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memperbaiki manajemen SDA dan pembenahan

kebijakan mitigasi bencana. Misalnya, kinerja DSDB tinggi di Batang sebagai kawasan industri yang baru berkembang masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar lingkungan lestari.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan upaya penguatan DSDB dimana jumlah daerah pada kuadran ini mencapai 68 (37 persen). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang hampir sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja tinggi seperti Badung, Trenggalek, maupun Klungkung memiliki peluang untuk meraih capaian DSDB yang tinggi.

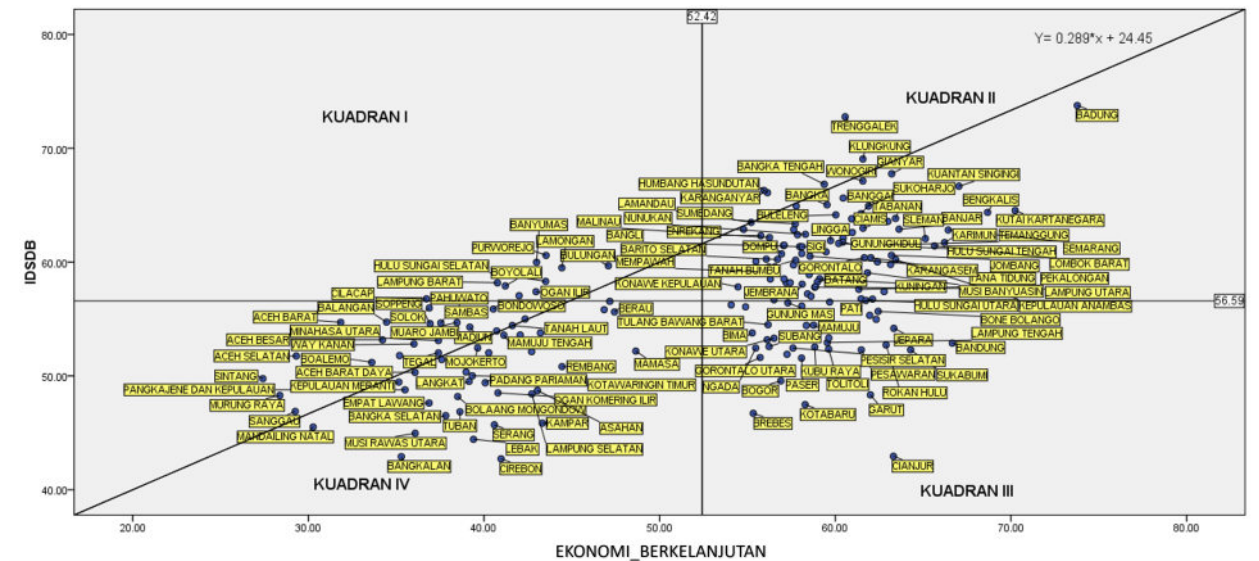
Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dengan jumlah daerah yang berada mencapai 28 (15 persen). Capaian pilar lingkungan lestari yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan lestari yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Salah satu contohnya adalah Pohuwato dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar lingkungan lestari namun mengalami kinerja yang buruk pada pilar ekonomi berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu menjaga kelestarian lingkungan dan bermasalah pada penguatan DSDB. Jumlah titik yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang hampir sama dengan kuadran II dengan jumlah 70 daerah (38 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar lingkungan lestari memiliki persoalan lingkungan dalam mengakselerasi kinerja DSDB.

b. Kinerja IDSDB dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kinerja pilar ekonomi berkelanjutan memiliki korelasi yang positif DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan

Klungkung berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian DSDB sedang (*bottom three*) seperti Bangkalan dan Cirebon berada pada kuadran IV. Uniknya, Cianjur memiliki kinerja yang tinggi pada pilar ini, namun memiliki capaian IDSDB sedang sehingga daerah ini masuk dalam Kuadran III. Anomali ini menunjukkan bahwa terdapat daerah yang memiliki capaian ekonomi berkelanjutan yang baik namun belum memberikan daya ungkit terhadap capaian DSDB di daerah. Terkait komposisi, daerah yang berada pada kuadran I maupun kuadran III relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Gambar 4.8 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar ekonomi berkelanjutan dan kinerja IDSDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.8 Kinerja DSDB dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja DSDB tinggi namun memiliki performa pilar ekonomi berkelanjutan yang rendah dengan jumlah 10 daerah (5 persen). Padahal, konsep dasar daya saing sendiri adalah ihwal kemampuan komparatif daerah terkait kinerja ekonomi dalam menghadapi persaingan antar daerah hingga global. Jumlah titik daerah yang berada dalam titik ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa DSDB yang tinggi pada wilayah tertentu masih memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi capaian daya dukung wilayah, kemampuan fiskal daerah, ekosistem

investasi, dan ketenagakerjaan. Misalnya, kinerja DSDB tinggi di Boyolali sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan, sebab tingginya capaian DSDB di daerah ini lebih dipengaruhi oleh kinerja pilar inklusi sosial dan tata kelola berkelanjutan.

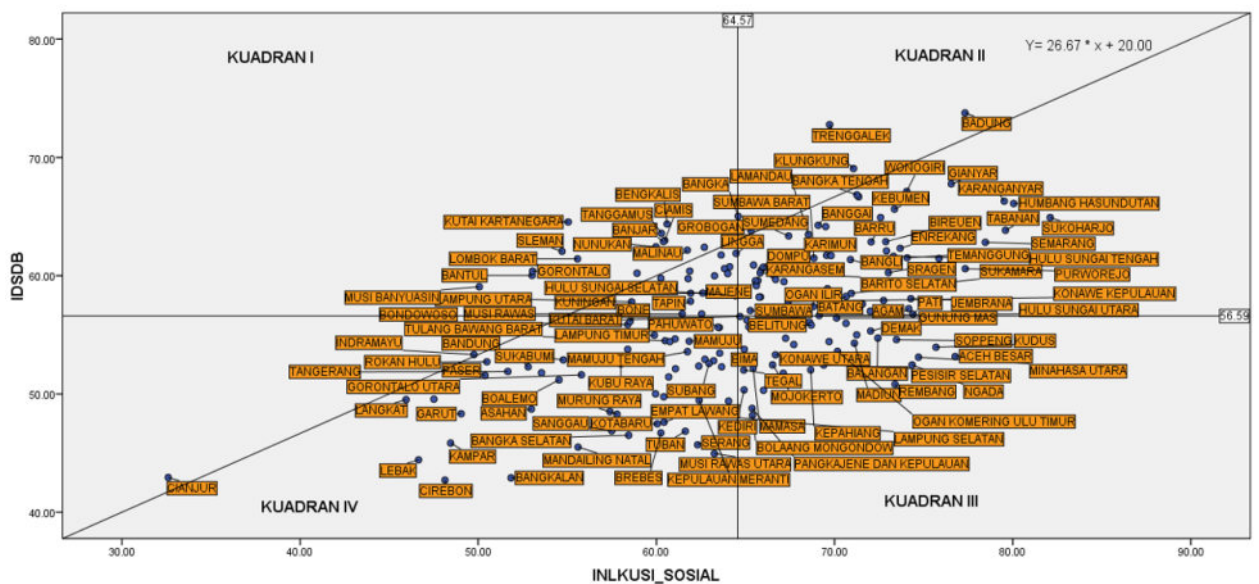
Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dengan upaya penguatan DSDB dimana jumlah daerah pada kuadran ini mencapai 88 (48 persen). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung memiliki peluang untuk meraih capaian DSDB yang tinggi.

Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang berada pada kuadran ini mencapai 29 (16 persen). Capaian pilar ekonomi berkelanjutan yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi berkelanjutan yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Salah satu contohnya adalah Sukabumi dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar lingkungan lestari dan inklusi sosial. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV) merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar ekonomi berkelanjutan dengan baik dan bermasalah pada penguatan DSDB. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II dengan jumlah 57 daerah (31 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan memiliki persoalan yang serupa pada kinerja DSDB. Bukti sahnya, dua daerah (Bangkalan dan Cirebon) yang berada pada level *bottom three* DSDB masuk pada kuadran ini.

c. Kinerja IDSDB dan Pilar Inklusi Sosial

Kinerja pilar inklusi sosial memiliki korelasi yang positif terhadap capaian DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian DSDB sedang (*bottom three*) seperti Bangkalan, Cianjur, dan Cirebon berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar inklusi sosial terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan. Tipologi ini menunjukkan komposisi daerah yang berada pada setiap kuadran relatif merata dan titik data mendekati posisi equilibrium (kinerja IDSDB=kinerja pilar inklusi sosial). Gambar 4.9 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDB yang tergolong dalam empat kuadran.



Gambar 4.9 Kinerja DSDB dan Pilar Inklusi Sosial

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja DSDB tinggi namun memiliki performa pilar inklusi sosial yang rendah dengan jumlah mencapai 28 (15 persen). Jumlah titik daerah yang berada dalam titik ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa DSDB yang tinggi pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar inklusi sosial. Misalnya, kinerja DSDB tinggi di Sleman tidak diimbangi oleh kinerja pada pilar inklusi sosial akibat capaian yang rendah pada variabel kondusivitas keamanan.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam menjaga inklusivitas sosialnya selaras dengan upaya penguatan DSDB dengan jumlah daerah mencapai 61 (33 persen). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja tinggi seperti Badung, Trenggalek, maupun Klungkung memiliki peluang untuk meraih capaian DSDB yang tinggi.

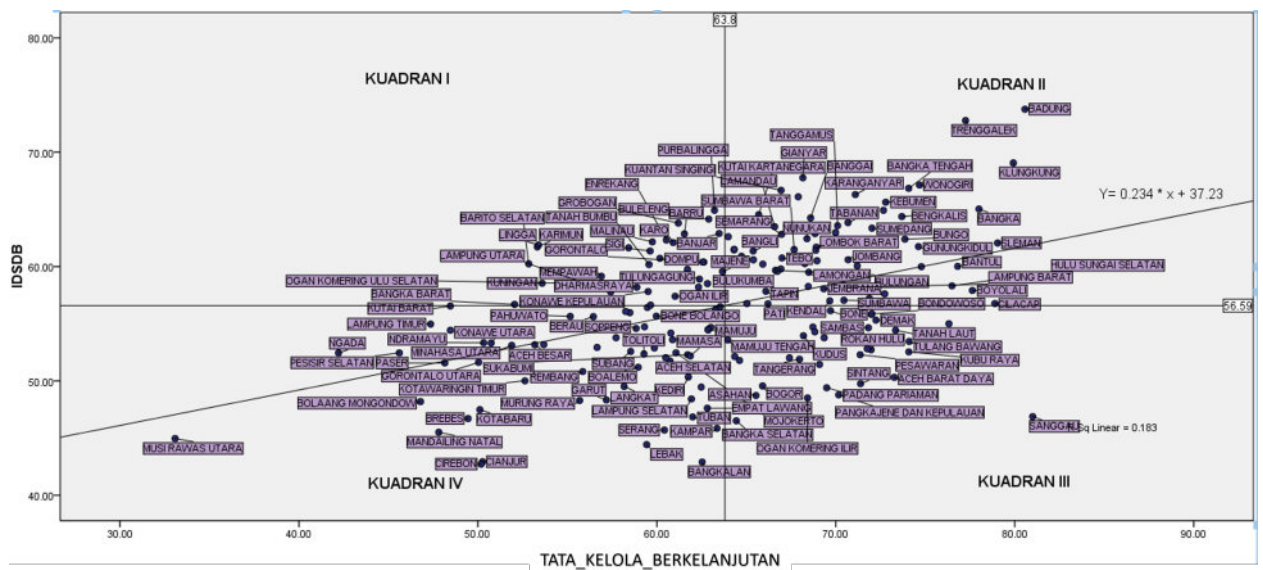
Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang berada pada kuadran ini mencapai 36 (20 persen). Capaian pilar inklusi sosial yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja inklusi sosial yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Salah satu contohnya adalah Tegal dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar inklusi sosial namun mengalami kinerja yang buruk pada pilar ekonomi berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu menguatkan inklusivitas sosial dan bermasalah pada penguatan DSDB. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II, yakni mencapai 59 (32 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar inklusi sosial memiliki persoalan yang serupa pada kinerja DSDB. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

d. Kinerja IDSDB dan Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki korelasi yang positif terhadap capaian penguatan DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian DSDB sedang (*bottom three*) seperti Bangkalan, Cianjur, dan Cirebon berada pada

kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan. Tipologi ini menunjukkan komposisi daerah yang berada pada setiap kuadran relatif merata dan titik data mendekati posisi equilibrium (kinerja IDSDB=kinerja pilar tata kelola berkelanjutan). Gambar 4.10 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDB di Indonesia.



Gambar 4.10 Kinerja DSDB dan Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja DSDB tinggi namun memiliki performa pilar tata kelola berkelanjutan yang rendah dengan jumlah daerah mencapai 32 (17 persen). Jumlah titik daerah yang berada dalam titik ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada daerah yang berkinerja tinggi namun memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan penyelenggaraan kebijakan berkelanjutan, Misalnya, kinerja DSDB tinggi di Buleleng tidak diimbangi oleh kinerja pada pilar ekonomi berkelanjutan.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan upaya penguatan DSDB dengan jumlah daerah mencapai 57

(31 persen). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang hampir sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja tinggi seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung memiliki peluang untuk meraih DSDB tinggi.

Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang berada pada kuadran ini mencapai 35 (19 persen). Capaian pilar tata kelola berkelanjutan yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tata kelola berkelanjutan yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Salah satu contohnya adalah Sanggau dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar lingkungan lestari dan ekonomi berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan bermasalah pada penguatan DSDB. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini mencapai 60 daerah (33 persen). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang memiliki persoalan terkait kinerja DSDB dan tata kelola berkelanjutan yang rendah dan membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DSDB kedepannya. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

2.2 Kaitan Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lain

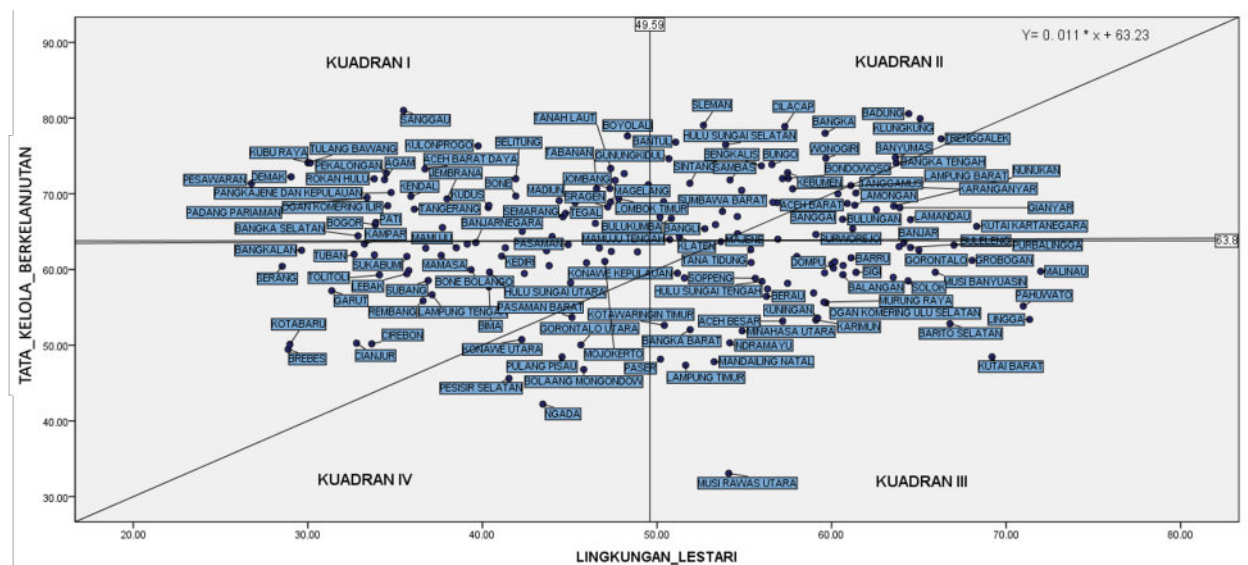
a. Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lingkungan Lestari

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki keunikan sesuai dengan capaian pilar lingkungan lestari di daerah.

Daerah dengan kinerja pilar tata kelola berkelanjutan tinggi seperti Badung dan Trenggalek berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan sedang (*bottom three*) seperti Ngada dan Pesisir Selatan berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan.

Anomali terlihat pada tipologi ini dimana Sanggau sebagai daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan sangat tinggi memiliki masalah pada capaian pilar lingkungan lestari.

Demikian halnya dengan Musi Rawas Utara yang menempati kuadran III dengan capaian tinggi pada pilar lingkungan lestari namun sedang pada pilar tata kelola berkelanjutan. Wilayah yang berada pada kuadran I dan III memiliki karakter permasalahan yang berbeda dimana salah satu sisi memiliki kinerja baik namun buruk pada sisi lainnya. Gambar 4.11 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.11 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lingkungan Lestari

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja tata kelola berkelanjutan tinggi namun memiliki performa lingkungan lestari yang rendah. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah sejumlah 32 (17 persen) dimana hal ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar lingkungan lestari. Misalnya, kinerja tata kelola pemerintahan yang optimal di Jembrana sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar lingkungan lestari.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan sehingga berdampak pada lingkungan yang lestari. Daerah yang berada pada kuadran ini adalah sejumlah 60 (33 persen) dimana jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang nyaris sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan memiliki peluang capaian kinerja lingkungan lestari yang tinggi. Buktinya, daerah yang berada pada level *top three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

Kinerja yang tersaji dalam kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I. Capaian pilar lingkungan lestari yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum sepenuhnya ditunjang oleh kinerja tata kelola berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu kinerja tata kelola berkelanjutan tidak memberikan dampak pada kinerja pilar lingkungan lestari. Salah satu contohnya adalah Aceh Besar dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar lingkungan lestari namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit (36 daerah/20 persen).

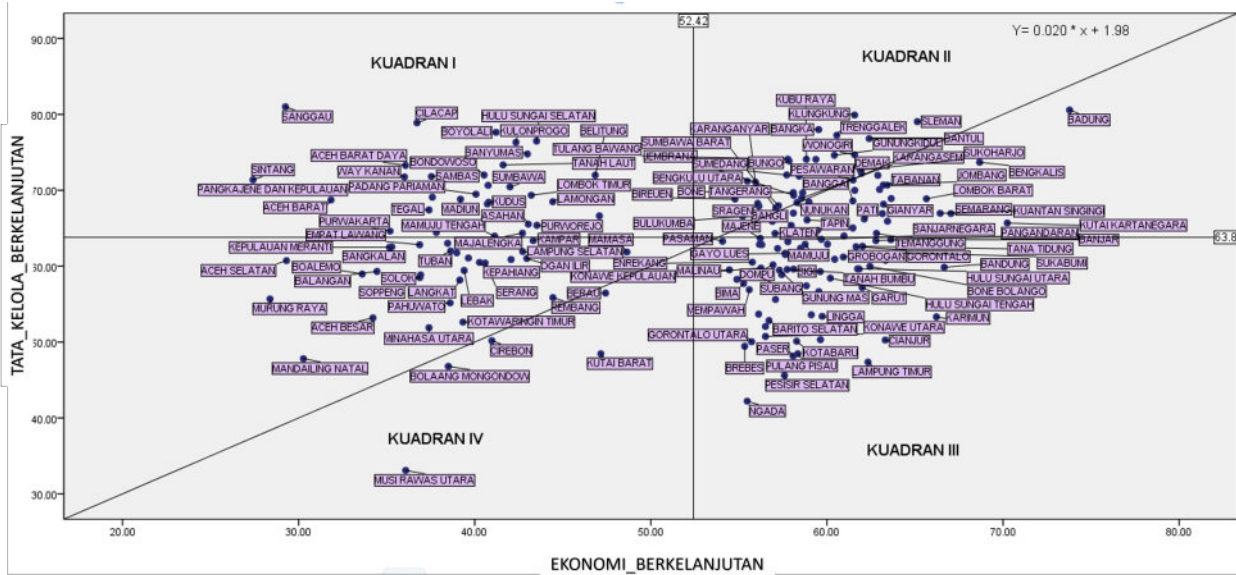
Terakhir, keberadaan 56 daerah (30 persen) pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar lingkungan lestari dengan

baik dan bermasalah pada perwujudan tata kelola yang berkelanjutan. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar lingkungan lestari memiliki persoalan yang serupa pada kinerja tata kelola berkelanjutan. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDDB masuk pada kuadran ini.

b. Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki korelasi yang positif terhadap capaian pilar ekonomi berkelanjutan di daerah. Daerah dengan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan tinggi seperti Badung, Trenggalek, dan Kutai Kertanegara berada pada kuadran II. Di sisi lain, daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan sedang (*bottom three*) yakni Musi Rawas Utara berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDDB secara keseluruhan.

Anomali terlihat pada tipologi ini dimana Ngada dan Pesisir Selatan sebagai daerah dengan ekonomi berkelanjutan sangat tinggi memiliki masalah pada capaian pilar tata kelola berkelanjutan. Wilayah yang berada pada kuadran I dan III memiliki karakter permasalahan yang berbeda dimana salah satu sisi memiliki kinerja baik namun buruk pada sisi lainnya. Dua daerah tersebut berada pada kuadran III yang menunjukkan bahwa daerah memiliki capaian yang baik pada pilar ekonomi berkelanjutan namun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah pada pilar tata kelola berkelanjutan. Gambar 4.12 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.12 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja tata kelola berkelanjutan tinggi namun memiliki performa ekonomi berkelanjutan yang rendah. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah sejumlah 34 (18,48 persen) dimana hal ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar ekonomi berkelanjutan. Misalnya, kinerja tata kelola pemerintahan yang optimal di Tegal sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan sehingga berdampak pada kinerja ekonomi yang berkelanjutan. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah 58 (31,48 persen) dimana terdapat sebaran yang hampir sama dengan kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan memiliki peluang untuk mendulang kinerja ekonomi berkelanjutan yang tinggi. Buktinya, daerah yang berada pada level *top three* IDSDDB masuk pada kuadran ini.

Kinerja yang tersaji dalam kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang

berada dalam kuadran ini mencapai 59 (31,52 persen). Capaian pilar ekonomi berkelanjutan yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum sepenuhnya ditunjang oleh kinerja tata kelola berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu kinerja tata kelola berkelanjutan tidak memberikan dampak pada kinerja pilar ekonomi berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Bandung dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

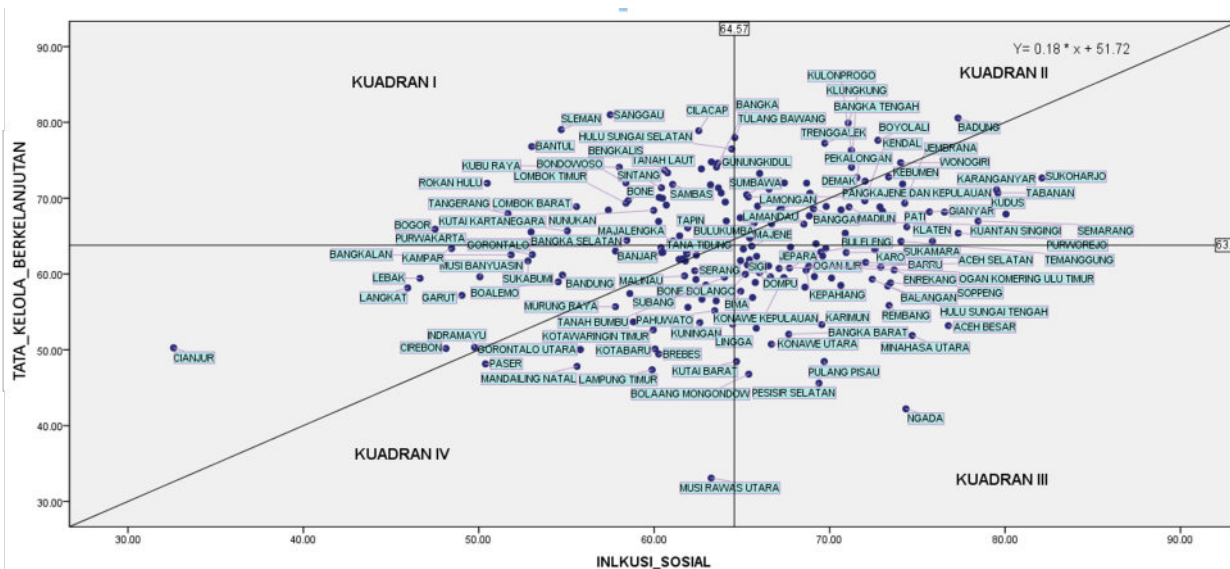
Terakhir, keberadaan 33 daerah (17,93 persen) pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar ekonomi berkelanjutan dengan baik dan bermasalah pada perwujudan tata kelola yang berkelanjutan. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan memiliki persoalan yang serupa pada kinerja tata kelola berkelanjutan. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

c. Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Inklusi Sosial

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki korelasi yang positif terhadap capaian pilar inklusi sosial di daerah. Daerah dengan kinerja pilar inklusi sosial tinggi seperti Sukoharjo, Humbang Hasundutan, dan Tabanan berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan sedang (*bottom three*) yakni Musi Rawas Utara berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan. Di sisi lain, jumlah selisih daerah antar kuadran dalam klaster ini hampir sama.

Anomali terlihat pada tipologi ini dimana Sanggau sebagai daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan yang sangat

tinggi memiliki masalah pada capaian pilar inklusi sosial (berada pada kuadran I). Kebermasalahan ini timbul sebagai refleksi bagi pemerintah daerah bahwa (1) capaian pada pilar tata kelola berkelanjutan tidak selamanya memberikan efek yang instan bagi perekonomian daerah; dan (2) Dominasi berlebihan pada satu pilar nyatanya tidak memberikan daya ungkit yang signifikan dalam peningkatan capaian DSDB. Gambar 4.13 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.13 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Inklusi Sosial

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja tata kelola berkelanjutan tinggi namun memiliki performa inklusi sosial yang rendah. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah sejumlah 32 (17 persen) dimana hal ini lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran III dan IV.. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar inklusi sosial. Misalnya, kinerja tata kelola pemerintahan yang optimal di Kutai Kertanegara sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar inklusi sosial.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan sehingga berdampak pada kinerja pilar inklusi sosial. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran terbanyak

dibandingkan kuadran lainnya, yakni 50 daerah (27 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan cenderung memiliki inklusivitas sosial yang tinggi. Buktinya, daerah yang berada pada level *top three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

Kinerja yang tersaji dalam kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I. Capaian pilar inklusi sosial yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum sepenuhnya ditunjang oleh kinerja tata kelola berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu kinerja tata kelola berkelanjutan tidak memberikan dampak pada kinerja pilar inklusi sosial. Salah satu contohnya adalah Temanggung dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar inklusi sosial namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini paling sedikit dibandingkan dengan kuadran lain, yakni 42 daerah (23 persen).

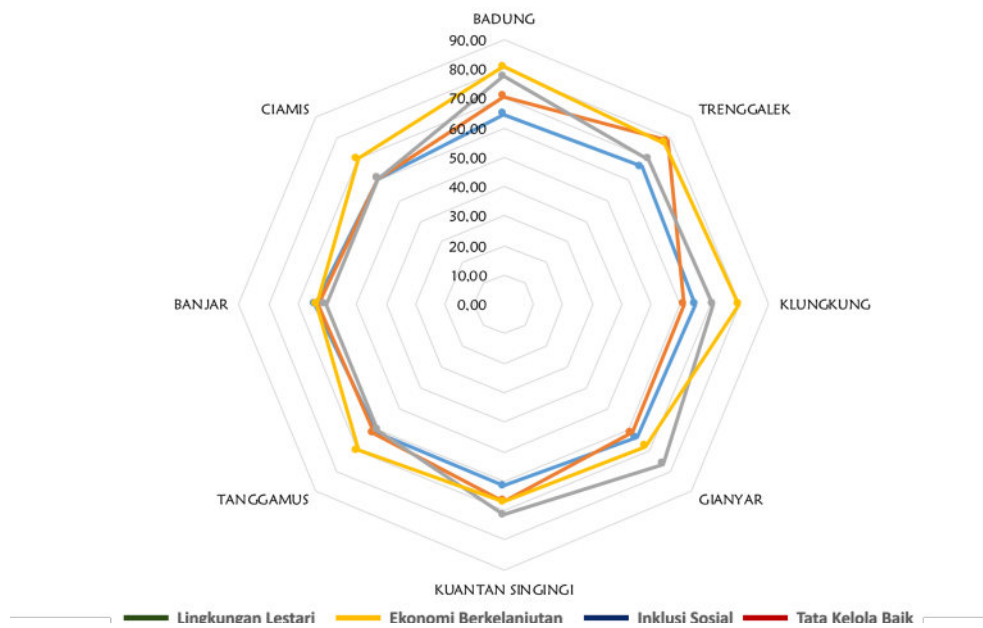
Terakhir, keberadaan 45 daerah (24 persen) pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar inklusi sosial dengan baik dan bermasalah pada perwujudan tata kelola yang berkelanjutan. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar inklusi sosial memiliki persoalan yang serupa pada kinerja tata kelola berkelanjutan. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

3. Analisis Kategorial

Secara regional, DSDB pada Kawasan Barat dan Tengah didominasi daerah dengan berkinerja sedang. Meski demikian, di setiap kawasan tetap memiliki daerah dengan berkinerja tinggi (bdk. Gambar 4.5). Menariknya, daerah-daerah di Provinsi Bali didominasi kabupaten yang berkinerja tinggi, kecuali Jembrana. Jembrana mengalami capaian yang sedang pada pemeringkatan IDSDB karena mengalami capaian yang rendah pada variabel pengelolaan sampah (12,65) dan kemampuan fiskal daerah (4,66). Keberadaan daerah dengan berkinerja tinggi ini menjadi peluang bagi daerah-daerah sekitarnya untuk mempelajari dan menduplikasi praktik-praktik baik tersebut.

3.1 Kategori Tinggi

Daerah berkinerja daya saing berkelanjutan level tinggi berjumlah 56 kabupaten (31 persen). Dari jumlah tersebut, Kawasan Barat menyumbang 36 kabupaten sedangkan di Kawasan Tengah terdapat 20 kabupaten. Pada kategori ini, terdapat delapan daerah yang memiliki daya saing pilar yang tinggi pada setiap pilarnya. Delapan daerah tersebut memperoleh skor pilar di atas 60. Daerah-daerah tersebut adalah Badung – Bali (Peringkat 1), Trenggalek-Jawa Tengah (2), Klungkung-Bali (3), Gianyar-Bali (4), Kuantan Singgigi-Riau (7), Tanggamus-Lampung (21), Banjar-Kalimantan (24), dan Ciamis-Jawa Barat (25). Keseimbangan antar pilar di atas dapat dilihat pada Gambar 4.14.

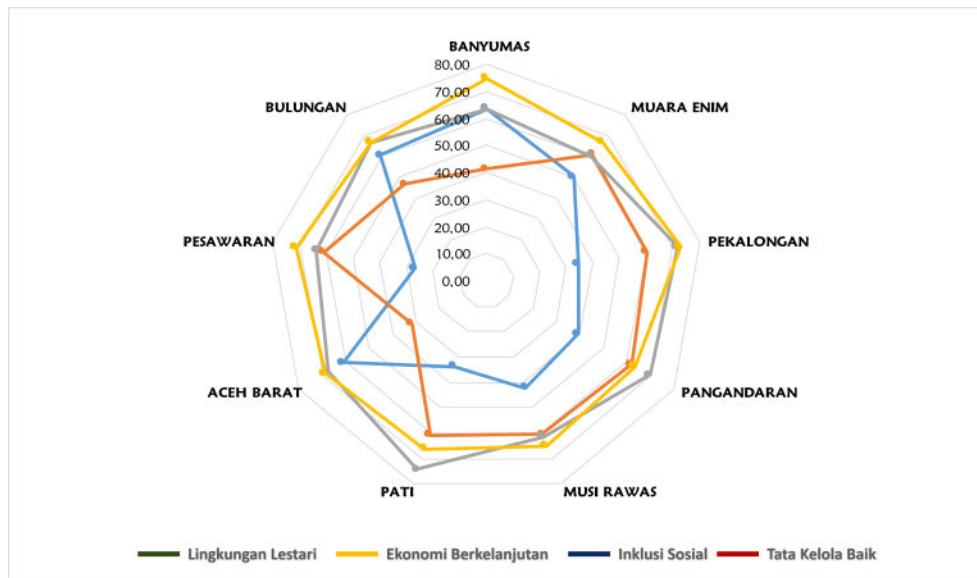


Gambar 4.14 Capaian pada daerah yang memiliki capaian tinggi pada setiap pilar

3.2 Kategori Sedang

Daerah berkinerja daya saing sedang berjumlah 127 kabupaten (69 persen). Secara kewilayahan, terdapat 94 daerah di Kawasan Barat yang memiliki derajat daya saing sedang, sedangkan di Kawasan Tengah terdapat 33 daerah yang memiliki derajat daya saing sedang. Artinya, daerah dengan kinerja daya saing sedang masih didominasi Kawasan Barat.

Mayoritas daerah berkinerja sedang tidak memiliki kinerja tinggi pada setiap pilar. Menariknya, terdapat sembilan (9) daerah yang menempati level tinggi pada dua pilar (dari empat pilar keseluruhan dengan capaian pilar yang bervariasi). Daerah tersebut adalah Bulungan-Kalimantan Utara (Peringkat 62), Banyumas-Jawa Tengah (64), Muara Enim-Sumatera Selatan (65), Pekalongan-Jawa Tengah (83), Pangandaran-Jawa Barat (85), Musi Rawas-Sumatera Selatan (91), Pati-Jawa Tengah (92), Aceh Barat-Aceh (109), dan Pesawaran-Lampung (140). Uniknya, sembilan daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan dan pilar inklusi sosial (Bdk. Gambar 4.15) Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan daya saing sedang dengan dua pilar yang unggul memiliki capaian yang baik pada sisi input (tata kelola berkelanjutan).



Gambar 4.15 Capaian pada daerah berdaya saing sedang yang memiliki capaian tinggi pada tiga pilar

4. Analisis Pilar

4.1 Pilar Lingkungan Lestari

a. Temuan Umum

Secara umum, studi ini memperlihatkan skor pilar lingkungan lestari masih berada pada level menengah ke bawah. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya skor pada tiga variabel pilar ini sehingga pemangku kebijakan masih dihadapkan pada persoalan rendahnya capaian pilar lingkungan lestari. Artinya untuk mendapatkan capaian pilar lingkungan lestari yang tinggi membutuhkan kerja baik pada variabel kualitas lingkungan, manajemen sumberdaya lingkungan hingga resiliensi/ketangguhan lingkungan terhadap bencana. Demikian juga pada level variabel, untuk memperoleh capaian kualitas lingkungan yang tinggi, maka indikator kualitas air, udara dan tutupan lahan juga harus memiliki capaian yang tinggi dan seterusnya.

Kontribusi masing-masing variabel pembentuk pilar lingkungan lestari bervariasi. Kontribusi variabel tertinggi adalah kualitas lingkungan (rerata 53,25), disusul, manajemen pengelolaan sumberdaya lingkungan (49,22) dan resiliensi

lingkungan (46,29). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan lingkungan lestari. Jika dibedah per indikator, kualitas lahan (35,51), risiko bencana (44,86), kapasitas pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana (47,72), jumlah sampah yang tertangani (49,22), perlu mendapatkan perhatian ke depan. (Bdk Tabel 4.1).

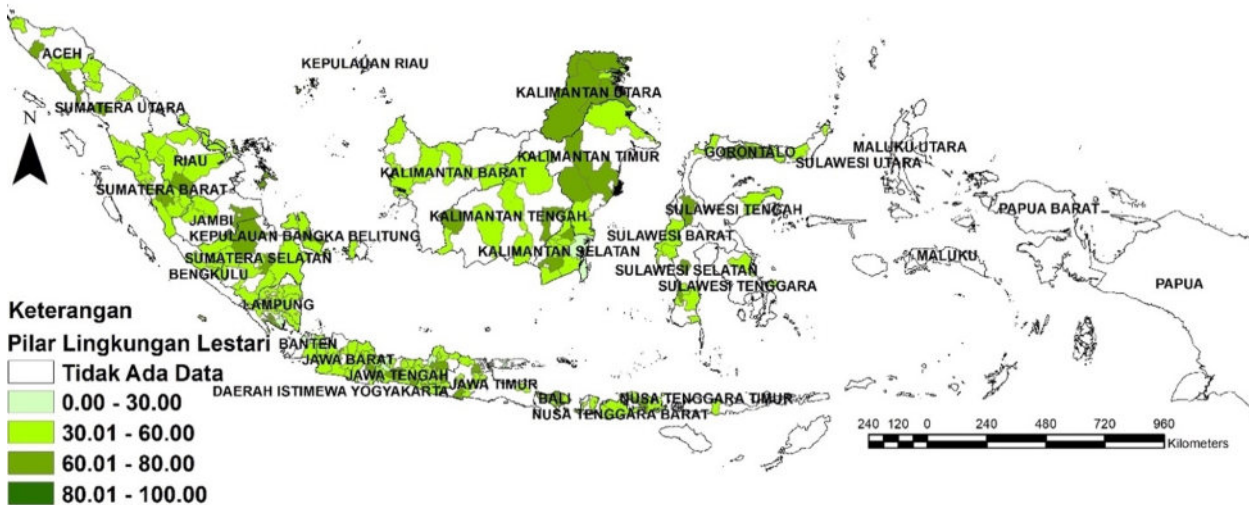
Tabel 4. 1 Nilai Rerata Indikator Pilar Lingkungan Lestari

No	Indikator	Nilai Rerata
1	Kualitas Air	57,87
2	Kualitas Udara	66,38
3	Kualitas Lahan	35,51
4	Intensitas Sampah	49,22
5	Risiko Bencana	44,86
6	Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah	47,72

Daerah yang memiliki skor lingkungan lestari tinggi umumnya memiliki kinerja DSDB berada di atas rerata nasional. Artinya, pilar lingkungan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembentukan daya saing daerah berkelanjutan. Capaian pilar lingkungan lestari menunjukkan gambaran kondisi dan mutu lingkungan hidup pada periode tertentu. Hasil perhitungan indikator penyokong pilar lingkungan lestari, menempatkan Malinau pada peringkat tertinggi bersama dengan Lingga (Kepulauan Riau), Pohuwato (Gorontalo), Kutai Barat (Kalimantan Timur), dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Namun, daerah-daerah ini memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kinerja pilar ekonomi dan tata kelola berkelanjutan. Citra pilar lingkungan lestari dapat dilihat pada Gambar 4.16.

Malinau (Kalimantan Utara) menjadi daerah dengan nilai pilar lingkungan tertinggi (71,98). Skor kualitas lingkungan yang tinggi (87,03) dan manajemen pengelolaan sampah yang tinggi (85,38) menjadikan daerah ini unggul dibanding daerah lainnya, Pemda Malinau juga berkomitmen menjaga lingkungan (memiliki kawasan konservasi hutan lindung Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,3 juta hektar)¹¹ yang dikenal dengan

Heart of Borneo. Namun, pekerjaan rumah Kabupaten Malinau adalah perbaikan pada ketangguhan terhadap bencana (resilensi) yang masih rendah (43,53).

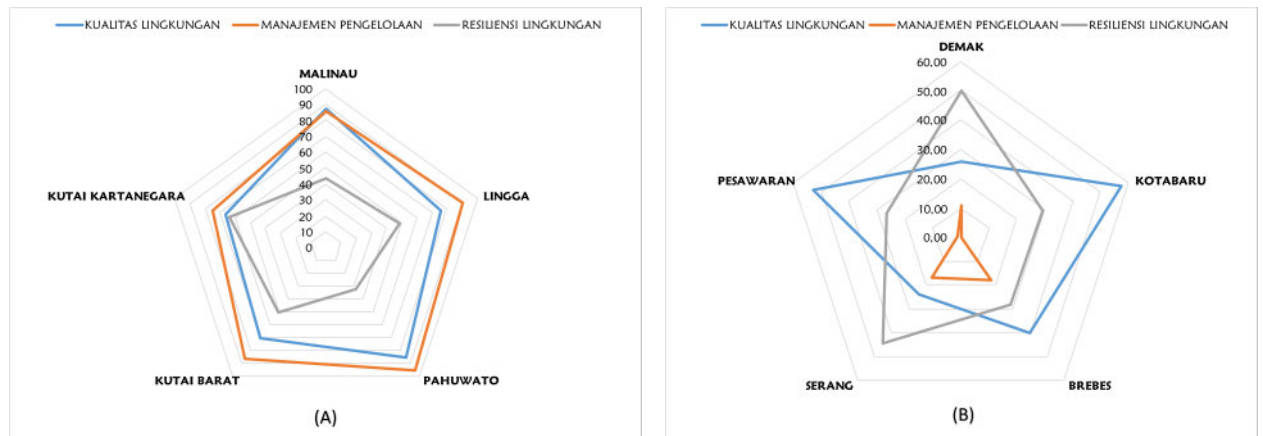


Gambar 4.16 Kinerja Pilar Lingkungan Lestari

Pesawaran (Lampung) merupakan daerah dengan pilar lingkungan lestari terendah (26,77). Kendala yang dihadapi daerah ini adalah terletak pada persoalan manajemen pengelolaan sumberdaya (0,98), resiliansi lingkungan (26,53) yang rendah, serta kualitas lingkungan (52,79). Skor yang diperoleh pada pilar lingkungan berbanding terbalik dengan pilar ekonomi berkelanjutan dan pilar sosial inklusif masing-masing nilainya 61,13 dan 63,55. Artinya, Pesawaran memiliki persoalan keberlanjutan lingkungan dan belum bisa menyeimbangkan empat pilar penyokong daya saing berkelanjutan.

Kinerja indikator pengelolaan sampah linear dengan kualitas lingkungan pada daerah top five dan bottom five. Wilayah *top five* ini memiliki nilai pengelolaan sampah yang tinggi memiliki capaian kualitas lingkungan hidup yang baik. Karakteristik kedua yang dapat dilihat adalah daerah pada wilayah *bottom five* memiliki kecenderungan dimana capaian pengelolaan sampah yang minim selaras dengan kualitas lingkungan yang

minim (pengecualian untuk Kabupaten Serang). Ihtwal resiliensi lingkungan, baik wilayah *top five* maupun *bottom five* tidak memiliki kaitan dengan capaian pada kualitas lingkungan maupun manajemen pengelolaan sampah. Analisis *spider web* pada daerah *top five* dan *bottom five* dapat dilihat pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Spider Web Top Five (A) dan Bottom Five (B) Pilar Lingkungan Lestari

b. Variabel Pembentuk Lingkungan Lestari

1. Kualitas Lingkungan Hidup

Nunukan merupakan daerah yang memiliki skor tertinggi pada variabel kualitas lingkungan (91,51). Capaian ini berada di atas rerata nasional (53,23). Kabupaten ini unggul dalam setiap indikator kualitas lingkungan hidup yakni: kualitas udara (94,92) dan kualitas tutupan lahan (90,60) dan kualitas air (89,01). Terdapat beberapa kebijakan yang rutin dilakukan dilakukan Kabupaten Nunukan di antaranya adalah pemantauan kualitas air, penurunan beban pencemaran air dan udara, pemulihan sumber-sumber air dan menjaga debit air untuk mendukung fungsi lahan pertanian. Capaian ini relevan dengan temuan pada opsi kelengkapan data 100 persen dimana menempatkan kabupaten ini pada posisi terbaik pada variabel ini.

Sementara kabupaten dengan skor terendah pada variabel lingkungan hidup adalah Pati-Jawa Tengah (17,48). Capaian masing-masing indikator kualitas lingkungan hidup di Pati sebagai berikut: kualitas air (11,22), kualitas udara (23,61) dan kualitas tutupan lahan (17,67). Rendahnya status mutu air, di

bawah 50 persen berpengaruh pada capaian indeks kualitas air yakni 35,33. Rasio ruang terbuka hijau yang dibawah standar (20 persen) turut memperparah kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pati. Capaian skor yang diterima menandakan masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Rendahnya kualitas lingkungan hidup di Pati berakar pada sejumlah persoalan: lemahnya peran dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya (praktek 3R lemah), masih rendahnya pengelolaan air limbah domestik rumah tangga dan limbah industri dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan mangrove (MenLHK, 2021)¹². Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan limbah domestik dan industri sebagai kontributor utama pencemaran air dan upaya meningkatkan area ruang terbuka hijau di lingkungan masyarakat.

2. Manajemen Sumber Daya Lingkungan

Karanganyar merupakan daerah yang memiliki skor tertinggi pada variabel manajemen sumberdaya alam dan lingkungan (100). Capaian ini berada di atas rerata nasional (49,21). Skor tertinggi berikutnya adalah Purbalingga-Jawa Tengah (98,94), Ogan Ilir-Sumatera Selatan (96,37), Tanggamus-Lampung (96,37), Purwakarta-Jawa Barat (96,37), Purworejo (96,37), dan Grobongan-Jawa Tengah (96,37). Sebagai gambaran umum, layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Karanganyar terdiri di delapan (8) kecamatan yakni: Kecamatan Karanganyar, Tasikmadu, Karangpandan, Jaten, Kebakpandan, Colomadu, Gondangrejo dan Tawangmangu dengan jumlah truk pengangkutan 19 armada truk sampah¹³.

Sementara daerah yang memiliki skor terendah dalam manajemen sumberdaya dan lingkungan adalah Mamuju-Sulawesi Barat (0,13), Kotabaru-Kalimantan Selatan (0,26), Kampar-Riau (0,41) dan Kubu Raya-Kalimantan Barat (0,98).

12 MenLHK. 2021. Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pati Tahun 2017.

13 <https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/14bbdf1b-a252-4922-8bf8-e20bdbfa92c2/resource/313d-ba0f-8a05-44a0-a1fd-8e4d9c55f3d6/download/dokumen-indeks-kualitas-lingkungan-hidup-kabupaten-karanganyar-2021.pdf>

Kotak 1. Inovasi Pengelolaan Sampah Karanganyar

Karanganyar meluncurkan program pengelolaan sampah di tingkat desa. Terdapat dua desa yang menggunakan teknologi tepat guna agar sampah yang ada bisa dimanfaatkan. Desa Gentunang mendaur ulang sampah menjadi barang ekonomi (anyaman dan asbak dari bahan sampah kayu) bernilai tinggi. Mendukung dari sisi kebijakan, pemda menerbitkan Perda 16/2010 tentang pengelolaan sampah dan retribusi persampahan sebagai upaya agar pengelolaan sampah dilaksanakan secara optimal dan bertanggungjawab.

Volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebanyak 7.080,90 ton selama tahun 2021 di Mamuju. Keterbatasan pengelolaan sampah di Mamuju disebabkan oleh jumlah armada yang masih terbatas dimana hanya terdapat dua ekskavator, dan satu bulldoser yang bekerja setiap harinya di lokasi tempat pemrosesan akhir. Adapun jumlah Jumlah mobil sampah yang dimiliki DLHK Mamuju, sebanyak 12 unit untuk *Dumpruck* dan mobil sampah jenis *Armroll* sebanyak enam unit. Faktanya, masih banyak ditemukan sampah pada sejumlah titik yang jarang diangkat akibat minimnya armada pengangkut.

3. Resiliensi Lingkungan

Buleleng merupakan daerah dengan tingkat resiliensi lingkungan tertinggi (86,35). Capaian ini melampaui rerata nasional (46,29). Daerah dengan tingkat resiliensi lingkungan tertinggi berikutnya adalah Indramayu-Jawa Barat (80,59), Karangasem-Bali (80,31), Magelang-Jawa Tengah (78,50), Klungkung-Bali (76,91) dan Sleman-Yogyakarta (74,63). Buleleng memiliki skor yang tinggi pada indikator kemampuan dan kapasitas daerah yang tinggi dalam menanggulangi bencana 100) dan risiko bencana yang rendah (72.70). Sebagai mitigasi bencana, Buleleng membuat dokumen kajian kebencanaan tanah longsor, banjir dan banjir bandang (Pendataan potensi bencana daerah). Selain itu, daerah ini juga membuat aplikasi lapor/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan di daerah, sehingga memudahkan masyarakat melapor jika terjadi bencana.

Kotak 2. Inovasi Mitigasi Bencana Buleleng

Tiga kegiatan rutin yang dilakukan Pemda Buleleng (Bali) terkait mitigasi Risiko bencana yakni: *pertama*, pra-bencana (melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan linmas terkait penyelamatan saat terjadi bencana; kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi adalah rangkaian upaya untuk mengurangi mitigasi bencana bencana di tingkat pra bencana). *Kedua*, tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, misalnya evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana. *Ketiga*, pasca bencana, dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.

Daerah-daerah yang memiliki skor resiliensi lingkungan rendah adalah Mandailing Natal-Sumatera Utara (16,67), Majene-Sulawesi Barat (17,09), Aceh Besar-Aceh (18,16), Berau-Kalimantan Timur (20,35) dan Paser-Kalimantan Timur (22,99).

Penyebabnya adalah tingkat risiko bencana daerah sangat tinggi, khususnya Kabupaten Mandailing Natal (Skor IRBI 2021: 214,80). Kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana juga rendah dan buruk. Daerah Mandailing Natal kerap mengalami bencana seperti longsor dan banjir bandang. Persoalan lainnya muncul dalam manajemen bencana alam, seperti: pencegahan, kesiapan daerah menangani bencana, cepat tanggap dan pemulihan pasca bencana dimana komitmen pemerintah daerah masih sangat buruk¹⁴.

4.2 Pilar Ekonomi berkelanjutan

a. Pengantar

Nilai rata-rata pilar ekonomi berkelanjutan adalah 59,67. Skor variabel tertinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan adalah tenaga kerja dengan rerata 88,04, disusul variabel ketersediaan infrastruktur ekonomi (66,50) dan ekosistem investasi (64,48). Sementara variabel terendah adalah keuangan daerah (8,23), disusul variabel daya dukung ekonomi (31,09). Hasil ini

¹⁴ Arif & Rosni. 2021. Manajemen Bencana Alam Hungan dengan Kepuasan Publik di Daerah Bencana: Studi Kasus di Daerah Bencana Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Geografi Vol 02 (02).

menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan berat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan pengoptimalan pengembangan potensi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi-potensi ekonomi akan membawa dampak baik terhadap sektor usaha, investasi dan kinerja lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah.

Sebaran daerah dengan tingkat daya saing pilar ekonomi berkelanjutan yang tinggi didominasi oleh wilayah Jawa-Bali.

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa warna kuning yang pekat terlihat menumpuk di kawasan Jawa-Bali dibandingkan regio lain (misalnya Sumatera dan Kalimantan). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan karakteristik antara daya saing daerah berkelanjutan dengan kekuatan pilar ekonomi berkelanjutan dimana regio yang memiliki ketangguhan ekonomi relatif memiliki tingkat daya saing daerah berkelanjutan yang tinggi.



Gambar 4.18 Kinerja Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Lebih dari separuh (64,13 persen), daerah-daerah memiliki kinerja ekonomi berkelanjutan di atas rata-rata nasional.

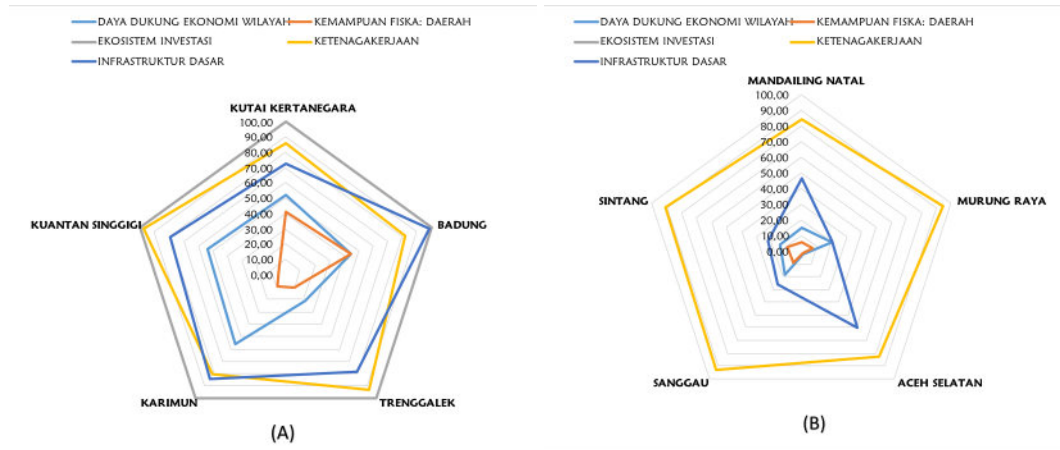
Daerah-daerah yang berada di atas rerata nasional umumnya terdapat di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sementara daerah yang berada di bawah rerata nasional umumnya berada di pulau Kalimantan, Sulawesi. Data ini menunjukkan masih tinggi disparitas ekonomi antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Daerah dengan skor pilar ekonomi tinggi umumnya memiliki skor yang tinggi pula pada variabel ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ekosistem investasi, kemampuan fiskal dan daya dukung ekonomi. Tantangan pada pilar ini adalah peningkatan indikator daya dukung ekonomi wilayah, peningkatan aksesibilitas jalan baik dan kemandirian fiskal daerah dan pengembangan sektor basis lestari. Berikut ini dapat dilihat capaian masing-masing indikator pada pilar ekonomi berkelanjutan (Tabel 4.2).

Tabel 4. 2 Nilai Rerata Indikator Pilar Ekonomi berkelanjutan

No	Indikator	Nilai Rerata
1	Rasio Elektrifikasi	92,39
2	Pertumbuhan Angkatan Kerja	88,04
3	Pertumbuhan Investasi Daerah	64,48
4	Ketersediaan Internet	62,15
5	Sektor Basis Lestari	51,23
6	Kualitas Jalan	44,95
7	Kemandirian Fiskal Daerah	11,97
8.	Daya Dukung Wilayah	10,95

Kinerja setiap indikator bervariasi pada pilar ekonomi berkelanjutan. Daerah *top five* memiliki kekuatan pada sisi ekosistem investasi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar. Namun jika dilihat pada variabel daya dukung ekonomi wilayah dan kemampuan fiskal daerah, lima wilayah tersebut memiliki capaian yang lebih rendah secara angka. Pada wilayah *bottom five*, capaian tinggi justru terlihat pada aspek ketenagakerjaan, dimana capaian pada variabel ini tidak jauh berbeda dengan wilayah *top five* pilar ekonomi berkelanjutan. Kondisi *spider webb* pada wilayah *Top Ten* dan *Bottom Ten* dapat dilihat pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Spider Web Top Five & Bottom Five Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Trenggalek (Jawa Timur) menjadi daerah dengan nilai pilar ekonomi berkelanjutan tertinggi (78,55). Capaian ini berada di atas rerata nasional (59,01). Trenggalek unggul pada sisi ekonomi dan menoreh capaian tinggi pada beberapa variabel pembentuknya, seperti kemampuan daya dukung ekonomi wilayah (100), ekosistem investasi (100), ketenagakerjaan (92,69), infrastruktur ekonomi 78,72.

Pekerjaan rumah daerah ini adalah peningkatan kemampuan fiskal daerah (10,08). Trenggalek mampu mempertahankan kondisi perekonomian melalui UMKM saat pandemi serta menghidupkan perekonomian desa melalui program Sadewa (seratus desa wisata). Pemkab Trenggalek turut meraih penghargaan *Natamukti Nindya* di tahun 2021 sebagai upaya mendorong perkembangan UMKM di daerahnya¹⁵ dan menerima penghargaan Bakti pada tahun 2022 karena berhasil mendorong 5000 pengusaha perempuan.

15 <https://www.trenggalekkab.go.id/article/berita/pemkab-trenggalek-raih-penghargaan-natamukti-nindya-tahun-2021>

Kotak 3. Inovasi Ekonomi Berkelanjutan Trenggalek

Trenggalek mengalami peningkatan investasi setiap tahun berkat adanya sejumlah kebijakan pro investasi hijau. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemda untuk mendorong peningkatan investasi, antara lain: pemetaan, promosi, bisnis *matching*, investor *gathering* dan lelang investasi. Efisiensi pelayanan publik melalui *cafe* pelayanan publik (CPP), digitalisasi dan jemput bola pelayanan turut menyumbang capaian realisasi investasi. Adapun sektor-sektor yang paling diminati investor di Kabupaten Trenggalek adalah perdagangan, perindustrian, kesehatan obat dan makan, pariwisata dengan masing-masing persentase sebagai berikut (49,81 persen; 35,37 persen; 2,18 persen dan 1,87 persen).

Trenggalek telah berbenah dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Adapun kebijakan dan inovasi yang dilakukan adalah memberikan relaksasi pajak hotel dan restoran pada masa pandemi dengan SK Bupati Trenggalek Nomor 188.45/330/406.001.3/2020. Trenggalek juga membangun system pengelolaan pajak berbasis web yang terpadu dan terintegrasi (E-BPHTB, E-SPTPD, E-SIMPATDA), menambah kanal-kanal pembayaran pajak daerah melalui m-banking, ATM dan *Virtual account* dll. Kerjasama lintas OPD juga dilakukan, terutama pengawasan fiskal daerah. Adapun OPD yang terlibat dalam kegiatan ini adalah BPN, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, dll.

Sintang (Kalimantan Barat) merupakan daerah dengan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan terendah (26,73).

Kendala yang dihadapi daerah ini adalah ekosistem investasi kemampuan fiskal daerah yang rendah (skor 6,24), daya dukung ekonomi wilayah rendah (skor 14,05) dan aksesibilitas terhadap infrastruktur ekonomi rendah (26,73). Penurunan capaian realisasi investasi yang berdampak pada rendahnya akses modal kepada koperasi dan UMKM; pandemi covid-19 yang melanda turut melemahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang. Imbas dari beragam persoalan tersebut ialah rendahnya capaian pada variabel daya dukung ekonomi wilayah. Selain itu pembangunan infrastruktur ekonomi yang masih lemah (kualitas jalan baik (10,87 persen, rasio elektrifikasi (92,85 persen) di bawah rata-rata nasional (99,45). Namun, pada pilar ini, hanya variabel ketenagakerjaan yang memiliki kinerja tinggi (91,33)

b. Variabel Pembentuk Ekonomi berkelanjutan

1. Daya Dukung Ekonomi

Kutai Barat (Kalimantan Timur) merupakan daerah yang memiliki skor tertinggi pada variabel daya dukung ekonomi (68,10). Kabupaten ini unggul pada indikator sektor basis lestari (100). Artinya sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi Kutai Barat telah memenuhi 2 syarat dikatakan sektor basis yakni $LQ > 1$ dan masuk dalam list taksonomi hijau OJK yang dielaborasi dengan *list NDC*. Sementara capaian daya dukung ekonomi wilayah masih sangat rendah (36,19) Hampir setiap daerah mengalami persoalan daya dukung ekonomi wilayah yang rendah dimana rerata nasional hanya 10,95. Kinerja Kutai Barat disusul Bulungan-Kalimantan Utara (63,48), Berau-Kalimantan Selatan (60,34), Manuju Tengah-Sulawesi Barat (57,77), Karimun-Kepulauan Riau (56,31) dan Tolitoli-Sulawesi Tengah (54,87). Senada dengan Kutai Barat, daerah ini juga memiliki persoalan pada daya dukung ekonomi wilayah yang rendah.

Aceh Selatan-Aceh menjadi daerah yang memiliki skor terendah pada variabel daya dukung ekonomi (1,90), disusul kabupaten Aceh Besar-Aceh (2,54), Bireuen-Aceh (2,81), Aceh Barat-Aceh (4,24), Gayo Lues-Aceh (8,67) dan Mamasa-Sulawesi barat (8,74). Secara nasional, daerah yang memiliki daya dukung ekonomi di atas rerata (50.29 persen) hampir berimbang dengan yang berada di bawah rerata nasional (49,73). Aceh selatan memiliki capaian variabel daya dukung ekonomi rendah karena memiliki persoalan pada sektor basis lestari. Artinya praktik pengelolaan sektor ekonomi (17 sektor penyokong PDRB) belum berdasarkan taksonomi hijau (keberlanjutan). Adapun sektor ekonomi yang dominan di Aceh Selatan adalah sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib. Daerah yang berada pada peringkat terbawah ini memiliki pekerjaan rumah pada indikator daya dukung ekonomi wilayah dan sektor basis lestari yang minim. Artinya, peningkatan ekonomi pada daerah ini belum mengedepankan aspek keberlanjutan.

2. Keuangan Daerah

Indikator untuk menilai kemampuan keuangan daerah adalah kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas/kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari luar (pemerintah pusat).

Bogor (Jawa Barat) menempati peringkat pertama pada variabel kemampuan keuangan daerah (100). Skor tertinggi berikutnya pada variabel kemampuan keuangan daerah adalah Tangerang-Banten (76,13), Bandung-Jawa Barat (57,63), Bengkalis-Riau (53,52), Badung-Bali (44,74), dan Kutai Kertanegara-Kalimantan Timur (40,73).

Jika melihat Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) oleh BPK (2021), dari 416 pemerintah kabupaten, Bogor memiliki IKFD tertinggi dengan nilai 6.209 dan berhasil mencapai level sangat mandiri/tinggi. Artinya terdapat 62,09 persen belanja daerah yang didanai pendapatan yang dihasilkan sendiri (PAD). Capaian ini perlu diapresiasi, mengingat kondisi pandemi yang melanda sejak 2020, banyak daerah yang tidak mampu mempertahankan kondisi perekonomiannya, namun Bogor berhasil meningkatkan kemandirian keuangannya daerahnya.

Kotak 4. Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Bogor

Data tahun 2021 menunjukkan realisasi PAD Kabupaten Bogor mencapai 112,67 persen (3,7 triliun dari target 3,3 triliun). Inovasi yang dilakukan Kabupaten Bogor untuk mendorong kemandirian fiskalnya, diantaranya: penghapusan biaya administrasi, penghapusan denda dan menerapkan diskon pajak. Selain itu Pemda Bogor juga membuat aplikasi/pelayanan PBB *online*, BPHTB *online* dan antrian *online* untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak¹⁶. Sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah, Bapenda juga berperan sebagai sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Implikasinya segala bentuk proses pengelolaan pajak daerah diharuskan berbasis digital.

16 Diskominfo Kab Bogor. 2021. Bappenda Kabupaten Bogor Tingkatkan Layanan Dengan Inovasi Berbasis Online. Diakses dalam <https://bogorkab.go.id/post/detail/bappenda-kabupaten-bogor-tingkatkan-layanan-dengan-inovasi-berbasis-online>.

Kemandirian fiskal daerah terendah adalah Boalemo (Gorontalo) disusul Mamasa (Sulawesi Barat), Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Dharmasraya (Sumatera Barat).

Adapun capaian IKFD kabupaten Boalemo adalah 0,353 dengan kategori sangat rendah (belum memiliki kemampuan fiskal yang baik). Dalam rangka mengatasi masalah ini, adapun strategi yang dilakukan Pemda Boalemo untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yakni: optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dari sumber yang ada, identifikasi pemungutan PBB, dan penyempurnaan serta penggalan jenis pajak dan retribusi berdasarkan kewenangan Pemda (RKPD, 2021)¹⁷.

3. Ekosistem Investasi

Ekosistem investasi memiliki peran dalam mendorong daya saing daerah (penyerapan tenaga kerja). Semakin tinggi pertumbuhan investasi di daerah maka akan meningkatkan sumber-sumber ekonomi dan mereduksi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Tercatat realisasi investasi tahun 2021 mencapai Rp. 901.02 triliun. Realisasi ini tercapai 100,1 persen dari target investasi pada tahun sebelumnya yakni Rp. 900 triliun¹⁸. Adapun jumlah lapangan kerja baru yang terserap dari realisasi investasi tersebut sebesar 1.207.893 orang TKI. Dari sisi kontribusi investasi, data BKPM 2021 menunjukkan sebagian besar masih tersebar di Pulau Jawa (52,8 persen) dan di luar Pulau Jawa (47,2 persen). Pembangunan infrastruktur yang masif turut menyumbang tingginya kontribusi investasi di luar Pulau Jawa. Daerah-daerah yang memiliki peringkat teratas ekosistem investasi adalah Badung-Bali (100), Bandung-Jawa Barat (100), Trenggalek-Jawa Timur (100), Gianyar-Bali (100), Klungkung-Bali (100), Jembarana-Bali (100), dan Tana Tidung-Kalimantan Utara (100).

17 RKPD Kab Boalemo. 2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 Kabupaten Boalemo.

18 BKPM. 2022. Realisasi Investasi 2021 Lampau Target, Kementerian Investasi/BKPM Optimis Kejar Target 1.200 Triliun Tahun ini. Diakses dalam <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/read->

Kotak 5. Inovasi Investasi Badung

Badung menjadi salah satu kabupaten dengan capaian realisasi investasi tinggi dengan kinerja DPMPTSP terbaik di tingkat nasional. Terdapat beberapa kebijakan dan kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah untuk peningkatan realisasi investasi, di antaranya:

1. Menyediakan regulasi terkait penyelenggaraan penanaman modal (Perda Kab. Badung No 3/2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal).
2. Membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP) agar pelaku usaha mudah mendapatkan pelayanan, tidak hanya perizinan (*one stop service* di MPP).
3. Kabupaten Badung telah memiliki RDTR digital di empat (empat) kecamatan, hanya 2 kecamatan yang belum memiliki RDTR. RDTR merupakan pintu awal untuk berinvestasi, ketentuan pada RDTR wajib diikuti para investor (tempat dan jenis investasi di sesuaikan berdasar RDTR).
4. Telah menerapkan layanan perizinan online disamping OSS RBA. (aplikasi Laperon)
5. Aplikasi Jelita (Jendela Investasi Kita) sebagai media informasi terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Badung. Aplikasi ini juga dijadikan sebagai wadah kolaborasi penanaman modal besar dan menengah dengan tujuan saling support, pendampingan dan menggandeng UMK.
6. Pemberian layanan prioritas dan khusus bagi investor di atas 10 miliar rupiah.

Adapun beberapa sektor yang paling diminati investor di Badung adalah sektor pariwisata, perdagangan, konstruksi, telekomunikasi. Sedangkan sektor yang menjadi andalan di Kabupaten Badung adalah pariwisata, UMKM dan pertanian. Selain itu Pemda juga memfasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha menengah, usaha besar dengan usaha mikro dan kecil. Hal ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Bupati NOMOR 70/044/HK/2021 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Panitia Penyelenggara, Penunjukan Narasumber dan Peserta Forum Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah.

Kabupaten yang berada pada peringkat terbawah (skor 0 atau mengalami pertumbuhan investasi negatif) adalah Aceh Selatan (Aceh), Aceh Besar (Aceh), Mandailing Natal (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Langkat (Sumatera Utara), Kampar (Riau), dan Lampung Barat (Lampung).

Beberapa permasalahan investasi yang dikeluhkan investor yakni infrastruktur belum memadai (aksesibilitas listrik yang masih sangat tergantung terhadap Sumatera Utara dan pelabuhan laut yang belum dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai). Selain itu kualitas sumberdaya manusia (karakter penduduk) yang belum memadai.

4. Tenaga Kerja

Input tenaga kerja dibutuhkan sebagai salah satu faktor produksi dalam aktivitas perekonomian. *World Bank* menyebutkan bahwa kinerja ketenagakerjaan Indonesia merupakan salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Untuk mempertahankan hal itu, Pemda memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan menjadi mediator jika terjadi permasalahan antara pelaku usaha dan tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas tinggi merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, yang memberi stimulasi pada pertumbuhan ekonomi.

Daerah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas-Kepulauan Riau dengan skor 100 (rerata nasional 88.04), disusul Konawe Kepulauan-Sulawesi Selatan (99,09), Bima-NTB (99,00), Bangli-Bali (98,28), Gayo Lues-Aceh (98,16), dan Kepahiang-Bengkulu (97,99). Capaian ini perlu dijaga dan dipertahankan, mengingat tidak semua daerah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Koordinasi multi pemangku kepentingan menjadi kunci agar penyerapan tenaga kerja mampu berjalan maksimal.

Kotak 6. Tenaga Kerja di Kepulauan Anambas

Capaian nilai tenaga kerja di Kepulauan Anambas cukup memuaskan dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya. Di Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pengangguran terbuka Kepulauan Anambas merupakan yang terendah mencapai 1,27 persen. Adapun persentase bekerja terhadap jumlah tenaga kerja mencapai 98,73 dan merupakan salah satu capaian tertinggi di Pulau Sumatera. Untuk perlindungan terhadap tenaga kerja, Kepulauan Anambas membuat Perbub No 42/2019 tentang Pelindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kabupaten dengan capaian terendah pada variabel ketenagakerjaan adalah Bogor-Jawa Barat (64,56), disusul Kuningan-Jawa Barat (66,31), Purwakarta-Jawa Barat (69,48), dan Serang-Banten (69,87), dimana capaian tersebut jauh tertinggal di bawah rerata nasional (88,04). Capaian persentase bekerja terhadap jumlah tenaga kerja mencapai 67,83 dan merupakan capaian empat terendah di Pulau Sumatera. Dari sisi tingkat pengangguran, capaian Asahan (6,39 persen) berada di atas rerata tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara (6,33 persen). Pertumbuhan tenaga kerja yang rendah menjadi indikasi kegagalan pemerintah dalam menata sistem ketenagakerjaan, memantau kualitas/mutu pendidikan dan lemah dalam perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas.

5. Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian suatu daerah. Infrastruktur dapat menciptakan *multiplier effect*, melalui peningkatan mobilitas faktor produksi, aktivitas perdagangan yang tinggi hingga mobilitas masyarakat. Infrastruktur ekonomi yang dimaksud terdiri dari kondisi jalan baik, elektrifikasi dan ketersediaan internet. Infrastruktur yang memadai akan mendorong minat investasi asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di daerah yang memiliki fasilitas infrastruktur lengkap. Teori Dorongan Kuat (*big push theory*) menyatakan bahwa perlu dibangun infrastruktur lebih dulu, berikutnya yang lain berkembang kemudian menetes, (*trickle down effect*). Selanjutnya, teori ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi hambatan daya saing dan untuk mendorong ekonomi ke arah kemajuan diperlukan suatu “dorongan kuat” dalam menciptakan infrastruktur di daerah.

Badung (Bali) merupakan daerah yang memiliki skor tertinggi pada variabel infrastruktur ekonomi (98,17). Capaian ini berada di atas rerata nasional (66,50). Badung unggul pada semua indikator pembentuk infrastruktur; persentase jalan baik (98,54), rasio elektrifikasi (100) dan ketersediaan internet (95,96). Capaian Badung disusul Belitung-Bangka Belitung (93,33), Tabanan-Bali

(91,54), Bogor-Jawa Barat (90,37), Jombang-Jawa Timur (88,61) dan Dharmasraya-Sumatera Barat (87,93).

Badung memiliki akses jalan yang memadai (kualitas jalan mantap 100 persen) dengan panjang jalan 640 km. Badung memiliki 60 persen jalan yang sudah berstandar internasional. Adapun program prioritas untuk pembangunan jalan adalah beautifikasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan trotoar. Hanya saja program ini mengalami kendala, yakni tidak bisa didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Biaya pemeliharaan jalan mencapai 10 miliar rupiah dengan 6 tim pengaspalan, 6 tim pemeliharaan bahu jalan dan 1 tim pengamat (total keseluruhan personil mencapai 150 orang). Selain itu, Badung juga memiliki aplikasi(media sosial) berupa pengaduan jalan rusak oleh masyarakat. Pengaduan tersebut langsung direspon oleh pemda dan hitungan 24 jam jalan rusak ringan sudah selesai diperbaiki.

Selain itu, Badung telah memiliki rasio elektrifikasi 100 persen. Artinya, seluruh desa di Kabupaten badung telah teraliri listrik. Hal ini sejalan dengan kebijakan bupati mewujudkan “Badung Terang” dimana tidak hanya desa yang teraliri listrik, tetapi juga penerangan jalan umum baik nasional, provinsi dan kabupaten. Bupati Badung juga melengkapi fasilitas umum/tempat strategis seperti Pura, Beji, Gang-gang dan fasilitas umum lainnya dengan lampu penerangan strategis.

Badung telah menyediakan fasilitas internet gratis di pusat-pusat pemerintahan yang dapat diakses oleh pegawai maupun masyarakat. Badung juga menyediakan internet gratis di fasilitas umum, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, sekolah dan *bale* belajar. Implikasinya masyarakat umum mampu menikmati layanan internet gratis di pusat-pusat layanan umum. Selain itu, untuk mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Badung juga telah menyediakan fasilitas internet gratis di beberapa objek wisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Badung.

Sementara itu, masih terdapat 46,44 persen daerah yang memiliki capaian nilai variabel infrastruktur di bawah rerata nasional. Murung Raya (Kalimantan Tengah) merupakan daerah yang memiliki skor terendah pada variabel infrastruktur ekonomi dengan capaian skor 20,47. Skor terendah variabel infrastruktur berikutnya adalah Sintang-Kalimantan Barat (22,02), Sanggau-Kalimantan Barat (26,12), Malinau-Kalimantan Utara (37,00), dan Mamasa-Sulawesi Barat (37,26).

Murung Raya bermasalah dalam indikator kondisi jalan baik, rasio elektrifikasi dan ketersediaan internet. Data BPS (2021) menunjukkan persentase kualitas jalan baik di Murung Raya hanya mencapai 12,07 persen. Sedangkan rasio elektrifikasi sebesar 90,12 persen (terendah di Kalimantan Tengah), masih berada jauh di bawah rerata nasional 99,45 (2021). Untuk memitigasi minimnya ketersediaan infrastruktur ekonomi, pemerintah Murung Raya bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Adapun salah satu program yang dibuat atas kerjasama ini adalah program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) baru rumah tangga yang belum memiliki KWH meter (sumbangan listrik).

Terkait ketersediaan internet, persoalan topografi kewilayahan turut menyebabkan penggunaan internet yang belum menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Temuan di Ngada menunjukkan bahwa capaian ketersediaan data internet hanya menyentuh angka 23 persen sebab terdapat tantangan topografi wilayah sehingga pemerintah kesulitan melakukan pemasangan *transmitter*. Dalam perspektif *provider*, kendala ini tentu menimbulkan biaya yang memberatkan sehingga sejauh ini Pemda hanya melakukan prioritas pemasangan ke daerah yang memiliki potensi dan prospek wisata.

4.3 Pilar Inklusi Sosial

a. Pengantar

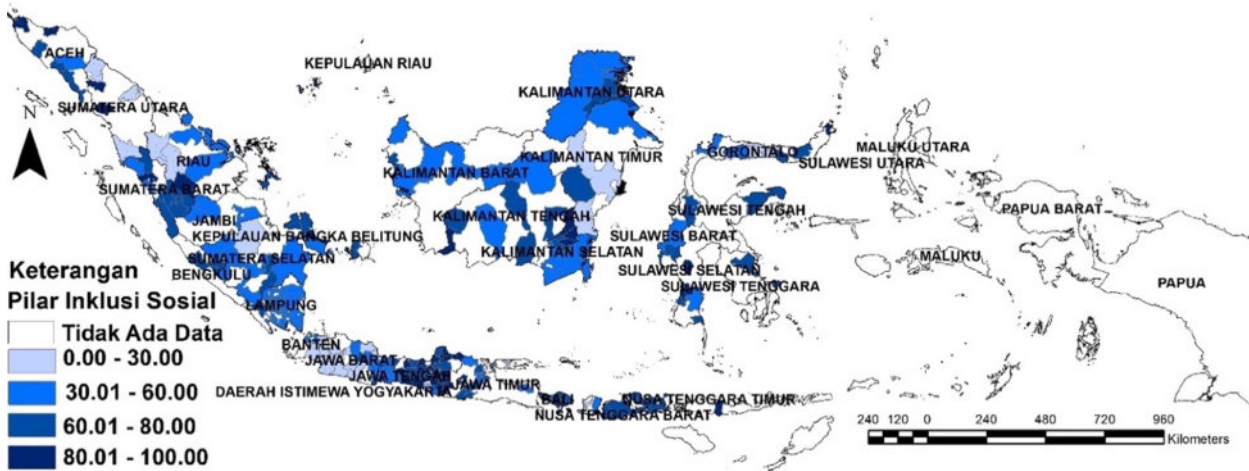
Secara umum, studi ini memperlihatkan skor pilar inklusi sosial yang bervariasi. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat lima indikator berkinerja sedang: Infrastruktur Pendidikan

(Sekolah Dasar), Rerata Lama Sekolah, Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, dan Indeks Gini. Selain itu, terdapat pula satu indikator berkinerja rendah, yakni indikator Ketersediaan Fasilitas Kesehatan. Indikator yang menunjukkan kinerja tinggi adalah Pembangunan Gender, Tingkat Kriminalitas, Ketersediaan Sanitasi Layak, dan Akses Terhadap Air Minum Layak. Dengan demikian, capaian ini menunjukkan bahwa penguatan pilar inklusi sosial masih menghadapi beragam persoalan struktural. Capaian rerata setiap indikator pada pilar inklusi sosial dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Nilai Rerata Indikator Pilar Inklusi Sosial

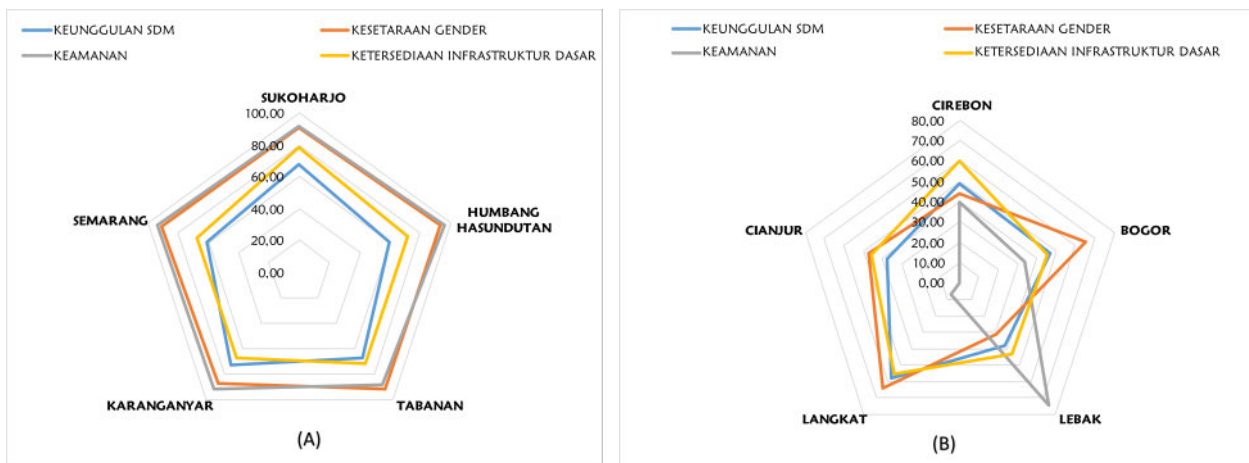
No	Indikator	Nilai Rerata
1	Rerata Lama Sekolah	41,52
2	Harapan Hidup	54,03
3	Prevalensi Stunting	54,57
4	Indeks Gini	56,59
5	Pembangunan Gender	68,16
6	Tingkat Kriminalitas	81,17
7	Infrastruktur Pendidikan (Sekolah Dasar)	54,78
8	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	24,83
9	Ketersediaan Sanitasi Layak	68,85
10	Akses Terhadap Air Minum Layak	80,64

Sukoharjo (Jawa Tengah) menempati peringkat pertama pilar inklusi sosial dengan skor 82,10. Selain itu, terdapat kabupaten Humbang Hasundutan-Sumatera Utara (80,05), Tabanan-Bali (79,59), Karanganyar-Jawa Tengah (79,52), Semarang-Jawa Tengah (78,46), Purworejo-Jawa Tengah (77,33), Badung-Bali (77,32), Aceh Besar-Aceh (76,77), Gianyar-Bali (76,55), dan Klaten-Jawa Tengah (75,86) yang berada pada posisi *top ten* di pilar ini. Daerah yang memiliki skor pilar inklusi sosial tinggi umumnya memiliki skor IDSDB berada di atas rerata nasional. Hanya saja daerah-daerah ini memiliki persoalan dalam pilar ekonomi dan tata kelola berkelanjutan. Capaian kinerja pilar sosial dalam perspektif kewilayahan dapat dilihat pada Gambar 4.20. Warna peta kabupaten yang semakin pekat (biru tua) menunjukkan bahwa nilai pilar inklusi sosial di daerah tersebut semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.



Gambar 4.20 Kinerja Pilar Inklusi Sosial

Pada pilar inklusi sosial terdapat perbedaan signifikan antara wilayah *top five* dan *bottom five*. Pada wilayah *top five*, terdapat kesamaan pola keunggulan antar variabel di pilar inklusi sosial, dimana skor variabel keunggulan SDM dan infrastruktur dasar berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Capaian yang tinggi dapat dilihat pada variabel kesetaraan gender dan keamanan. Hal ini menggambarkan bahwa daerah dengan daya saing pilar inklusi sosial yang baik menunjukkan inklusivitas dan kondusivitas sosial yang baik pula. Sebaliknya, pada wilayah *bottom five*, tidak terlihat adanya keteraturan pola, artinya kinerja tinggi pada satu variabel gugur oleh persoalan yang terjadi di variabel yang lain. Misalnya, capaian tinggi variabel kondusivitas keamanan di Lebak tidak diikuti oleh capaian yang



Gambar 4.21 Spider Web Top Five (A) & Bottom Five (B) Pilar Inklusi Sosial

baik pada variabel kesetaraan gender, keunggulan SDM, dan ketersediaan infrastruktur dasar. Contoh lain capaian rendah variabel konduktivitas keamanan di Langkat bertolak belakang pada tingginya kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur dasar, maupun kesetaraan gender di daerah tersebut. Dua daerah ini menunjukkan anomali yang sejatinya jika dituntaskan akan meningkatkan capaian pilar inklusi sosial di masa mendatang. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *top five & bottom five* pada pilar inklusi sosial dapat dilihat pada Gambar 4.21.

Sukoharjo merupakan kabupaten dengan capaian nilai terbaik dalam pilar inklusi sosial (82.09).

Keempat variabel inklusi sosial di Sukoharjo menunjukkan nilai yang tinggi yakni keunggulan SDM (67,57), kesetaraan gender (90,78), keamanan (91,54), dan infrastruktur dasar (78,47). Pemerintah Sukoharjo telah menerbitkan regulasi Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, Perbup Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas; Perbup Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo; Perbup Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sanggar Inklusi, SK Bupati Sukoharjo Nomor 461/505/2020 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Sukoharjo, Perbup Nomor 24 Tahun 2022 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan; serta Perbup Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi.

Kotak 7. Inovasi Desa Inklusi Sukoharjo

Sukoharjo memiliki inovasi yang unik dimana terdapat kelurahan/desa inklusi dan sanggar inklusi sebagai program pemberdayaan sosial. Saat ini terdapat 12 sanggar inklusi di 12 kecamatan dengan 5 Pokja (pendidikan, kesehatan (terapis, penambahan makanan tambahan buat anak berkebutuhan khusus). Tujuannya yakni untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi disabilitas. Terdapat 700 anak berkebutuhan khusus di sanggar inklusi se-Kab Sukoharjo. Bupati mengalokasikan penganggaran untuk pembangunan sanggar inklusi tersebut. Selain itu, terdapat program SHG (*Self Help Group*), yang ada di 70 desa dari 167 desa. Tujuannya untuk pemberdayaan bagi kaum rentan dan disabilitas. Misalnya, pelatihan menjahit dan membuat batik *ciprat*.

Sukoharjo berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang mengintegrasikan isu-isu gender dalam pembangunan daerah. Sukoharjo mendorong pembangunan yang inklusif di semua sektor dan lapisan, dimulai dari pembangunan tingkat desa. Pembangunan yang inklusif dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis dalam mewujudkan keadilan gender melalui pendekatan partisipatif sebagai upaya untuk memperluas dan mempercepat pembangunan yang inklusif. Selain itu, Sukoharjo menerapkan kebijakan wajib sekolah 12 tahun, memperkecil angka putus sekolah, meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas yang bermutu; meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan.

Cianjur (Jawa Barat) berada di peringkat terendah (32,59). Tiga variabel menunjukkan kinerja yang rendah, yaitu keunggulan SDM (37,45), kesetaraan gender (46,98), dan keamanan. Rendahnya pilar inklusi sosial, antara lain disebabkan rendahnya tingkat rerata lama sekolah (RLS), kriminalitas dan stunting yang tinggi, serta persoalan keamanan. Rendahnya RLS disebabkan banyaknya anak usia sekolah yang lebih memilih masuk ke pondok pesantren dibandingkan masuk ke sekolah formal. Isu lain yang perlu diperhatikan secara serius di wilayah Cianjur adalah persoalan terkait keamanan yang perlu dibenahi. Sebab, persoalan keamanan acapkali menjadi salah satu determinan yang menentukan keputusan investasi di suatu daerah.

b. Variabel Pembentuk Inklusi Sosial

1. Keunggulan Sumber Daya Manusia

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi di daerah. Keunggulan SDM yang akan menentukan siapa yang mampu menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dalam persaingan. Daerah mesti memiliki SDM handal dan berkualitas, profesional dan memiliki daya saing yang kuat. WEF (2019) mengemukakan capaian daya

saing Indonesia cukup rendah karena memiliki persoalan kualitas SDM yang rendah pula. Peningkatan keunggulan SDM berimbas pada peningkatan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, daerah mesti berusaha memenuhi ketentuan Undang-Undang terkait pengalokasian anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD. Komitmen akan pembiayaan pendidikan yang kuat menjadi salah satu modal dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Badung (Badung) memiliki skor tertinggi pada variabel keunggulan SDM (80,11). Kabupaten ini unggul dalam indikator pendidikan: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yakni 10,62 tahun dan kesehatan: Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 75,18 tahun yang merupakan AHH tertinggi di Provinsi Bali, serta tingkat stunting yang rendah. Rendahnya stunting di Kabupaten Badung tidak terlepas dari adanya daya dukung kebijakan yang konkret. Beberapa aturan yang dijalankan untuk mencapai keunggulan tersebut yakni adanya Analisis situasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 1836/0413/HK/2022 tentang Likus Stunting tahun 2023, Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui Gerakan Badung Sehat pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (Garbasari).

Kotak 8. Program Garba Sari Badung

Program Garba Sari merupakan sebuah gerakan di Badung yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan gerakan penurunan angka stunting. Lapisan masyarakat diantaranya perangkat desa yang berkomitmen sebagai promotor melaksanakan dan mendukung dengan menggunakan dana desa, serta organisasi perangkat daerah pemerintah. Seluruh elemen tersebut saling bersinergi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting untuk mewujudkan generasi berkualitas. Badung turut menjadi contoh secara nasional dalam hal percepatan penurunan stunting. Kabupaten ini memperoleh nilai presentase stunting (8 persen), dimana nilai tersebut jauh dibawah rata-rata nasional (24 persen). Stunting merupakan problem bangsa sangat krusial karena akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara kabupaten dengan skor terendah pada variabel keunggulan SDM adalah Gorontalo Utara (27.02). RLS di Gorontalo Utara sebesar 7,15 tahun, merupakan terendah kedua dari lima kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Rendahnya skor keunggulan SDM, menyebabkan tingginya gini ratio di daerah ini (0,41). Apabila sumber daya manusianya berkualitas maka secara otomatis meningkatkan kualitas daerah, sehingga perlu dukungan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah menuju daerah yang mampu berdaya saing

Kotak 9. Persoalan Metodologis Rerata Lama Sekolah

Persoalan rendahnya angka RLS disejumlah daerah disebabkan oleh faktor metodologis terkait penyelenggaraan pendidikan non formal. Temuan di Bangkalan, Trenggalek, dan Cianjur menunjukkan bahwa sebagian besar anak berusia sekolah di wilayah tersebut menempuh pendidikan di Pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal. Praktik baiknya, kini Pemerintah Daerah telah mendorong Pondok Pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal untuk bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta membentuk Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019.

2. Kesetaraan Gender

Pentingnya pembangunan berbasis kesetaraan gender menjadi keseriusan pemerintah dalam membangun inklusivitas sosial sebagai bagian dari daya saing daerah yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada kualitas hidup manusia, serta meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas. Sedangkan dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menggunakan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda dalam pembangunan di Indonesia. Kesetaraan gender juga menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang harus terwujud pada 2030. Hal ini sejalan dengan tujuan kelima dari SDGs yakni mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender punya peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Maka dari itu, penting melakukan pengarusutamaan gender dalam agenda kebijakan, program, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun daerah.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat (semua masyarakat) untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka¹⁹. Kondisi ideal dalam pembangunan adalah tercapainya kesetaraan gender dalam mengakses pembangunan, serta merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. Guna melihat keberhasilan pemenuhan kesetaraan gender, kajian ini menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai alat ukur dengan membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki di suatu daerah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi jalan untuk mengintegrasikan gender dalam melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

Ogan Ilir (Sumatera Selatan) menempati skor tertinggi (99,09) pada variabel kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan gender kecil di daerah tersebut dimana perempuan memiliki capaian IPM yang hampir setara dengan laki-laki. Kabupaten Ogan Ilir telah memiliki Perbup No. 017 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Keberadaan perda ini akhirnya memberikan akses kesempatan kepada perempuan untuk terlibat lebih mendalam pada pembangunan daerah. Dengan demikian, IPM perempuan sendiri akan meningkat dan pada akhirnya mengurangi kesenjangan dengan capaian IPM laki-laki di Ogan Ilir.

Capaian kesetaraan gender terendah dalam indeks ini terdapat di Paser-Kalimantan Timur (71,19). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan gender antara laki-laki dan

¹⁹ Kementerian PPN/Bappenas. Sustainable Development Goals.

perempuan di Paser sendiri masih cukup tinggi. Capaian IPG di Paser menempati peringkat paling bawah se-Kalimantan Timur dalam pembangunan gender. Keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Paser nampaknya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian IPG di daerah tersebut. Masalah yang terjadi di Paser antara lain partisipasi perempuan dalam pembangunan lebih rendah ketimbang laki-laki; ketimpangan antara pengeluaran laki-laki dan pengeluaran perempuan; serta persentase sumbangan pendapatan perempuan yang masih rendah.

3. Kondusivitas Keamanan

Kunci utama pelaksanaan berbagai program pembangunan adalah terciptanya keamanan yang kondusif. Untuk menggerakkan iklim investasi dibutuhkan pula kondisi daerah yang aman dan kondusif. Kriminalitas dan konflik sosial mengganggu aktivitas usaha yang berujung pada penurunan produktivitas. Oleh karena itu, stabilitas keamanan suatu daerah diperlukan sebagai prasyarat bagi masuknya penanaman modal atau investasi.

Hasil pengukuran pada variabel ini menunjukkan bahwa Pangkajene dan Kepulauan (Sulawesi Selatan) merupakan daerah dengan kondusivitas keamanan terbaik (100). Capaian tersebut diikuti oleh Konawe Kepulauan-Sulawesi Tenggara (99,94), Lingga-Kepulauan Riau (99,74), Kepulauan Anambas-Kepulauan Riau (99,61), Sukamara-Kalimantan Tengah (99,61), Tana Tidung-Kalimantan Utara (99,29), Konawe Utara-Sulawesi Tenggara (99,23), Murung Raya-Kalimantan Tengah (99,16), Pangandaran-Jawa Barat (97,61), dan Malinau-Kalimantan Utara (97,22). Data situasi Kamtibmas Polres Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 menunjukkan jumlah tindak pidana yang terjadi pada tahun 2021 menurun dibanding pada tahun 2020, pada tahun 2020 terjadi tindak pidana sebanyak 300 kasus sedangkan pada tahun 2021 terjadi 223 kasus, menurun 77 kasus tindak pidana. Kasus yang dominan yang terjadi di daerah tersebut merupakan konvensional yang sering terjadi

di masyarakat yaitu terkait masalah kehidupan masyarakat (contoh: perkelahian, pemerkosaan) bukan tindakan kriminal serius (begal, perampokan, dll).

Di sisi lain, Cianjur (Jawa Barat) merupakan daerah dengan capaian nilai variabel terendah (0,00). Capaian tersebut disusul oleh Sleman-Yogyakarta (2,45), Langkat-Sumatera Utara (7,10), Kampar-Riau (11,17), dan Bantul-Yogyakarta (14,46) sebagai daerah dengan nilai kondusivitas keamanan rendah. Rendahnya capaian kondusivitas keamanan di Sleman disebabkan oleh maraknya kriminalitas seperti *klitih* yang meresahkan masyarakat. Selain itu, capaian rendah di Cianjur disebabkan oleh maraknya premanisme dan pungutan liar di daerah tersebut. Bahkan, premanisme tersebut terjadi di sekitar kawasan wisata sehingga Polres Cianjur mengambil langkah responsif dengan menerjunkan tim untuk memburu preman yang melakukan pungutan liar dan meresahkan masyarakat di kawasan terminal, pasar, hingga destinasi wisata.

4. Ketersediaan Infrastruktur Sosial

Peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan tersebut meliputi aspek kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air minum layak, dimana keempat indikator ini harus menjadi perhatian pembangunan. Sarana dan prasarana di sektor kesehatan juga membutuhkan perhatian pemerintah dalam upaya memperkuat daya saing di daerah. Kasus kematian ibu dan bayi bisa terminimalisasi dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung secara kapasitas dan kapabilitas.

Rembang (Jawa Tengah) mencatatkan capaian sangat tinggi (82,20) terkait penyediaan infrastruktur dasar. Catatan tersebut diikuti oleh Sukoharjo-Jawa Tengah (78,47), Pati-Jawa Tengah (76,34), Biruen-Aceh (76,16), Balangan-Kalimantan Selatan (75,68), Aceh Barat-Aceh (75,08), Purworejo-Jawa Tengah (74,33), Hulu Sungai Utara-Kalimantan Selatan (74,26), Minahasa

Utara-Sulawesi Utara (74,26), dan Klaten-Jawa Tengah (74,07). Kemampuan Rembang dalam mengelola CSR dari sejumlah perusahaan memberikan dampak positif pada penyediaan infrastruktur dasar seperti sekolah dasar, sanitasi, maupun air bersih. Selain itu, penyediaan air bersih di Sukoharjo juga berjalan dengan baik dimana krisis air bersih di Desa Tawang, Kecamatan Weru, Sukoharjo, mulai teratasi berkat optimalnya pengoperasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum.

Daerah dengan capaian variabel ketersediaan infrastruktur dasar paling minim adalah Kepulauan Anambas-Kepulauan Riau (20,57). Capaian tersebut diikuti oleh Ogan Komering Ulu Selatan-Sumatera Selatan (33,98), Empat Lawang-Sumatera Selatan (36,18), Pasaman-Sumatera Barat (37,24), Tulang Bawang Barat-Lampung (37,77), Mamasa-Sulawesi Selatan (37,84), Garut-Jawa Barat (38,93), dan Solok-Sumatera Barat (38,95). Keberadaan sarana pendidikan di Kepulauan Anambas amatlah memprihatinkan, dimana persoalan tersebut berupa minimnya ruang belajar dan perlunya renovasi sejumlah gedung sekolah yang tersebar di berbagai pulau (misalnya minimnya ruang belajar siswa di SD Desa Lingai besar). Selain itu, Kepulauan Anambas terdiri atas ratusan pulau dengan jumlah sekolah yang terbatas. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi anak-anak di Anambas yang harus menerjang ombak untuk memperoleh ilmu di sekolah.

4.4 Pilar Tata kelola Berkelanjutan

a. Temuan Umum Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Pilar tata kelola memuat lima variabel yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta berkelanjutan yang terbagi dalam sejumlah indikator. Secara umum, studi ini memperlihatkan skor pilar Tata Kelola Berkelanjutan dengan kinerja yang optimal pada setiap indikator. Bahkan, sebagian besar daerah yang memiliki indeks di atas rerata nasional memiliki nilai tata kelola berkelanjutan. Capaian rerata setiap indikator pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Rerata kinerja indikator pada pilar Tata Kelola Berkelanjutan menunjukkan tingkat kinerja yang bervariasi. Skor rerata implementasi TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan TAKE di Indonesia masih sangat sedikit.

Tabel 4. 4 Nilai Rerata Indikator Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

No	Indikator	Nilai Rerata
1	Partisipasi Masyarakat	92,08
2	Kewajaran Informasi Keuangan	94,35
3	Pengendalian dan Pencegahan Korupsi	71,96
4	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	57,26
5	Integritas	54,10
6	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	57,26
7	Inovasi Daerah	49,03
8	Kebijakan Berkelanjutan	62,82
9	Implementasi TAKE	7,65
10	Kerjasama Antar Daerah	65,03

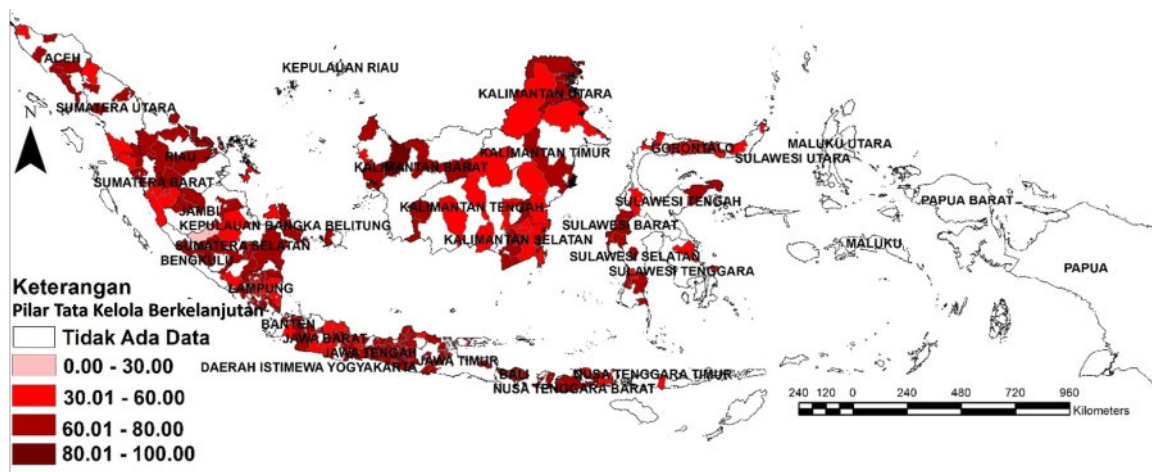
Rerata indikator dengan capaian tertinggi adalah Opini BPK, Partisipasi Masyarakat, dan Pencegahan Korupsi. Di sisi lain, indikator dengan capaian terendah dalam pilar ini adalah Implementasi TAKE, Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Integritas.

Pemeringkatan pada pilar tata kelola berkelanjutan menempatkan Sanggau (Kalimantan Barat) sebagai peringkat pertama (81,00). Selanjutnya, peringkat kedua hingga sepuluh ditempati oleh Badung-Bali (80,57), Klungkung-Bali (79,92), Sleman-Yogyakarta (79,04), Cilacap-Jawa Tengah (78,89), Bangka-Bangka Belitung (78,00), Boyolali-Jawa Tengah (77,63), Trenggalek-Jawa Timur (77,25), Bantul-Yogyakarta (76,81), dan Hulu Sungai Selatan-Kalimantan Selatan (76,49). Capaian tata kelola di Sanggau menunjukkan nilai yang baik pada variabel partisipasi (100) dan akuntabilitas (82.87). Sanggau memperoleh Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik yang mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi demi mewujudkan *good governance*. Sanggau memiliki visi dan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

berkualitas menuju kabupaten yang sejahtera dan berdaya saing. Visi dan misi yang disusun dengan sistemis dan komprehensif pada akhirnya membawa capaian kabupaten tersebut menjadi daerah dengan tata kelola berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Sanggau juga mendorong adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada sisi lain, Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan) berada pada peringkat terendah untuk pilar tata kelola berkelanjutan (33,08). Kinerja tersebut disusul oleh Ngada-NTT (42,21), Pesisir Selatan-Sumatera Barat (45,61), Bolaang Mongondow-Gorontalo (46,79), Lampung Timur-Lampung (47,36), Mandailing Natal-Sumatera Utara (47,81), Paser-Kalimantan Timur (48,15) Pulang Pisau-Kalimantan Tengah (48,46), Kutai Barat-Kalimantan Timur (48,46), Brebes-Jawa Tengah (49,45), dan Gorontalo Utara-Gorontalo (50,04). Capaian Musi Rawas Utara pada tiga indikator menunjukkan kinerja yang rendah, yaitu akuntabilitas (35.74), transparansi (35.02), efektif dan inklusif (7.30). Rendahnya pilar tata kelola, antara lain disebabkan rendahnya efektif dan inklusif yang tergambarkan melalui inovasi daerah yang minim. Bilamana menilik temuan dari MCP KPK, terlihat bahwa survei penilaian integritas di kabupaten ini berada dalam kategori sangat rentan dimana tingkat kerawanan korupsi dan upaya pencegahan korupsi berdasarkan penilaian para pengguna layanan publik menunjukkan adanya kerentanan pada aspek keberadaan pungutan liar, transparansi layanan, dan kualitas pengelolaan barang dan jasa. Nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Musi Rawas Utara berada pada kategori kurang dengan skor 1,09. Hal ini sejalan dengan temuan tim peneliti dimana tidak semua dinas di kabupaten ini memiliki *website*.

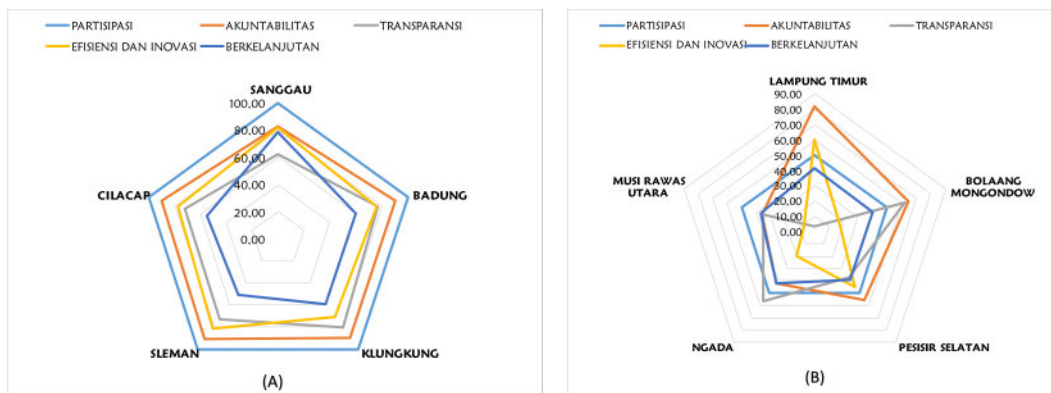
Secara kewilayahan, kinerja pilar tata kelola berkelanjutan menunjukkan pemerataan sebaran dimana capaian kinerja tinggi terdapat pada wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Capaian kinerja pilar tata kelola berkelanjutan dalam perspektif kewilayahan dapat dilihat pada Gambar 4.22. Warna peta kabupaten yang semakin pekat (merah tua) menunjukkan bahwa nilai pilar Tata Kelola Berkelanjutan di daerah tersebut semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.



Gambar 4.22 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Pada wilayah *top five*, terlihat keteraturan pola yang menggambarkan bahwa tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi berada pada level tinggi. Persoalan pada wilayah *top five* adalah capaian yang relatif rendah pada variabel transparansi dan tata kelola berkelanjutan. Capaian rendah pada tata kelola berkelanjutan didominasi oleh minimnya implementasi TAKE di sebagian besar daerah yang menjadi *locus* pengamatan.

Pola yang berbeda terlihat pada wilayah *bottom five* dimana terdapat variasi kinerja antar variabel. Pada kasus Lampung Timur, terlihat bahwa capaian akuntabilitas berada pada angka yang sangat tinggi, namun kontradiktif pada capaian integritas. Selain itu, terdapat pula kabupaten dengan nilai transparansi yang baik namun memiliki persoalan pada variabel efisiensi, yakni Ngada. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *top five* & *bottom five* pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.23.



Gambar 4.23 Spider Webb Top Five (A) & Bottom Five (B) Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

b. Variabel Pembentuk Tata kelola Berkelanjutan

1. Partisipasi

Implikasi lanjut dari partisipasi adalah terwujudnya komitmen daerah dalam mengelola atau menjalankan pemerintahan yang bersifat terbuka dan demokratis. Indikator tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah tingkat partisipasi masyarakat, dimana dalam melaksanakan pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tata kelola berkelanjutan membutuhkan tingkat partisipasi yang tinggi dan deliberatif, sebab pelaksanaan pemerintahan daerah yang inklusif menghendaki adanya proses dan peran serta multipihak yang dominan dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

Sebagian besar daerah telah memiliki *concern* terhadap isu partisipasi daerah. Sebanyak 158 kabupaten dari 184 kabupaten memuat tentang partisipasi dan realisasi anggaran terkait pada dokumen RKPD. Artinya daerah-daerah sudah menyadari pentingnya partisipasi dalam segala aspek pembangunan. Sementara kabupaten kabupaten yang hanya mencantumkan angka partisipasi tanpa realisasi dalam RKPD sebanyak sebanyak 26 kabupaten.

Keberhasilan pembangunan terlihat dari adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam aktivitas perencanaan pembangunan di daerah. Dengan adanya partisipasi tersebut maka keberhasilan pembangunan dapat dirasakan kebermanfaatannya secara luas, tidak hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat. Partisipasi aktif dalam pembangunan akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Skor pada variabel ini bersifat *dummy*, artinya pada cerimanan partisipasi dalam pengukuran indeks ini menunjukkan apakah daerah memiliki komitmen tertulis perihal partisipasi masyarakat atau tidak (skornya 1 untuk memiliki dan 0

untuk tidak memiliki). Pada klaster indeks ini, seluruh daerah mencatatkan isu partisipasi masyarakat dalam dokumen RKPD. Capaian positif pada wilayah *top five* IDSDB dan *top five* pilar tata kelola berkelanjutan tercermin pula dalam komitmen pemerintah dalam menjangkau partisipasi publik. Praktik baik yang dapat dijadikan pelajaran adalah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan di Kabupaten Trenggalek. Teknis pelaksanaan program tersebut sudah diatur dalam Perbup 1/2019 dimana penyelenggaraannya mendahului musyawarah perencanaan pembangunan reguler, nantinya usulan bisa diinput dalam SIPD dan jadi bahan advokasi di perencanaan APBD dan APBDes. Selain itu terdapat pula kegiatan *ideafest* dimana peserta melakukan *submission* proposal dan dikurasi, hasilnya 3 gagasan terbaik menjadi prioritas dalam RKPD di Kabupaten Trenggalek.

Adanya jaminan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi. Temuan yang dilihat di Trenggalek menunjukkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi baik (persentase kehadiran 80 persen sd 90 persen) setelah pemerintah membuka akses seluasnya kepada masyarakat yang ingin terlibat. Fakta yang ditemukan di Kabupaten Sanggau turut menunjukkan adanya capaian positif pada tingkat partisipasi masyarakat, sebab perencanaan dimulai dari bawah, dan anggota dewan (DPRD) turut mengikuti musrenbang pada tahap desa dan kecamatan, selain itu anak-anak dan perempuan dilibatkan dalam musrenbang serta adanya dukungan asistensi dari desa sampai kecamatan oleh Bappelitbangda. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) juga turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, misalnya di Kabupaten Bangkalan.

Keterbukaan pemerintah untuk melibatkan aktor non pemerintah dalam aktivitas perencanaan hingga pembangunan daerah merupakan catatan positif yang patut diapresiasi. Praktik baik yang dapat dijadikan pelajaran adalah adanya kelembagaan multipihak yang mendorong adanya

pelibatan aktor non-pemerintah di Sanggau. Sanggau saat ini sudah punya lembaga multipihak Sabang Merah Berdompu (SMB). Anggota lembaga ini terdiri dari berbagai lembaga mitra dan juga dinas yang bersinergi untuk mendorong pencapaian target pembangunan di Kabupaten Sanggau.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaknai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan pengukuran kinerja instansi pemerintah di daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah demi terwujudnya konsep *good governance*. Hal ini amatlah penting sebab akuntabilitas memiliki prinsip bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang bebas korupsi dan demokratis.

Capaian variabel akuntabilitas tertinggi diperoleh Klungkung-Bali (90,24). Capaian kinerja tersebut disusul oleh Badung-Bali (90,03), Bantul-Yogyakarta (87,77), dan Trenggalek-Jawa Timur (81,93) memiliki skor variabel akuntabilitas yang tinggi. Dalam penilaian terhadap variabel transparansi kabupaten-kabupaten tersebut juga mendapatkan skor tertinggi, hal ini berarti antara akuntabilitas dan transparansi berjalan saling beriringan. Uniknya, tiga daerah dengan akuntabilitas tinggi di atas merupakan *Top Three* IDSDB.

Praktik baik akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dapat ditemukan di Klungkung, dimana daerah ini memiliki sejumlah praktik baik yang mendukung kinerja indikator akuntabilitas. Langkah yang dilakukan antara lain melakukan asistensi/pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan oleh BPKP; melakukan rekonsiliasi laporan per semester dan tahunan; melakukan revidi atas laporan keuangan maupun audit tertentu oleh APIP; dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan

pengawasan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada akhirnya, rangkaian langkah tersebut membawa Klungkung yang pernah berada di Zona Merah dengan nilai rapor 40 melesat ke Zona Hijau dengan nilai 90 lebih dan masuk 20 besar secara nasional.

Mandailing Natal-Sumatera Utara (44,22), Indramayu-Jawa Barat (49,16), dan Ngada-NTT (42,34) menempati skor terendah pada variabel akuntabilitas. Pelajaran berharga bahwa peningkatan daya saing guna menuju pada kemajuan sangat tergantung dari upaya memperbaiki performance kualitas pemerintahan daerahnya. Kasus unik terjadi di Kabupaten Ngada dimana dalam proses perhitungan MCP, terdapat persoalan dimana aparaturnya tidak melakukan pengisian formulir penilaian *self assesment* secara serius dan tepat waktu. Dampaknya, capaian MCP menjadi rendah dan berdampak pada anjloknya nilai pada variabel akuntabilitas ini. Hal ini relatif masuk akal, sebab pada penilaian integritas, nilai yang diperoleh kabupaten ini berada dalam kategori baik.

3. Transparansi

Transparansi sangat penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya mesti bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses oleh semua pihak. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi di daerah dengan menerapkan nilai-nilai integritas. Transparansi merupakan salah satu indikator dalam perwujudan *good governance* sebab memiliki keselarasan dengan tujuan yang hendak dicapai, yakni terlaksananya pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

Boyolali (Jawa Tengah) menempati capaian kinerja tertinggi pada variabel transparansi dengan skor 100. Capaian tersebut disusul oleh Wonogiri-Jawa Tengah (81,78), Klungkung-Bali (80,36), Badung-Bali (76,66), Bantul-Yogyakarta (74,65), dan Lamandau-

Kalimantan Tengah (74,53) merupakan daerah dengan capaian integritas tertinggi 2021 se-Kalimantan Tengah. Tercatat Survei Penilaian Integritas Badung mencapai 98.56 persen dengan artian integritas kabupaten ini terjaga. Capaian tersebut diapresiasi oleh KPK RI dengan memberikan penghargaan peringkat II MCP di tingkat Provinsi Bali dan peringkat 8 untuk tingkat nasional. Rangkaian kebijakan pencegahan korupsi yang dilakukan daerah turut membentuk perilaku ASN yang berintegritas di daerah.

Di sisi lain, Cirebon (Jawa Barat) merupakan daerah dengan capaian transparansi terendah (0,00). Capaian tersebut diikuti oleh Lampung Timur-Lampung (3,10), Kampar-Riau (3,22), Lampung Selatan-Lampung (19,41), dan Karo-Sumatera Utara (26,93). Hasil Survei Penilaian Integritas KPK juga menunjukkan bahwa Berau dan Paser mendapatkan nilai yang terendah yakni (68,99) dan (67,55) yang artinya tingkat integritas sangat rentan. Dengan demikian, guna mencapai daya saing maka pemerintah daerah diperlukan adanya implementasi sistem pemerintahan yang transparan dengan memberikan efek kejut dan efek jera bagi ASN daerah agar tercipta kondusivitas dan integritas yang baik dalam melakukan pelayanan publik di daerah.

4. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan dalam penguatan daya saing daerah berkelanjutan di daerah. Efektivitas acapkali diasosiasikan dengan efisiensi sebab terdapat korelasi antara dua konsep di atas. Efisiensi sendiri merupakan komparasi antaran input dan output dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Pelayanan akan efisien bilamana birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah melalui inovasi dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

Inovasi berbasis prinsip keberlanjutan harus menjadi prioritas daerah, terutama bagi daerah yang mengandalkan Sumber Daya Alam sebagai fondasi perekonomian daerah saat ini dan di masa depan. Mewujudkan inovasi-inovasi yang andal dengan menciptakan ide kreatif dan menghasilkan produk-produk yang mendunia merupakan kunci daya saing. Dengan adanya otonomi daerah juga memberikan ruang yang luas untuk berinovasi dan berkreativitas membangun daerah. Adapun untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, kreatif dan inovatif.

Daerah dengan kinerja efektivitas tertinggi adalah Bangka-Bangka Belitung (97,49). Capaian tersebut disusul Lampung Barat-Lampung (90,97), Tegal-Jawa Timur (90,73), Musi Rawas-Sumatera Selatan (87,68), dan Tanggamus-Lampung (86,96). Lampung Barat menjadi salah satu daerah dengan nilai inovasi tertinggi indeks inovasi daerah tahun 2021 dari Kemendagri. Terakhir, Kabupaten Tegal yang masuk nominator penjangkaran inovasi masyarakat tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Di sisi lain, Musi Rawas Utara (Sulawesi Selatan) menempati capaian terendah pada variabel ini dengan skor 7,29. Capaian tersebut disusul Konawe Utara-Sulawesi Tenggara (9,21), Minahasa Utara-Sulawesi Utara (10,88), Aceh Besar-Aceh (13,57), dan Tolitoli-Sulawesi Tengah (15,81). Kabupaten dengan nilai terendah dipengaruhi berbagai faktor diantaranya SDM yang kurang inovatif, kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. Untuk mengatasi persoalan pelaporan inovasi, Pemkab Ngada terus melakukan terus memberikan arahan kepada OPD dan ASN agar mampu menciptakan inovasi dan memahami secara baik tentang Inovasi Daerah. Kedepannya, pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi menuju kesejahteraan masyarakat.

5. Berkelanjutan

Definisi Berkelanjutan dalam variabel ini mengarah pada indikator kebijakan Berkelanjutan, implementasi Transfer

Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Daerah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan mesti menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan. Peran pemerintah sangat penting, dikarenakan dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Daerah yang mampu berdaya saing adalah daerah yang dapat menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan insentif bagi daerah berkinerja baik terutama dalam meningkatkan perlindungan kelestarian alam (ekologi). Kemudian menerapkan KAD dalam penguatan daya saing daerah berkelanjutan.

Tolitoli (Sulawesi Tengah) merupakan daerah dengan capaian tertinggi pada (84,89). Capaian tersebut disusul Bengkalis-Riau (82,66), Musi Banyuasin-Sumatera Selatan (80,00), Sanggau-Kalimantan Barat (78,22), dan Pelalawan-Riau (76,89). Kabupaten-kabupaten ini memiliki nilai yang tinggi di setiap indikatornya. Hal ini menunjukkan untuk segala kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah kabupaten tersebut mengedepankan prinsip pelestarian dan perlindungan lingkungan dan beberapa bentuk kerjasama untuk saling mendukung antar daerah yang satu dengan daerah lainnya menuju peningkatan daya saing.

Capaian paling rendah dalam variabel ini diperoleh Dharmasraya-Sumatera Barat (4,44). Kinerja tersebut disusul Mandailing Natal-Sumatera Utara (17,33), Pasaman Barat-Sumatera Barat (18,22), Pasaman-Sumatera Barat (19,11), dan Tulang Bawang Barat-Lampung (20,00) menempati skor terendah pada variabel berkelanjutan. Kabupaten-kabupaten ini juga memiliki nilai rendah pada masing-masing indikatornya. Rendahnya capaian tersebut karena daerah tersebut tidak menerapkan TAKE serta ketiadaan sejumlah regulasi yang mendukung penguatan daya saing daerah berkelanjutan pada tiga pilar (terkait lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial).

Kotak 10. Inovasi Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE)

Terkait pelaksanaan TAKE, terdapat beberapa cerita inovatif yang akhirnya mendorong daerah untuk mengimplementasikan program ini di daerah. Misalnya yang terjadi di Trenggalek, dimana Pemkab mengimplementasikan TAKE sebagai jalan inovatif untuk mengatasi persoalan persampahan di daerah tersebut. Hal ini berawal dari kondisi anggaran pengelolaan sampah yang sedikit dan tidak mungkin bisa dioptimalkan untuk membersihkan Trenggalek secara keseluruhan. Pemerintah Trenggalek akhirnya menyelenggarakan adipura desa dengan mengedepankan semangat gotong royong dalam melakukan pembersihan di tingkat desa. Hasilnya, dengan anggaran yang terbatas Pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu menciptakan Trenggalek yang bersih dan asri.

Kisah lainnya datang dari Sanggau yang menjadikan TAKE sebagai sarana untuk meningkatkan status kemandirian desa. Implementasi TAKE di Sanggau berawal dari kebijakan bupati yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Prakteknya, terdapat 40 desa yang mendapatkan TAKE dimana pendanaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Program ini akhirnya menjadi strategi yang ditempuh pemda untuk meningkatkan status kemandirian desa. Pelaksanaan TAKE di Sanggau berjalan dengan baik berkat adanya dukungan dari aktor non pemerintah seperti Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Ihwal implementasi TAKE yang belum terwujud secara masif daerah, ketiaktahuan turut mendeterminasi persoalan tersebut. Hasil studi lapangan di Bangkalan dan Cianjur menunjukkan bahwa Pemda sama sekali belum mengetahui adanya program ini. Proses sosialisasi yang selama ini telah dijalankan nampaknya belum membuahkan hasil mengingat masih banyak daerah yang kemungkinan mengalami persoalan yang sama terkait program ini. Persoalan lainnya adalah keberadaan program ini yang belum *mandatory* secara status menyebabkan daerah tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait program ini.

2.5 Analisis Regional

a. Indonesia Barat

Kinerja IDSDB di Indonesia barat memiliki kinerja yang tinggi dan berimbang pada setiap pilar (rata-rata 63,15). Hasil pemeringkatan IDSDB pada daerah dengan kategori tinggi tersebar secara merata di Provinsi Sumatera dan Jawa. Rerata capaian pada masing-masing pilar IDSDB tinggi untuk pilar lingkungan lestari (57,06) berada pada level sedang, sedangkan

pilar ekonomi berkelanjutan (60,03); sosial inklusi (68,57); dan tata kelola berkelanjutan (68,31) berada pada level yang tinggi.

Sejumlah variabel memiliki kinerja unggul pada wilayah Indonesia Barat. Pada pilar ekonomi berkelanjutan, variabel berkontribusi tinggi adalah ekosistem investasi (97,30), ketenagakerjaan (90,05) dan infrastruktur ekonomi 68,19. Variabel dengan capaian tinggi pada pilar inklusi sosial adalah tingkat kondusivitas keamanan (82,19) dan kesetaraan gender (75,68). Variabel dengan capaian tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (94,59) dan akuntabilitas (79,97).

Daerah berkinerja sedang memiliki capaian nilai yang cukup baik pada seriap pilar (rata-rata 53,09). Rerata capaian pada masing-masing pilar pada IDSDB sedang sebagai berikut: pilar lingkungan lestari (44,45), ekonomi berkelanjutan (48,35), sosial inklusi (62,42) dan Tata Kelola Berkelanjutan (53,08) dimana capaian seluruh pilar berada pada level sedang. Daerah-daerah yang memiliki IDSDB kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel akuntabilitas, partisipasi, keamanan, kesetaraan gender, infrastruktur ekonomi dan ketenagakerjaan.

1. Lingkungan Lestari

Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada manajemen pengelolaan sampah.

Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiliensi/ketangguhan daerah terhadap bencana. Isu kebencanaan merupakan persoalan yang perlu diurusutamakan, khususnya dalam menghadapi tantangan krisis perubahan iklim yang berdampak pada cuaca dan produksi pangan.

Dari sisi indikator pada pilar lingkungan lestari tinggi, umumnya unggul pada indikator kualitas air, kualitas udara dan manajemen pengelolaan sampah. Disisi lain indikator risiko bencana, kemampuan daerah dalam memitigasi bencana dan kualitas lahan menjadi indikator yang memiliki kinerja buruk. Maraknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini semestinya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk meningkatkan

kemampuan mitigasi bencana di daerah. Selain itu, tutupan lahan juga semestinya menjadi atensi ditengah tantangan efek rumah kaca yang disebabkan oleh merebaknya deforestasi.

Persentase daerah yang memiliki pilar lingkungan lestari kategori tinggi di Indonesia bagian barat sebesar 16,28 persen daerah dengan capaian rerata pilar sebesar 63,63. Daerah-daerah tersebut adalah Lingga (Kepulauan Riau), Grobogan (Jawa Tengah), Purbalingga (Jawa Barat), Barito Selatan (Kalimantan Tengah), Trenggalek (Jawa Timur), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Lamandau (Kalimantan Tengah), Solok (Sumatera Barat), dan Muaro Jambi (Jambi). Umumnya, daerah yang berada pada kategori ini memiliki capaian baik pada pengelolaan sampah.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar lingkungan lestari mencapai 79,85 persen (rerata 45,84). Daerah-daerah tersebut meliputi Wonogiri (Jawa Tengah), Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan), Bangka (Bangka Belitung), Murung Raya (Kalimantan Tengah), Kuningan (Jawa Barat), Karimun (Kepulauan Riau), Purwakarta (Jawa Barat), dan Mempawah (Kalimantan Barat). Umumnya daerah yang berada pada papan tengah memiliki kinerja sedang pada variabel manajemen pengelolaan SDA dan lingkungan, kualitas lingkungan dan resiliensi lingkungan. Adapun indikator dengan kinerja rendah pada kelompok ini adalah kualitas tutupan lahan yang buruk dengan rerata capaian 28,77.

Terakhir, jumlah daerah berkinerja lingkungan lestari rendah mencapai 3,85 persen (rerata 28,57). Daerah-daerah tersebut adalah Bangkalan (Jawa Timur), Demak (Jawa Tengah), Brebes (Jawa Tengah), Serang (Banten), dan Pesawaran (Lampung). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas kategori ini umumnya memiliki kinerja buruk pada manajemen pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup dan resiliensi lingkungan. indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah kualitas lahan yang buruk dengan rerata capaian sebesar 11,51 dan manajemen pengelolaan sampah dengan rerata capaian 13,17. Capaian ini menandakan bahwa ketika pilar lingkungan lestari terabaikan dari proses penguatan daya saing, maka hal ini akan turut mendegradasi kekuatan daya saing suatu daerah. 2. 2.

2. Ekonomi Berkelanjutan

Daerah di Indonesia Barat dengan kinerja yang tinggi dan berimbang pada setiap pilar mencapai 27,13 persen dengan rerata 69,91. Daerah-daerah tersebut adalah Bengkalis (Riau), Kuantan Singgingi (Riau), Semarang (Jawa Tengah), Karimun (Kepulauan Riau), Sleman (Yogyakarta), Sukabumi (Jawa Barat), Malang (Jawa Timur), Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), dan Jepara (Jawa Tengah). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel investasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah daya dukung wilayah dan kemampuan fiskal yang masih rendah. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan adalah daya dukung ekonomi, kemandirian fiskal daerah, dan peningkatan kualitas jalan baik.

Kontribusi pilar ekonomi berkelanjutan terhadap daya saing berkelanjutan, terutama daerah teratas belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Bengkalis memiliki peringkat 1 (capaian tinggi) di pilar ekonomi berkelanjutan. Disisi lain pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 44 (capaian sedang), inklusi sosial peringkat 91 (rerata 60,60) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 16 (rerata, 73,27). Capaian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing daerah.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar ekonomi berkelanjutan mencapai 69,77 persen (rerata 48,37). Daerah-daerah tersebut adalah Lingga (Kepulauan Riau), Banjarnegara (Jawa Barat), Indramayu (Jawa Barat), Lampung Tengah (Lampung), Bangka (Bangka Belitung), Wonosobo (Jawa Tengah), Bangka Tengah (Bangka Belitung), Kuningan (Jawa Barat), dll. Umumnya daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sedang pada variabel daya dukung wilayah, investasi dan kemampuan fiskal daerah. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah daya dukung ekonomi (rerata 8,1), kemandirian fiskal (rerata 11,68), kualitas jalan baik (rerata 46,84) dan pertumbuhan investasi (rerata 28,77) .

Kontribusi pilar ekonomi berkelanjutan pada daerah berkategori sedang terhadap daya saing berkelanjutan,

belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Lingga memiliki peringkat 36 (capaian 59,73/sedang) di pilar ekonomi berkelanjutan, namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 1 (capaian 71,34/tinggi), inklusi sosial peringkat 65 (capaian 64,47/tinggi) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 114 (capaian 54,39/sedang). Artinya terdapat daerah yang memiliki peringkat sedang di pilar ekonomi berkelanjutan memiliki kinerja tinggi terhadap IDSDB. Berbeda dengan Banjarnegara memiliki peringkat di pilar ekonomi berkelanjutan 37 (capaian 59,97/sedang), namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 94 (capaian 39,75/sedang), inklusi sosial peringkat 46 (capaian 67,77/tinggi) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 70 (capaian 63,54/tinggi). Tipologi berikutnya adalah daerah yang memiliki peringkat sedang pada pilar lingkungan lestari, memiliki peringkat sedang pada IDSDB.

Jumlah daerah berkinerja ekonomi berkelanjutan rendah mencapai 3,10 persen (rerata 28,58). Daerah-daerah tersebut adalah Aceh Selatan (Aceh), Sanggau (Kalimantan Barat), Murung Raya (Kalimantan Tengah), dan Sintang (Kalimantan Barat). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja buruk pada daya dukung wilayah, kemampuan fiskal, ekosistem investasi dan infrastruktur ekonomi. Sebagai contoh Kabupaten Sintang memiliki peringkat 129 di pilar ekonomi berkelanjutan (capaian 27,41/rendah), namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 53 (capaian 51,88/sedang), inklusi sosial memiliki peringkat 95 (capaian 60,40/tinggi) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 29 (capaian 71,38/Tinggi). Artinya, terdapat daerah yang memiliki peringkat rendah di pilar ekonomi berkelanjutan memiliki kinerja sedang terhadap IDSDB.

3. Inklusi Sosial

Kinerja pilar inklusi sosial berkontribusi terhadap capaian daya saing daerah berkelanjutan. Sebagai contoh, Sukoharjo (Jawa Tengah) memperoleh peringkat tertinggi di pilar inklusi sosial. Di sisi lain Sukoharjo menempati peringkat 64 (capaian 48,13/sedang) di pilar lingkungan lestari, ekonomi unggul berada

di posisi 22 (capaian 61,89/tinggi), dan Tata Kelola Berkelanjutan posisi 20 (capaian 72,66/tinggi).

Daerah berkinerja inklusi sosial tinggi mencapai 74,42 persen daerah (rerata 67,36). Top Ten daerah pada kategori ini adalah Karanganyar (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Purworejo (Jawa Tengah), Aceh Besar (Aceh), Klaten (Jawa Tengah), Kudus (Jawa Tengah), Pati (Jawa Tengah), Agam (Sumatera Barat), Temanggung (Jawa Tengah), dan Wonogiri (Jawa Tengah). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel kondusivitas keamanan dan kesetaraan gender. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah keunggulan SDM dan ketersediaan infrastruktur sosial. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan inklusi sosial adalah rata lama sekolah, angka harapan hidup, penurunan stunting, dan infrastruktur kesehatan.

Kontribusi pilar inklusi sosial terhadap daya saing berkelanjutan, terutama kategori tinggi memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Karanganyar memiliki peringkat 1 (capaian tinggi) di pilar inklusi sosial. Disisi lain pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 17 (capaian 61,10/tinggi), ekonomi berkelanjutan peringkat 73 (capaian 55,94/sedang) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 32 (capaian 71,09/tinggi). Demikian juga Kabupaten Banjarnegara yang menempati posisi 46 (capaian 67,77/tinggi) pada pilar inklusi sosial. Adapun peringkat di pilar ekonomi berkelanjutan 44 (capaian 58,98/sedang), pilar lingkungan lestari menempati posisi 91 (capaian 40,37/sedang) dan pilar Tata Kelola Berkelanjutan menempati peringkat 48 (capaian 48,64/tinggi). Dengan demikian pilar tinggi di inklusi sosial, memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing daerah berkelanjutan pada kategori tinggi dan sedang.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar inklusi sosial mencapai 24,03 persen (rerata 53,26). Daerah-daerah tersebut adalah Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah), Lampung Timur (Lampung), Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Pasaman Barat (Sumatera Barat), Lampung Utara (Lampung), Bangka Selatan (Bangka Belitung), Bondowoso (Jawa Timur), Kubu Raya (Kalimantan Tengah), Muaro Jambi (Jambi), dll. Umumnya daerah

yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sedang pada semua variabel pilar inklusi sosial. Sedangkan indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah rata lama sekolah (rerata 38,66), prevalensi stunting (rerata 48,49), infrastruktur kesehatan (rerata 18,11) dan infrastruktur sekolah dasar (rerata 44,45).

Kontribusi pilar inklusi sosial kategori sedang terhadap daya saing berkelanjutan, belum memiliki capaian yang optimal.

Sebagai contoh, Kotawaringin Timur memiliki peringkat 99 (capaian 59,95/sedang) di pilar inklusi sosial, namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 59 (capaian 50,42/sedang), ekonomi berkelanjutan peringkat 104 (capaian 39,33/sedang) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 118 (capaian 52,84/sedang). Artinya terdapat daerah yang memiliki peringkat sedang di pilar inklusi sosial memiliki kinerja sedang terhadap IDSDB.

4. Tata Kelola Berkelanjutan

Pilar tata kelola berkelanjutan terhadap daya saing daerah berkelanjutan memiliki kinerja yang baik. Sebagai contoh, Sanggau memperoleh peringkat 1 (capaian sangat tinggi) di pilar tata kelola berkelanjutan. Disisi lain Sanggau menempati peringkat 106 (capaian 35,48/sedang) di pilar lingkungan lestari, ekonomi unggul berada di posisi 127 (capaian 29,25/rendah), dan inklusi sosial posisi 109 (capaian 57,49/sedang). Artinya, daerah dengan kategori sangat tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan, sekurang-kurangnya memiliki capaian IDSDB pada posisi sedang.

Jumlah daerah berkinerja tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 74,42 persen (rerata 67,93). Daerah-daerah tersebut adalah Sleman (Yogyakarta), Cilacap (Jawa Tengah), Bangka (Bangka Belitung), Boyolali (Jawa Tengah), Trenggalek (Jawa Timur), Bantul (Yogyakarta), Kulon Progo (Yogyakarta), Banyumas (Jawa Tengah), Wonogiri (Jawa Tengah), Gunungkidul (Yogyakarta), Tulang Bawang (Lampung), dll. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel partisipasi masyarakat,

akuntabilitas dan efisiensi dan inklusi. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah variabel transparansi dan kebijakan berkelanjutan. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan pilar Tata Kelola Berkelanjutan adalah integritas, inovasi daerah dan implementasi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE).

Kontribusi pilar Tata Kelola Berkelanjutan terhadap daya saing berkelanjutan, terutama kategori tinggi memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Sleman memiliki peringkat 1 (capaian tinggi) di pilar inklusi sosial. Disisi lain pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 51 (capaian 52,66/sedang), ekonomi berkelanjutan peringkat 6 (capaian 65,13/tinggi) dan pilar inklusi sosial menempati posisi 113 (capaian 54,70/sedang). Artinya, pilar tata kelo baik yang tinggi, memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing daerah berkelanjutan pada kategori tinggi. Demikian juga Temanggung dan Serang yang menempati posisi 67 dan 96 (capaian 67,77/tinggi) pada pilar Tata Kelola Berkelanjutan, namun kontribusi terhadap daya saing daerah berkelanjutan berada pada kategori sedang dan rendah.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 25,58 persen (rerata 53,73). Daerah-daerah tersebut adalah Bandung (Jawa Barat), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Lebak (Banten), Dharmasraya (Sumatera Barat), Subang (Jawa Barat), Solok (Sumatera Barat), Solok Selatan (Sumatera Barat), Langkat (Sumatera Utara), dll. Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel partisipasi masyarakat. Sedangkan indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah Impelementasi TAKE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Integritas, Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dan Pencegahan Korupsi.

Kontribusi pilar Tata Kelola Berkelanjutan sedang terhadap daya saing berkelanjutan, belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Bandung memiliki peringkat 96 (capaian 59,85/sedang) di pilar Tata Kelola Berkelanjutan, namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 103 (capaian 35,78/sedang), ekonomi berkelanjutan peringkat 3 (capaian 67,66/

tinggi) dan inklusi sosial menempati posisi 112 (capaian 54,77/ sedang). Artinya terdapat daerah yang memiliki peringkat sedang di pilar Tata Kelola Berkelanjutan memiliki kinerja sedang terhadap IDSDB.

b. Indonesia Tengah

Kinerja IDSDB di Indonesia Tengah memiliki kinerja yang tinggi dan berimbang pada setiap pilar (rata-rata 57,90). Hasil pemeringkatan IDSDB pada daerah dengan kategori tinggi tersebar secara merata pada setiap regio (Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi) kecuali Nusa Tenggara Timur. Selibuhnya, secara umum wilayah Indonesia Tengah didominasi oleh daerah dengan status daya saing yang sedang. Bahkan, bila merujuk Gambar 4.6, ditemukan bahwa semakin ke arah timur, daerah dengan warna hijau (status daya saing daerah berkelanjutan tinggi) semakin jarang terlihat. Rerata capaian pada masing-masing pilar IDSDB tinggi untuk pilar lingkungan lestari (53,22) dan pilar ekonomi berkelanjutan (53,53) yang berada pada level sedang; sedangkan pilar inklusi sosial (65,49); dan tata kelola berkelanjutan (62,37) berada pada level yang tinggi.

Sejumlah variabel memiliki kinerja unggul pada wilayah Indonesia Tengah. Pada pilar ekonomi berkelanjutan, variabel berkontribusi tinggi adalah ekosistem investasi (97,30), ketenagakerjaan (90,05) dan infrastruktur ekonomi 68,19. Variabel dengan capaian tinggi pada pilar inklusi sosial adalah tingkat kondusivitas keamanan (82,19) dan kesetaraan gender (75,68). Variabel dengan capaian tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (94,59) dan akuntabilitas (79,97).

Daerah berkinerja sedang memiliki capaian nilai yang cukup baik pada seriap pilar (rata-rata 54,60). Rerata capaian pada masing-masing pilar pada IDSDB sedang sebagai berikut: pilar lingkungan lestari (48,772), ekonomi berkelanjutan (49,204), sosial inklusi (64,696) dan Tata Kelola Berkelanjutan (60,103) dimana capaian seluruh pilar berada pada level sedang dan tinggi. Daerah-daerah yang memiliki IDSDB kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel kualitas lingkungan, ketenagakerjaan,

infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender, kondusivitas keamanan, infrastruktur dasar, partisipasi, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, persoalan pada daerah dengan daya saing daerah berkelanjutan yang sedang di Indonesia Tengah berkuat pada persoalan manajelem pengelolaan sampah, resiliensi lingkungan, daya dukung wilayah, kemampuan fiskal daerah, ekosistem investasi, keunggulan SDM, transparansi, efisiensi dan inklusi, serta berkelanjutan.

Daerah yang berada di Top Ten wilayah Indonesia Tengah, umumnya memiliki keunggulan di 4 pilar. Badung (Bali), Klungkung (Bali), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Buleleng (Bali), Tabanan (Bali), Barru (Sulawesi Selatan), Gianyar (Bali), Banggai (Sulawesi Selatan), Nunukan (Kalimantan Utara), dan Banjar (Kalimantan Selatan) merupakan kabupaten yang masing-masing pilarnya berada di level tinggi. Daerah di luar kabupaten tersebut memiliki kinerja pilar sosial yang tinggi serta lingkungan, ekonomi, dan tata kelola yang sedang.

Salah satu temuan menarik yang perlu mendapatkan apresiasi adalah capaian top ten di Indonesia Tengah didominasi oleh Provinsi Bali. Peringkat satu sampai tiga ditempati oleh Badung, Klungkung, dan Gianyar; serta di peringkat enam dan tujuh masing-masing diduduki oleh Buleleng dan Tabanan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan di Bali berjalan dengan optimal dan mampu unggul dengan kawasan lainnya di wilayah Indonesia Tengah.

1. Lingkungan Lestari

Kontribusi pilar lingkungan lestari terhadap daya saing berkelanjutan, terutama daerah teratas belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Malinau (Kalimantan Utara) menjadi peringkat teratas di pilar lingkungan lestari, namun di pilar ekonomi berkelanjutan memiliki *peringkat* 105, pilar inklusi sosial berada pada *peringkat* 126, dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 132. Berkaca pada *top ten* IDSDB di Indonesia Tengah, hanya ada dua kabupaten yang memiliki kinerja lingkungan lestari yang optimal dan seimbang di semua variabel, yakni Badung (Bali) dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Dari sisi indikator pada pilar lingkungan lestari tinggi,

umumnya unggul pada indikator kualitas air, kualitas udara dan manajemen pengelolaan sampah. Disisi lain, terdapat capaian kinerja yang buruk pada variabel resiliensi daerah terhadap bencana.

Persentase daerah yang memiliki pilar lingkungan lestari kategori tinggi di Indonesia bagian tengah sebesar 29,63 persen daerah dengan capaian rerata pilar sebesar 64,90.

Daerah-daerah tersebut adalah Malinau (Kalimantan Utara), Pohuwato (Gorontalo), Kutai Barat (Kalimantan Timur), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Klungkung (Bali), Gorontalo (Gorontalo), Buleleng (Bali), Badung (Bali), Banjar (Kalimantan Selatan), Gianyar (Bali), Nunukan (Kalimantan Utara), Boalemo (Gorontalo), Sigi (Sulawesi Tengah), Barru (Sulawesi Selatan), Enrekang (Sulawesi Selatan)), dan Balangan (Kalimantan Selatan). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel kualitas lingkungan. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah manajemen pengelolaan sampah dan resiliensi daerah terhadap bencana.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar lingkungan lestari mencapai 68,52 persen (rerata 48,82). Umumnya daerah

yang berada pada papan tengah memiliki kinerja sedang pada variabel manajemen pengelolaan SDA dan lingkungan dan resiliensi lingkungan. Adapun variabel yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah resiliensi lingkungan dengan rerata capaian sebesar 40,30.

Daerah yang memiliki kinerja pilar lingkungan lestari kategori rendah di Indonesia bagian Tengah adalah Kotabaru (Kalimantan Selatan). Capaian yang diperoleh daerah ini

pada pilar lingkungan lestari adalah sebesar 28,97. Adapun variabel yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah manajemen pengelolaan sampah yang buruk dengan capaian 0,26 dan resiliensi lingkungan dengan capaian sebesar 29,40. Capaian ini menandakan bahwa ketika pilar lingkungan lestari terabaikan dari proses penguatan daya saing, maka hal ini akan turut mendegradasi kekuatan daya saing suatu daerah. Hal ini relevan dengan posisi Kotabaru yang termasuk dalam daerah berkategori sedang.

2. Ekonomi Berkelanjutan

Jumlah daerah berkinerja tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan mencapai 24,07 persen (rerata 62,96). Daerah-daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah Badung (Bali), Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Lombok Barat (NTB), Banjar (Kalimantan Selatan), Tabanan (Bali), Gianyar (Bali), Hulu Sungai Utara (Kalimantan Selatan), Gorontalo (Gorontalo), Klungkung (Bali), Banggai (Sulawesi Selatan), dan Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel investasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah daya dukung wilayah dan kemampuan fiskal yang masih rendah.

Pilar ekonomi berkelanjutan, terutama daerah teratas belum memiliki kontribusi optimal terhadap DSDB. Berkaca pada *top ten* IDSDB, tidak ada satupun kabupaten yang memiliki kinerja ekonomi berkelanjutan yang optimal dan seimbang di semua variabel. Dari sisi indikator pada pilar ekonomi berkelanjutan pada daerah berdaya saing tinggi, umumnya mengalami persoalan pada variabel daya dukung wilayah dan kemampuan fiskal daerah. Permasalahan pada variabel daya dukung wilayah menunjukkan adanya kecenderungan bahwa ekonomi belum sepenuhnya dibangun di atas prinsip berkelanjutan.

Kemudian, jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar ekonomi berkelanjutan mencapai 75,93 persen (rerata 50,54). Umumnya daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sedang pada variabel daya dukung wilayah, investasi dan kemampuan fiskal daerah. Adapun variabel yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah daya dukung wilayah (rerata 33,05), kemandirian fiskal (rerata 6,37), dan ekosistem investasi (rerata 54,55).

Secara keseluruhan pada pilar ekonomi berkelanjutan tidak terdapat kabupaten yang berada pada level rendah di Indonesia Tengah. Hal ini menunjukkan kinerja positif berbagai *leading indicator* ekonomi di wilayah ini pada variabel ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga infrastruktur

dasar. Lebih lanjut, ekosistem investasi yang meningkat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja hingga pada meningkatnya kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Hanya saja, persoalan terkait kemampuan fiskal daerah menjadi sorotan yang patut untuk tingkatkan dari segi pendapatan daerah, mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia Tengah masih berada pada kekuatan fiskal yang belum sepenuhnya mandiri.

3. Inklusi Sosial

Capaian pilar inklusi sosial di Indonesia Tengah secara umum terdiri dari kategori tinggi dan sedang. Secara umum terdapat 83,33 persen kabupaten di Indonesia Tengah yang memiliki capaian pilar inklusi sosial yang tinggi. Daerah-daerah yang berada pada peringkat tinggi ini umumnya memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel kualitas SDM, kesetaraan gender, dan kondusivitas keamanan. Tantangan dalam peningkatan inklusivitas sosial secara umum di wilayah ini adalah penguatan pada variabel infrastruktur dasar.

Plar inklusi sosial memiliki kinerja yang optimal terhadap DSDB. Sebagai contoh, Tabanan bertengger di peringkat 1 (capaian tinggi) di pilar inklusi sosial se Indonesia Tengah memiliki capaian yang *inline* dengan skor IDSDB (peringkat 17 nasional dengan status tinggi). Contoh lainnya adalah Badung yang berada pada peringkat 2 di pilar inklusi sosial se Indonesia Tengah juga memiliki capaian yang sangat baik dalam pemeringkatan IDSDB (peringkat 1 nasional). Artinya daerah-daerah kategori sangat tinggi pada pilar inklusi sosial, memiliki capaian IDSDB yang tinggi.

Jumlah daerah berkinerja sedang pilar inklusi sosial mencapai 16,67 persen (rerata 55,70). Umumnya daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sedang pada variabel keunggulan SDM. Secara umum, Kontribusi pilar inklusi sosial kategori sedang terhadap daya saing berkelanjutan, belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Nunukan (Kalimantan Utara) memiliki peringkat 144 (capaian 59.969/ sedang) di pilar inklusi sosial, namun di pilar lingkungan

lestari memiliki peringkat 22 (capaian 63,557/tinggi), ekonomi berkelanjutan peringkat 70 (capaian 57,857/sedang) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 62 (capaian 68,385/tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya, daerah yang memiliki kinerja sedang pada pilar inklusi sosial memiliki kinerja yang sedang pula pada capaian IDSDB.

4. Tata Kelola Berkelanjutan

Pilar tata kelola berkelanjutan memiliki kinerja yang optimal terhadap capaian DSDB. Sebagai contoh, Badung (Bali) memperoleh peringkat 1 (capaian sangat tinggi) di pilar tata kelola berkelanjutan se-Indonesia Tengah. Bila menilik pilar yang lain, Badung menempati peringkat 8 se-Indonesia Tengah (capaian 64,42/tinggi) di pilar lingkungan lestari, ekonomi unggul berada di posisi 1 se Indonesia tengah (capaian 70,61/tinggi), dan inklusi sosial posisi ke-2 se Indonesia tengah (capaian 79,59/tinggi).

Jumlah daerah berkinerja tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 57,41 persen (rerata 66,99).

Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Persoalan krusial bagi daerah ini terlihat pada variabel transparansi, efisiensi, dan tata kelola berkelanjutan. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan pilar Tata Kelola Berkelanjutan adalah integritas, inovasi daerah dan implementasi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) yang belum berjalan di sebagian besar wilayah di Indonesia Tengah.

Pilar Tata Kelola Berkelanjutan, terutama kategori tinggi memiliki kontribusi optimal yang optimal. Sebagai contoh, Klungkung (Bali) memiliki sebagai daerah tertinggi dalam pemeringkatan tata kelola level tinggi memiliki capaian yang baik pada pilar lingkungan lestari dengan peringkat 5 (capaian 65,07/tinggi), ekonomi berkelanjutan berada pada peringkat peringkat 11 (capaian 61,12/tinggi), dan pilar inklusi sosial menempati posisi 12 (capaian 71,06/tinggi). Artinya, pilar Tata Kelola Berkelanjutan yang tinggi, memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing daerah berkelanjutan pada kategori tinggi.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 40,74 persen (rerata 55,03). Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Sedangkan variabel yang membutuhkan perhatian khusus dalam kategori ini adalah transparansi, efisiensi, dan tata kelola berkelanjutan.

Kontribusi pilar Tata Kelola Berkelanjutan dengan tingkat sedang terhadap daya saing berkelanjutan, belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Kabupaten Pohuwato yang bertengger di peringkat 46 (capaian 55,16/sedang) di pilar Tata Kelola Berkelanjutan, namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 2 (capaian 70,98/tinggi), ekonomi berkelanjutan peringkat 48 (capaian 38,37/sedang) dan inklusi sosial menempati posisi 36 (capaian 63,45/tinggi). Hal ini menunjukkan terdapat daerah yang memiliki peringkat sedang di pilar Tata Kelola Berkelanjutan memiliki kinerja sedang terhadap keseluruhan capaian IDSDB daerah.

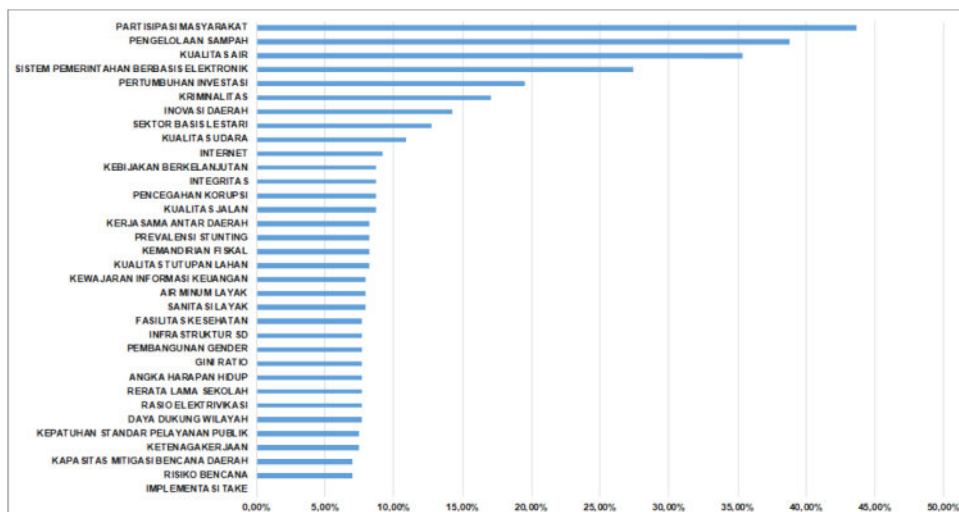
c. Indonesia Timur

Berdasarkan aspek kelengkapan data, tidak ada satupun wilayah di kawasan Indonesia Timur yang masuk dalam indeks daya saing daerah berkelanjutan. Persoalan kelengkapan data di Indonesia Timur disebabkan oleh tidak ditemukannya sejumlah indikator dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh tim indeks. Data yang tidak ditemukan oleh tim indeks didominasi oleh pilar lingkungan seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Pengelolaan Sampah per Tahun yang termuat dalam RKPD, dan Indeks Risiko Bencana. Selain itu, pada pilar ekonomi terdapat ketidaklengkapan data pada indikator rasio elektrifikasi dan ketersediaan internet. Pada pilar tata kelola berkelanjutan, terdapat permasalahan ketidaklengkapan data pada partisipasi masyarakat, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kepatuhan standar pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan integritas aparatur. Uniknya, pada pilar inklusi sosial seluruh data pada setiap indikator dapat terpenuhi.

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (Kelengkapan Data 80 persen)

1. Gambaran Umum

Analisis pada bagian ini menggunakan basis kelengkapan data 80 persen pada indikator indeks. Daerah yang menjadi titik pengamatan pada kategori ini sekurang-kurangnya memiliki ketersediaan data pada minimal 80 persen indikator yang digunakan dalam kajian ini. Penetapan ambang batas minimal 80 persen dalam kajian ini dilakukan berdasarkan *expert judgement* dengan mempertimbangkan kelengkapan data pada setiap indikator. Persoalan yang terjadi adalah tidak semua daerah memiliki publisitas data per-indikator dalam IDSDB. Gambar 4.24 menunjukkan persentase ketidaktersediaan data pada pengukuran IDSDB basis kelengkapan data 80 persen. Gambar tersebut menunjukkan bahwa data Partisipasi Masyarakat dan Realisasi Pengelolaan Sampah merupakan indikator dengan tingkat ketidaktersediaan yang tinggi, sebab kedua data ini diperoleh dari RKPD dan tidak semua Kabupaten melakukan publikasi terhadap dokumen RKPD mereka.

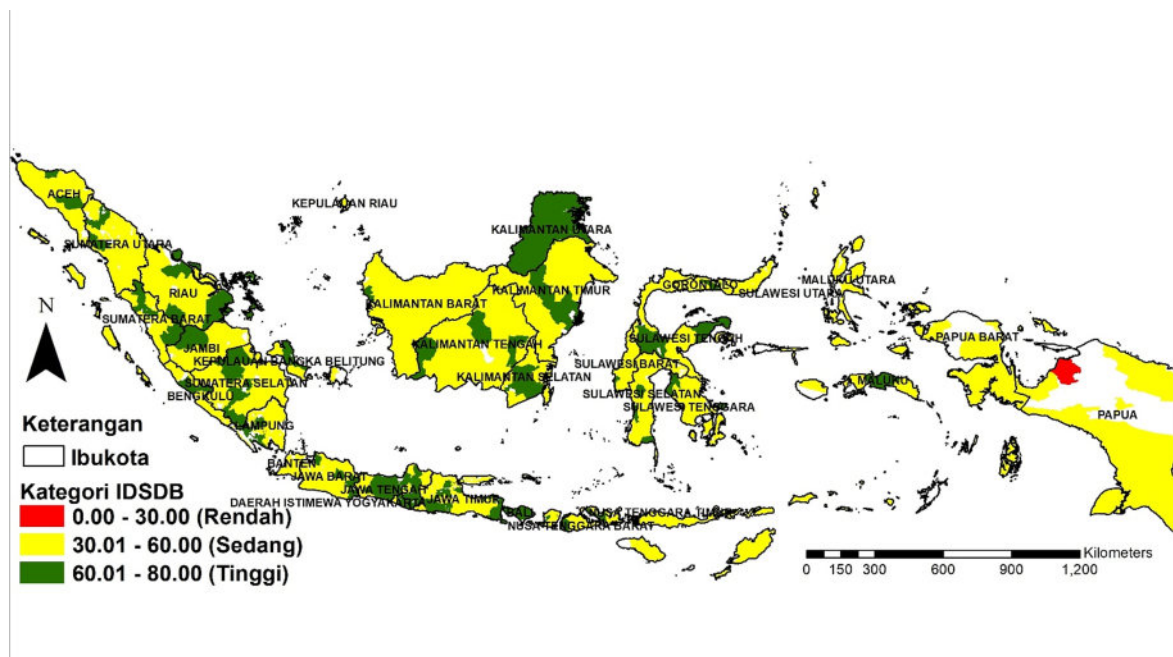


Gambar 4.24 Ketidakterersediaan data per indikator

Konteks indeks pada dua opsi yang tersaji dalam laporan ini tentu memiliki perbedaan dari sisi substansi. Daerah yang berada pada peringkat terbawah IDSDB pada opsi kelengkapan data 100 persen tidak bisa dikatakan sebagai daerah berdaya saing rendah, sebab nilai yang diperoleh berada kategori sedang (penjelasan soal kategori terdapat pada bagian 4.2.1). Namun, daerah yang menempati *bottom three* pada opsi kelengkapan data 80 persen dapat dikatakan berdaya saing rendah, sebab terdapat kabupaten dengan nilai mendekati batas minimal 30, bahkan daerah terbawah berada pada kategori daya saing daerah berkelanjutan yang rendah.

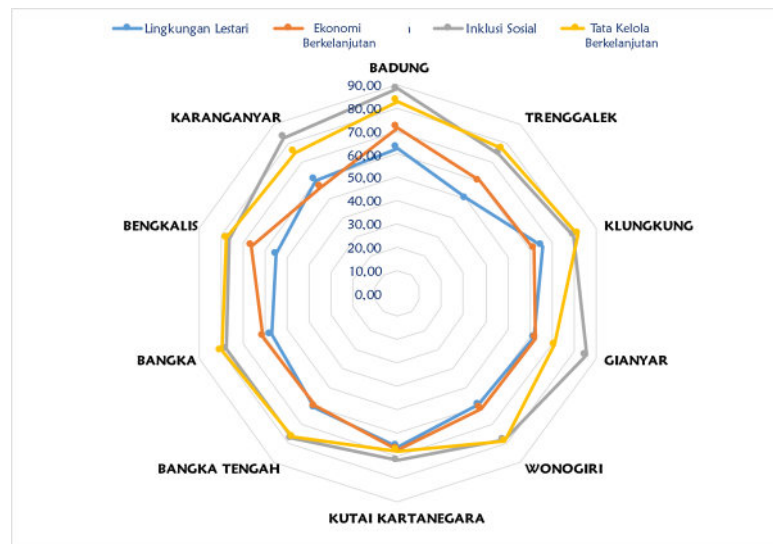
2. Hasil Pengukuran Umum

Raihan daya saing kabupaten pada umumnya berada pada level sedang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya daerah yang memiliki capaian yang sedang berjumlah 71,83 persen (278 kabupaten). Dominasi daerah berkinerja sedang secara kuantitas menunjukkan bahwa masih banyak daerah belum berdaya saing secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki persoalan yang serius dalam penguatan daya saing secara berkelanjutan.



Gambar 4.25 Kinerja DSDB (387 Kabupaten)

Kinerja daya saing daerah berkelanjutan masih menunjukkan profil kesenjangan antar-wilayah. Kesenjangan antar wilayah tersaji dengan jelas pada Gambar 4.25 dimana semakin ke wilayah timur warna semakin banyak daerah memiliki warna arsiran kuning dan merah. Warna kuning dalam peta menunjukkan kinerja yang sedang serta warna merah dalam peta menunjukkan kinerja yang rendah. Citra yang tersaji pada Gambar 4.25 menggambarkan realita bahwa persoalan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah serius di Indonesia.

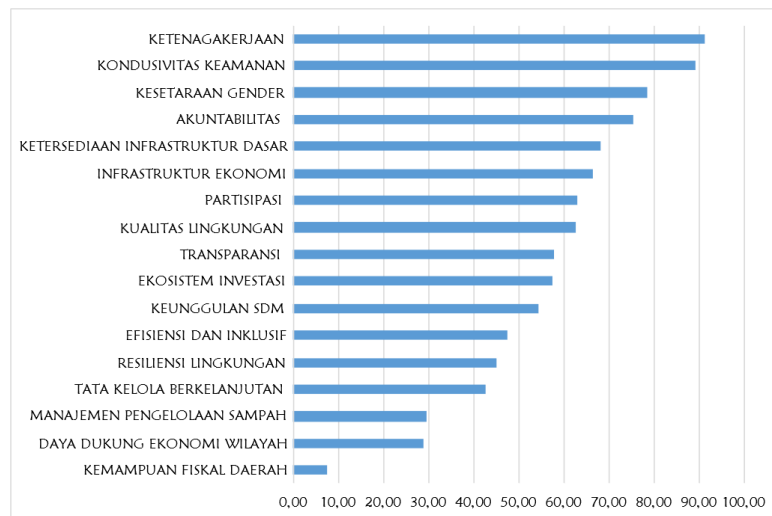


Gambar 4.26 Spider Web Top Ten DSDB

Komposisi top ten dalam klaster data ini mengalami perubahan secara komposisi. Daerah yang menempati sepuluh besar dalam pemeringkatan klaster ini ialah: Badung (Bali), Trenggalek (Jawa Timur), Klungkung (Bali), Gianyar (Bali), Wonogiri (Jawa Tengah), Kutai Kertanegara (Kalimantan Selatan), Bangka Tengah (Bangka Belitung), Bangka (Bangka Belitung), Bengkulu (Riau), dan Karanganyar (Jawa Tengah). Kabupaten yang menempati sepuluh besar dalam pemeringkatan klaster data 100 persen dan tidak masuk dalam pemeringkatan klaster ini adalah: Kuantan Singgigi (Riau), Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), dan Kebumen (Jawa Tengah). Kemudian, daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar inklusi sosial adalah daerah Badung (Bali), Karanganyar (Jawa Tengah), Gianyar (Bali), dan Kutai Kertanegara (Jawa Timur). Empat daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah Trenggalek

(Jawa Timur), Klungkung (Bali), Wonogiri (Jawa Tengah), Bangka (Bangka Belitung), dan Bengkalis (Riau). Dari sepuluh daerah tersebut, tidak ada daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar lingkungan lestari. *Spider Webb* kondisi daerah pada posisi *top ten* dapat dilihat pada Gambar 4.26.

Hasil pengukuran IDSDB pada 16 indikator menunjukkan bahwa tidak semua indikator bekerja dengan optimal dalam rangka penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan di Indonesia. Delapan indikator (50 persen dari seluruh indikator) yang memiliki capaian dengan status sangat tinggi dan tinggi (Gambar 4.27). Indikator yang memiliki kinerja sangat tinggi antara lain kondusivitas keamanan dan ketenagakerjaan. Selain itu, indikator yang termasuk dalam kinerja tinggi adalah akuntabilitas, kesetaraan gender, infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar, partisipasi, dan kualitas lingkungan. Kinerja indikator yang rendah ditunjukkan kemampuan fiskal daerah.



Gambar 4.27 Rerata Kinerja Indikator DSDB

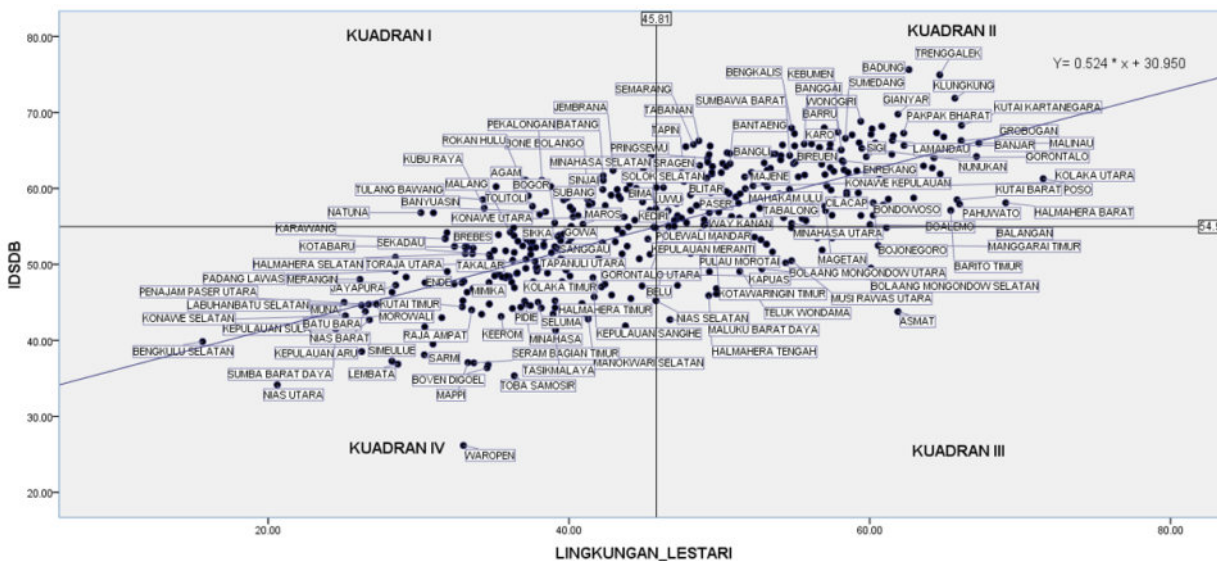
Upaya penguatan daya saing daerah di Indonesia belum dibangun secara utuh di atas prinsip berkelanjutan. Gambaran ini tampak dalam kinerja yang tidak optimal dari sejumlah indikator seperti lingkungan seperti daya dukung ekonomi wilayah, tata kelola berkelanjutan, manajemen pengelolaan sampah, hingga manajemen pengelolaan sampah. Capaian yang diraih indikator tersebut masih jauh dari kriteria minimal status tinggi (60) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan berjalan *vis a vis*.

3. Analisis Kuadran

3.1. Kaitan IDSDB dan Kinerja Pilar

a. Kinerja IDSDB dan Pilar Lingkungan Lestari

Kinerja pilar lingkungan lestari memiliki korelasi yang positif terhadap DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian DSDB sedang dan rendah (*bottom three*) seperti Waropen, Nias Utara, dan Toba Samosir berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan. Selain itu, *bottom three* pada pilar lingkungan lestari (Sumba Tengah, Nias Utara, dan Bengkulu Selatan) berada pada kuadran yang sama dengan daerah berkinerja IDSDB *bottom three*. Pada aras komposisi, daerah yang berada pada kuadran I dan kuadran III lebih sedikit dibandingkan daerah pada kuadran II dan IV. Gambar 4.28 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan lestari dan kinerja IDSDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.28 Kinerja DSDB dan Pilar Lingkungan Lestari

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja DSDB tinggi namun memiliki performa pilar lingkungan lestari yang rendah dengan jumlah mencapai 52 (13 persen). Jumlah titik daerah yang berada dalam titik ini relatif lebih sedikit dibandingkan

dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa DSDB yang tinggi pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar lingkungan lestari. Misalnya, kinerja DSDB tinggi di Banyuwangi masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar lingkungan lestari.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan upaya penguatan DSDB dimana jumlah daerah pada kuadran ini mencapai 148 (38 persen). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang hampir sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja tinggi seperti Badung, Trenggalek, maupun Klungkung memiliki peluang untuk meraih capaian DSDB yang tinggi.

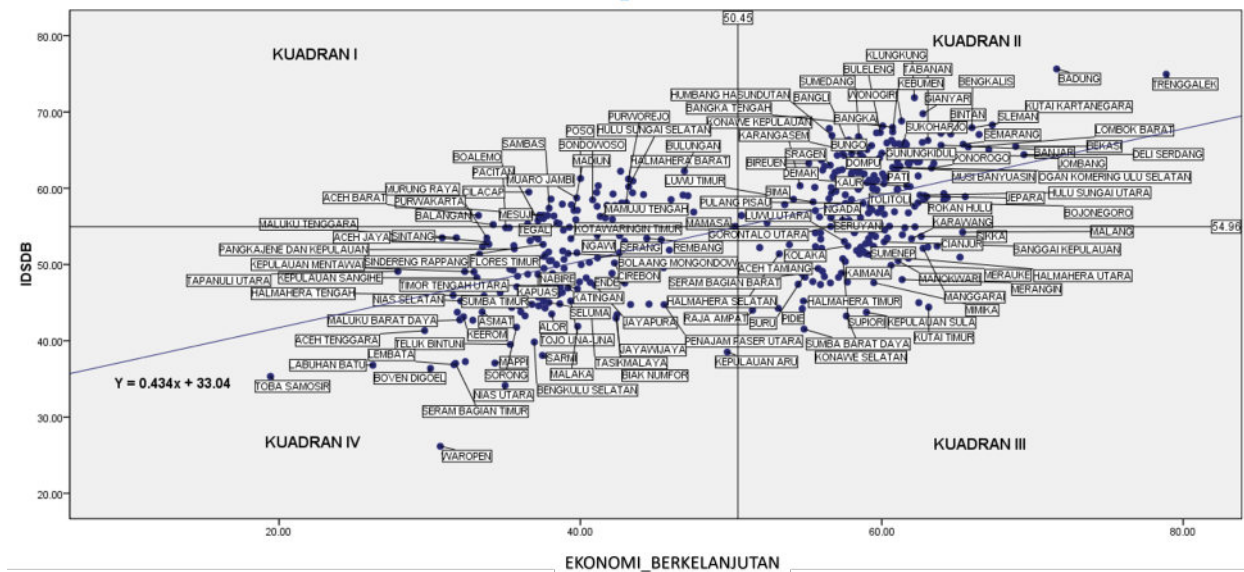
Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dengan jumlah daerah mencapai 42 (11 persen). Capaian pilar lingkungan lestari yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan lestari yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu menjaga kelestarian lingkungan dan bermasalah pada penguatan DSDB. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang hampir sama dengan kuadran II dengan jumlah 145 daerah (37 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar lingkungan lestari memiliki persoalan yang serupa pada kinerja DSDB. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

b. Kinerja IDSDB dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kinerja pilar ekonomi berkelanjutan memiliki korelasi yang positif DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan

Klungkung berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian DSDB sedang dan rendah (*bottom three*) yakni Waropen, Nias Utara, dan Toba Samosir berada pada kuadran IV. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat daerah yang memiliki capaian ekonomi berkelanjutan yang baik namun belum memberikan daya ungkit terhadap capaian DSDB di daerah. Terkait komposisi, daerah yang berada pada kuadran I maupun kuadran III relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Gambar 4.29 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar ekonomi berkelanjutan dan kinerja IDSDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.29 Kinerja DSDB dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja DSDB tinggi namun memiliki performa pilar ekonomi berkelanjutan yang rendah dengan jumlah mencapai 50 (13 persen). Jumlah titik daerah yang berada dalam titik ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa DSDB yang tinggi pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar ekonomi berkelanjutan. Misalnya, kinerja DSDB tinggi di Cilacap sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan, sebab tingginya capaian DSDB di daerah ini lebih dipengaruhi oleh kinerja pilar inklusi sosial dan lingkungan lestari.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan upaya penguatan DSDB dimana jumlah daerah pada kuadran ini mencapai 149 (39 persen). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung memiliki peluang untuk meraih capaian DSDB yang tinggi.

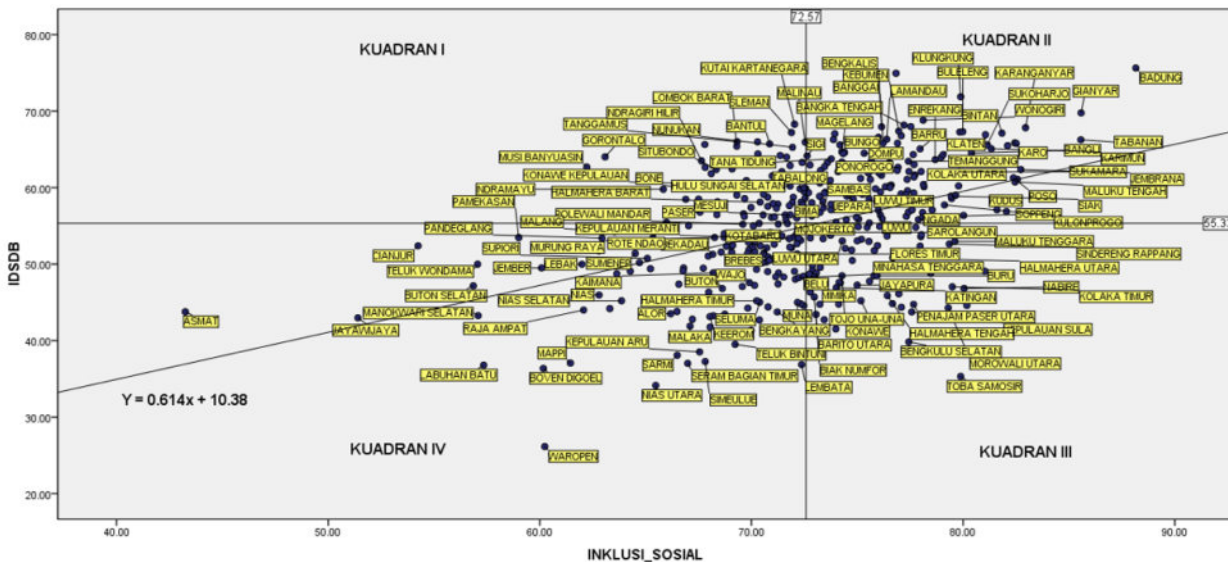
Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang berada pada kuadran ini mencapai 74 (19 persen). Capaian pilar ekonomi berkelanjutan yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi berkelanjutan yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Salah satu contohnya adalah Halmahera Utara dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar lingkungan lestari dan tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV (merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar ekonomi berkelanjutan dengan baik dan bermasalah pada penguatan DSDB). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II dengan jumlah 114 daerah (29 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan memiliki persoalan yang serupa pada kinerja DSDB. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

c. Kinerja IDSDB dan Pilar Inklusi Sosial

Kinerja pilar inklusi sosial memiliki korelasi yang positif terhadap capaian DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan

capaian DSDB *bottom three* yakni Waropen dan Nias Utara berada pada kuadran IV. Toba Samosir (*bottom three*) sendiri berada pada kuadran III, artinya memiliki kinerja pilar inklusi sosial yang tinggi namun memiliki kinerja yang rendah pada IDSDB. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar inklusi sosial terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan. Tipologi ini menunjukkan komposisi daerah yang berada pada setiap kuadran relatif merata dan titik data mendekati posisi equilibrium (kinerja IDSDB = kinerja pilar inklusi sosial). Gambar 4.30 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDB yang tergolong dalam empat kuadran.



Gambar 4.30 Kinerja DSDB dan Pilar Inklusi Sosial

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja DSDB tinggi namun memiliki performa pilar inklusi sosial yang rendah dengan jumlah mencapai 75 (19 persen). Jumlah titik daerah yang berada dalam titik ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa DSDB yang tinggi pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar inklusi sosial. Misalnya, kinerja DSDB tinggi di Kutai Kartanegara tidak diimbangi oleh kinerja pada pilar inklusi sosial akibat capaian yang rendah pada variabel kesetaraan gender.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam menjaga inklusivitas sosialnya selaras dengan upaya

penguatan DSDB dengan jumlah daerah mencapai 125 (32 persen). Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung memiliki peluang untuk meraih capaian DSDB yang tinggi.

Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang berada pada kuadran ini mencapai 75 (19 persen). Capaian pilar inklusi sosial yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja inklusi sosial yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Salah satu contohnya adalah Toba Samosir dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar inklusi sosial namun mengalami kinerja yang buruk pada pilar ekonomi berkelanjutan, lingkungan lestari, dan tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu menjaga kelestarian lingkungan dan bermasalah pada penguatan DSDB. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II, yakni mencapai 112 (29 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar inklusi sosial memiliki persoalan yang serupa pada kinerja DSDB. Bukti sahnya, dua daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB (Waropen dan Nias Utara) masuk pada kuadran ini.

d. Kinerja IDSDB dan Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki korelasi yang positif terhadap capaian penguatan DSDB di daerah. Daerah dengan kinerja daya saing daerah tinggi (*top three*) seperti Badung, Trenggalek, dan Klungkung berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian DSDB sedang (*bottom three*) seperti Waropen, Nias Utara, dan Toba Samosir berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian

Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang berada pada kuadran ini mencapai 43 (11 persen). Capaian pilar tata kelola berkelanjutan yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja DSDB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tata kelola berkelanjutan yang tinggi belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian DSDB. Salah satu contohnya adalah Lampung Selatan dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar lingkungan lestari dan ekonomi berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

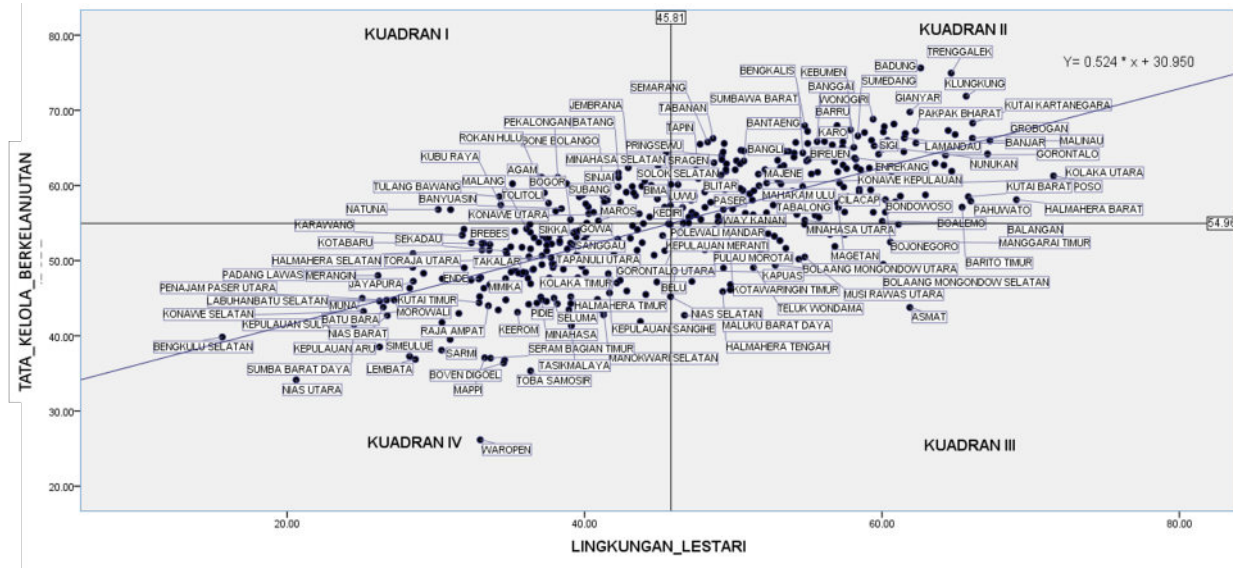
Terakhir, keberadaan sejumlah daerah pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan dan bermasalah pada penguatan DSDB. Jumlah titik yang berada pada kuadran ini mencapai 144 daerah (37 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar tata kelola berkelanjutan memiliki persoalan yang serupa pada kinerja DSDB. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDDB masuk pada kuadran ini.

3.2 Kaitan Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lain

a. Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lingkungan Lestari

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki korelasi yang positif terhadap capaian pilar lingkungan lestari di daerah. Daerah dengan kinerja pilar tata kelola berkelanjutan tinggi seperti Badung dan Trenggalek berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan rendah (*bottom three*) seperti Waropen, Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Timur berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDDB secara keseluruhan.

Anomali terlihat pada tipologi ini dimana Sanggau sebagai daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan sangat tinggi memiliki masalah pada capaian pilar lingkungan lestari. Wilayah yang berada pada kuadran I dan III memiliki karakter permasalahan yang berbeda dimana salah satu sisi memiliki kinerja baik namun buruk pada sisi lainnya. Gambar 4.32 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.32 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Lingkungan Lestari

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja tata kelola berkelanjutan tinggi namun memiliki performa lingkungan lestari yang rendah. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah sejumlah 82 (21 persen) dimana hal ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar lingkungan lestari. Misalnya, kinerja tata kelola pemerintahan yang optimal di Malang sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar lingkungan lestari.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan sehingga berdampak pada lingkungan yang lestari. Daerah yang berada pada kuadran ini adalah sejumlah 145 (37 persen) dimana jumlah titik yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang nyaris

sama dengan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan cenderung memiliki kinerja lingkungan lestari yang tinggi. Buktinya, daerah yang berada pada level *top three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

Kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran

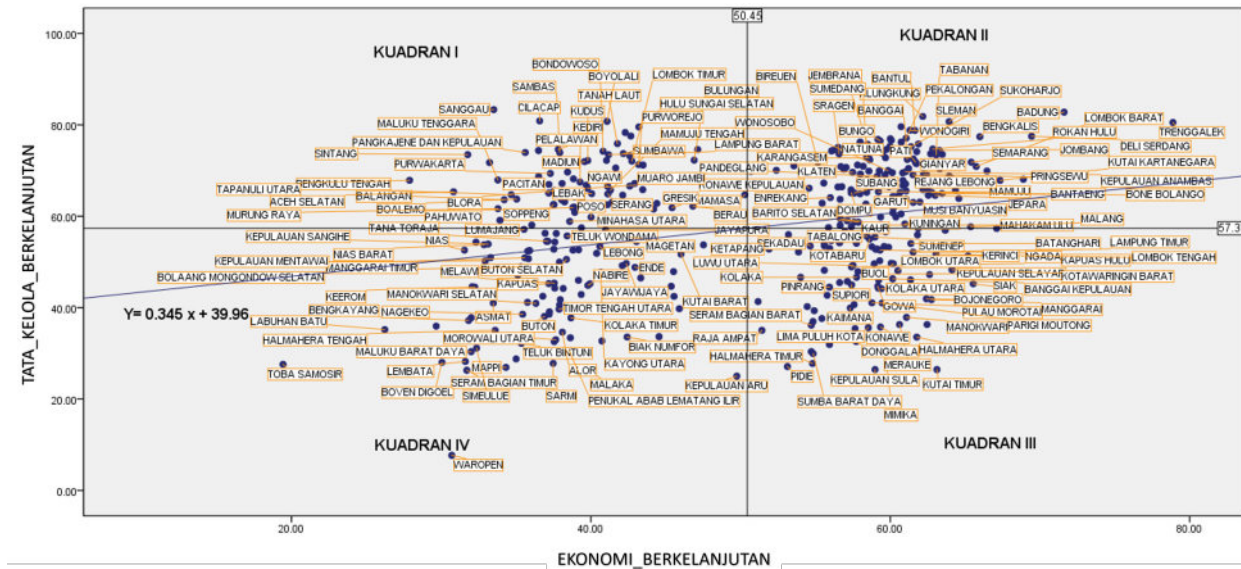
I. Capaian pilar lingkungan lestari yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum sepenuhnya ditunjang oleh kinerja tata kelola berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu kinerja tata kelola berkelanjutan tidak memberikan dampak pada kinerja pilar lingkungan lestari. Salah satu contohnya adalah Asmat dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar lingkungan lestari namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit (45 daerah/12 persen).

Terakhir, keberadaan 115 daerah (30 persen) pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar lingkungan lestari dengan baik dan bermasalah pada perwujudan tata kelola yang berkelanjutan. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar lingkungan lestari memiliki persoalan yang serupa pada kinerja tata kelola berkelanjutan. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

b. Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki korelasi yang positif terhadap capaian pilar ekonomi berkelanjutan di daerah. Daerah dengan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan tinggi seperti Malang, Badung, dan Deli Serdang berada pada kuadran II. Di sisi lain, daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan rendah (*bottom three*) yakni Waropen, Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Timur berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap

kinerja IDSDB secara keseluruhan. Gambar 4.33 menunjukkan keterkaitan antara kinerja pilar lingkungan dan kinerja IDSDB yang tergolongkan dalam empat kuadran.



Gambar 4.33 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja tata kelola berkelanjutan tinggi namun memiliki performa ekonomi berkelanjutan yang rendah. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah sejumlah 77 (20 persen) dimana hal ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran II dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar ekonomi berkelanjutan. Misalnya, kinerja tata kelola pemerintahan yang optimal di Mamuju Tengah sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan.

Kuadran II menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan sehingga berdampak pada kinerja ekonomi yang berkelanjutan. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah 134 (35 persen) dimana terdapat sebaran yang hampir sama dengan kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan cenderung memiliki kinerja

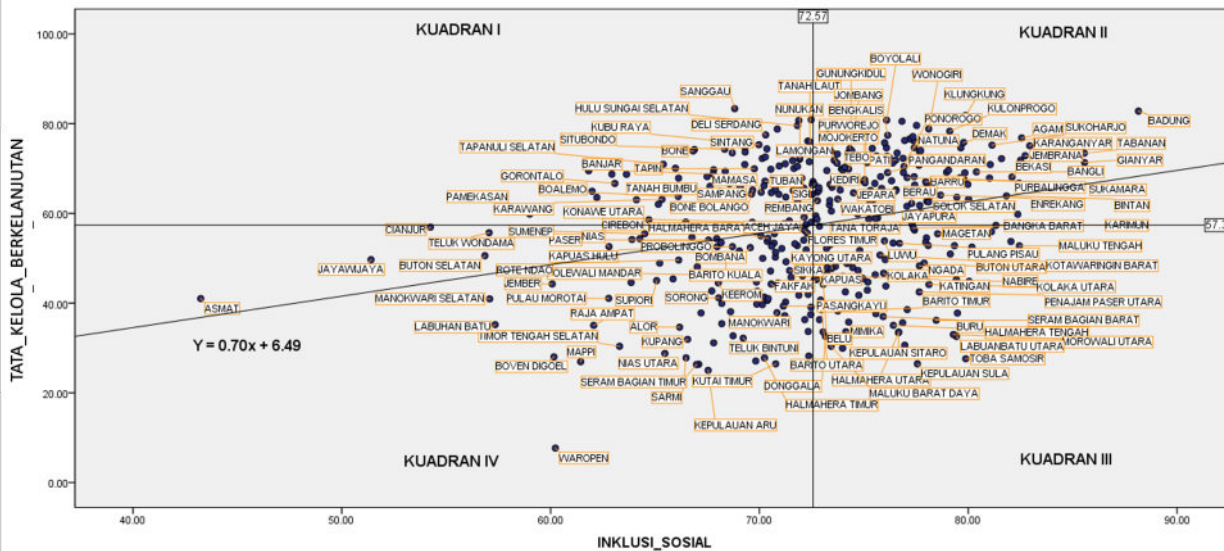
ekonomi berkelanjutan yang tinggi. Buktinya, daerah yang berada pada level *top three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

Kinerja yang tersaji dalam kuadran III menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I dimana jumlah daerah yang berada dalam kuadran ini mencapai 88 (23 persen). Capaian pilar ekonomi berkelanjutan yang tinggi pada daerah dalam kuadran ini belum sepenuhnya ditunjang oleh kinerja tata kelola berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu kinerja tata kelola berkelanjutan tidak memberikan dampak pada kinerja pilar ekonomi berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Parigi Moutong dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini relatif sedikit.

Terakhir, keberadaan 88 daerah (23 persen) pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar ekonomi berkelanjutan dengan baik dan bermasalah pada perwujudan tata kelola yang berkelanjutan. Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar ekonomi berkelanjutan memiliki persoalan yang serupa pada kinerja tata kelola berkelanjutan. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

c. Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Inklusi Sosial

Kinerja pilar tata kelola berkelanjutan memiliki korelasi yang positif terhadap capaian pilar inklusi sosial di daerah. Daerah dengan kinerja pilar inklusi sosial tinggi seperti Badung, Gianyar, dan Tabanan berada pada kuadran II. Sebaliknya, daerah dengan capaian tata kelola berkelanjutan rendah (*bottom three*) yakni Waropen, Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Timur berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan adanya linearitas antara capaian pilar ini terhadap kinerja IDSDB secara keseluruhan.



Gambar 4.34 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan dan Pilar Inklusi Sosial

Kuadran I menggambarkan daerah-daerah berkinerja tata kelola berkelanjutan tinggi namun memiliki performa inklusi sosial yang rendah. Daerah yang berada dalam kuadran ini adalah sejumlah 87 (22 persen) dimana hal ini lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang berada pada kuadran III dan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan pada wilayah tertentu belum dipengaruhi oleh kinerja pilar inklusi sosial. Misalnya, kinerja tata kelola pemerintahan yang optimal di Sintang sebagai masih mengalami kinerja yang rendah pada pilar inklusi sosial.

Kuadran II (kinerja tata kelola berkelanjutan tinggi dan inklusi sosial tinggi) menggambarkan keberhasilan sejumlah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan sehingga berdampak pada kinerja ekonomi yang berkelanjutan. Jumlah titik yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran terbanyak dibandingkan kuadran lainnya, yakni 124 daerah (32 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan cenderung memiliki inklusivitas sosial yang tinggi. Buktinya, daerah yang berada pada level *top three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

Kuadran III (kinerja tata kelola berkelanjutan rendah dan inklusi sosial tinggi) menunjukkan antitesis atas kinerja pada Kuadran I. Capaian pilar inklusi sosial yang tinggi pada daerah

dalam kuadran ini belum sepenuhnya ditunjang oleh kinerja tata kelola berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu kinerja tata kelola berkelanjutan tidak memberikan dampak pada kinerja pilar inklusi sosial. Salah satu contohnya adalah Kepulauan Sula dimana daerah ini memiliki capaian yang tinggi pada pilar inklusi sosial namun mengalami kinerja yang tidak optimal pada pilar tata kelola berkelanjutan. Sama halnya dengan kuadran I, jumlah daerah yang berada pada titik ini paling sedikit dibandingkan dengan kuadran lain, yakni 76 daerah (20 persen).

Terakhir, keberadaan 100 daerah (26 persen) pada kuadran IV merupakan cerminan problematika daerah yang belum mampu mengelola kinerja pilar inklusi sosial dengan baik dan bermasalah pada perwujudan tata kelola yang berkelanjutan.

Jumlah titik daerah yang berada pada kuadran ini memiliki sebaran yang sama dengan kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkinerja rendah pada pilar inklusi sosial memiliki persoalan yang serupa pada kinerja tata kelola berkelanjutan. Bukti sahnya, daerah yang berada pada level *bottom three* IDSDB masuk pada kuadran ini.

4. Analisis Kategorial

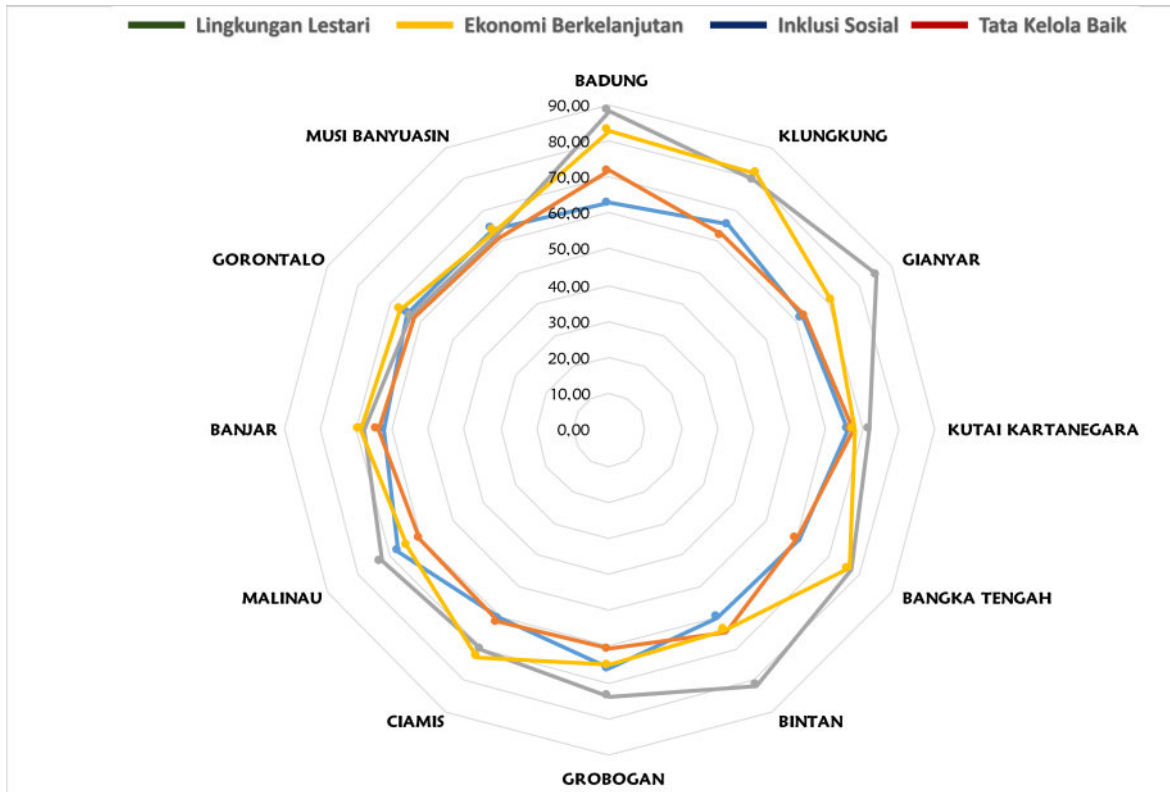
Kinerja DSDB pada umumnya berada di level sedang. Capaian ini sama dengan temuan pada kelenkapan data 100 persen dimana setiap regio di Indonesia memiliki karakteristik yang sama, yakni didominasi dengan tingkat DSDB sedang. Citra spasial menunjukkan bahwa setiap regio didominasi oleh daerah berdaya saing sedang (bdk. Gambar 4.35) dimana hanya pulau Jawa saja yang didominasi dengan tingkat DSDB tinggi yang dicitrakan dengan warna hijau. Pada wilayah lainnya, derajat daya saing daerah berkelanjutan masih didominasi oleh warna kuning. Satu-satunya warna merah yang menunjukkan derajat daya saing daerah berkelanjutan yang rendah terlihat di Pulau Papua. Hasil citra ini membuktikan anggapan bahwa pembangunan selama ini hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa tidak dapat dipungkiri.

Daerah yang berdekatan dengan kawasan perkotaan dan/ atau ibukota provinsi memiliki daya saing tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan membangun Indonesia dari tepi terluar belum berjalan dengan optimal karena pembangunan di level Kabupaten sebagian besar masih bertumpu pada *spillover effect* kawasan perkotaan. Sama seperti kondisi pada klaster data 100 persen, keberadaan daerah dengan kinerja IDSDB tinggi di setiap regio merupakan peluang bagi daerah-daerah sekitarnya untuk mempelajari dan menduplikasi praktik-praktik baik dalam rangka pengembangan daya saing daerah berkelanjutan dalam agenda pembangunan daerah.

4.1 Kategori Tinggi

Jumlah daerah dengan kinerja tinggi mencapai 27,91 persen (108 kabupaten). Jika dilihat secara kewilayahan, maka terdapat 75 daerah di wilayah Indonesia Barat yang memiliki derajat daya saing yang tinggi, pada wilayah Indonesia Tengah terdapat 32 daerah yang memiliki derajat daya saing yang tinggi, dan terdapat satu daerah di wilayah Indonesia Timur dengan derajat daya saing tinggi, yakni Maluku Tengah.

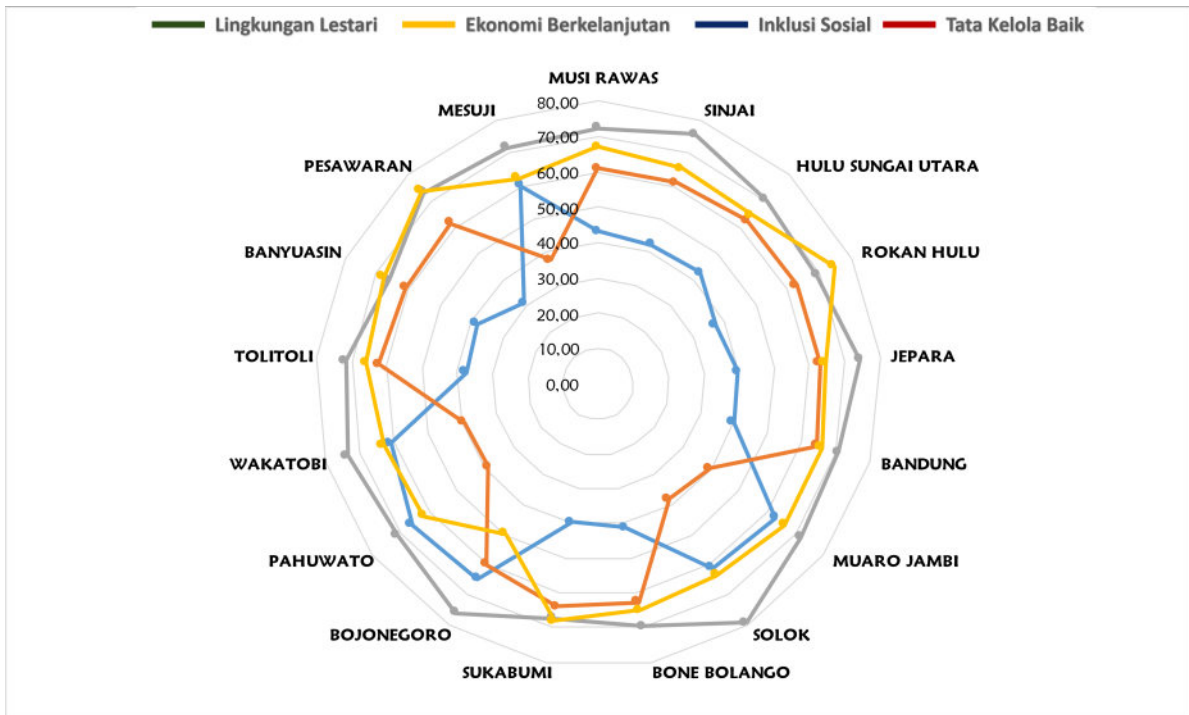
Pada kategori ini, dua belas daerah memiliki daya saing pilar yang tinggi pada setiap pilarnya. Dua belas daerah tersebut memperoleh skor pilar di atas 60.. Daerah yang dimaksud adalah Badung-Badung (Peringkat 1), Trenggalek-Jawa Timur (2), Klungkung-Bali (3), Gianyar-Bali (4), Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur (6), Bangka Tengah-Bangka Belitung (7), Bintan-Kepulauan Riau (15), Grobogan-Jawa Tengah (21), Ciamis-Jawa Barat (24), Malinau-Kalimantan Utara (25), Banjar-Kalimantan Selatan (31), dan Gorontalo-Gorontalo (50). Enam daerah di luar *top ten* yang memiliki status tinggi pada setiap pilarnya.



Gambar 4.35 Capaian pada daerah yang memiliki capaian tinggi pada setiap pilar

4.2 Kategori Sedang

Daerah berkinerja sedang mencapai 71.83 persen (278 kabupaten). Secara kewilayahan, 153 daerah berada di wilayah Indonesia Barat yang, sedangkan 92 daerah beradadi wilayah Indonesia Tengah, dan 33 daerah di Indonesia Timur. Daerah yang memiliki kinerja tinggi pada pilar lingkungan lestari meliputi yakni Muaro Jambi-jambi, Solok-Sumatera Barat, Bojonegoro-Jawa Timur, Pohuwato-Gorontalo, dan Wakatobi-Sulawesi Tenggara (Bdk. Gambar 4.36). Uniknya, terdapat satu daerah yang tidak memiliki capaian yang tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan, yakni Bojonegoro. Penyebab anjloknya nilai Bojonegoro adalah ketiadaan data terkait indikator efisiensi (terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik) sehingga berdampak pada kalkulasi nilai keseluruhan pada pilar tata kelola berkelanjutan.



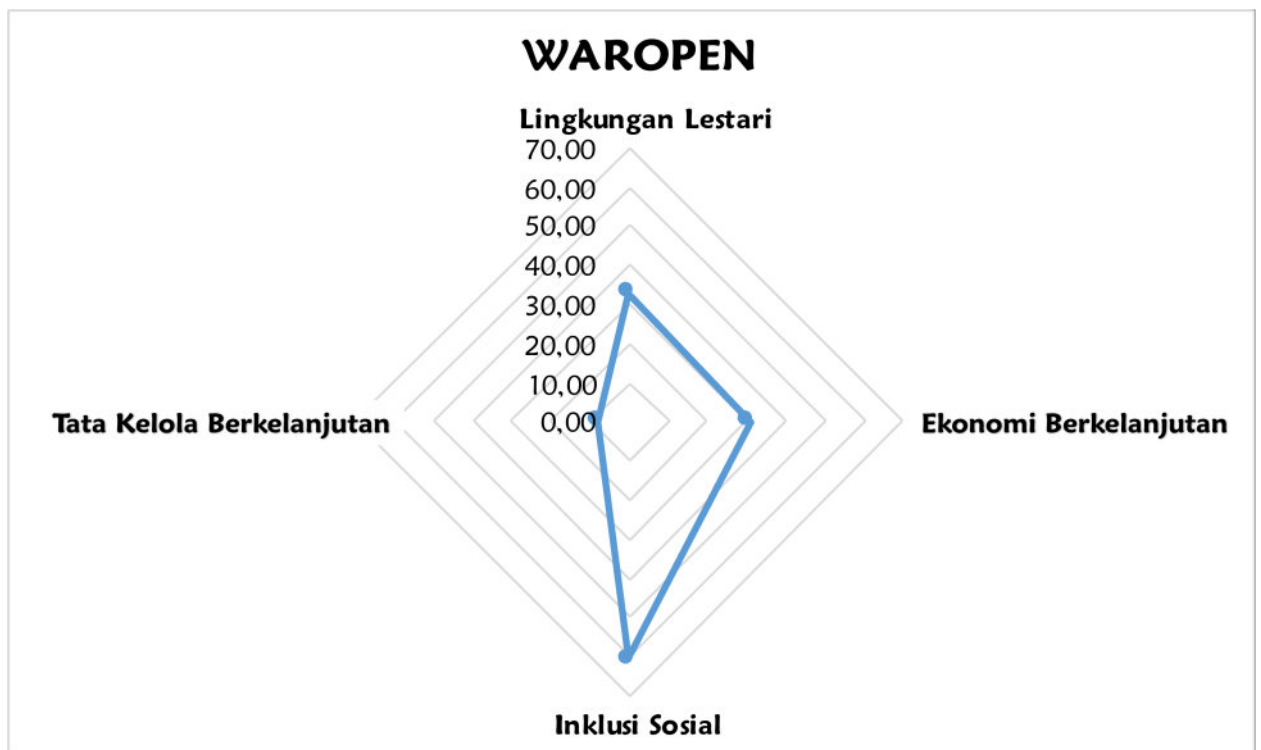
Gambar 4.36 Capaian pada daerah berdaya saing sedang yang memiliki capaian tinggi pada tiga pilar

4.3 Kategori Rendah

Waropen (Papua) menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki capaian rendah. Akar masalahnya adalah kelengkapan data dan capaian yang minim pada sejumlah indikator. Ihwal kelengkapan data, peneliti tidak menemukan data pada indikator (1) Indeks Kualitas Air, (2) Realisasi Pengelolaan Sampah, (3) Partisipasi Masyarakat, dan (4) Indeks Inovasi Daerah. Padahal, capaian Kabupaten ini pada pilar lingkungan lestari sangatlah baik, terutama terkait kualitas lingkungan.

Pada pilar ekonomi berkelanjutan, Waropen memiliki tingkat daya dukung wilayah yang rendah serta kualitas jalan baik yang masih minim (17,39 persen). Selain itu, persoalan prevalensi stunting yang masih jauh dari target pemerintah pusat serta pembangunan gender yang masih di angka 70 turut melemahkan posisi Waropen dalam pemeringkatan IDSDB. Persoalan tata kelola pemerintahan yang masih buruk (skor MCP 23,37; skor kepatuhan standar pelayanan publik 9,63; serta survey penilaian integritas 42,91) turut berkontribusi terhadap capaian anjlok Waropen pada pilar ini.

Waropen memiliki kinerja tinggi pada pilar inklusi sosial dengan capaian tinggi (60,23). Selibuhnya, capaian kabupaten ini pada tiga pilar lainnya masih rendah, bahkan capaian pilar tata kelola berada pada angka yang sangat rendah. Tentu hal ini relevan dengan apa yang terjadi di daerah, dimana pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah dengan berfokus dengan pemenuhan hak dasar manusia (sandang, pangan, papan) yang sebagian besar pengukurannya tercermin dalam pilar inklusi sosial.



Gambar 4.37 Capaian pada daerah berdaya saing rendah

5. Analisis Pilar

5.1 Lingkungan Lestari

a. Pengantar

Pilar Lingkungan Lestari pada bagian ini menggambarkan kondisi kualitas lingkungan, resiliensi lingkungan, dan pengelolaan sampah pada wilayah dengan kelengkapan data minimal 80 persen. Bengkulu Selatan-Bengkulu memiliki kinerja terendah (15,63) dan disusul Nias Utara-Sumatera Utara

(20,60), Muna-Sulawesi Tenggara (25,04), Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara (25,13), dan Simeulue-Aceh (28,22). Selain daerah-daerah tersebut masih terdapat 285 daerah yang berada di bawah nilai rata-rata (45,80). Artinya hanya 102 daerah yang berada di atas rata-rata pilar lingkungan. Salah satu penyebab rendahnya nilai pilar lingkungan lestari adalah ketidaklengkapan data Indeks Lingkungan Air (IKA) dan data pengelolaan sampah. Ketidaklengkapan data tersebut sangat mempengaruhi hasil akhir perhitungan pada pilar.

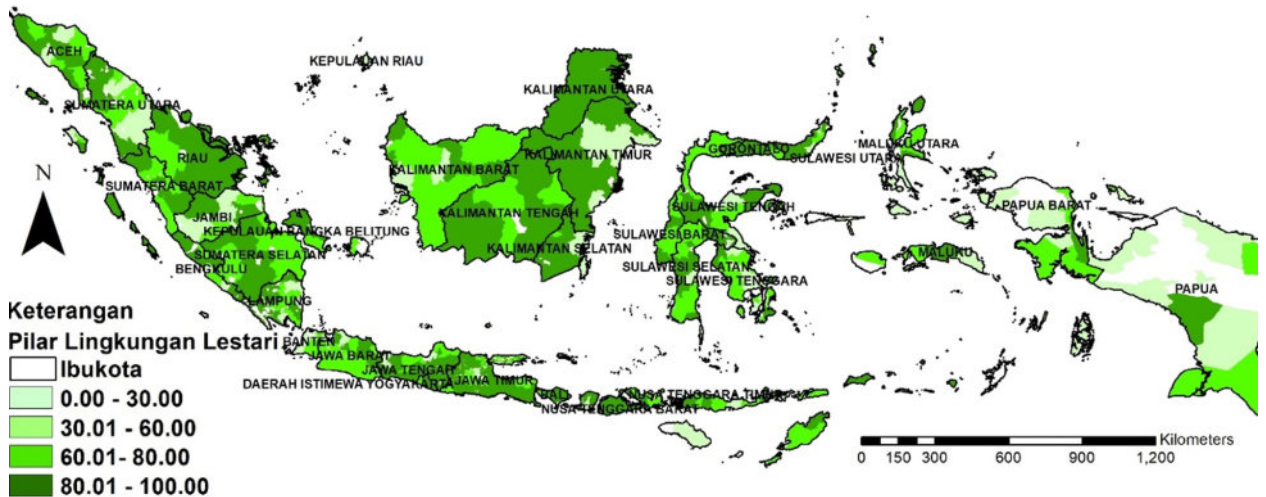
Penyebab dari rendahnya nilai pada kabupaten-kabupaten tersebut adalah capaian pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan pengelolaan sampah yang rendah. Kabupaten yang memiliki kelengkapan data pada setiap variabelnya, ternyata tidak serta merta memberikan kontribusi terhadap skor nilai pada pilar lingkungan. Hal ini menandakan bahwa kelengkapan data, pengukuran pada komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara berkala, dan pengelolaan sampah menjadi hal krusial yang mesti dibenahi dalam upaya perbaikan pengelolaan lingkungan yang mengarah pada peningkatan kualitas lingkungan dan tentunya sebagai upaya peningkatan daya saing daerah.

b. Temuan Umum

Pada pilar lingkungan lestari, Poso (Sulawesi Tengah) memiliki kinerja tertinggi yakni 71,53 (rerata nasional 45,81). Capaian ini disusul Halmahera Barat-Maluku Utara (69,04), Malinau-Kalimantan Utara (67,26), Lingga-Kepulauan Riau (67,10), Kutai Kertanegara-Kalimantan Timur (66,10), Grobongan-Jawa Tengah (66,08), -Gorontalo (65,97), Kutai Barat-Kalimantan Timur (65,80), dan Klungkung-Bali (65,66). Berdasarkan hasil pengolahan data, (kelengkapan data 100 persen dan 80 persen) terdapat beberapa perbedaan peringkat. Kelengkapan data 100 persen menempatkan Malinau sebagai posisi pertama dan dikelengkapan data 80 persen Malinau berada pada posisi ketiga. Perbedaan ini disebabkan *range*/nilai indikator yang tinggi pada kabupaten lain di kelengkapan data 80 persen.

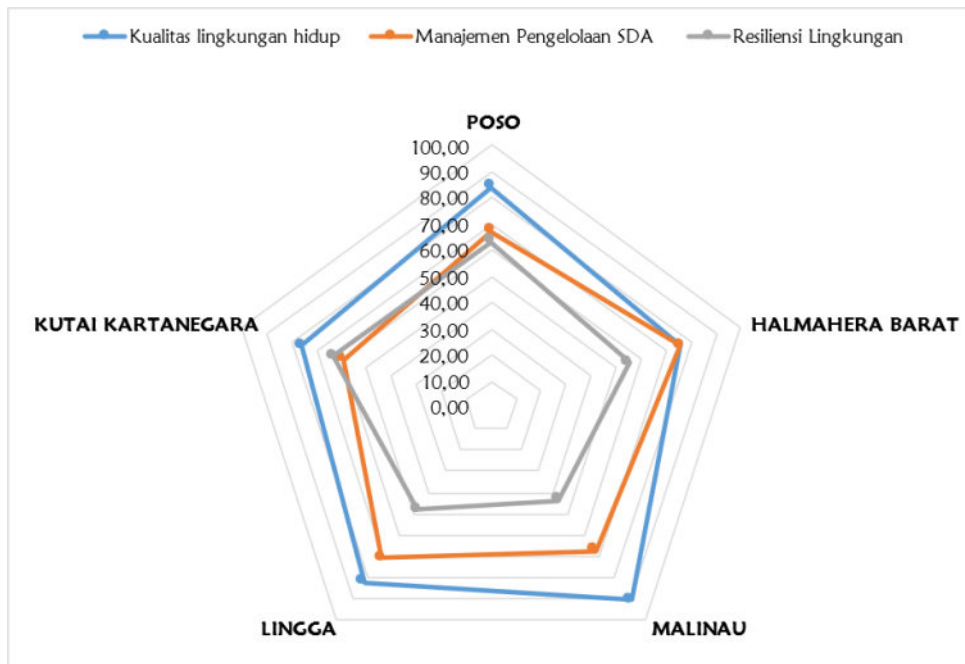
Hasil indeks menunjukkan bahwa kekuatan pilar lingkungan lestari yang semakin bermasalah ke sisi Timur Indonesia.

Persoalan ini disebabkan oleh dua faktor, yakni persoalan faktual lingkungan dan keberadaan kualitas publikasi data yang tidak merata di Indonesia Timur. Misalnya, daerah dengan kondisi lahan yang kering dan tidak memungkinkan untuk ditanami pohon tentu akan memiliki persoalan terkait tutupan lahan.



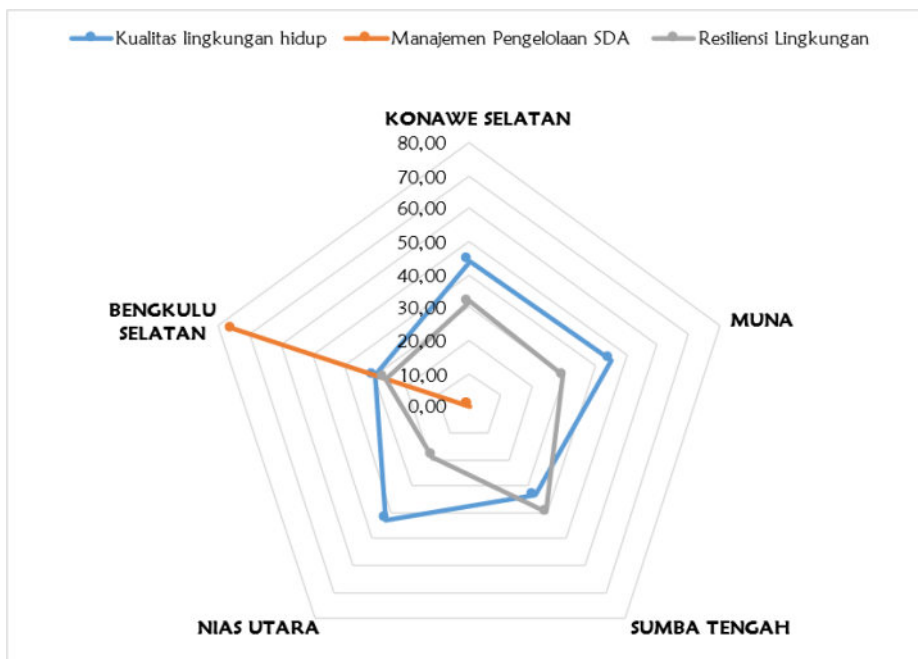
Gambar 4.38 Kinerja Pilar Lingkungan Lestari

Pada wilayah top five, terlihat keteraturan pola yang menggambarkan bahwa tingkat kualitas air, udara, dan tutupan lahan di daerah tersebut berada pada level sedang dan tinggi. Persoalan pada wilayah top five adalah capaian yang relatif rendah pada variabel resiliensi lingkungan. Isu kebencanaan tentu saja menjadi persoalan yang perlu diperhatikan sebagai prioritas, sebab daerah yang berada pada top five memiliki kerawanan terhadap bencana. Contoh: Poso dengan ancaman bencana gempa bumi, Malinau, Kutai Kertanegara, dan Lingga dengan ancaman longsor dan banjir; serta Halmahera Barat dengan ancaman Tsunami di wilayah pesisir. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah top five pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.39.



Gambar 4.39 Spider Web Top Five Pilar Lingkungan Lestari

Pola yang berbeda terlihat pada wilayah *bottom five*. Pada kasus ini, terdapat kabupaten dengan nilai kualitas lingkungan yang baik yang baik namun memiliki persoalan pada variabel manajemen pengelolaan SDA, yakni Nias Utara. Pola lainnya adalah ketiadaan data terkait pengelolaan sampah sehingga nilai hanya terlihat di Bengkulu Selatan. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *bottom five* pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.40.



Gambar 4.40 Spider Web Bottom Five Pilar Lingkungan Lestari

Kontribusi masing-masing variabel pembentuk pilar lingkungan lestari bervariasi. Kontribusi tertinggi adalah variabel kualitas lingkungan hidup dengan rerata 62,70, resiliensi/ketangguhan lingkungan terhadap bencana (45,08) dan manajemen pengelolaan SDA dan lingkungan (29,64). Dari sisi indikator, terdapat beberapa yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni: manajemen pengelolaan sampah, kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana dan risiko bencana di daerah. Capaian rerata tersebut dapat dilihat secara detail pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Nilai Rerata Indikator Pilar Lingkungan Lestari

No	Indikator	Nilai Rerata
1	Kualitas Udara	72,70
2	Kualitas Air	59,05
3	Kualitas Lahan	56,34
4	Intensitas Sampah	29,64
5	Risiko Bencana	45,38
6	Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah	44,79

Kotak 11. Inovasi Lingkungan Lestari Poso

Poso memiliki sejumlah inovasi yang mendorong kinerja tinggi pada pilar lingkungan lestari. Penataan bantaran sungai dengan tanaman toga, pengecetan dan pemberian bantuan tong sampah. Pembuatan instalasi pengelolaan air Limbah (IPAL) komunal untuk mengatasi limbah rumah tangga. Selain itu, komitmen masyarakat sekitar dan adat bersepakat untuk melestarikan alam dan kawasan cagar hutan Biosefer Lore Lindu. Pemerintah telah membuat perjanjian berupa penandatanganan MoU dengan 15 desa tentang komitmen dan kesepakatan menjaga dan memelihara asset berupa hutan.

Pemerintah Kabupaten Poso juga mengkampanyekan perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan slogan *sampapitu* sampah pilahan itu uang. Program ini merupakan salah satu inovasi pemda untuk mengurangi volume sampah di masyarakat (mengumpulkan, pemilihan dan penjualan sampah). Dalam mengelola sampah bupati juga melibatkan komponen masyarakat dan dunia usaha melalui program bank sampah menuju pusat daur ulang, implikasinya jumlah sampah yang masuk ke TPA berkurang secara periodik.

Kabupaten Poso sangat rentan dengan banjir bandang dengan ketinggian 1-1.5 meter. Pemerintah Kabupaten Poso (BPBD) telah membentuk Tim Reaksi Cepat dalam menanggulangi banjir dengan menetapkan status waspada jika intensitas curah hujan tinggi. Sosialisasi dan pelatihan mabajemen dan analisis resioko juga dilakukan sebagai mitigasi jika terjadi bencana.

Daerah dengan capaian pilar lingkungan lestari terendah adalah Bengkulu Selatan-Bengkulu (15,64), disusul Nias Utara-Sumatera Utara (20,60), Sumba Tengah-NTT (24,49), Muna-Sulawesi Tenggara (25,05), dan Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara (25,13). Bengkulu Selatan bermasalah pada variabel kualitas lingkungan dan risiliensi lingkungan. Data pada variabel kualitas lingkungan (udara, Lahan dan air) tidak bisa diakses memperpuruk kinerja daerah ini. Terdapat beberapa catatan dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, dimana Provinsi Bengkulu merupakan satu dari 14 provinsi yang belum memenuhi indeks kualitas air.

c. Variabel Pembentuk Lingkungan Lestari

1. Kualitas Lingkungan Hidup

Nunukan (Kalimantan Utara) menempati peringkat tertinggi pada kinerja kualitas lingkungan (92,61). Daerah ini unggul dalam setiap indikator kualitas lingkungan hidup yakni: kualitas udara (93,87) dan kualitas tutupan lahan (92,81) dan kualitas air (91,15). Dalam mencapai tingkat keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan sejumlah kebijakan sebagai langkah intervensi. Kebijakan tersebut meliputi pemantauan kualitas air, penurunan beban pencemaran air dan udara, pemulihan sumber-sumber air dan menjaga debit air untuk mendukung fungsi lahan pertanian.

Sementara kinerja kualitas terendah dialami Bengkulu selatan (-55,00). Bengkulu Selatan bermasalah pada variabel kualitas lingkungan karena keterbatasan akses untuk mendapatkan data tidak bisa diakses memperpuruk kinerja daerah ini. Selain itu, Provinsi Bengkulu merupakan satu dari 14 provinsi yang ketersediaan indeks kualitas air-nya masih nihil (Direktorat Jenderal Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, 2021).

2. Manajemen Sumber Daya Lingkungan

Manggarai Timur (NTT) memiliki kinerja tertinggi pada manajemen sumber daya alam dan lingkungan (100). Manggarai Timur terus berbenah, terutama dalam penanganan sampah. Di sejumlah lokasi telah dibangun TPS3R untuk mengurangi volume sampah di TPA. Selain itu sampah-sampah juga dipilah dan diolah kembali menjadi pupuk kompos dan kerajinan tangan. Terdapat beberapa capaian indikator lingkungan hidup khususnya di bidang persampahan diantaranya: pengelolaan jumlah sampah perkotaan yang dikelola mengalami peningkatan mencapai 131,57 persen di tahun 2021. Terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan pemda untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yakni peningkatan pengelolaan sampah melalui program 3R (RKPD Manggarai Timur, 2022)²⁰.

²⁰ RKPD Manggarai Timur. 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022.

Sementara itu, Simeulue (Aceh) menjadi kabupaten dengan kinerja terendah pada manajemen pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Capaian tersebut diikuti Aceh Singkil (Aceh), Aceh Tenggara (Aceh), Aceh Timur (Aceh), Pidie (Aceh), Toba Samosir (Sumatera Utara), Nias Utara (Sumatera Utara), Labuhan Batu Selatan (Sumatera Utara), Lahat (Sumatera Utara), Seluma (Bengkulu), Natuna (Kepulauan Riau), Nabire (Papua), Keerom (Papua), Merauke (Papua), Jayapura (Papua), dll dengan skor 0. Capaian yang rendah pada daerah ini, karena tidak memiliki ketersediaan/kelengkapan data tentang pengelolaan sampah.

3. Resiliensi Lingkungan

Buleleng (Bali) merupakan daerah dengan tingkat resiliensi lingkungan tertinggi (85,56). Capaian ini berada di atas (rerata nasional 45,09). Capaian ini disusul Indramayu (Jawa Barat), Karangasem (Bali), Magelang (Jawa Tengah), Klungkung (Bali), Maluku Tengah (Maluku), dan Sleman (Yogyakarta). Buleleng memiliki skor yang tinggi pada indikator kemampuan dan kapasitas daerah yang tinggi dalam menanggulangi bencana (skor 100) dan skor risiko bencana yang rendah (71,12). Sebagai mitigasi bencana, Buleleng telah membuat dokumen kajian kebencanaan tanah longsor, banjir dan banjir bandang. Pendataan potensi bencana daerah. Selain itu, daerah ini turut merancang aplikasi lapor/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan di daerah, sehingga memudahkan masyarakat untuk melapor bilamana terjadi bencana.

Daerah-daerah yang berkinerja rendah adalah Mandailing Natal-Sumatera Utara (16,67) disusul Nias Utara-Sumatera Utara (19,17), Majene-Sulawesi Barat (19,34), Aceh Besar-Aceh (20,32), dan Nias Barat-Sumatera Utara (20,03). Mandailing Natal berkinerja rendah karena tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. Lebih dari, kemampuan pemda dalam menanggulangi bencana juga buruk. Daerah Mandailing Natal sering mengalami bencana longsor dan banjir bandang. Manajemen bencana alam, seperti: pencegahan, kesiapan daerah menangani bencana,

cepat tanggap dan pemulihan pasca bencana, komitmen pemerintah daerah masih sangat buruk²¹.

Namun, Mandailing Natal telah membentuk destana (desa tangguh bencana) bagi desa-desa yang rawan bencana.

Tujuan pembentukan program ini adalah untuk memberikan fasilitas edukasi dan pemahaman bencana alam bagi masyarakat sebagai bentuk mitigasi jika terjadi bencana. Dilintas sektoral (OPD) telah dibentuk TRC (tim reaksi cepat) kabupaten untuk melaporkan kebutuhan masyarakat pascabencana. Hanya saja program ini masih bersifat himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat.

5.2 Ekonomi Berkelanjutan

a. Pengantar

Pilar Ekonomi berkelanjutan pada asumsi kelengkapan data minimal 80 persen menunjukkan fenomena dimana daerah berkinerja rendah berada di luar Pulau Jawa. Daerah dengan capaian rendah adalah Toba Samosir-Sumatera Utara (19,43), disusul Labuhan Batu-Sumatera Utara (26,23), Tapanuli Utara-Sumatera Utara (27,88), Aceh Tenggara-Aceh (29,66) Boven Digoel-Papua (30,05), Waropen-Papua (30,70), dan Aceh Selatan-Aceh (30,83). Selain kabupaten-kabupaten tersebut masih terdapat 158 daerah yang berada di bawah nilai rata-rata (50,45). Daerah dengan nilai terendah didominasi oleh daerah yang berada di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua.

Salah satu penyebab rendahnya kinerja ekonomi berkelanjutan tersebut adalah kapasitas fiskal daerah yang rendah. Penilaian ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Dimana Provinsi Aceh, NTT, Sulawesi Utara masuk dalam kategori KFD rendah, dan Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori KFD sangat rendah.

21 Arif & Rosni. 2021. Manajemen Bencana Alam Hungan dengan Kepuasan Publik di Daerah Bencana: Studi Kasus di Daerah Bencana Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Geografi Vol 02 (02).

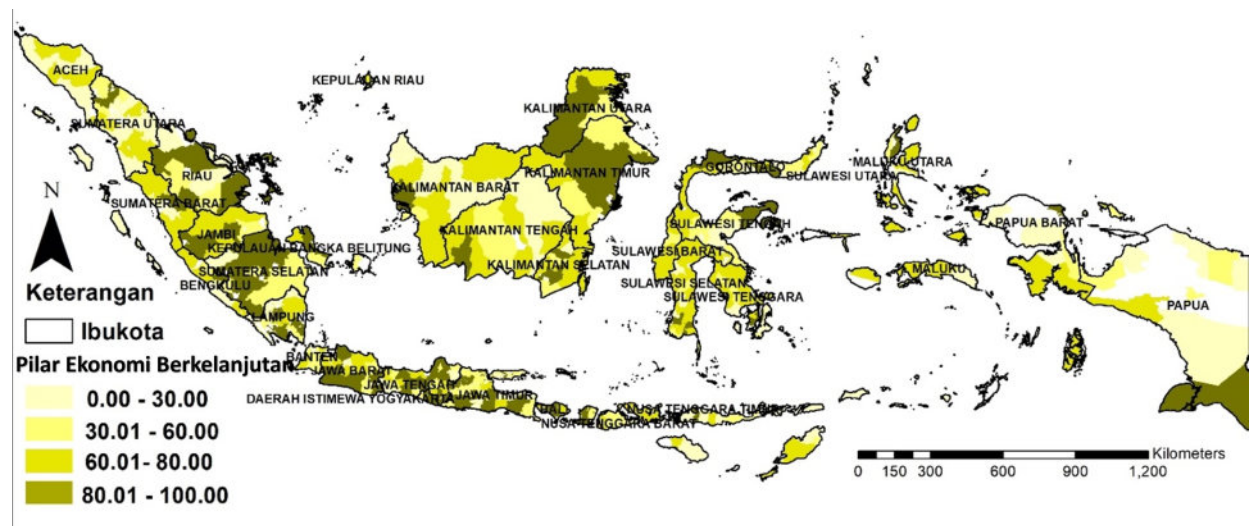
b. Temuan Umum

Daerah yang memiliki capaian di atas rata-rata nasional mencapai 57,36 persen. Daerah-daerah yang berada di atas rerata nasional umumnya terdapat di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sementara daerah yang berada di bawah rerata nasional umumnya berada di pulau Kalimantan dan Sulawesi. Data ini menunjukkan masih tinggi disparitas ekonomi antara Pualu Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tabel 4.6 menunjukkan capaian per indikator dimana terdapat dua indikator yang memperoleh capaian rendah, yakni daya dukung wilayah dan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan serius pada manifestasi prinsip berkelanjutan dalam penguatan ekonomi daerah akibat rendahnya nilai pada capaian daya dukung wilayah yang mempertimbangkan aspek lingkungan di dalamnya.

Tabel 4. 6 Nilai Rerata Indikator Pilar Ekonomi Berkelanjutan

No	Indikator	Nilai Rerata
1	Ratio Elektrifikasi	95,17
2	Pertumbuhan Angkatan Kerja	91,40
3	Ketersediaan Internet	58,00
4	Pertumbuhan Investasi Daerah	57,62
5	Sektor Basis Lestari	49,16
6	Kualitas Jalan	46,27
7	Daya dukung Wilayah	8,68
8.	Kemandirian Fiskal Daerah	7,55

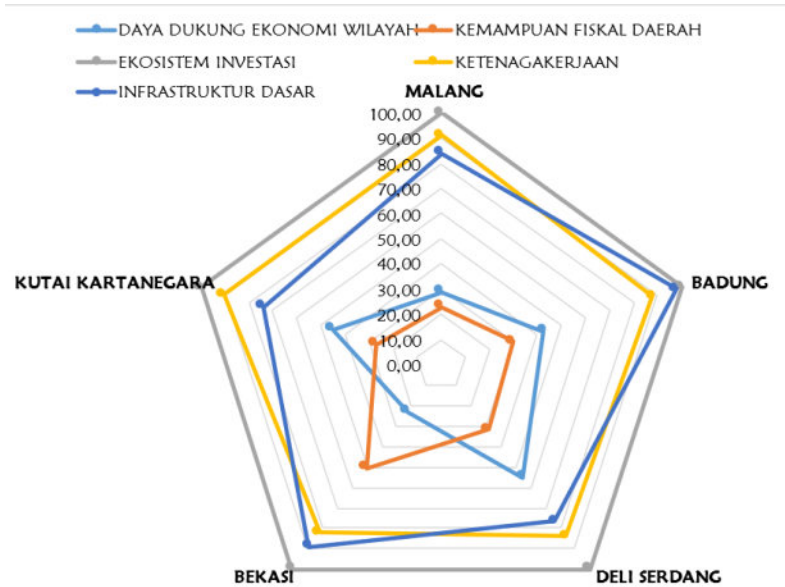
Kinerja pilar ekonomi berkelanjutan menunjukkan profil ketimpangan antar-wilayah. Gambar 4.41 memperlihatkan bahwa semakin mengarah ke wilayah Indonesia Timur, warna kuning dalam peta terlihat semakin memudar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah di kawasan Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Ketimpangan ini menjadi bukti sah terhadap anggapan yang selalu menarasikan ketertinggalan wilayah Indonesia Timur dari sisi ekonomi. Akan tetapi, tetap diperlukan sebuah *disclaimer* terhadap temuan ini, sebab Indonesia Timur memiliki persoalan pada sisi kelengkapan data sehingga hal ini turut mendeterminasi anjloknya capaian pilar ekonomi berkelanjutan di kawasan tersebut.



Gambar 4.41 Kinerja Pilar Ekonomi Berkelanjutan

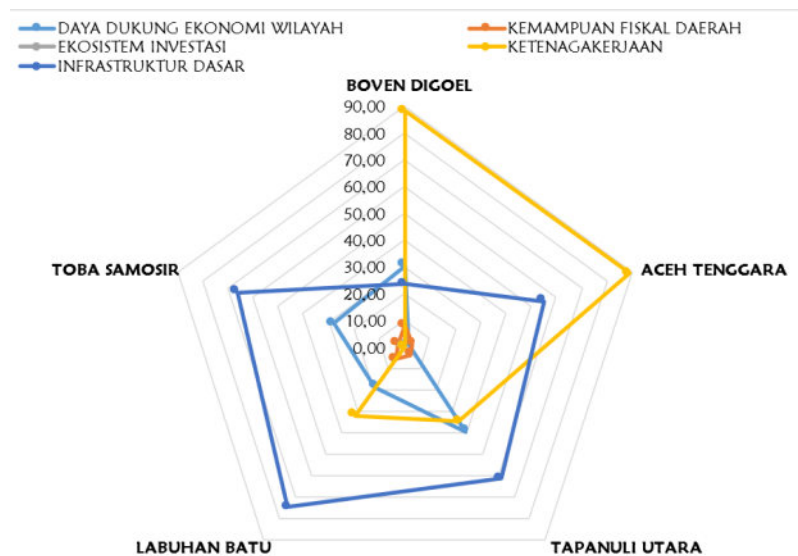
Pola yang terbentuk dalam *top five* dan *bottom five* pilar ekonomi berkelanjutan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik. Pada wilayah *top five*, terlihat keteraturan pola yang menggambarkan bahwa tingkat ekosistem investasi, infrastruktur ekonomi, hingga ketenagakerjaan berada pada level sangat tinggi. Persoalan pada wilayah *top five* adalah capaian yang relatif rendah pada variabel kemandirian fiskal daerah dan daya dukung wilayah.

Isu kelengkapan data pada akhirnya turut merubah konstelasi *top five* dan *bottom five* pada pilar ekonomi berkelanjutan di opsi pemeringkatan basis data 80 persen. Daerah yang termasuk dalam *top five* opsi 100 persen adalah Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Badung (Bali), Trenggalek (Jawa Timur), Karimun (Kepulauan Riau), dan Kuantan Singgigi (Riau). Menilik hasil pada pemeringkatan data 80 persen, terdapat perubahan signifikan dimana Malang menempati posisi puncak dalam pilar ini. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *top five* & *bottom five* pada pilar ekonomi berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.42.



Gambar 4.42 Spider Web Top Five Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kemudian, pola yang berbeda terlihat pada wilayah **bottom five**. Pada kasus ini, terdapat kabupaten dengan nilai ketenagakerjaan yang baik yang baik namun memiliki persoalan pada variabel ekosistem investasi dan infrastruktur ekonomi, yakni Boven Digoel (Papua) dan Aceh Tenggara (Aceh). Selain itu, daerah yang menempati *bottom five* dalam pemeringkatan ini memiliki masalah terkait kelengkapan data. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *top five & bottom five* pada pilar ekonomi berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.43.



Gambar 4.43 Spider Web Bottom Five Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Malang menjadi daerah dengan nilai pilar ekonomi berkelanjutan tertinggi yakni 78,88 dengan rerata nasional sebesar 50,49. Malang memiliki kinerja tinggi pada ekosistem investasi (100), ketenagakerjaan (90,78), dan infrastruktur ekonomi (84,08). Kunci tercapainya pertumbuhan investasi positif di Malang (kendati di masa pandemi) adalah berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dimana Pemerintah Kabupaten Malang memberikan insentif kepada investor yang berhasil memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, dan beberapa ketentuan lainnya. Namun, pekerjaan rumah daerah Malang adalah peningkatan kemampuan fiskal daerah dengan nilai (23,05) dan daya dukung ekonomi wilayah

Toba Samosir (Sumatera Utara) merupakan daerah dengan kinerja pilar ekonomi terendah (19,43), disusul Labuhan Batu-Sumatera Utara (26,23), Tapanuli Utara-Sumatera Utara (27,89), Aceh Tenggara-Aceh (29,87), dan Boven Digoel-Papua (30,05). Salah satu penyebab rendahnya pilar ekonomi berkelanjutan tersebut adalah kapasitas fiskal daerah yang rendah.. Penyebab lain rendahnya nilai pada kabupaten-kabupaten tersebut adalah tingkat pertumbuhan investasi yang masih minim. Misalnya, Toba Samosir memiliki persoalan realisasi investasi daerah yang menurun. Kemampuan daya dukung ekonomi wilayah yang rendah dan aksesibilitas yang masih minim terhadap infrastruktur ekonomi (jalan dan internet). Penyerapan tenaga kerja turut menyumbang lemahnya pilar ekonomi berkelanjutan di Toba Samosir dengan nilai 45,84 (merupakan terendah di seluruh kabupaten di Indonesia).

c. Variabel Pembentuk Ekonomi berkelanjutan

1. Daya Dukung Ekonomi

Kutai Barat (Kalimantan Timur) merupakan daerah yang memiliki skor tertinggi pada variabel daya dukung ekonomi (63,62). Capaian ini selaras dengan hasil pengukuran pada opsi

kelengkapan data 100 persen. Skor tertinggi berikutnya pada variabel daya dukung ekonomi adalah Bulungan-Kalimantan Utara (60,20), Merauke-Papua (57,07), Berau-Kalimantan Utara (56,26) dan Morowali-Sulawesi Barat (56,25). Senada dengan Kutai Barat, kabupaten-kabupaten ini juga memiliki persolan pada daya dukung ekonomi wilayah yang rendah. Kabupaten ini memiliki hambatan pada sisi pengembangan sektor tambang yang memiliki dampak negatif terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan itu sendiri.

Daerah dengan capaian terendah pada variabel ini adalah Aceh Singkil-Aceh (0,68) diikuti Pidie Jaya-Aceh (0,94), Pidie-Aceh (1,10), Simelue-Aceh (1,27), Aceh Tenggara-Aceh (1,42), Aceh Timur-Aceh (1,58), Aceh Tamiang-Aceh (1,62), Aceh Selatan-Aceh (1,64), Aceh Jaya-Aceh (2,06), dan Aceh Besar-Aceh (2,11). Interval capaian nilai pada kabupaten ini berkisar 0,68-4,58 , artinya kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh memiliki permasalahan pada daya dukung wilayah dan sektor basis lestari. Praktik pengelolaan sektor ekonomi (17 sektor PDRB) belum mampu mendukung ketahanan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh. Di sisi lain, sektor penyokong PDRB di provinsi Aceh merupakan sektor yang tidak masuk dalam daftar taksonomi hijau OJK atau dengan kata lain bukan termasuk sektor rendah karbon.

2. Keuangan Daerah

Bogor (Jawa Barat) menempati peringkat pertama pada variabel kemampuan keuangan daerah, capaian skor (64,90) dan di atas rerata nasional (7,34). Capaian ini disusul Bekasi-Jawa Barat (50,50), Tangerang-Banten (49,66), Bojonegoro-Jawa Timur (39,40), Bandung-Jawa Barat (37,87), Mimika-Papua (37,33), dan Bengkalis-Riau (35,23). Susunan kabupaten dengan capaian tertinggi ini memiliki sedikit perbedaan dengan adanya Kabupaten Mimika dan Bojonegoro dalam kategori ini. Selebihnya, tidak ada perubahan yang signifikan pada capaian tersebut karena adanya penggunaan skema opsi indeks berbasis kelengkapan data.

Daerah dengan capaian kemandirian fiskal daerah terendah adalah Phakpak Bharat-Sumatera Utara (0,00), diikuti Bolaang Mongondow Timur-Sulawesi Utara (0,57), Nagekeo_NTT (0,70), Kepulauan Talaud-Sulawesi Utara (0,71) dan Banggai Kepulauan-Sulawesi Selatan (0,78) dengan rerata nasional 7,34. Temuan menunjukkan bahwa 68,99 persen daerah yang memiliki capaian kemandirian fiskal daerah di bawah rata-rata nasional. Hal ini menandakan daerah-daerah tersebut masih mengandalkan dana perimbangan (TKD). Tahun 2021 menunjukkan realisasi pajak di Phakpak Barat masih rendah (per Oktober 2021) mencapai 12,39 miliar rupiah dari total target 20 miliar rupiah. Adapun perbandingan pendapatan asli daerah dengan dana tranfer memiliki *gap* yang sangat jauh (PAD: 20,74 miliar rupiah dan Dana transfer 505,63 miliar rupiah).

3. Ekosistem Investasi

Badung (Bali) memiliki kinerja ekosistem investasi yang positif (skor indeks 100) bersama 223 Kabupaten lainnya. Sementara itu terdapat 164 kabupaten yang memiliki kinerja ekosistem investasi dengan skor 0 seperti Supori, Waropen, Keerom, Sarmi, Boven Digoel, Nabire, Teluk Bintuni, Halmahera Barat Maluku Barat Daya, dll (Papua dan Maluku).

Kabupaten berkinerja pertumbuhan investasi rendah berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Penyerapan realisasi investasi rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: infrastruktur ekonomi (aksesibilitas jalan baik, listrik dan internet) dan sosial (sanitasi, air minum layak dan sekolah) yang belum memadai. Belum ada pemetaan investasi ditingkat desa/kecamatan, sengketa dan kepemilikan lahan yang belum jelas (kepemilikan tanah tanpa dokumen) dan tingkat kriminalitas (perampasan tanah adat) menjadi sumber konflik yang cukup tinggi.

4. Tenaga Kerja

Asmat (Papua) memiliki kinerja terbaik dalam variabel ketenagakerjaan (100) disusul Samosir-Sumatera Utara (99,54), Nias Barat-Sumatera Utara (99,45), Nagekeo-NTT (99,03), Bener Meriah-Aceh (98,63), dan Kepulauan Anambas-

Kepulauan Riau (98,47). Kabupaten Samosir merupakan kabupaten penyerapan tenaga kerja tertinggi di tingkat nasional. Hal ini pun sejalan dengan data tingkat pengangguran terkecil di Pulau Sumatera yakni sebesar 0,7 persen dan mengalami penurunan setiap tahunnya (2020 sebesar 1,20 persen). Pandemi COVID-19 yang melanda tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Samosir. Hal ini disebabkan angkatan kerja sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Daerah dengan capaian terendah pada variabel ketenagakerjaan adalah Toba Samosir-Sumatera Utara (0,00) disusul Dairi-Sumatera Utara (29,00), Labuhan Batu-Sumatera Utara (32,14), Tapanuli Utara-Sumatera Utara (34,77), Simalungun-Sumatera Utara (39,86) dan Asahan-Sumatera Utara (40,95). Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, sektor pertanian merupakan sektor dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu, persentase bekerja terhadap angkatan kerja di Dairi sebesar 61,42 persen. Kondisi menggambarkan bahwa jumlah tenaga kerja masih banyak yang belum memperoleh pekerjaan di Dairi. Pada umumnya penduduk Dairi bekerja sebagai berusaha sendiri tanpa bantuan dari orang lain sebanyak 15.306 penduduk, berusaha dibantu/buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 49.372, berusaha dibantu/buruh tetap/buruh bayar sebanyak 5.052. buruh/karyawan/ pegawai sebanyak 24.768, pekerja bebas di pertanian sebanyak 7.231, pekerja bebas di non pertanian sebanyak 1.901 dan pekerja tak dibayar sejumlah 54.092. Klasifikasi jenis pekerjaan ini menggambarkan bahwa masyarakat masih rentan tidak memiliki pekerjaan terutama buruh tidak tetap.

5. Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi

Badung (Bali) merupakan daerah yang memiliki skor tertinggi pada variabel infrastruktur ekonomi (97,68) disusul Belitung-Bangka Belitung (93,32), Gresik-Jawa Timur (92,09), Tabanan-Bali (91,44), Bogor-Jawa Barat (90,34), Dharmasraya-Sumatera Barat (89,12) dan Bekasi-Jawa Barat (89,07). Badung unggul pada semua indikator pembentuk infrastruktur dimana capaian pada masing-masing indikator sebagai berikut: persentase jalan

baik (98,60), rasio elektrifikasi (98,64) dan ketersediaan internet (95,81).

Asmat (Papua) merupakan daerah yang memiliki skor terendah pada variabel infrastruktur ekonomi dengan capaian skor 20,05 disusul Boven Digoel-Papua (23,47), Keerom-Papua (27,27), Kepulauan Aru-Maluku (37,74), dan Nias Selatan-Sumatera Utara (37,33). Asmat bermasalah pada indikator kondisi jalan baik yakni 28,91 persen dengan panjang jalan 886.48 km. Adapun kondisi jalan rusak dan rusak berat di Asmat masing-masing mencapai 345,32 km dan 284,50 km (71,09 persen dalam kondisi rusak dan rusak berat). Pemerintah pusat melalui Perpres 10/ 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal telah merencanakan akan membangun fasilitas pembangunan peningkatan jalan desa strategis di Asmat.

Selain itu, masalah elektrifikasi juga menjadi persolan infrastruktur di Asmat dengan capaian 42,51 persen. Capaian tersebut tentunya masih jauh dibawah rerata nasional 99,45. Artinya sebagian besar penduduk di Asmat belum terairi listrik sebagai sumber penerangan utama. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Asmat, pemerintah bekerjasama dengan PLN untuk mewujudkan enegi listrik merata dan berkeadilan. Terdapat lima distrik menjadi objek kerjasama pemda dengan PLN yakni Distrik Agats, Atsj, Fayit, Pantai Kasuari dan Suator.

5.3 Inklusi Sosial

a. Pengantar

Pilar inklusi sosial mengedepankan potensi kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam pembentukan daya saing daerah berkelanjutan di daerah. Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai/capaian pada pilar sosial adalah 72,57 dengan kontribusi pada masing-masing variabel dan indikator pilar inklusi sosial berberda-beda. Skor variabel tertinggi pada pilar ini adalah kondusivitas keamanan dengan rata-rata capaian (89,09), kesetaraan gender (78,64), ketersediaan infrastruktur sosial

(68,30) dan keunggulan SDM (54,26). Pekerjaan rumah pada variabel ini adalah menciptakan sumberdaya manusia yang unggul dan pemenuhan infrastruktur sosial yang memadai.

Tantangan DSDB, khususnya pada indikator pilar inklusi sosial adalah peningkatan pada infrastruktur pendidikan dasar (SD), penurunan angka stunting, peningkatan rata lama sekolah, angka harapan hidup dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Indikator dengan nilai terbawah ini sangat krusial dan penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sebagai bagian dari ikhtiar dan kebijakan peningkatan daya saing maka indikator ini layakanya dijadikan prioritas pembangunan pusat dan daerah.

b. Temuan Umum

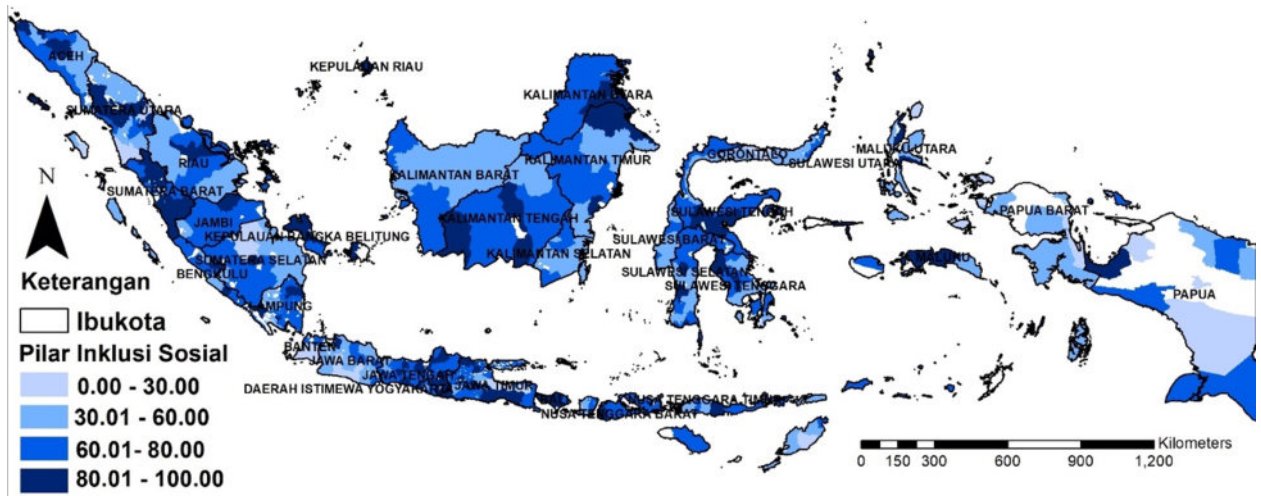
Hasil kalkulasi data menunjukkan nilai rata-rata pilar inklusi sosial adalah sebesar 72,67. Skor variabel dengan status sangat pada pilar inklusi sosial adalah variabel tingkat kriminalitas dengan rerata sebesar 89,09 (yang berarti sangat kondusif) dan air minum layak (81,79). Variabel yang memiliki nilai terendah dan sekaligus menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah infrastruktur sekolah dasar (43,28). Tabel 4.7 menunjukkan capaian per indikator dimana tidak terdapat satupun indikator yang memperoleh capaian rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pilar inklusi sosial di Indonesia telah berjalan dengan baik, namun secara kinerja perlu ditingkatkan untuk menunjang penguatan daya saing daerah berkelanjutan secara kolektif.

Tabel 4. 7 Nilai Rerata Indikator Pilar Inklusi Sosial

No	Indikator	Nilai Rerata
1	Rerata Lama Sekolah	53,07
2	Angka Harapan Hidup	55,83
3	Prevalensi Stunting	51,40
4	Indeks Gini	56,72
5	Pembangunan Gender	78,64
6	Tingkat Kriminalitas	89,09
7	Infrastruktur Pendidikan (Sekolah Dasar)	43,28

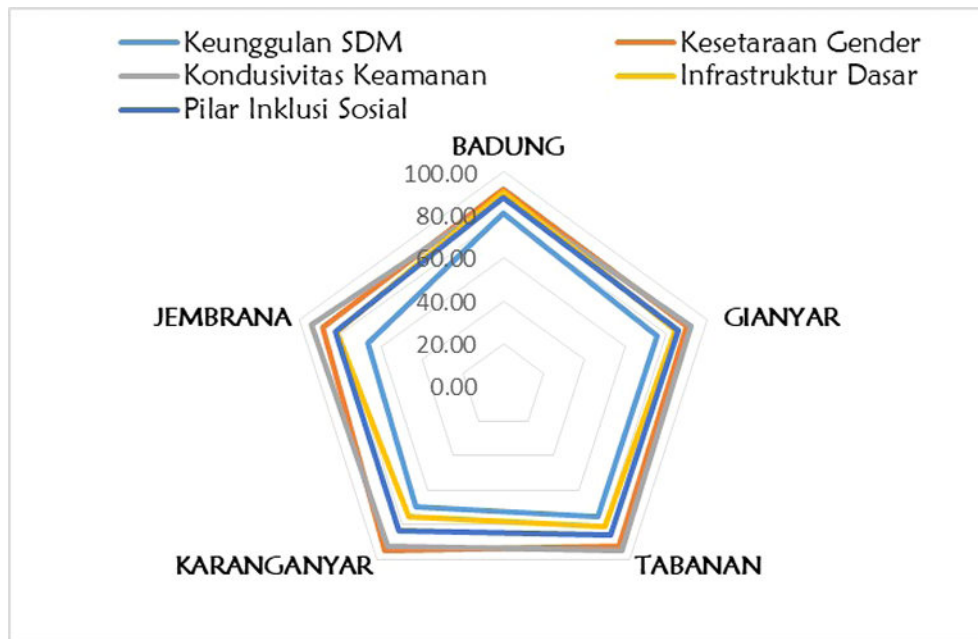
No	Indikator	Nilai Rerata
8	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	74,30
9	Ketersediaan Sanitasi Layak	73,82
10	Akses Terhadap Air Minum Layak	81,79

Secara spasial, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan antar regio yang cukup jelas pada pilar ini. Gambar 4.44 memperlihatkan bahwa semakin mengarah ke wilayah Indonesia Timur, warna biru dalam peta terlihat semakin memudar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah pada aspek penguatan pilar inklusi sosial di kawasan Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Ketimpangan ini menjadi bukti sah terhadap anggapan yang selalu menarasikan ketertinggalan wilayah Indonesia Timur. Akan tetapi, tetap diperlukan sebuah *disclaimer* terhadap temuan ini, sebab Indonesia Timur memiliki persoalan pada sisi kelengkapan data.



Gambar 4.44 Kinerja Pilar Inklusi Sosial

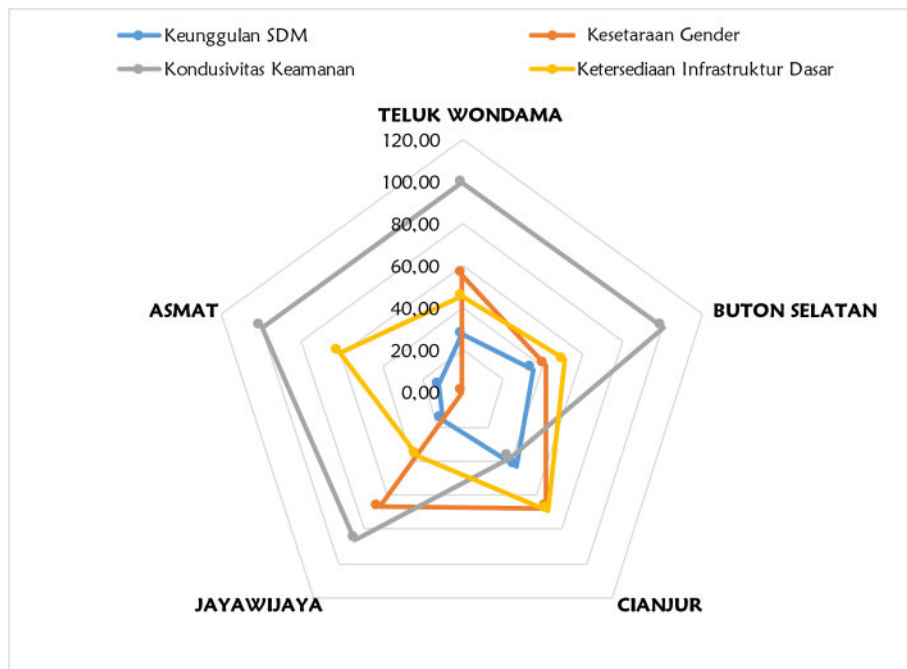
Variabel pada wilayah top five memiliki kinerja yang tinggi pada pilar inklusi sosial. Terdapat keteraturan pola yang menggambarkan bahwa tingkat keunggulan SDM, kesetaraan gender, kondusivitas keamanan, dan ketersediaan infrastruktur dasar di daerah tersebut berada pada level tinggi. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *top five* pada pilar inklusi sosial dapat dilihat pada Gambar 4.45.



Gambar 4.45 Spider Web Top Five Inklusi Sosial

Di sisi lain, kinerja pada wilayah *bottom five* reatif bervariasi.

Pola yang berbeda terlihat pada wilayah *bottom five* dimana daerah yang berada pada kategori tersebut memperoleh nilai konduktivitas keamanan yang baik yang baik namun memiliki persoalan pada variabel ketersediaan infrastruktur dasar. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *bottom five* pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.46.



Gambar 4.46 Spider Web Bottom Five Inklusi Sosial

Badung (Bali) menorehkan capaian terbaik dengan menempati peringkat pertama pada pilar inklusi sosial (skor 88,15). Selain itu, terdapat Gianyar-Bali (85,57), Tabanan-Bali (85,56), Karanganyar_Jawa Tengah (82,94), Jembrana-Bali (82,72), Agam-Sumatera Barat (82,56), Semarang-Jawa Tengah (82,51), Maluku Tengah-Maluku (82,45), dan Karo-Sumatera Utara (82,43) yang berada pada posisi *top ten* di pilar ini. Daerah yang memiliki skor pilar inklusi sosial tinggi umumnya memiliki skor IDSDB berada diatas rerata nasional. Perbedaan hasil ini dengan hasil pemeringkatan dengan opsi kelengkapan data 100 persen adalah adanya perubahan konstelasi *top five* dimana Sukoharjo dan Humbang Hasundutan terlempar dari *top five* opsi kelengkapan data 100 persen.

Pada sisi lain, Asmat (Papua) berada pada capaian terendah dengan nilai 43.24. Capaian tersebut disusul Jayawijaya-Papua (51,40), Cianjur-Jawa Barat (54,25), Buton Selatan-Sulawesi Tenggara (56,85), Teluk Wondama-Papua (57,06), Manokwari Selatan-Papua Barat (57,08), Labuhan Batu-Sumatera Utara (57,34), Probolinggo-Jawa Timur (60,08), Boven Digoel-Papua (60,16), dan Waropen-Papua (60,23). Keunggulan SDM yang rendah (11,59) membawa Asmat berada diposisi terendah. Rendahnya kualitas SDM, antara lain disebabkan rendahnya tingkat rerata lama sekolah (RLS) dan *gini ratio* dan *stunting* yang tinggi. Gizi buruk di Asmat sangat tinggi yang berdampak terjadinya *stunting*. Beberapa penyebabnya faktor lingkungan dan kurangnya tenaga kesehatan. Hal ini juga diperkuat dengan data yang menyatakan infrastruktur dasar khususnya infrastruktur kesehatan yang masih minim.

c. Variabel Pembentuk Inklusi Sosial

1. Keunggulan Sumber Daya Manusia

Badung (Bali) memiliki skor tertinggi pada variabel keunggulan SDM dengan nilai sebesar 80,90 disusul Deli Serdang-Sumatera Utara (79,87), Gianyar-Bali (73,50), Karo-Sumatera Utara (75,33), dan Tabanan-Bali (74,98). Badung memiliki kinerja yang tinggi dalam indikator pendidikan: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yakni 10,62 tahun dan kesehatan: Angka

Harapan Hidup (AHH) mencapai 75,18 tahun yang merupakan AHH tertinggi di Provinsi Bali, serta tingkat stunting yang rendah. Rendahnya stunting di Kabupaten Badung tidak terlepas dari dukungan kebijakan. Beberapa aturan yang dijalankan untuk mencapai keunggulan tersebut yakni adanya Analisis situasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 1836/0413/HK/2022 tentang Likus Stunting tahun 2023, Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui Gerakan Badung Sehat pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (Garbasari).

Sementara itu, daerah dengan capaian terendah pada variabel keunggulan SDM adalah Asmat-Papua (11,60) diikuti Jayawijaya-Papua (15,92), Teluk Wondama-Papua (27,52), Boven Digoel-Papua (29,22), dan Mappi-Papua (31,16). Capaian RLS di Asmat adalah sebesar 5,08 tahun atau dengan kata lain rata-rata lama sekolah peserta didik hanya mencapai kelas lima sekolah dasar, dengan Angka Harapan Hidup (AHH) hanya mencapai 58,59 tahun. AHH di Asmat merupakan nilai terendah dari 387 kabupaten yang diukur. Tentu ini turut mempengaruhi capaian IPM, Kabupaten ini menempati urutan IPM terendah di Provinsi Papua. Pekerjaan besar bagi Pemda Asmat adalah terus berevolusi meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, raihan gini ratio (0,40) yang tinggi turut mempengaruhi skor pada variabel ini.

2. Kesetaraan Gender

Ogan Ilir (Sumatera Selatan) merupakan daerah dengan capaian kinerja variabel tertinggi (100) disusul Kolaka Timur-Sulawesi Tenggara (99,96), Pakpak Bharat-Sumatera Utara (99,56), Nagekeo-NTT (98,83), dan Seram Bagian Barat-Maluku (98,77). Capaian ini menunjukkan bahwa proses pembangunan gender di daerah tersebut berjalan dengan baik. Tujuan kesetaraan gender adalah untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan

partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Kedua daerah ini berkomitmen untuk terus mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai bidang mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan program pembangunan. Misalnya, Kabupaten Kolaka Timur merupakan kabupaten yang terpilih sebagai model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di kedua kabupaten ini responsif gender.

Capaian pembangunan gender terendah berada di Asmat-Papua (0,00), disusul Manokwari Selatan-Papua Barat (23,47), Pulau Morotai-Maluku (35,33), Waropen-Papua (36,65), dan Paser-Kalimantan Timur (38,51). Peran perempuan di Waropen masih tertinggal di berbagai aspek, sehingga potensi mereka sebagai pelaksana pembangunan tidak maksimal. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan pemkab mencanangkan program Sekolah Perempuan. Sekolah perempuan ini diharapkan dapat menjadi titik awal kebangkitan masyarakat di pedesaan khususnya perempuan di Waropen, untuk meningkatkan kapasitasnya yang berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Waropen.

3. Kondusivitas Keamanan

Mahakam Ulu (Kalimantan Timur) bersama Konawe Kepulauan (Sulawesi Selatan), Pesisir Barat (Sumatera Barat), Buton Selatan (Sulawesi Tenggara), Supiori (Papua), dan Asmat (Papua) merupakan daerah dengan kondusivitas keamanan tertinggi dengan capaian 100. Hal ini menandakan bahwa daerah tersebut minim terjadi tingkat kriminalitas dan konflik sosial dalam setahun terakhir (selama 2021). Capaian tersebut didukung oleh langkah preventif oleh pihak keamanan melalui sosialisasi (misalnya sosialisasi anti miras di Konawe Kepulauan) dan kapasitas pihak keamanan dalam melakukan resolusi konflik di daerah.

Pada sisi yang lain, Labuhan Batu (Sumatera Utara) merupakan daerah dengan capaian terendah karena ketidaktersediaan data (0) disusul Deli Serdang-Sumatera Utara (32,94), Cianjur-Jawa Barat (38,16), Sleman-Yogyakarta (39,67), dan Langkat-Sumatera Utara (42,52). Capaian ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat kriminalitas yang terjadi di daerah tersebut. Fakta unik yang dapat ditilik dari temuan di atas adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia Barat memiliki persoalan serius terkait kondusivitas keamanan dibandingkan wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

4. Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Badung (Bali) merupakan daerah dengan capaian terbaik pada variabel ketersediaan infrastruktur dasar (90,73) disusul Siak-Riau (89,94), Bantul-Yogyakarta (88,16), Bekasi-Jawa Barat (87,26), Tangerang-Banten (86,94), Sleman-Yogyakarta (86,85), dan Deli Serdang-Sumatera Utara (85,83). Pemkab Deli Serdang berkomitmen untuk mewujudkan sanitasi layak di daerah. Berbagai program/kegiatan pun telah dilaksanakan antara lain penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK), membangun IPAL komunal, pembangunan *septic tank* kedap, penyedotan dan pengangkutan tinja dari permukiman ke unit pengelolaan limbah tinja di IPLT, dan berbagai langkah konkret lainnya. Pemkab Deli Serdang secara aktif menjalin Kerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam penanganan sanitasi di daerah. Disamping itu, Pemkab juga aktif berkoordinasi dengan pihak swasta/dunia usaha agar kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) bisa diarahkan untuk percepatan target sanitasi layak di Deli Serdang.

Nias (Sumatera Utara) merupakan daerah dengan kinerja variabel terendah (35,34) disusul Jayawijaya-Papua (36,47), Nias Selatan-Sumatera Utara (37,05), Kepulauan Anambas-Kepulauan Riau (38,44), dan Teluk Wondama-Papua (45,18). Temuan ini menunjukkan fakta bahwa persoalan

ketertinggalan infrastruktur dasar tersebar merata di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Contoh nyata terjadi di pulau Nias dimana terdapat sejumlah kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, dan juga tergolong daerah dengan kemiskinan terekstrem termasuk Nias dan Nias Utara.

5.4 Tata Kelola Berkelanjutan

a. Pengantar

Tata kelola berkelanjutan membuka jalan bagi daerah untuk menjemput dan meningkatkan investasi. Peter Druker mengatakan, tidak ada negara atau daerah yang miskin dan terbelakang, kecuali yang tidak dikelola. Tata kelola berkelanjutan tercermin dari kemudahan birokrasi, ditunjang dengan pelayanan publik yang memadai dan kualitas kebijakan yang tetap menjawab kebutuhan *multistakeholders*. Penguatan tata kelola harus didukung penataan sistem yang baik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan partisipatif. Sebagai contoh untuk mendapatkan kebijakan dan program prioritas daerah yang tepat, kapasitas dan integritas kepemimpinan daerah menjadi salah satu kuncinya.

Perubahan konstelasi peringkat daerah pada pilar ini menunjukkan pentingnya pemenuhan data sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik. Pemerintah daerah sebagai regulator aktif dalam penguatan daya saing daerah berkelanjutan idealnya memiliki *political will* untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik secara konkret. Dinamika yang tersaji pada pemeringkatan pilar tata kelola menunjukkan bahwa data merupakan salah satu determinan utama yang menentukan baik atau tidaknya kinerja tata kelola pemerintahan suatu daerah. Temuan dalam kajian ini merupakan cerminan reflektif bagi daerah yang memiliki isu kelengkapan data (yang tidak masuk dalam pemeringkatan basis kelengkapan data 100 persen). Kelengkapan data merupakan muara keberhasilan tata kelola yang nantinya akan berdampak

pada keberhasilan kinerja pada pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial.

b. Temuan Umum

Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai/capaian rata-rata pilar tata kelola berkelanjutan adalah 57.54 dengan kontribusi pada masing-masing variabel dan indikator berberda-beda.

Skor variabel tertinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah akuntabilitas dengan rata-rata capaian (75,56), partisipasi masyarakat (63,05), transparansi (58,00), efektivitas (47,45) dan variabel keberlanjutan (42,79). Pekerjaan rumah pada variabel ini adalah menciptakan dan mendesain kebijakan yang berkelanjutan dan kebijakan daerah serta implementasi TAKE (anggaran berbasis ekologi) untuk meningkatkan daya saingnya. Capaian rerata setiap indikator pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 4.8.

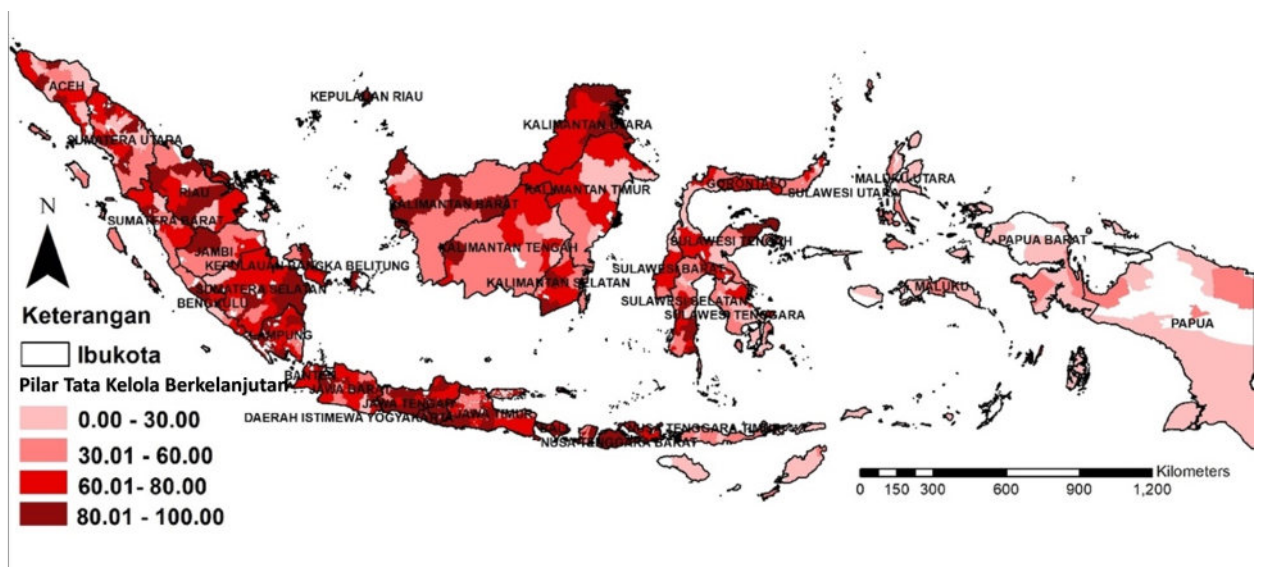
Tabel 4. 8 Nilai Rerata Indikator Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

No	Indikator	Nilai Rerata
1	Partisipasi masyarakat	63,05
2	Kewajaran Informasi Keuangan	92,51
3	Pengendalian dan Pencegahan Korupsi	69,39
4	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	64,77
5	Integritas	58,00
6	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	53,09
7	Inovasi Daerah	41,82
8	Kebijakan Berkelanjutan	57,56
9	Implementasi TAKE	5,94
10	Kerjasama Antar Daerah	64,86

Praktik tata kelola berkelanjutan di 183 daerah menunjukkan

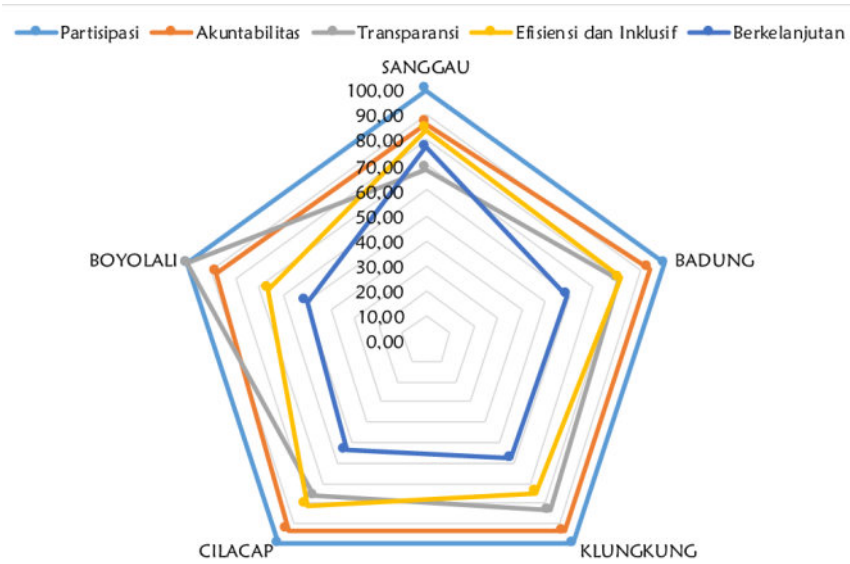
adanya sejumlah temuan yang patut untuk diperhatikan secara seksama. Pemingkatan pada pilar Tata kelola berkelanjutan menempatkan Sanggau-Kalimantan Barat (83,34) sebagai peringkat pertama. Selanjutnya, peringkat kedua hingga sepuluh ditempati oleh Badung-Bali (82,78), Klungkung-Bali (81,84), Cilacap-Jawa Tengah (80,87), Boyolali-Jawa Tengah (80,77), Sleman-Yogyakarta (80,71), Tulungagung-Jawa Timur (80,71),

Malang-Jawa Timur (80,51), Bangka-Bangka Belitung (79,59), dan Hulu Sungai Selatan-Kalimantan Selatan (79,55). Skor rerata implementasi TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan TAKE di Indonesia masih sangat sedikit. Capaian kinerja pilar tata kelola berkelanjutan dalam perspektif kewilayahan dapat dilihat pada Gambar 4.47. Warna peta kabupaten yang semakin pekat (merah tua) menunjukkan bahwa nilai pilar Tata Kelola Berkelanjutan di daerah tersebut semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.



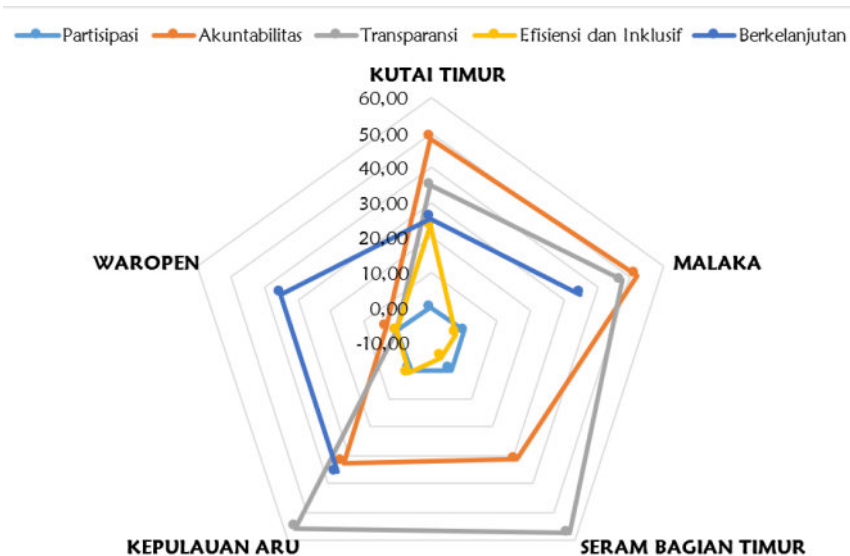
Gambar 4.47 Kinerja Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Pada wilayah *top five*, terlihat keteraturan pola yang menggambarkan bahwa tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi berada pada level tinggi. Persoalan pada wilayah *top five* adalah capaian yang relatif rendah pada variabel transparansi dan tata kelola berkelanjutan yang berada pada level sedang. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *top five* & *bottom five* pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.48.



Gambar 4.48 Spider Web Top Five Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Kemudian, pola yang berbeda terlihat pada wilayah *bottom five*. Pada kasus Kutai Timur, terlihat bahwa capaian akuntabilitas berada pada angka yang sangat tinggi, namun kontradiktif pada capaian pada variabel efisiensi. Persoalan lainnya, rendahnya capaian Kutai Timur disebabkan oleh ketiadaan data pada variabel partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat pula kabupaten dengan nilai transparansi yang baik namun memiliki persoalan pada variabel akuntabilitas, yakni Seram Bagian Timur. Gambaran terkait kekuatan variabel daerah *bottom five* pada pilar tata kelola berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.49.



Gambar 4.49 Spider Web Bottom Five Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

Sanggau masih menempati statusi kabupaten terbaik dalam pilar tata kelola dengan capaian sebesar 83.33. Variabel tata kelola di Sanggau menunjukkan nilai yang baik yakni partisipasi (100) dan akuntabilitas (82,87). Raihan ini relevan dengan capaian pada opsi kelengkapan data 100 persen yang menempatkan kabupaten ini pada posisi yang sama. Perubahan konstelasi pemeringkatan pilat tata kelola turut mengalami perubahan yang signifikan dimana Sleman terlempar dari posisi *top five* (menjadi peringkat 6) dan tergantikan oleh Cilacap.

Pada sisi lain, Waropen berada pada peringkat terendah untuk pilar tata kelola berkelanjutan. Capaian Waropen pada dua indikator menunjukan kinerja yang rendah, yaitu akuntabilitas (3,3) dan berkelanjutan (35,04). Disamping itu, ketidaksediaan data partisipasi, transparansi, dan efesiensi & inklusif membawa capaian skor di daerah ini rendah. Isu kelengkapan data turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian kabupaten ini pada pilar tata kelola berkelanjutan. Digitalisasi/penggunaan *platform online* akan membuat pelayanan publik di daerah ini menjadi cepat, mudah, murah dan ramah pada lingkungan. Variabel-variabel (faktor struktural) perlu dioptimalkan sebagai instrument bagi pertumbuhan empat pilar daya saing berkelanjutan, termasuk dalam mendorong kepastian kemudahan berusaha dan penciptaan ekonomi yang kompetitif.

c. Variabel Pembentuk Tata kelola berkelanjutan

1. Partisipasi

Eksistensi variabel partisipasi dalam pilar tata kelola berkelanjutan memberikan efek yang signifikan terhadap capaian pilar. Ketersediaan data partisipasi yang diambil dari dokumen RKPD (terdapat RKPD 222 kabupaten dari 416 kabupaten yang berhasil dihimpun tim indeks) menjadi *proxy* yang ideal untuk menggambarkan komitmen daerah terhadap keterbukaan akses partisipasi publik. Struktur nilai biner (0 untuk *coding* tidak tersedia dan 100 untuk tersedia) menyebabkan analisis pada pilar ini bergantung pada komitmen kabupaten. Dalam pilar ini, kabupaten yang hanya mencantumkan

angka partisipasi tanpa realisasi dalam RKPD sebanyak 46 kabupaten. Dan yang terakhir, kabupaten yang sama sekali tidak mencantumkan data partisipasi maupun realisasinya sebanyak 119 kabupaten.

2. Akuntabilitas

Banyuwangi (Jawa Timur) merupakan daerah dengan capaian kinerja variabel tertinggi (96,88) diikuti Tulang Bawang-Lampung (96,57), Deli Serdang-Sumatera Utara (96,45), Ponorogo-Jawa Timur (95,44), dan Pringsewu-Lampung (95,40). Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah guna memastikan capaian opini BPK yang baik bagi daerah yaitu melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah, perbaikan dan pengendalian internal kinerja, komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan penataan aset. Strategi tersebut diimplementasikan oleh Banyuwangi sehingga daerah tersebut meraih opini WTP 10 kali berturut-turut dan meraih penghargaan *Government Award*. Pemkab Banyuwangi juga meraih juara Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RAD-PPKT) tingkat Jawa Timur. Penghargaan diraih berkat sejumlah inovasi yang berbasis transparansi publik, serta komitmen yang kuat dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Capaian kinerja terendah pada variabel akuntabilitas diperoleh Waropen-Papua (3,36), diikuti Mappi-Papua (30,23), Buton Selatan-Sulawesi Tenggara (30,32), Flores Timur-NTT (31,66), dan Seram Bagian Timur-Maluku (31,67). Pada kasus Waropen, terjadi kasus korupsi dimana pada tahun 2021 Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Waropen untuk subsidi transportasi tahun 2017-2018 dengan total kerugian negara mencapai Rp 9,6 miliar rupiah. Hasil pengukuran IDSDB juga menempatkan kabupaten-kabupaten ini pada posisi terendah. Pelajaran yang dapat dipetik dari temuan ini adalah peningkatan daya saing guna menuju pada kemajuan sangat tergantung dari upaya pemerintah

daerah untuk memperbaiki performa kualitas pemerintahan di daerahnya.

3. Transparansi

Boyolali (Jawa Tengah) merupakan daerah dengan kinerja variabel transparansi tertinggi (100) diikuti Bolaang Mongondow Selatan-Sulawesi Utara (85,45), Wonogiri-Jawa Tengah (84,70), Klungkung-Bali (84,70), dan Badung-Bali (83,51). Daerah-daerah ini perlu mendapat apresiasi dalam kinerjanya mewujudkan daerah yang bebas korupsi. Hal ini terlihat relevan sebab di level Kabupaten, indeks tertinggi survei penilaian integritas diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan skor 91,7. Hal ini dapat tercapai dengan baik berkat adanya semangat masyarakat dalam melawan korupsi yang termanifestasikan dalam kegiatan Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia) Boyolali. Kegiatan ini merupakan acara tahunan masyarakat Boyolali dalam rangka edukasi serta penyuluhan Melawan Korupsi di Indonesia. Tujuan program tersebut adalah membangun semangat dan perilaku Anti Korupsi di masyarakat.

Waropen (Papua) merupakan daerah dengan capaian terendah (0) karena ketidaktersediaan data. Capaian tersebut diikuti Tasikmalaya-Jawa Barat (4,73), Cirebon-Jawa Barat (16,00), Lampung Timur-Lampung (18,60), dan Kampar-Riau (18,71). Hal ini relevan dengan capaian integritas di Tasikmalaya yang masih bermasalah, sebab daerah ini mendapatkan nilai 54,00 dan ini jauh sekali dari rata-rata nasional, yakni 72,40. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif pengguna layanan publik, masih ditemukan adanya tindakan oknum pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas. Jajaran birokrasi, baik di bidang eksekutif maupun legislatif diharapkan dapat menjaga integritas dan terus memperkuat tata kelola yang terintegrasi. Dengan demikian, guna mencapai daya saing maka pemerintah daerah diperlukan adanya implementasi sistem pemerintahan yang transparan.

4. Efektivitas

Bangka (Bangka Belitung) merupakan daerah dengan capaian kinerja variabel tertinggi (97,93), disusul Lampung Barat-Lampung (94,26), Tegal-Jawa Tengah (93,47), Tanggamus-Lampung (91,45), dan Musi Rawas-Sumatera Selatan (89,48).

Temuan ini relevan dengan fakta di daerah dimana Lampung Barat menjadi salah satu daerah dengan nilai inovasi tertinggi indeks inovasi daerah tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri RI. Daerah ini menjadi kabupaten pertama di Provinsi Lampung yang memelopori penerapan *Smart City* guna mendukung sistem pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Selain itu, Kabupaten Tegal yang masuk nominator penjarangan inovasi masyarakat tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Salah satu inovasi digital yang dimiliki oleh Tegal adalah aplikasi Laporan Bupati dalam bentuk aplikasi android dan perizinan online dalam bentuk *website*.

Pada level terendah, terdapat Nagekeo (NTT), Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara), Seram Bagian Timur (Maluku), Sindereng Rappang (Sulawesi Selatan), dan Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan) yang menempati pemeringkatan terbawah pada variabel ini. Namun, posisi tersebut dicapai karena ketiadaan data terkait inovasi di daerah tersebut. Kabupaten dengan nilai terendah dipengaruhi berbagai faktor diantaranya SDM yang kurang inovatif dan minimnya inovasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

5. Berkelanjutan

Maros (Sulawesi Selatan) merupakan daerah dengan capaian variabel tertinggi (88,89), diikuti Siak-Riau (85,90), Jayapura-Papua (84,62), Tolitoli-Sulawesi Tenggara (83,76), dan Bengkalis-Riau (81,62). Kabupaten-kabupaten ini memiliki nilai yang tinggi di setiap indikatornya. Persamaan karakteristik pada tiga daerah ini adalah langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengimplementasikan TAKE. Capaian yang tinggi pada variabel ini disebabkan oleh komitmen konkret daerah untuk mengimplementasikan TAKE di daerah. Hal ini

dijadikan pertimbangan dalam kalkulasi indeks sebagai apresiasi terhadap komitmen daerah untuk memberikan alokasi dana khusus untuk upaya pelestarian lingkungan ditengah tantangan perubahan iklim global. Tiga daerah ini juga memiliki catatan aktivitas yang baik terhadap kepemilikan Perdaya yang mendukung prinsip keberlanjutan serta intens dalam melakukan Kerjasama Antar Daerah.

Pada sisi lain, Dharmasraya (Sumatera Barat) merupakan daerah dengan skor terendah pada variabel berkelanjutan (4,27), diikuti Nganjuk-Jawa Timur (4,70), Toba Samosir-Sumatera Utara (15,38), Nias Barat-Sumatera Utara (15,38), dan Nias-Sumatera Utara (16,24). Kabupaten-kabupaten ini juga memiliki nilai rendah pada masing-masing indikatornya seperti kebijakan berkelanjutan dan kerjasama antar daerah yang minim. Selain capaian faktual yang minim, persoalan ketidaktersediaan data turut berkontribusi secara signifikan terhadap posisi daerah yang berada pada *bottom three*. Misalnya, ketiadaan informasi secara terbuka ihwal kerjasama antar daerah dan tidak diterapkannya TAKE di Dharmasraya turut berkontribusi pada anjloknya daerah ini pada variabel Berkelanjutan.

6. Analisis Regional

a. Indonesia Barat

Kinerja IDSDB di Indonesia Barat memiliki kinerja yang sedang dan tinggi pada setiap pilar (rata-rata 56,36). Hasil pemeringkatan IDSDB kategori tinggi, merata di Provinsi Sumatera, Jawa dan Bali. Terdapat 32,90 persen daerah menempati peringkat tertinggi IDSDB di Indonesia Barat dengan rentang nilai 60,02 sampai dengan 74,94. Adapun rata-rata capaian pada masing-masing pilar IDSDB tinggi sebagai berikut: pilar lingkungan lestari (53,82) dan pilar ekonomi berkelanjutan (59,89) pada level sedang, kemudian pilar sosial inklusi (75,44) dan pilar Tata Kelola Berkelanjutan (69,88) pada level yang tinggi.

Selain itu, sejumlah variabel memiliki kinerja unggul pada wilayah Indonesia Barat. Capaian variabel kualitas lingkungan (62,37) pada pilar lingkungan lestari berada dalam kategori tinggi. Kemudian, pilar ekonomi berkelanjutan, variabel berkontribusi sangat tinggi adalah ekosistem investasi yang tinggi (94,67), ketenagakerjaan (91,96) dan infrastruktur ekonomi 70,90. Variabel yang tinggi di pilar sosial adalah tingkat keamanan yang sangat tinggi (88,52) dan kesetaraan gender (88,52) serta infrastruktur sosial (69,61). Variabel sangat tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (94,00) dan akuntabilitas (84,46).

Daerah berkinerja sedang memiliki capaian nilai yang cukup baik pada setiap pilar (rata-rata 52,36). Hasil pemeringkatan terbawah tersebar di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan Barat dan Tengah menunjukkan bahwa terdapat 67,11 persen daerah menempati posisi sedang IDSDB di Indonesia Barat dengan rentang nilai 34,14 sampai dengan 59,85. Adapun rata-rata capaian pada masing-masing pilar pada IDSDB sedang sebagai berikut: pilar lingkungan lestari (46,64), ekonomi berkelanjutan (50,78), inklusi sosial (73,17) dan Tata Kelola Berkelanjutan (61,91) pada level yang sedang dan tinggi.

Lingkungan Lestari

Persentase daerah yang memiliki pilar lingkungan lestari dengan kategori tinggi di Indonesia bagian barat sebesar 10,09 persen daerah dengan capaian rerata pilar 62,39. Daerah-daerah tersebut adalah Lingga (Kepulauan Riau), Grobogan (Jawa Tengah), Barito Selatan (Kalimantan Tengah), Purbalingga (Jawa Barat), Nganjuk (Jawa Timur), Trenggalek (Jawa Timur), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Barito Selatan (Kalimantan Tengah), Muaro Jambi (Jambi), dll. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja tinggi pada manajemen pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup dan resiliensi/ketangguhan daerah terhadap bencana.

Jumlah daerah berkinerja sedang pilar lingkungan lestari mencapai 85,09 persen (rerata 45,66). Daerah-daerah tersebut adalah Aceh Barat (Aceh), Wonogiri (Jawa Tengah), Tanggamus (Lampung), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Mempawah (Kalimantan Barat), Kuantan Sangingi (Riau), Kuningan (Jawa Barat), Sidoarjo (Jawa Timur), Cilacap (Jawa Tengah), Sumedang (Jawa Barat), dll. Umumnya daerah yang berada pada papan tengah memiliki kinerja tinggi pada variabel kualitas lingkungan hidup dan kinerja sedang pada variabel manajemen pengelolaan lingkungan dan SDA dan resiliensi lingkungan. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah kualitas lahan yang buruk dengan rerata capaian 28.77, manajemen pengelolaan sampah (30,11).

Terakhir, jumlah daerah berkinerja rendah pilar lingkungan lestari mencapai 4,82 persen (rerata 25,84). Daerah-daerah tersebut adalah Padang Lawas Utara (Sumatera Utara), Kerinci (Jambi), Padang Lawas (Sumatera Utara), Bengkulu Tengah (Bengkulu), Simeulue (Aceh), Nias Barat (Sumatera Utara), Batu Bara (Sumatera Utara) dll. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja buruk pada manajemen pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup dan resiliensi lingkungan. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah kualitas air yang buruk dengan rerata capaian 5.75 dan manajemen pengelolaan sampah dengan rerata capaian 9.40.

Ekonomi Berkelanjutan

Terdapat 28,94 persen daerah di Indonesia Barat dengan kinerja yang tinggi dan berimbang pada setiap pilar (rerata 62,64). Daerah-daerah tersebut adalah Deli Serdang (Sumatera Utara), Bekasi (Jawa Barat), Karimun (Kepulauan Riau), Kuantan Singgingi (Riau), Bengkalis (Riau), Siak (Riau), Semarang (Jawa Tengah), Kerinci (Jambi), dan Bintan (Kepulauan Riau). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel investasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah daya dukung wilayah dan kemampuan fiskal yang masih rendah. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan adalah daya dukung ekonomi, kemandirian fiskal daerah, dan peningkatan kualitas jalan baik.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar ekonomi berkelanjutan mencapai 69,706 persen (rerata 46,56). Daerah-daerah tersebut adalah Wonosobo (Jawa Tengah), Natuna (Kepulauan Riau), Indramayu (Jawa Barat), Batang (Jawa Tengah), Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kendal (Jawa Tengah), Lampung Tengah (Lampung), Bungo (Jambi) dll. Umumnya daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sedang pada variabel daya investasi dan kinerja tinggi pada variabel ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah daya dukung ekonomi (rerata 7,71), kemandirian fiskal (rerata 11,37), kualitas jalan baik (rerata 47,75).

Terakhir, Jumlah daerah berkinerja ekonomi berkelanjutan rendah mencapai 1,75 persen (rerata 25,80). Daerah-daerah tersebut adalah Aceh Tenggara (Aceh), Tapanuli Utara (Sumatera Utara), Labuhan Batu (Sumatera Utara) dan Toba Samosir (Sumatera Utara). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja buruk pada daya dukung wilayah, kemampuan fiskal, ekosistem investasi dan infrastruktur ekonomi. Sebagai contoh Toba Samosir memiliki peringkat 228 di pilar ekonomi berkelanjutan (capaian 19,43/rendah), namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat 189 (capaian 36,36/

sedang), inklusi sosial memiliki peringkat 16 (capaian 79,88/tinggi) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 227 (capaian 27,10/rendah). Artinya terdapat daerah yang memiliki peringkat rendah di pilar ekonomi berkelanjutan dan Tata Kelola Berkelanjutan memiliki kinerja buruk terhadap IDSDB.

Inklusi Sosial

Kinerja pilar inklusi sosial berkontribusi terhadap capaian daya saing daerah berkelanjutan. Sebagai contoh, Karanganyar memperoleh peringkat 1 (capaian 82,94/sangat tinggi) di pilar inklusi sosial. Disisi lain Karanganyar menempati peringkat 21 (capaian 60,15/tinggi) di pilar lingkungan lestari, ekonomi unggul berada di posisi 110 (capaian 56,52/sedang), dan Tata Kelola Berkelanjutan posisi 25 (capaian 52,21/tinggi). Artinya daerah-daerah kategori sangat tinggi pada pilar inklusi sosial, memiliki capaian IDSDB yang tinggi.

Kinerja inklusi sosial berkategori tinggi di wilayah barat mencapai 92,11 persen daerah (rerata 72,62). Daerah-daerah tersebut adalah Toba Samosir (Sumatera Utara), Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Sukamara (Kalimantan Tengah), Demak (Jawa Tengah), Belitung (Bangka Belitung), Solok (Sumatera Barat), Labuhan Batu Utara (Sumatera Utara), Siak (Riau), Kulonprogo (Yogyakarta), dll. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel kondusivitas keamanan, kesetaraan gender, dan dan infrastruktur sosial. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah keunggulan SDM. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan inklusi sosial adalah rata lama sekolah, penurunan stunting, dan infrastruktur sekolah.

Persentase daerah yang memiliki kinerja pilar ekonomi berkelanjutan kategori sedang di Indonesia bagian barat sebesar 1,32 persen daerah dengan capaian rerata pilar 56,86. Daerah-daerah tersebut adalah Pamekasan (Jawa Timur), Labuhan Batu (Sumatera Utara), dan Cianjur (Jawa Barat). Umumnya daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel infrastruktur sosial dan kesetaraan gender. Sedangkan indikator yang berkinerja rendah pada

kelompok ini adalah kondusivitas keamanan (rerata 33,25), prevalensi stunting (rerata 36,58), dan rata lama sekolah (rerata 47,09).

Kontribusi pilar inklusi sosial kategori sedang terhadap daya saing berkelanjutan, belum memiliki capaian yang optimal.

Sebagai contoh, Cianjur memiliki peringkat 129 (capaian 54,25/ sedang) di pilar inklusi sosial, namun di pilar lingkungan lestari memiliki peringkat peringkat 170 (capaian 38,33/sedang), ekonomi berkelanjutan peringkat 16 (capaian 63,67/tinggi) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 157 (capaian 56,93/ sedang). Artinya daerah yang memiliki peringkat sedang di pilar inklusi sosial memiliki kinerja sedang terhadap IDSDB.

Tata kelola berkelanjutan

Kontribusi pilar tata kelola berkelanjutan terhadap daya saing daerah berkelanjutan, memiliki kinerja yang baik.

Daerah yang berada pada kategori sangat tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah Sanggau-Kalimantan Barat (83,37), Cilacap-Jawa Tengah (80,87), Boyolali-Jawa Tengah (80,77), Sleman-Yogyakarta (80,71) dan Tulungagung-Jawa timur (80,71). Daerah yang menempati peringkat sangat tinggi di pilar Tata Kelola Berkelanjutan memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan tata kelola berkelanjutan adalah adalah kerjasama daerah, peraturan berkelanjutan, dan dan inovasi daerah.

Jumlah daerah berkinerja tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 59,21 persen (rerata 69,44).

Daerah-daerah tersebut adalah Bangka (Bangka Belitung), Wonogiri (Jawa Tengah), Bantul (Yogyakarta), Kulonprogo (Yogyakarta), Banyumas (Jawa Tengah), Deli Serdang (Sumatera Utara), Bengkalis (Riau), Pekalongan (Jawa Tengah), Gunung Kidul (Yogyakarta), Bungo (Jambi), Demak (Jawa Tengah) dll. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah

variabel kebijakan berkelanjutan. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan pilar Tata Kelola Berkelanjutan adalah integritas, inovasi daerah, kebijakan berkelanjutan dan implementasi anggaran TAKE.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 37,72 persen (rerata 49,00). Daerah-daerah tersebut adalah Pamekasan (Jawa Timur), Lampung Tengah (Lampung), Kaur (Bengkulu), Aceh Jaya (Aceh), Mempawah (Kalimantan Barat), Pasaman Barat (Sumatera Barat), Barito Selatan (Kalimantan Tengah), Cirebon (Jawa Barat), Kuningan (Jawa Barat), Batu Bara (Sumatera Utara), dan sejumlah daerah lainnya (bdk Lampiran). Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel Akuntabilitas. Sedangkan variabel yang berkinerja rendah pada pilar ini adalah partisipasi masyarakat, kebijakan berkelanjutan, efisiensi dan inklusi serta transparansi.

Terakhir, jumlah daerah berkinerja rendah pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 1,32 persen (rerata 27,82). Daerah-daerah tersebut adalah Nias Utara (Sumatera Utara), Toba Samosir (Sumatera Utara), dan Pidie (Aceh). Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja rendah hampir di semua variabel kecuali variabel akuntabilitas. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada daerah-daerah ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan minim, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, inovasi daerah dalam pembangunan, kebijakan-kebijakan berkelanjutan, implementasi TAKE dan kerjasama daerah yang minim.

b. Indonesia Tengah

Kinerja IDSDB di Indonesia Tengah memiliki kinerja yang tinggi dan berimbang pada setiap pilar (rata-rata 64,55). Secara keseluruhan, terdapat 25,81 persen daerah menempati status daya saing daerah berkelanjutan yang tinggi di Indonesia Tengah dengan rentang nilai 60,20 sampai dengan 75,62. Rerata capaian pada masing-masing pilar IDSDB tinggi sebagai berikut: pilar lingkungan lestari (57,60) dan pilar ekonomi berkelanjutan (58,86) pada level sedang, kemudian pilar sosial inklusi (75,76)

dan pilar Tata Kelola Berkelanjutan (68,63) pada level yang tinggi. Nilai rerata yang dicapai oleh wilayah Indonesia Tengah jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat, padahal secara kepadatan jauh lebih hijau (secara spasial) wilayah barat dibandingkan tengah.

Sejumlah variabel memiliki kinerja unggul pada wilayah Indonesia Tengah. Capaian variabel kualitas lingkungan (70,53) pada pilar lingkungan lestari berada dalam kategori tinggi. Kemudian, pilar ekonomi berkelanjutan, variabel berkontribusi sangat tinggi adalah ekosistem investasi yang tinggi (87,10), ketenagakerjaan (93,46), dan infrastruktur ekonomi (70,48). Variabel yang tinggi di pilar sosial adalah kondusivitas keamanan yang sangat tinggi (92,66), kesetaraan gender (81,07), serta infrastruktur sosial (73,08) . Variabel sangat tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (95,16) dan akuntabilitas (80,16). Disisi lain daerah yang memiliki daya saing tinggi di Indonesia Barat memiliki pekerjaan rumah pada variabel manajemen pengelolaan lingkungan dan SDA dan resiliensi/ketangguhan terhadap bencana, daya dukung wilayah, kemampuan fiskal, keunggulan SDM, efisiensi, transparansi dan inklusi serta berkelanjutan.

Daerah berkinerja sedang memiliki capaian nilai yang cukup baik pada seriap pilar (rata-rata 51,66). Hasil pemeringkatan dengan capaian yang rendah pada sisi pemeringkatan tersebar di regio Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Temuan indeks menunjukkan bahwa terdapat 74,19 persen daerah menempati posisi sedang IDSDB di Indonesia Barat dengan rentang nilai 36,87 sampai dengan 59,96 . Rerata capaian pada masing-masing pilar pada IDSDB sedang di Indonesia Tengah sebagai berikut: pilar lingkungan lestari (42,95), ekonomi berkelanjutan (48,70), inklusi sosial (71,90) dan Tata Kelola Berkelanjutan (50,04) pada level yang sedang dan tinggi.

Lingkungan lestari

Persentase daerah yang memiliki pilar lingkungan lestari dengan kategori tinggi di Indonesia bagian tengah adalah sebesar 13,71 persen daerah dengan capaian rerata pilar sebesar 62,81. *Top Three* pada kategori ini adalah Poso (Sulawesi Tengah), Malinau (Kalimantan Utara), dan Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja sedang pada manajemen pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup dan resiliensi/ketangguhan daerah terhadap bencana. Secara umum kinerja kualitas lingkungan pada kategori ini berjalan baik dengan kontribusi yang signifikan terhadap IDSDB.

Jumlah daerah berkinerja sedang pilar lingkungan lestari mencapai 81,45 persen (rerata 45,20). Daerah-daerah yang menempati posisi *top three* dalam kategori ini adalah Sigi (Sulawesi Tengah), Nunukan (Kalimantan Utara), dan Enrekang (Sulawesi Selatan). Umumnya daerah yang berada pada papan tengah memiliki kinerja tinggi pada variabel kualitas lingkungan hidup dan kinerja sedang pada variabel manajemen pengelolaan lingkungan dan SDA dan resiliensi lingkungan. Adapun variabel yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah manajemen pengelolaan sampah dengan derajat capaian yang rendah.

Terakhir, jumlah daerah berkinerja sedang pilar lingkungan lestari mencapai 4,84 persen (rerata 26,20). Daerah-daerah yang menempati posisi *top three* dalam kategori ini adalah Lembata (NTT), Morowali (Sulawesi Tengah), dan Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur). Anjloknya nilai pada pemeringkatan ini pada umumnya disebabkan oleh persoalan ketidaktersediaan data pada indikator yang diukur. Dampak dari ketidaktersediaan data tersebut adalah anjloknya capaian nilai pada pila lingkungan lestari. Menariknya, Penajam Paser Utara termasuk dalam kelompok ini, dimana kita ketahui bersama bahwa kabupaten ini merupakan lokasi tempat berdirinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Data yang tidak tersedia di daerah ini adalah Indeks Kualitas Air dan akses terhadap RKPD untuk melihat realisasi pengelolaan sampah di daerah.

Ekonomi berkelanjutan

Jumlah daerah berkinerja tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan mencapai 20,16 persen (rerata 62,80). Wilayah yang menempati *top three* pada klaster ini adalah Badung (Bali), Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), dan Lombok Barat (NTB). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel investasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Contoh konkret dapat dilihat dari perkembangan ekonomi Lombok Barat yang kini berfokus pada sektor pariwisata berhasil menghadirkan investasi yang besar. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah pada klaster ini adalah daya dukung wilayah dan kemampuan fiskal yang masih rendah. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan adalah daya dukung ekonomi, kemandirian fiskal daerah, dan peningkatan kualitas jalan baik.

Kontribusi pilar ekonomi berkelanjutan terhadap daya saing berkelanjutan, terutama daerah teratas belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Lombok Barat memiliki peringkat 3 (capaian tinggi) di pilar ekonomi berkelanjutan klaster ini. Capaian kabupaten pada pemerinngkatan umum IDSDB menorehkan hasil: pilar lingkungan lestari berada pada posisi 24 (capaian 56,66/sedang), pilar inklusi sosial peringkat 103 (rerata 69,30/tinggi) dan pilar tata kelola berkelanjutan menempati posisi 16 (rerata 70,89/tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa pilar ekonomi berkelanjutan yang tinggi memberikan dampak positif terhadap capaian pilar lingkungan lestari, inklusi sosial dan tata kelola berkelanjutan serta berdampak signifikan pada IDSDB.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar ekonomi berkelanjutan mencapai 79,84 persen (rerata 48,43). *Top Three* pada kategori ini meliputi Buleleng (Bali), Maros (Sulawesi Selatan), dan Parigi Moutong (Sulawesi Tengah). Umumnya daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sedang pada variabel daya investasi dan kinerja tinggi pada variabel ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah daya dukung ekonomi, kemandirian fiskal daerah, dan kualitas jalan

baik. Isu kemandirian fiskal daerah menjadi *causa prima* dalam penguatan daya saing daerah berkelanjutan sebab daerah pada kategori ini belum mandiri secara fiskal.

Inklusi Sosial

Capaian pilar inklusi sosial di wilayah Indonesia Barat terdiri atas kategori sangat tinggi, tinggi dan sedang. Terdapat 4,84 persen daerah yang berada pada kategori sangat tinggi pada pilar inklusi sosial yakni Badung, Gianyar, dan Tabanan (*Top Three*). Uniknya, ketiga daerah ini berasal dari provinsi yang sama, yakni Provinsi Bali. Daerah-daerah yang berada pada peringkat sangat tinggi ini umumnya memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel kesetaraan gender dan kondusivitas keamanan, sementara variabel infrastruktur sosial dan keunggulan SDM pada kategori tinggi. Dari sisi variabel yang menjadi tantangan dalam peningkatan inklusi sosial adalah keunggulan SDM.

Kontribusi pilar inklusi sosial terhadap daya saing daerah berkelanjutan, memiliki kinerja yang optimal. Sebagai contoh, Tabanan memperoleh peringkat 3 pada klaster ini (capaian 85,56/sangat tinggi) memiliki capaian yang relatif baik pada pilar yang lain (IDSDB umum) dimana daerah ini menempati peringkat 54 (capaian 48,64/sedang) di pilar lingkungan lestari, ekonomi unggul berada di posisi 8 (capaian 63,03/tinggi), dan Tata Kelola Berkelanjutan posisi 8 (capaian 73,42/tinggi). Artinya daerah-daerah kategori sangat tinggi pada pilar inklusi sosial, memiliki capaian IDSDB yang tinggi dan sedang.

Jumlah daerah berkinerja tinggi pilar inklusi sosial mencapai 94,35 persen (rerata 72,45). Daerah-daerah *top three* pada klaster ini adalah Buleleng (Bali), Klungkung (Bali), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel kondusivitas keamanan, kesetaraan gender, dan dan infrastruktur sosial. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah keunggulan SDM. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan inklusi sosial adalah rata lama sekolah, prevalensi stunting, dan infrastruktur sekolah.

Terakhir, satu-satunya daerah yang memiliki kinerja pilar inklusi sosial kategori sedang di Indonesia adalah Buton Selatan (Sulawesi Tenggara). Buton Selatan yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel kondusivitas keamanan. Sedangkan indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah kualitas SDM (35,13/sedang), kesetaraan gender (41,53/sedang), dan infrastruktur dasar (50,72/sedang).

Tata Kelola Berkelanjutan

Kontribusi pilar tata kelola berkelanjutan terhadap daya saing daerah berkelanjutan, memiliki kinerja yang optimal. Sebagai contoh, Badung dan Klungkung (Bali) yang memperoleh peringkat 1 dan 2 (capaian sangat tinggi) di pilar tata kelola berkelanjutan klaster ini memiliki capaian kinerja yang baik pula pada pilar output, yakni lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial. Hasil ini menggambarkan bahwa daerah dengan kategori sangat tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan, memiliki capaian IDSDB pada posisi relatif tinggi.

Jumlah daerah berkinerja tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 39,52 persen (rerata 67,74). Daerah yang menempati posisi *top three* pada klaster ini adalah Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan), Tanah Laut (Sulawesi Selatan), serta Pangkajene dan Kepulauan (Sumatera Selatan). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah variabel kebijakan berkelanjutan. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan pilar Tata Kelola Berkelanjutan adalah integritas, inovasi daerah, kebijakan berkelanjutan dan implementasi TAKE di daerah.

Selain itu, jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 55,65 persen (rerata 46,45). Daerah yang menempati kategor *top three* pada kategori ini adalah Poso (Sulawesi Tengah), Minahasa Utara (Sulawesi Utara), dan Mahakam Ulu (Kalimantan Timur). Daerah yang berada

pada kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel Akuntabilitas. Sedangkan variabel yang berkinerja rendah pada pilar ini adalah partisipasi masyarakat, kebijakan berkelanjutan, efisiensi dan inklusi serta transparansi.

Terakhir, jumlah daerah berkinerja rendah pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 3,23 persen (rerata 27,74).

Daerah-daerah tersebut adalah Sumba Tengah (NTT), Lembata (NTT), Kutai Timur (Kalimantan Timur), dan Malaka (NTT). Uniknya, mayoritas daerah dengan kinerja tata kelola pemerintahan yang rendah berasal dari Provinsi NTT. Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja rendah hampir di semua variabel kecuali variabel akuntabilitas. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada daerah-daerah ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan minim, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, inovasi daerah dalam pembangunan, kebijakan-kebijakan berkelanjutan, implementasi TAKE dan kerjasama daerah yang minim.

c. Indonesia Timur

Kinerja IDSDB di Indonesia Timur memiliki kinerja yang bervariasi pada setiap pilar (rata-rata 57,90). Secara keseluruhan, terdapat satu daerah menempati status daya saing daerah berkelanjutan yang tinggi di Indonesia Tengah yakni kabupaten Maluku Tengah. Capaian Maluku Tengah pada variabel kualitas lingkungan (83,39) berada dalam kategori sangat tinggi. Disisi lain daerah yang memiliki daya saing tinggi di Indonesia Timur memiliki pekerjaan rumah pada variabel manajemen pengelolaan lingkungan dan SDA dan resiliensi/ketangguhan terhadap bencana, daya dukung wilayah, kemampuan fiskal, keunggulan SDM, partisipasi, efisiensi, transparansi dan inklusi serta berkelanjutan.

Daerah berkinerja sedang memiliki capaian nilai yang cukup baik pada setiap pilar (rata-rata 45,68). Hasil pemeringkatan dengan capaian yang sedang pada sisi pemeringkatan tersebar di regio Maluku dan Papua. Temuan indeks menunjukkan bahwa terdapat 94 persen daerah menempati posisi sedang IDSDB

di Indonesia Timur dengan rentang nilai 36,38 sampai dengan 58,10. Rerata capaian pada masing-masing pilar pada IDSDB sedang di Indonesia Tengah sebagai berikut: pilar lingkungan lestari (38,74), ekonomi berkelanjutan (45,61), inklusi sosial (68,64) dan Tata Kelola Berkelanjutan (38,65) pada level yang sedang dan tinggi.

Satu-satunya wilayah yang menempati capaian yang rendah pada pemeringkatan IDSDB di wilayah Indonesia Timur adalah Waropen. Pada daerah dengan status daya saing rendah, terdapat satu pilar menunjukkan kinerja yang baik dengan status tinggi (di atas 60), yakni inklusi sosial. Capaian Waropen pada variabel kualitas lingkungan (59,65) berada dalam level sedang. Kemudian, pada pilar ekonomi berkelanjutan, variabel berkontribusi sangat tinggi adalah ekosistem investasi yang ketenagakerjaan (84,90). Variabel yang tinggi di pilar sosial adalah kondusivitas keamanan yang sangat tinggi (99,76). Akan tetapi, daerah ini memperoleh capaian yang rendah pada seluruh variabel penilaian pada pilar tata kelola berkelanjutan.

Lingkungan lestari

Kontribusi pilar lingkungan lestari terhadap daya saing berkelanjutan, terutama daerah teratas belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Halmahera Barat (Maluku Utara) menjadi peringkat teratas di pilar lingkungan lestari klaster ini, namun di pilar ekonomi berkelanjutan memiliki peringkat 243 (capaian 43,04/sedang), inklusi sosial peringkat 277 (capaian 70,41/tinggi) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 231 (capaian 54,46/Sedang). Temuan ini menunjukkan bahwa daerah dengan kategori tinggi pada pilar lingkungan lestari, memiliki capaian IDSDB pada posisi sedang.

Persentase daerah yang memiliki pilar lingkungan lestari dengan kategori tinggi di Indonesia bagian timur adalah sebesar 6 persen daerah dengan capaian rerata pilar sebesar 65,46. Kabupaten yang berada pada kategori tersebut adalah Halmahera Barat (Maluku Utara) dan Asmat (Asmat). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja tinggi pada manajemen pengelolaan sampah dan

kualitas lingkungan hidup, namun memiliki capaian sedang pada variabel resiliensi/ketangguhan daerah terhadap bencana. Secara umum kinerja kualitas lingkungan pada kategori ini berjalan baik dengan kontribusi yang signifikan terhadap IDSDB.

Selanjutnya, jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar lingkungan lestari mencapai 85,71 persen (rerata 37,75).

Daerah-daerah yang menempati posisi *top three* dalam kategori ini adalah Maluku Tengah (Maluku), Teluk Wondama (Papua Barat), dan Halmahera Tengah (Maluku Utara). Umumnya daerah yang berada dengan kinerja sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel kualitas lingkungan hidup dan kinerja sedang pada variabel manajemen pengelolaan lingkungan dan SDA dan resiliensi lingkungan. Adapun variabel yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah manajemen pengelolaan sampah dengan derajat capaian yang relatif masih rendah.

Terakhir, jumlah daerah berkinerja rendah pada pilar lingkungan lestari mencapai 8,57 persen (rerata 27,35).

Daerah yang menempati posisi ini adalah Jayapura (Papua) dan Kepulauan Aru (Maluku). Anjloknya nilai pada pemeringkatan ini pada umumnya disebabkan oleh persoalan ketidakterdediaan data pada indikator yang diukur. Dampak dari ketidakterdediaan data tersebut adalah anjloknya capaian nilai pada pilar lingkungan lestari. Data yang tidak terkumpul secara lengkap didominasi oleh data Indeks Kualitas Air (IKA).

Ekonomi berkelanjutan

Terdapat 8,57 persen daerah di Indonesia Timur dengan kinerja yang tinggi dan berimbang pada setiap pilar (rerata 62,80). Wilayah yang menempati *top three* pada klaster ini adalah Halmahera Utara (Maluku Utara), Manokwari (Papua Barat), dan Merauke (Papua). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel investasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah pada klaster ini adalah daya dukung wilayah dan kemampuan fiskal yang masih rendah. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan adalah daya dukung ekonomi, kemandirian fiskal

daerah, dan peningkatan kualitas jalan baik. Terlebih, sebagian besar kabupaten di Indonesia Timur masih berkuat dengan isu kemandirian fiskal daerah akibat minimnya perolehan PAD dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer.

Kontribusi pilar ekonomi berkelanjutan terhadap daya saing berkelanjutan, terutama daerah teratas belum memiliki capaian yang optimal. Sebagai contoh, Halmahera Utara memiliki peringkat 1 (capaian tinggi) di pilar ekonomi berkelanjutan klaster ini, namun pada pemerinngkatan umum IDSDB menorehkan hasil: pilar lingkungan lestari berada pada posisi 52 (capaian 61,77/tinggi), pilar inklusi sosial peringkat 361 (rerata 33,56/sedang) dan pilar tata kelola berkelanjutan menempati posisi 201 (rerata 50,82/sedang). Hal ini menunjukkan bahwa pilar ekonomi berkelanjutan yang tinggi memberikan dampak positif terhadap capaian pilar lingkungan lestari, inklusi sosial dan tata kelola berkelanjutan serta berdampak signifikan pada IDSDB.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar ekonomi berkelanjutan mencapai 91,43 persen (rerata 44,15). *Top Three* pada kategori ini meliputi Maluku Tengah (Maluku), Halmahera Tengah (Maluku Utara), dan Teluk Wondama (Papua Barat). Umumnya daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sedang pada variabel daya investasi dan kinerja tinggi pada variabel ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi. Variabel yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah daya dukung ekonomi, kemandirian fiskal daerah, dan infrastruktur ekonomi (kualitas jalan baik). Isu kemandirian fiskal daerah tetap menjadi *causa prima* dalam penguatan daya saing daerah berkelanjutan sebab daerah pada kategori ini belum mandiri secara fiskal.

Inklusi Sosial

Kontribusi pilar inklusi sosial terhadap daya saing daerah berkelanjutan, memiliki kinerja yang relatif kurang optimal. Sebagai contoh, Maluku Tengah (Maluku) memperoleh peringkat 1 pada klaster ini memiliki capaian yang relatif baik pada pilar yang lain (IDSDB umum) dimana daerah ini menempati peringkat 112 (capaian 52,99/sedang) di pilar lingkungan lestari,

ekonomi unggul berada di posisi 123 (capaian 59,03/sedang), dan Tata Kelola Berkelanjutan posisi 251 (capaian 52,76/sedang). Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya capaian pada pilar inklusi sosial memiliki daya ungkit terhadap daya saing daerah berkelanjutan, mengingat indikator pada pilar inklusi sosial merupakan kebutuhan *mandatory* yang wajib diselenggarakan daerah. Dengan atau tanpa kebijakan khusus terkait daya saing daerah berkelanjutan, nampaknya pilar ini akan tetap berkembang seiring berjalannya waktu.

Terdapat 5,71 persen daerah yang berada pada kategori sangat tinggi pada pilar inklusi sosial yakni Maluku Tengah (Maluku) dan Nabire (Papua). Daerah-daerah yang berada pada peringkat sangat tinggi ini umumnya memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel kesetaraan gender, ketersediaan infrastruktur dasar, dan kondusivitas keamanan. Variabel yang menjadi tantangan dalam peningkatan inklusi sosial adalah keunggulan SDM.

Daerah berkinerja inklusi sosial tinggi mencapai 82,86 persen daerah (rerata 70,04). Daerah-daerah *top three* pada klaster ini adalah Maluku Tenggara (Maluku), Seram Bagian Barat (Maluku), dan Kepulauan Sula (Maluku Utara). Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki kinerja baik pada variabel kondusivitas keamanan, kesetaraan gender, dan infrastruktur sosial. Hanya saja persoalan krusial bagi daerah ini adalah keunggulan SDM. Dari sisi indikator yang menjadi tantangan dalam peningkatan inklusi sosial adalah rata lama sekolah, prevalensi *stunting*, dan infrastruktur sekolah.

Kontribusi pilar inklusi sosial terhadap daya saing berkelanjutan, khususnya pada kategori tinggi memiliki capaian yang tidak optimal. Sebagai contoh, Maluku Tenggara memiliki capaian terbaik pilar inklusi sosial pada klaster ini memiliki capaian pada pilar lingkungan lestari yang menempati peringkat 220 (capaian 43,08/sedang), ekonomi berkelanjutan peringkat 361 (capaian 33,79/sedang) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 109 (capaian 67,93/tinggi). Dengan demikian pilar tinggi di inklusi sosial pada kategori tinggi tidak memiliki korelasi capaian kontribusi tinggi terhadap IDSDB maupun tiga pilar lainnya di Indonesia Timur.

Jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar inklusi sosial mencapai 11,43 persen (rerata 52,20). Daerah-daerah yang termasuk pada klaster ini adalah Manokwari Selatan (Papua Barat), Teluk Wondama (Papua), Jayawijaya (Papua), dan Asmat (Papua). Karakteristik daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel konduktivitas keamanan. Sedangkan indikator yang berkinerja rendah pada kelompok ini adalah kualitas SDM, kesetaraan gender, dan infrastruktur dasar.

Kontribusi pilar inklusi sosial terhadap daya saing berkelanjutan, khususnya pada kategori sedang memiliki capaian yang tidak optimal. Sebagai contoh, Manokwari (Papua) memiliki capaian terbaik pilar inklusi sosial pada klaster ini memiliki capaian pada pilar lingkungan lestari yang menempati peringkat 239 (capaian 41,28/sedang), ekonomi berkelanjutan peringkat 340 (capaian 36,33/sedang) dan tata kelola berkelanjutan menempati posisi 327 (capaian 40,94/sedang). Hal ini menunjukkan pilar tinggi di inklusi sosial pada kategori sedang menunjukkan adanya korelasi capaian kontribusi yang sedang pula terhadap kinerja tiga pilar lainnya di Indonesia Timur.

Tata Kelola Berkelanjutan

Kategorisasi kinerja pilar tata kelola berkelanjutan di Wilayah Indonesia Tengah terdiri atas tinggi sedang, dan rendah. Daerah yang berada pada kategori tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan adalah Maluku Tenggara-Maluku (52,76). Daerah ini menempati capaian tinggi di pilar Tata Kelola Berkelanjutan karena memiliki kinerja sangat tinggi pada variabel akuntabilitas (89,25) dan kinerja tinggi pada variabel transparansi (61,11). Tantangan dalam peningkatan tata kelola berkelanjutan terdapat pada variabel peraturan berkelanjutan terkait implementasi TAKE yang belum dilaksanakan di daerah ini. Selain itu, ketiadaan data partisipasi masyarakat turut berdampak pada capaian yang minim pada keseluruhan pilar tata kelola berkelanjutan di kabupaten ini.

Kontribusi pilar tata kelola berkelanjutan terhadap daya saing daerah berkelanjutan, memiliki kinerja yang optimal

untuk wilayah Indonesia Timur. Menilik capaian Maluku Tenggara di pilar tata kelola berkelanjutan klaster, terdapat ini memiliki capaian kinerja yang dengan tingkat sedang pada pilar output, yakni lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial. Hasil ini menggambarkan bahwa daerah dengan kategori sangat tinggi pada pilar tata kelola berkelanjutan di Indonesia Timur, memiliki capaian IDSDB yang baik (dalam hal ini setidaknya tidak menunjukkan daya kinerja yang rendah).

Selain itu, jumlah daerah berkinerja sedang pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 55,65 persen (rerata 41,88).

Daerah yang menempati kategor *top three* pada kategori ini adalah Jayapura (Papua), Halmahera Selatan (Maluku Utara), dan Teluk Wondama (Papua). Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel Akuntabilitas, sedangkan variabel yang berkinerja rendah pada pilar ini adalah partisipasi masyarakat, kebijakan berkelanjutan, efisiensi dan inklusi serta transparansi. Kebermasalahan pada capaian pada klaster ini didominasi oleh persoalan ketersediaan data yang tidak memadai sehingga berdampak pada anjloknya capaian indikator pada daerah yang termasuk dalam klaster ini.

Terakhir, jumlah daerah berkinerja rendah pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 22,86 persen (rerata 27,74).

Daerah-daerah tersebut adalah Sarmi (Papua), Halmahera Timur (Maluku Utara), dan Mappi (Papua). Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja rendah hampir di semua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pada daerah yang berada dalam klaster ini rawan akan beragam masalah. Lemahnya capaian pada sisi akuntabilitas dan transparansi menunjukkan kinerja tata kelola yang buruk. Jika tidak dibenahi, hal ini berpotensi menurunkan *trust* pemangku kepentingan dan berdampak pada tersendatnya dukungan bagi daerah untuk melakukan penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Indikator yang berkinerja rendah pada daerah-daerah ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan minim, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, inovasi daerah dalam pembangunan, kebijakan-kebijakan berkelanjutan, implementasi TAKE dan kerjasama daerah yang minim.



V REPORTASE DAERAH

Memanggul Hasil Panen Suku Baduy (Oleh Taufan Rengganis)



1. Badung (Bali)

Badung merupakan kabupaten dengan skor tertinggi indeks daya saing daerah berkelanjutan (capaian skor 72,96). Badung memperoleh capaian pada empat pilar relatif seimbang dengan kriteria tinggi. Rincian capaian Badung sebagai berikut: capaian pada pilar lingkungan lestari sebesar 64,42 (tinggi), ekonomi berkelanjutan sebesar 70,01 (tinggi), inklusi sosial sebesar 77,32 (tinggi) dan tata kelola berkelanjutan sebesar 80,57 (sangat tinggi). Keunggulan Badung pada pilar lingkungan lestari terletak pada variabel manajemen pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta risiliensi terhadap bencana. Sementara pada pilar ekonomi berkelanjutan unggul pada variabel keuangan daerah, ekosistem investasi, ketersediaan infrastruktur ekonomi dan ketenagakerjaan. Capaian daerah ini pada pilar inklusi sosial memiliki keunggulan pada variabel keunggulan SDM, kesetaraan gender dan kondusivitas keamanan. Terakhir, keunggulan daerah ini dalam pilar tata kelola berkelanjutan tercermin dalam variabel partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan efisiensi serta inklusif.

Badung memiliki berbagai inovasi dari sisi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hingga tata kelola pemerintahan daerah. Penerapan *Tri Hita Karana* dalam keseharian masyarakat Badung tentunya membentuk perilaku cinta lingkungan dan berdampak pada kelestarian lingkungan di daerah. Keberadaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai turut berkontribusi pada capaian pengelolaan sampah yang optimal. Selain itu, Kabupaten ini melakukan penanganan stunting melalui gerakan Badung sehat pada seribu hari pertama kehidupan (Garbasari). Dalam rangka peningkatan realisasi investasi, Kabupaten Badung melakukan sejumlah terobosan diantaranya melalui penyediaan regulasi ramah investasi, optimalisasi MPP, dan dukungan Layanan Perizinan Online (Laperon) sebagai aplikasi pendukung OSS. Terakhir, kabupaten ini memiliki capaian pencegahan korupsi terbaik di level Nasional serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap perwujudan lingkungan lestari.



2. Trenggalek (Jawa Timur)

Trenggalek merupakan kabupaten dengan capaian skor tertinggi kedua dalam pemeringkatan IDSDB (capaian skor 72,77). Kabupaten Trenggalek memperoleh capaian pada empat pilar relatif seimbang dengan kriteria tinggi dengan rincian: lingkungan lestari sebesar 66,28 (tinggi), ekonomi berkelanjutan sebesar 78,55 (tinggi), inklusi sosial sebesar 69,72 (tinggi) dan tata kelola berkelanjutan sebesar 77,25 (tinggi). Keunggulan Trenggalek pada pilar lingkungan lestari terletak pada variabel manajemen pengelolaan sumberdaya lingkungan (pengelolaan sampah). Pada pilar ekonomi berkelanjutan, daerah ini unggul pada variabel ekosistem investasi, ketersediaan infrastruktur ekonomi dan ketenagakerjaan. Capaian daerah ini pada pilar inklusi sosial memiliki keunggulan pada variabel kesetaraan gender dan kondusivitas keamanan. Terakhir, keunggulan daerah ini dalam pilar tata kelola berkelanjutan tercermin dalam variabel partisipasi, akuntabilitas, dan kebijakan berkelanjutan.

Daya saing daerah berkelanjutan Trenggalek dibentuk di atas prinsip kolektif kolegal. Kolektivitas tersebut tercermin dalam sejumlah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan program Adipura Desa (implementasi TAKE dengan mengoptimalkan peran desa dalam pemeliharaan lingkungan), program Sampah Pelunas Pajak (mengajak warga untuk mengumpulkan sampah plastik bekas untuk pembayaran PBB), skema insentif kepada warga miskin yang memiliki komitmen untuk menjaga kesehatan, penyelenggaraan *Ideafest* untuk mengumpulkan gagasan masyarakat, dan penyelenggaraan Musrenbang untuk Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan. Selain itu, terdapat program Sadewa (Seratus Desa Wisata) sebagai langkah aktivasi untuk memperkuat kemandirian desa dan pengadaan *Trenggalek Smart Bench* sebagai fasilitas publik yang inklusif dan ramah lingkungan (menggunakan *solar panel*).

3. Klungkung (Bali)



Klungkung merupakan daerah dengan capaian skor tertinggi ketiga dalam pemeringkatan IDSDB (capaian skor 68,95).

Klungkung memperoleh capaian pada empat pilar relatif seimbang dengan kriteria tinggi dengan rincian: lingkungan lestari sebesar 65,07 (tinggi), ekonomi berkelanjutan sebesar 61,17 (tinggi), inklusi sosial sebesar 71,06 (tinggi) dan tata kelola berkelanjutan sebesar 79,92 (tinggi). Keunggulan Klungkung pada pilar lingkungan lestari terletak pada variabel manajemen pengelolaan sumberdaya lingkungan (pengelolaan sampah) dan resiliensi lingkungan. Pada pilar ekonomi berkelanjutan, daerah ini unggul pada variabel ekosistem investasi, ketersediaan infrastruktur ekonomi dan ketenagakerjaan. Capaian daerah ini pada pilar inklusi sosial memiliki keunggulan pada variabel kesetaraan gender dan kondusivitas keamanan. Terakhir, keunggulan daerah ini dalam pilar tata kelola berkelanjutan tercermin dalam variabel partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Pemerintah Kabupaten Klungkung mengimplementasikan sejumlah inovasi dalam rangka pemeliharaan kualitas lingkungan hingga penyelenggaraan layanan publik yang efisien. Daerah ini mengembangkan program *TOSS Center* (Tempat Olah Sampah Setempat) dan Lubang Daur Ulang Sampah (Bang Daus) dimana program ini bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI). Penanggulangan kemiskinan di daerah ini berjalan dengan melakukan perbaikan basis data kemiskinan, penggalangan aspirasi dan pemberian bantuan untuk keluarga miskin secara tepat sasaran dengan dukungan aplikasi Klungkung Dalam Genggaman. Selain itu Pemerintah Daerah memiliki inisiatif pelayanan publik melalui skema layanan jemput bola untuk perizinan dan kependudukan. Inovasi peningkatan pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal/penerimaan daerah dilakukan dengan mengembangkan aplikasi *One Resa, One Gate One Destination*, SIAPPDOL, Sitampan Online, Sicantik Pro, Sipenera, e-Mikol, dan Gebyar Sinona.



4. Malinau (Kalimantan Utara)

Malinau menjadi daerah dengan capaian pilar lingkungan lestari tertinggi (capaian skor 71,98). Capaian IDSDB Malinau berada pada skor 61,97 dan berada pada peringkat 33 dari 183 daerah. Pada pilar yang lain, Malinau mencatatkan skor 55,56 pada pilar ekonomi berkelanjutan, 61,74 pada pilar inklusi sosial, dan 59,75 pada pilar tata kelola berkelanjutan. Malinau menorehkan capaian sangat tinggi pada variabel kualitas lingkungan (87,03) dan manajemen pengelolaan sampah (85,38) sehingga daerah ini secara akumulatif unggul dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kelestarian lingkungan di Malinau dibangun diatas semangat kolektivitas dan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Malinau merupakan kabupaten konservasi yang memiliki 1,3 juta hektare kawasan hutan lindung Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang dikenal dengan *Heart of Borneo* dan Malinau juga merupakan *catchment area* (resapan air) daerah sekitarnya. Keberadaan kawasan TNKM memberikan dampak yang signifikan atas tingginya capaian kualitas lingkungan di Malinau. Untuk mendukung perwujudan kelestarian lingkungan, Pemkab Malinau menjalankan program unggulan yakni RT Bersih (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis). Program ini berjalan dengan baik melalui pelibatan multipihak (organisasi ataupun lembaga) di Malinau. Terakhir, Pemkab Malinau mengembangkan manajemen wisata dan pengelolaan sampah secara langsung di Desa Wisata Pulau Sapi (Dewi Pulsa), Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau. Hal ini mendorong kemandirian warga desa dalam memelihara kebersihan sekaligus menciptakan nilai tambah dari pengembangan desa wisata di kawasan tersebut.

5. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)



Kutai Kertanegara menjadi daerah dengan capaian pilar ekonomi berkelanjutan tertinggi ketiga (capaian skor 71,98) setelah Trenggalek dan Badung. Capaian IDSDB Kutai Kertanegara berada pada skor 63,87 dan berada pada peringkat 15 dari 183 daerah. Pada pilar yang lain, Kutai Kertanegara mencatatkan torehan skor 68,31 pada pilar lingkungan lestari, 55,05 pada pilar inklusi sosial, dan 65,69 pada pilar tata kelola berkelanjutan. Kutai Kertanegara menorehkan capaian sangat tinggi pada variabel ekosistem investasi (100) dan ketenagakerjaan (85,79), serta capaian tinggi pada variabel ketersediaan infrastruktur ekonomi (72,68). Kendati mencatatkan capaian sedang pada variabel daya dukung wilayah (52,00) dan kemampuan fiskal daerah (40,73), capaian ini relatif lebih baik sehingga daerah ini secara akumulatif unggul dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kendati daerah ini identik dengan keberadaan SDA pertambangan, namun daerah ini memiliki potensi dan aspek lain yang turut mengangkat kinerja pilar ekonomi berkelanjutan. Kutai Kartanegara memiliki sekitar 120 hektar lahan budidaya rumput laut dengan cakupan pasar internasional (mayoritas rumput laut dikirim ke Jepang dan Cina). Selain itu, daerah ini memiliki capaian realisasi investasi yang tinggi serta didukung dengan kinerja DPMPTSP yang prima. Hal ini terlihat dari keberhasilan DPMPTSP Kutai Kartanegara dalam meraih predikat pelayanan prima dalam evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh KemenpanRB RI. Langkah konkretnya, daerah ini menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut.



6. Sukoharjo (Jawa Tengah)

Sukoharjo menjadi daerah dengan capaian pilar inklusi sosial tertinggi (capaian skor 82,10). Capaian IDSDB Sukoharjo berada pada skor 64,66 dan berada pada peringkat 13 dari 183 daerah. Pada pilar yang lain, Sukoharjo mencatatkan capaian tinggi pada pilar ekonomi berkelanjutan (60,89) dan pilar tata kelola berkelanjutan (72,66). Akan tetapi, daerah ini masih memiliki persoalan pada pilar lingkungan lestari dengan skor 48,12. Sukoharjo menorehkan capaian sangat tinggi pada variabel kesetaraan gender (90,79) dan kondusivitas keamanan (91,54), serta capaian tinggi pada variabel ketersediaan infrastruktur dasar (78,47) dan keunggulan SDM (67,58). Ketiadaan capaian variabel berstatus rendah serta capaian kuantitatif yang tinggi di Sukoharjo menempatkan daerah ini pada posisi tertinggi untuk pilar inklusi sosial. Capaian ini turut berkontribusi pada capaian tinggi DSDB Sukoharjo dengan menempatkan daerah ini pada posisi *Top 15*.

Capaian dan praktik baik penguatan pilar inklusi sosial di Sukoharjo bertumpu pada keberadaan regulasi serta sejumlah program konkret. Pemerintah Kab. Sukoharjo menerbitkan sejumlah regulasi yang terkait dengan isu penyandang disabilitas, penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung, pembentukan sanggar inklusi, hingga pembentukan kelurahan/desa inklusi. Kabupaten Sukoharjo memiliki inovasi unik berupa kelurahan/desa inklusi dan sanggar inklusi sebagai program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi disabilitas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi yang mengintegrasikan isu-isu gender dalam pembangunan daerah.

7. Sanggau (Kalimantan Barat)



Sanggau menjadi daerah dengan capaian pilar tata kelola berkelanjutan berstatus sangat tinggi (capaian skor 81,00) namun tidak optimal pada pilar lainnya. Secara keseluruhan, IDSDB Sanggau menunjukkan kinerja sedang (skor 46,16) dan berada pada peringkat 173 dari 183 daerah. Pada pilar yang lain, Sanggau mencatatkan capaian sedang pada pilar lingkungan lestari (35,48) dan pilar inklusi sosial (57,49). Sayangnya, daerah ini masih memiliki persoalan pada pilar ekonomi berkelanjutan dengan capaian rendah (skor 28,59). Kinerja yang sedang pada 3 pilar diatas menyebabkan capaian agregatif IDSDB Sanggau berada pada level sedang.

Kendati demikian, kinerja seluruh variabel tata kelola berkelanjutan di kabupaten Sanggau berada pada level tinggi dan sangat tinggi. Kabupaten Sanggau menorehkan capaian sangat tinggi pada variabel partisipasi (100), akuntabilitas (82,88), dan efisiensi (81,59); serta capaian tinggi pada variabel transparan (62,32) dan kebijakan berkelanjutan (78,22). Ketiadaan capaian variabel berstatus rendah di daerah ini menempatkan Sanggau pada posisi tertinggi untuk pilar tata kelola berkelanjutan. Namun, capaian sangat tinggi pada pilar ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian pilar lainnya dan skor umum IDSDB.

Secara kinerja, kabupaten ini memiliki sejumlah program konkret yang memudahkan masyarakat dalam menjangkau akses pelayanan publik daerah hingga perwujudan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten ini mendapatkan Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik dan penghargaan kabupaten inovatif perbatasan pada tahun 2021. Selain itu, Kabupaten Sanggau juga mendorong adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Aplikasi yang digunakan dalam rangka memudahkan akses masyarakat dalam pelayanan publik meliputi aplikasi e-PHYO dalam mengontrol kinerja ASN; aplikasi Sipada (Sistem Pajak Daerah), dan aplikasi Sidompu (Sistem

Pendataan Orang Tidak Mampu). Pemerintah Kabupaten Sanggau turut berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan melalui implementasi TAKE sebagai strategi untuk meningkatkan status kemandirian desa. Terakhir, Kabupaten Sanggau memiliki komitmen konkret terhadap keberlanjutan lingkungan pada sektor perkebunan kelapa sawit. Pemkab Sanggau menjadi yang pertama di Kalimantan Barat dalam menindaklanjuti Inpres No.8 tahun 2018 dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Sanggau No.065/3442/HK-B terkait penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.



8. Deli Serdang (Sumatera Utara)

Deli Serdang merupakan kabupaten dengan skor indeks daya saing daerah berkelanjutan dengan capaian sebesar 64,50.

Deli Serdang memperoleh capaian pada empat pilar relatif seimbang dengan kriteria tinggi, kecuali pilar lingkungan lestari. Rincian IDSDB di Deli Serdang sebagai berikut: pilar lingkungan lestari sebesar 45,50 (sedang), ekonomi tangguh sebesar 69,44 (tinggi), inklusi sosial sebesar 70,30 (tinggi) dan tata kelola baik sebesar (77,50). Daerah ini tidak termasuk dalam pemeringkatan 183 daerah (kelengkapan data 100 persen) karena memiliki persoalan terkait kelengkapan data, yakni ketiadaan data Indeks Kualitas Air (IKA).

Inovasi yang dilakukan daerah ini cukup bervariasi pada setiap pilarnya. Pada pilar lingkungan lestari, Pemkab melakukan pemantauan dan sampling air pada musim kemarau dan penghujan pada aliran sungai; menetapkan kebijakan pembuatan kolam limbah bagi pelaku usaha yang akan membuka usaha sebagai salah satu prasyarat mendapat izin; serta merancang aplikasi Jumpamadu (jemput sampah terima duit). Kemudian, kemandirian fiskal Kabupaten Deli Serdang termasuk yang unggul di Pulau Sumatera dan nasional dengan capaian 3.62 dengan capaian yg sangat tinggi berkat adanya kebijakan pemberian *reward* (penghapusan denda) dan *punishment* bagi wajib pajak (denda 2 persen dari total pajak yang telah terbayar).

Dari sisi kemudahan berinvestasi, Kabupaten telah menyiapkan beberapa kebijakan diantaranya: pemetaan sektor dan potensi unggulan di masing-masing kecamatan (22 kecamatan) melalui aplikasi Srideli.

9. Pohuwato (Gorontalo)



Pohuwato merupakan kabupaten dengan capaian indeks daya saing daerah berkelanjutan sebesar 55,57. Daerah ini memperoleh capaian bervariasi pada empat pilar IDSDB. Rincian capaian IDSDB di Pohuwato adalah sebagai berikut: pilar lingkungan lestari sebesar 70,98 (tinggi), ekonomi berkelanjutan sebesar 38,37 (rendah), inklusi sosial sebesar 63,45 (tinggi), dan tata kelola berkelanjutan sebesar 55,16 (sedang). Variasi ini sendiri menunjukkan bahwa masih terdapat *vis a vis* antara pencapaian pilar lingkungan lestari dan ekonomi berkelanjutan.

Pohuwato memiliki inovasi yang mendorong tingginya capaian pada pilar lingkungan lestari. Kinerja multipihak menjadi kunci utama pencapaian tersebut dimana terdapat sinergitas antara pemda, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM tersebut bernama Burung dan merupakan mitra pembangunan strategis di Pohuwato dalam bidang lingkungan hidup dan pengembangan komoditas pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, terdapat inovasi pengelolaan sampah yakni Rumah Singgah Satko atau pakai sampah tukar sembako untuk menciptakan dan mendorong masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan. Disisi lain, dalam pemenuhan sanitasi layak melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan fokus utama yaitu mendapatkan model pendekatan pembangunan sanitasi yang sesuai dengan kondisi yang ada di daerah (masyarakat Suku Bajo-di Kecamatan Lemito).



10. Ngada (NTT)

Ngada merupakan satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ketersediaan data yang lengkap (100 persen). Capaian IDSDB Ngada berada pada level sedang dengan nilai sebesar 52,42. Daerah ini memperoleh capaian bervariasi pada empat pilar IDSDB. Rincian capaian IDSDB di Ngada adalah sebagai berikut: pilar lingkungan lestari sebesar 43,46 (sedang), ekonomi berkelanjutan sebesar 55,34 (sedang), inklusi sosial sebesar 74,35 (tinggi), dan tata kelola berkelanjutan sebesar 42,21 (sedang).

Komitmen dan *political will* pemerintah daerah merupakan kunci tersedianya data di suatu daerah. Dalam konteks umum, Kepala Daerah di Ngada kerap mengintruksikan setiap OPD untuk memastikan keterbukaan data kepada publik. Selain itu, terkait pemenuhan data lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngada mampu melakukan pengukuran data kualitas lingkungan hidup tepat waktu dengan melakukan pengukuran indeks di akhir musim hujan dan awal musim panas. Hal ini menjadi istimewa sebab daerah ini mengalami kendala keterbatasan anggaran, namun tetap melakukan pengukuran dengan sumber daya terbatas.

Inspirasi lainnya adalah komitmen daerah untuk melakukan internalisasi nilai budaya sebagai filosofi pembangunan daerah. Ngada memiliki tiga program unggulan yang ikonik dan dikenang masyarakat dan dinarasikan dalam bahasa setempat: *wae gebho gabho* (air berkelimpahan), *dara rilo ralo* (listrik terang benerang), dan *zala siro saro* (jalan simpang siur). Hasilnya, kegiatan ekonomi dan aksesibilitas di Ngada sangatlah baik sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas distribusi semakin mudah. Kepala Daerah Ngada juga memiliki program unggulan *Tante Nela Paris* dimana daerah ini memiliki sektor unggulan Pertanian dan Pariwisata sebagai sumber penghidupan, kedaulatan dan jati diri masyarakat. *Tante Nela Paris* merupakan akronim dari “Tani, Ternak, Nelayan dan Pariwisata” untuk memenuhi; *Tuka* (konsumsi), *Tuku* (tabungan), dan *Teka* (yakni untuk dijual/diinvestasikan lebih lanjut). Filosofih Tuka, Tuku dan Teka menggambarkan cara masyarakat Ngada mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

11. Jayapura (Papua)



Jayapura merupakan kabupaten dengan capaian indeks daya saing daerah berkelanjutan sebesar 47,26. Daerah ini memperoleh capaian bervariasi pada empat pilar IDSDB. Rincian capaian IDSDB di Jayapura adalah sebagai berikut: pilar lingkungan lestari sebesar 28,48 (rendah), ekonomi berkelanjutan sebesar 40,98 (sedang), inklusi sosial sebesar 74,99 (tinggi), dan tata kelola berkelanjutan sebesar 57,00 (sedang). Daerah ini tidak termasuk dalam pemeringkatan 183 daerah (kelengkapan data 100 persen) karena memiliki persoalan terkait kelengkapan data, yakni ketiadaan data Indeks Kualitas Air (IKA) dan realisasi penanganan sampah di daerah yang menyebabkan anjloknya capaian pilar lingkungan lestari di daerah ini.

Pemkab Jayapura memiliki misi dalam pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam menjaga kualitas air dan udara, pemkab telah membentuk regulasi (perbup dan perda) untuk perlindungan terhadap kawasan Gunung Cycloop dan Danau Sentani. Disamping itu, dilakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat terkait pembersihan lingkungan, memilah sampah dan juga penanaman pohon. Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar menjaga kualitas air tetap baik. Hal ini semakin terlihat baik dengan komitmen nyata Pemkab Jayapura untuk mengimplementasikan TAKE sebagai insentif pemeliharaan kualitas lingkungan di daerah.

Permasalahan yang terjadi di Jayapura (pada pilar ekonomi berkelanjutan) adalah kendala teknis dan kualitas SDM pada proses perizinan, etos tenaga kerja yang rendah, hingga sulitnya berinvestasi di Jayapura. Proses perizinan melalui OSS RBA di kabupaten ini, masih terkendala lemahnya jaringan internet dan rendahnya kualitas SDM dimana tim teknis masih belum paham terkait tupoksinya sehingga persyaratan perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP. Yang kedua, etos kerja masyarakat masih rendah, sehingga perusahaan besar di Jayapura cenderung menggunakan tenaga kerja dari luar Jayapura. Terakhir, masalah sengketa tanah/hak ulayat adat yang menjadi salah penyebab rendahnya investasi di wilayah ini akibat kendala persengketaan lahan dan resolusi konflik yang tidak solutif.



12. Bangkalan (Jawa Timur)

Bangkalan merupakan daerah dengan kinerja DSDB sedang dengan nilai 42,63. Bangkalan memperoleh capaian bervariasi dimana terdapat capaian pilar yang rendah, sedang, hingga tinggi. Rincian IDSDB di Bangkalan sebagai berikut: pilar lingkungan lestari sebesar 29,64 (rendah), ekonomi berkelanjutan sebesar 34,38 (sedang), inklusi sosial sebesar 51,84 (sedang), dan tata kelola berkelanjutan sebesar 62,53 (tinggi). Temuan ini menjadi hal yang unik sebab terdapat anomali dimana kinerja tata kelola berkelanjutan yang tinggi tidak serta merta menjadi input yang baik terhadap kinerja tiga pilar lainnya.

Tantangan pada setiap pilar turut menghambat upaya Bangkalan dalam meningkatkan capaian DSDB. Di tengah cita-cita luhur menghimpun investasi untuk membangun daerah, daerah ini dihadapkan pada persoalan tata kelola dimana sejatinya Kepala Daerah tidak mengingkari visi dan misi yang sudah dicanangkan dalam RKPD, namun lemah dalam melakukan implementasi pada program yang direncanakan. Ihtwal hal ini, terdapat persoalan klasik yang menjadi penghambat, yakni Eksekutif selalu berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Kemudian, pada pilar lingkungan lestari, masih ditemukan sejumlah tindakan pencemaran dilakukan oleh warga sekitar dan ironisnya terjadi keterbatasan anggaran membuat penanggulangan pencemaran lingkungan terbatas. Selain itu, angkutan armada pengangkut sampah masih terbatas sehingga pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Selain itu, sejatinya pemerintah daerah telah menyediakan internet, sarana untuk menggunakan internet (gawai yang *proper*) masih terbatas di masyarakat.

13. Cirebon (Jawa Barat)

Cirebon merupakan dengan kinerja DSDB sedang dengan skor 42,32. Cirebon memperoleh capaian pada empat pilar relatif seimbang dengan kriteria sedang pada semua pilar. Rincian IDSDB di Cirebon sebagai berikut: pilar lingkungan lestari sebesar 33,66 (sedang), ekonomi berkelanjutan sebesar 39,47 (sedang), inklusi sosial sebesar 48,13 (sedang), dan tata kelola berkelanjutan sebesar 50,18 (sedang).

Daerah ini mengalami sejumlah kendala yang turut menghambat peningkatan kinerja DSDB. Pada pilar lingkungan lestari, kualitas air dan tutupan lahan merupakan masalah serius dimana tahun 2004 jumlah mata air di Kabupaten Cirebon berjumlah 214 titik mata air dan ditahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 40 titik mata air. Penyebab hilangnya sumber mata air tersebut karena fenomena alih fungsi lahan yang tinggi serta proses pemotongan batu alam akibat belum memiliki IPAL. Terkait ketenagakerjaan, saja persoalan yang dihadapi Cirebon saat ini adalah kekurangan *trainer* (pelatih) yang dapat memberi materi pelatihan maupun praktik.





14. Cianjur (Jawa Barat)

Cianjur merupakan kabupaten dengan capaian IDSDB yang berada pada kategori sedang (42,46) Daerah ini memperoleh capaian pada empat pilar relatif seimbang dengan kriteria sedang pada semua pilar. Rincian IDSDB di Cianjur sebagai berikut: pilar lingkungan lestari sebesar 32,79 (sedang), ekonomi berkelanjutan sebesar 60,52 (tinggi), inklusi sosial sebesar 32,60 (sedang), dan tata kelola berkelanjutan sebesar 50,26 (sedang). Kinerja ekonomi berkelanjutan yang tinggi di Cianjur merupakan dampak dari kinerja investasi yang tinggi di kawasan Cipanas dan Cianjur Kota (daerah ini merupakan kawasan wisata). Selain itu, kinerja tata kelola di Cianjur baik pada sisi pelayanan publik (memiliki prestasi kinerja dalam bidang pelayanan investasi DPMPSTP).

Permasalahan yang dimiliki Cianjur mengakibatkan capaian DSDB daerah ini berada pada level sedang. Ihwal pilar lingkungan lestari, daerah ini memiliki persoalan keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan kualitas lingkungan dimana jumlah PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) hanya berjumlah 3 orang untuk mengawasi kualitas air, udara, dan limbah B3 dimana jumlah ini masih sangat kurang untuk menangani isu lingkungan di Cianjur. Selain itu, masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk melakukan pemeliharaan kualitas lingkungan. Terkait kebencanaan, Cianjur memiliki tantangan geografis yang terlalu luas namun dukungan anggaran minim (kurang dari 1 persen APBD) sehingga kapabilitas daerah dalam menanggulangi bencana masih belum optimal. Ihwal ekonomi berkelanjutan, kontribusi terbesar ekonomi cianjur adalah sektor pertanian, tetapi kontribusi pertanian pada pajak daerah hanya pada PBB sehingga kinerja sektor unggulan di daerah ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pajak daerah. Solusinya, perlu ada upaya penciptaan nilai tambah agar sektor unggulan di daerah ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.



VI PENDUKUNG & PENGHAMBAT

Capaian daya saing daerah berkelanjutan antar wilayah relatif bervariasi sesuai dengan dinamika yang terjadi. Rendah dan tingginya daya saing suatu wilayah dideterminasi oleh sejumlah faktor. Namun, daya saing daerah masih sangat rendah karena memiliki sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang dimaksud meliputi kualitas daya dukung lingkungan, ketersediaan infrastruktur yang memadai, sektor unggulan daerah, dan kinerja tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, faktor penghambat antara lain desain kewenangan dan mengatur sejumlah urusan, kualitas SDM, dan keterbatasan dukungan anggaran dapat menurunkan daya saing daerah. Secara rinci, faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Determinan Pendukung

1. Pilar Lingkungan Lestari

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah merupakan berkah bagi daerah, khususnya daerah yang bertumpu pada sektor primer. Sumber daya alam sebagai anugerah dan *endowment* menjadi daya dukung penyangga terhadap kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Daerah yang telah berdaya saing mampu mengelola sumber daya alam dan residu aktivitas pengelolaan tersebut dapat dikelola secara optimal. Dampaknya, kemampuan tersebut menghasilkan *spillover effect* terhadap perekonomian dan bermuara pada kuatnya daya saing di daerah.

Kapabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana menjadi daya dukung penguatan daya saing daerah.

Pada hakikatnya, bencana merupakan fenomena alam yang tidak dapat terprediksi secara waktu maupun dampak. Daerah yang berdaya saing memiliki kemampuan untuk mengelola risiko atas potensi dan insiden bencana yang terjadi di daerah. Daya dukung tersebut dapat berupa sumber daya anggaran, tenaga kebencanaan, infrastruktur, maupun mekanisme mitigasi bencana yang tertuang dalam suatu dokumen (sebagai petunjuk teknis). Pengelolaan risiko bencana secara baik akan meningkatkan *trust stakeholder* sehingga bermuara pada terciptanya kontribusi positif terhadap daya saing daerah secara berkelanjutan.

Pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya saing suatu daerah.

Sampah sebagai residu aktivitas manusia merupakan persoalan penting yang perlu diatasi secara sistematis. Manajemen pengelolaan sampah dengan baik oleh pemerintah daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Keberadaan TPS 3R dan pemanfaatannya secara optimal turut berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih dan meningkatnya pendapatan masyarakat berkat adanya pengelolaan sampah non organik. Selain itu, inisiatif daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam gerakan kolektif-kolegial terkait pembersihan sampah turut memberikan efek positif terhadap kelestarian lingkungan.

2. Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Penguatan sektor unggulan yang lestari menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan daya saing daerah berkelanjutan. Konsep sektor unggulan lestari mengedepankan kemampuan komparatif suatu sektor dalam menyangga perekonomian daerah sekaligus mereduksi karbon sebagai residu aktivitas ekonomi. Sektor unggulan lestari mampu menjadi penggerak utama (*primer mover*) daerah dalam meningkatkan daya saingnya karena memiliki keterkaitan ke depan dan ke

belakang (*forward* dan *backward linkages*) yang kuat. Melalui sektor unggulan lestari, daerah mampu bersaing bahkan dengan produk sejenis dari wilayah lain (*competitiveness*), di pasar nasional dan internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, maupun kualitas layanan. Pemanfaatan komoditas unggulan di daerah yang berdaya saing dilakukan hingga produk-produk turunannya (hilirisasi).

Ketersediaan infrastruktur daerah merupakan komponen yang mendeterminasi ketertarikan investor dalam melakukan investasi di daerah. Infrastruktur fisik seperti jalan raya dengan kualitas baik hingga ketersediaan listrik tentunya menunjang aktivitas ekonomi daerah. Dukungan infrastruktur yang baik menentukan keberhasilan pelaku usaha daerah sedari tahapan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Rangkaian proses ini yang akhirnya menggerakkan roda perekonomian daerah. Selain pada sisi kualitas, keberadaan jalan baik secara jumlah menentukan kemudahan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah.

Keberhasilan sejumlah daerah dalam menggerakkan ekonomi digital didukung oleh kinerja konektivitas internet yang baik. Ketersediaan internet dengan *bandwidth* yang memadai turut menunjang perekonomian kelompok *silent majority* seperti UMKM yang beraktivitas dalam berbagai *platform marketplace*. Kelancaran komunikasi dan aksesibilitas jaringan akan memudahkan proses digitalisasi dalam aspek tata kelola pemerintahan hingga aktivitas niaga. Akhirnya, konektivitas internet di era digital turut menjadi daya ungkit keberhasilan peningkatan daya saing daerah.

Terakhir, inovasi daerah dalam melakukan pemungutan pajak turut berdampak positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Beragam inovasi yang dilakukan oleh sejumlah pembeda menunjukkan adanya harapan dan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Keberadaan program digitalisasi pajak yang berkolaborasi dengan *marketplace* dan QRIS memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, pemanfaatan digital turut meminimalisir adanya kebocoran PAD dan mampu menghadirkan data penerimaan yang *real time*.

3. Pilar Inklusi Sosial

Penanganan stunting pada anak usia dini merupakan pijakan awal yang baik untuk menciptakan generasi penerus yang unggul. Pencapaian prevalensi stunting (di bawah 14 persen) oleh sejumlah daerah memiliki korelasi positif terhadap tingginya tingkat daya saing daerah berkelanjutan. Bonus Demografi 2030 merupakan peluang yang harus disambut oleh daerah melalui kebijakan dan program sosial yang konkret. Melalui penanganan stunting dan capaian prevalensi stunting yang baik, daerah memiliki modalitas yang kuat dalam menghadapi persaingan di masa mendatang.

Daerah yang aman dan kondusif turut berkontribusi atas tingginya tingkat daya saing suatu daerah. Tidak dapat dipungkiri, kondusivitas keamanan merupakan kebutuhan yang primer bagi pelaku ekonomi baik di level daerah hingga global. Kinerja kondusivitas keamanan mampu memberikan efek positif terhadap *trust* para *stakeholder* dan menjadi pertimbangan yang baik bagi investor untuk merealisasikan investasi mereka. Kolaborasi antara aparaturnya keamanan dan masyarakat secara intens memberikan penguatan terhadap derajat kondusivitas keamanan suatu daerah.

Kualitas dan keberadaan infrastruktur sosial memiliki andil terhadap penguatan daya saing daerah. Sarana infrastruktur merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu proses pembangunan di daerah. Keberadaan infrastruktur mampu menjadi daya ungkit dalam peningkatan daya saing dan daya dukung daerah dalam aktivitas pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan. Misalnya, keberadaan sekolah dasar sebagai sarana pembelajaran masyarakat yang memadai akan menjadi tempat yang nyaman untuk menimba ilmu. Pada kasus yang lain, kualitas sanitasi dan air minum layak yang mumpuni akan membantu upaya pencegahan stunting di daerah. Keberadaan fasilitas kesehatan yang mumpuni turut memberikan kontribusi yang nyata pada daya saing daerah, terlebih ditengah tantangan daerah menghadapi pandemi COVID-19.

4. Pilar Tata Kelola Yang Baik

Kapabilitas kepemimpinan lokal menjadi faktor sentral dalam upaya peningkatan daya saing daerah berkelanjutan.

Desentralisasi sebagai amanat reformasi menghadirkan ruang otonomi bagi pemerintahan daerah untuk berkreasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat (sesuai amanat konstitusi) tidak akan tercapai manakala kewenangan dalam desentralisasi tidak dapat dioptimalkan secara optimal. Peran kepemimpinan Kepala Daerah dalam peningkatan daya saing merupakan determinan utama terwujudnya penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Sebab eksistensi dan sepak terjang kepala daerah-lah yang menentukan kemana perahu pembangunan nantinya akan bergerak.

Komitmen dan kinerja yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan merupakan faktor penting yang turut mendeterminasi pencapaian daya saing daerah berkelanjutan.

Kebijakan ramah lingkungan dan perizinan yang pro lingkungan merupakan batu uji yang konkret untuk mengukur kreativitas dan inovasi kepala daerah dalam peningkatan daya saing daerah berkelanjutan. Keberadaan regulasi tersebut menjadi cerminan kuat yang menunjukkan komitmen daerah terhadap realisasi pembangunan berkelanjutan ditengah tantangan ancaman krisis iklim global.

Selain itu, proses perumusan kebijakan yang inklusif dan deliberatif turut mendorong pencapaian daya saing daerah berkelanjutan.

Aspirasi masyarakat sejatinya merupakan cerminan potret kebutuhan daerah dan juga masalah riil yang terjadi di level akar rumput. Pemerintah daerah yang membuka pintu aspirasi dengan lebar berhasil menangkap kebutuhan riil masyarakat. Realisasi aspirasi masyarakat dengan sendirinya akan mengatasi beragam permasalahan yang terjadi. Muaranya, pengentasan masalah tersebut berdampak signifikan terhadap penguatan daya saing daerah berkelanjutan berbasis bukti (*evidence based*).

Integritas dan ketepatan waktu aparatur dalam melakukan pelaporan keuangan merupakan kunci terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Capaian

positif pada Opini BPK didulang oleh daerah yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang tepat waktu dan didukung oleh proses penyusunan yang detail dan komprehensif. Hal inilah yang akhirnya turut mendorong kinerja pilar tata kelola, sekalipun pada daerah dengan derajat daya saing yang sedang dan rendah. Integritas aparatur pemerintahan turut meningkatkan *trust* publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dampaknya, daerah dengan capaian integritas yang baik memiliki capaian daya saing daerah berkelanjutan yang relatif tinggi dan sedang.

Pelaksanaan program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) turut mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan asri. Penyediaan dana (alokasi) APBD untuk pelaksanaan program TAKE oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu daya ungkit yang mumpuni dalam penguatan daya saing daerah berkelanjutan. Pelaksanaan berbagai program yang dibiayai oleh skema TAKE akhirnya mewujudkan kesadaran masyarakat untuk bekerja kolektif-kolegial dalam menjaga kelestarian lingkungan hingga menjalankan aktivitas ekonomi dengan prinsip keberlanjutan di daerah.

Terakhir, digitalisasi merupakan daya ungkit yang mendeterminasi pencapaian penguatan daya saing daerah berkelanjutan. Perkembangan zaman yang mengarah pada perubahan perilaku masyarakat yang bergantung pada penggunaan infrastruktur digital menjadi alasan utama pentingnya digitalisasi. Spirit penyederhanaan yang diusung oleh digitalisasi berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan inklusif. Setiap pengguna jasa layanan publik memperoleh kesempatan dan kualitas layanan yang setara dalam mengakses layanan publik. Kehadiran *platform* digital dalam aktivitas ekonomi merupakan aktualisasi nilai globalisasi yang menekankan prinsip daya saing dalam realitanya.

Determinan Penghambat

1. Pilar Lingkungan Lestari

Keterbatasan daerah dalam menyediakan kualitas air, udara, maupun tutupan lahan menjadi salah satu penghambat terwujudnya daya saing daerah berkelanjutan. Contoh konkretnya adalah penggunaan sumber mata air yang sama dari satu sungai oleh beberapa Kabupaten pada akhirnya bergantung pada sejauh mana tingkat kualitas dari air tersebut. Manakala air yang digunakan bermasalah pada sisi kandungan, hal ini akan menurunkan derajat kinerja pengelolaan air di daerah. Pelajaran penting dari kasus ini adalah penting bagi daerah untuk melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk menjaga kualitas air dari hulu hingga hilir.

Persoalan lainnya, daya dukung armada pengangkut sampah serta kuantitas SDM yang terbatas telah memperparah penumpukan sampah di berbagai daerah. Keterbatasan dari sisi anggaran, SDM, hingga infrastruktur turut berperan terhadap minimnya tingkat pengelolaan sampah di daerah, khususnya bagi daerah dengan bentang geografis yang luas. Minimnya kreativitas dan inisiatif oleh pemerintah daerah turut memperparah kelestarian lingkungan. Dampaknya, sampah yang ada semakin menumpuk, ibaratkan bom waktu persoalan sampah yang tidak tertangani akan menimbulkan dampak sistematis bagi daerah.

Isu bentang wilayah dan keterbatasan sumber daya turut melemahkan kapasitas daerah dalam melakukan mitigasi bencana. Jumlah tenaga kebencanaan yang terbatas hingga armada yang sedikit dan kurang memadai pada akhirnya akan menjadi penghambat bagi daerah kala terjadi bencana. Lagi-lagi, bentang wilayah yang relatif luas memberikan dampak signifikan terhadap daerah dengan sumber daya yang terbatas untuk melakukan mitigasi bencana. Sebab, penanganan bencana yang optimal semestinya menjangkau setiap titik di daerah dengan segala sumber daya yang ada. Keterbatasan tersebut relatif mengkhawatirkan mengingat bencana merupakan fenomena

yang tidak dapat diprediksi dari sisi waktu maupun dampak kewilayahan. Selain itu, ketiadaan infrastruktur peraga (petunjuk mitigasi tsunami, dll) kebencanaan di sejumlah kawasan wisata menjadi persoalan yang berdampak pada kapasitas pengetahuan masyarakat soal kebencanaan.

2. Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Dependensi suatu daerah pada sektor tertentu tanpa didukung kekuatan dari sektor yang lain akan melemahkan capaian daya saing daerah di seluruh pilar. Kebertumpuan daerah pada salah satu sektor membuat daerah rentan mengalami *economic decline*. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran bagi kita untuk tidak berfokus pada satu sektor saja. Keruntuhan pada satu-satunya sektor ekonomi unggulan memberikan efek sistemik seperti melemahnya daya beli hingga melemahnya capaian pendapatan asli daerah. Bliamana daerah hendak mengembangkan sektor unggulan baru, diharapkan untuk tetap memperhatikan keseimbangan keempat pilar DSDB.

Ketidakmandirian daerah dari sisi fiskal turut melemahkan daya saing suatu daerah. Daerah yang tidak mandiri secara fiskal dihadapkan pada kondisi keterbatasan sumber daya fiskal serta tidak leluasa dalam menggunakan anggaran. Ketergantungan terhadap dana transfer menyebabkan stagnannya derajat daya saing suatu daerah, sebab alokasi belanja melalui dana transfer sudah memiliki ketentuan dan peruntukan yang *rigid*. Kekakuan peruntukan dana transfer akhirnya melemahkan daya kreativitas daerah, bahkan sebagian besar daerah mengambil jalan pintas dengan memberlakukan regulasi yang tidak ramah investasi berkelanjutan.

Persoalan lainnya, keterbatasan infrastruktur turut mendegradasi capaian daya saing pada suatu daerah. Tingkat aksesibilitas dan konektivitas yang rendah turut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah. Keberadaan jalan baik yang terbatas mempersulit akses distribusi dan migrasi (komuter) di daerah. Selain itu, fenomena *blank spot* (ketiadaan sinyal) dan listrik yang belum masuk desa turut

menghambat aktivitas ekonomi, khususnya UMKM di daerah yang bertumpu pada keberadaan listrik untuk memproduksi dan konektivitas internet untuk bertransaksi di era digital.

3. Pilar Inklusi Sosial

Keberadaan fasilitas kesehatan yang kurang memadai pada sisi jumlah maupun ketersediaan antar jarak melemahkan daya saing daerah berkelanjutan. Pada aspek kesehatan, penanganan pandemi COVID-19 maupun beragam penyakit lainnya mengalami hambatan manakala jumlah fasilitas kesehatan di suatu daerah terbatas. Selain itu, keterbatasan fasilitas turut berdampak pada minimnya proses *monitoring* dan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan penanganan stunting. Dampaknya, kualitas SDM dari sisi kesehatan mengalami pelemahan dari sisi capaian dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan di masa mendatang.

Tingkat keamanan yang tidak kondusif merupakan determinan yang penting dalam persoalan lemahnya daya saing daerah. Permasalahan kriminalitas yang tinggi secara angka menciptakan kerentanan sosial dan berpotensi mempengaruhi suatu keputusan investasi. Dampak dari situasi yang tidak kondusif adalah terciptanya kekhawatiran bagi *stakeholder* untuk melakukan aktivitas ekonomi di daerah. Dengan demikian, daerah tersebut akan kehilangan daya tarik investasinya dan mengalami efek samping berupa pelemahan dari sisi ekonomi.

Pelibatan perempuan secara minim dalam pembangunan daerah turut mendeterminasi rendahnya daya saing suatu daerah. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dipengaruhi oleh sejauhmana keterbukaan pemerintah dalam melakukan pelibatan pada kelompok perempuan. Padahal, perempuan (khususnya ibu-ibu) merupakan kelompok yang lebih mengetahui gambaran perekonomian rumah tangga. Kebijakan terkait pengadaan kebutuhan pokok tanpa melibatkan perempuan berdampak pada output kebijakan yang bias dan

tidak mencapai target.

Prevalensi stunting yang curam turut disebabkan oleh buruknya kualitas sanitasi dan air minum masyarakat. Air sebagai zat dengan tingkat konsumsi yang tinggi oleh masyarakat merupakan asupan pokok yang menentukan kondisi tubuh manusia. Selain itu, sanitasi merupakan infrastruktur pendukung dari aktivitas biologis manusia. Kinerja yang tidak optimal pada dua indikator ini melemahkan daya saing daerah karena dampak akibat buruknya air minum dan sanitasi dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya klaster masyarakat yang sedang berada dalam proses pertumbuhan.

4. Pilar Tata Kelola Yang Baik

Ketiadaan itikad pemerintah daerah dalam pewujudan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah akar masalah dari rangkaian persoalan keberlanjutan di daerah. Kualitas kepemimpinan yang baik di suatu daerah tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak disertai dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tidak dapat dilihat secara abstrak pada janji kampanye, namun harus tertuang secara konkret dalam visi-misi dan dokumen perencanaan daerah.

Daerah berdaya saing lemah memiliki persoalan serius dari sisi penyediaan informasi publik. Padahal, keberadaan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses merupakan modalitas utama serta portofolio yang efektif untuk melakukan promosi daerah. Keterbatasan informasi pada aspek data statistik, publikasi dokumen perencanaan daerah, hingga produk hukum daerah menyebabkan rendahnya capaian daya saing suatu daerah. Ketiadaan data strategis menunjukkan adanya dua kemungkinan, (1) keterbatasan infrastruktur digital untuk melakukan publikasi, dan/atau (2) rendahnya *political will* daerah dalam melakukan penginputan data.

Capaian integritas yang rendah merupakan cerminan minimnya integritas aparatur daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Secara metodologis, penilaian integritas dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal, sehingga derajat presisi temuan dengan kondisi faktual amatlah tinggi. Rendahnya integritas aparatur daerah turut melemahkan daya saing daerah, sebab hal ini merupakan pintu celah terjadinya tindakan korupsi. Korupsi yang tidak terdeteksi penegak hukum pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi bagi pelaku usaha dan menjadi titik mula terjadinya kerusakan lingkungan akibat pengawasan yang kendor pasca terjadinya korupsi.

Digitalisasi penyelenggaraan publik yang tidak optimal menyebabkan rendahnya daya saing suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya ketertinggalan dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik. Dampaknya, prinsip kemudahan berusaha tidak terwujud di daerah dan berpengaruh pada keputusan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas perekonomian di daerah. Persoalan lainnya, minimnya dukungan infrastruktur internet dan listrik membuat daerah terisolir dari berbagai layanan publik di level pusat maupun daerah.

Keterbatasan Data

1. Ketersediaan Data

Terbatasnya informasi ihwal kualitas lingkungan menjadi penghambat bagi tim indeks dalam melakukan pengukuran daya saing daerah berkelanjutan di daerah. Informasi terkait pengukuran hal-hal strategis seperti pengukuran gas rumah kaca relatif terbatas. Mekanisme *self assesment* dalam pengukuran gas rumah kaca turut menyebabkan data capaian yang terbatas. Rendahnya kesadaran daerah untuk melakukan pengukuran dan penginputan tepat waktu menjadi permasalahan yang perlu dibenahi dalam pengukuran data gas rumah kaca. Pengukuran gas rumah kaca sejatinya merupakan elemen penting mengingat capaian gas rumah kaca memiliki korelasi yang erat dengan sejauhmana aktivitas ekonomi daerah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan.

Permasalahan lainnya, pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) di beberapa daerah mengalami kendala dari segi proses maupun biaya. Pada aras proses, terdapat daerah yang melakukan pengukuran dan penginputan tepat waktu. Selain itu, terdapat pula temuan bahwa data yang telah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI tidak ditindaklanjuti perbaikannya oleh daerah. Sehingga, data yang diperoleh tim indeks mengalami kekosongan pada sejumlah Kabupaten. Terkait persoalan biaya, terdapat masalah anggaran yang terkena imbas kebijakan realokasi dan *refocusing* sehingga mempersulit daerah untuk melakukan pengukuran kualitas air.

Publikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak dilakukan oleh sebagian besar kabupaten di Indonesia. Padahal, aktivitas publikasi dokumen perencanaan daerah merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan. Kekosongan data pada indikator manajemen pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat merupakan imbas dari tidak dipublikasikannya dokumen RKPD. Sejatinya, manfaat dari publikasi terbuka dokumen perencanaan pemerintah adalah sebagai bagian dari portofolio investasi daerah. Sebab, investor mempertimbangkan kejelasan visi dan perencanaan pembangunan suatu daerah dalam pengambilan keputusan investasi.

Terakhir namun tidak menjadi akhir, perencanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) perlu untuk disusun hingga level kabupaten. Pada praktiknya, selama ini pihak yang diwajibkan menyusun RAD TPB hanya Pemerintah di level level nasional dan provinsi. Dampaknya, daerah tidak mempunyai turunan Perpres 59/2017 karena pada dasarnya memang tidak diwajibkan. Kendati tidak diwajibkan, Pemerintah Kabupaten sejatinya tetap membutuhkan RAD TPB karena penyusunan dokumen yang berkaitan dengan capaian TPB dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk melihat realisasi pembangunan berkelanjutan di daerah. Keberadaan regulasi yang memandatkan penyusunan RAD TPB oleh pemerinah daerah (level kabupaten) akan berdampak pada upaya untuk menyediakan anggaran guna melakukan penyusunan dokumen tersebut.

2. Metodologi

Penggunaan indikator rerata lama sekolah (RLS) memiliki kendala metodis sehingga tidak menggambarkan capaian riil terkait lama anak menempuh pendidikan. Temuan di daerah menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari rendahnya capaian rerata lama sekolah disebabkan oleh komposisi anak usia sekolah yang didominasi oleh masyarakat yang menempuh pendidikan informal (contoh: pesantren). Pada sisi yang lain, tidak ada pilihan lain bagi tim indeks untuk menggunakan indikator ini sebagai alat ukur kualitas SDM suatu daerah. Kedepannya, perlu ada pengembangan suatu indikator yang inklusif dan bisa menjangkau kelompok masyarakat yang menempuh pendidikan informal.

Masalah lainnya, terdapat perbedaan penggunaan indikator dalam melihat capaian prevalensi stunting di daerah. Indeks ini menggunakan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai alat ukur dalam melihat prevalensi stunting di daerah. Sedangkan, sejumlah daerah yang mengalami capaian buruk dalam prevalensi stunting versi SSGI menggunakan hasil dari perhitungan aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Perbedaan dari kedua metodologi ini adalah SSGI menggunakan metode *stratified two stage sampling* dalam pengumpulan data, sedangkan metode e-PPGBM merupakan data *real time* melalui penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulannya.

Pemerintah pusat perlu menyeragamkan cara pandang terhadap penggunaan indikator stunting di daerah, sebab kedua metode ini memiliki kegunaan yang berbeda. Data stunting dengan metode SSGI digunakan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data e-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam *surveilans* program gizi. Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat *real-time*. Pada akhirnya, penggunaan kedua metodologi ini harus digunakan secara tepat sesuai fungsinya masing-masing.

A man wearing glasses and a dark t-shirt with 'West Kalimantan' written on it is operating a large, traditional wooden water wheel. The wheel is partially submerged in a stream, and water is splashing around it. The scene is captured in a dramatic, low-key lighting style, with the man's face and the wheel's structure highlighted against a dark background. The overall mood is one of traditional craftsmanship and sustainable energy.

VII PENUTUP

Kesimpulan

Daya saing daerah di Indonesia secara umum menunjukkan kinerja dengan tingkat sedang, timpang secara kewilayahan, dan belum dibangun secara merata pada seluruh pilar.

Hal ini menunjukkan bahwa aktualisasi dan implementasi daya saing daerah berkelanjutan secara kolektif masih jalan di tempat. Dominasi satu pilar dalam penguatan daya saing daerah berkelanjutan menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih belum sepenuhnya seimbang. Kondisi ini terutama tampak pada gambaran capaian daya saing daerah-daerah yang berada pada tingkat sedang dan rendah. Daerah-daerah berperingkat tinggi relatif memiliki kinerja tinggi pada setiap pilar daya saing daerah berkelanjutan. Sementara daerah-daerah dengan capaian sedang dan rendah, memiliki capaian yang bervariasi pada setiap pilar.

Penguatan daya saing daerah masih mengabaikan kelestarian lingkungan. Capaian rendah pada pilar lingkungan lestari di daerah berdaya saing sedang dan rendah menunjukkan adanya sikap abai dalam memelihara keajaiban lingkungan. Ironisnya, sebagian besar daerah dalam kajian ini memiliki capaian di tingkat sedang dan rendah. Selain itu, skor pada indikator daya dukung wilayah menunjukkan hasil yang rendah. Artinya, pembangunan ekonomi di masa kini sejatinya sedang berada dalam ancaman kerusakan lingkungan. Bilamana hal ini terus dibiarkan, maka keberlanjutan daya dukung wilayah akan semakin melemah dan berdampak pada kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

Daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia mengalami capaian daya saing yang relatif sedang dan rendah. Ketidaktersediaan data menyebabkan rendahnya capaian daya saing daerah berkelanjutan pada daerah-daerah di Indonesia Timur. Berkaca dari hasil indeks (opsi kelengkapan data 80 persen), kawasan Indonesia Timur memiliki pekerjaan rumah yang pelik pada seluruh pilar daya saing daerah berkelanjutan. Kendati kawasan ini memiliki daya dukung yang kuat dari sisi

sumber daya alam, tanpa dukungan kualitas kepemimpinan dan tata kelola berkelanjutan, maka daerah-daerah di belahan timur Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

Keberhasilan maupun kegagalan daerah dalam mewujudkan daya saing daerah berkelanjutan bergantung pada sejauh mana daerah melakukan perbaikan di masa mendatang.

Pada dasarnya, terdapat keterkaitan yang kuat antara elemen pendukung dan elemen penghambat terhadap daya saing daerah berkelanjutan. Variasi determinan pendukung dan penghambat di berbagai daerah membutuhkan intervensi yang berbeda sesuai dengan dinamika yang berkembang. Kuncinya dimulai dari penguatan kapasitas kepemimpinan dan komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan penguatan daya saing yang berkelanjutan di daerah.

Catatan Akhir

Persoalan pilar dalam analisis ini didasarkan pada temuan pada dua opsi karena secara opsi menunjukkan kesamaan yang membentuk suatu tipologi daya saing daerah berkelanjutan.

Kebermasalahan pada pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, maupun tata kelola pemerintahan yang baik tentu saja terjadi pada wilayah dengan kelengkapan data 100 persen dan 80 persen. Misalnya, pada kasus Kabupaten Deli Serdang, daerah ini tidak masuk ke dalam pemeringkatan karena ketiadaan data seperti Indeks Kualitas Air (IKA). Hanya saja, jika melihat kinerja yang ada, sejatinya praktik daya saing daerah berkelanjutan di Deli Serdang telah berjalan dengan baik. Bukti sahnya adalah capaian pertumbuhan investasi yang positif (56 persen) dengan kinerja tata kelola pemerintahan yang optimal pada setiap variabel dan indikatornya.

Proses perhitungan indeks DSDB sejatinya merupakan komposit atas data-data yang saling terkait, sehingga persoalan pada satu indikator akan mendistorsi hasil indeks secara keseluruhan. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari persoalan ketidaklengkapan data ialah pentingnya suatu institusi untuk mempublikasikan data. Hal ini disebabkan oleh fakta dimana data mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan

dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan/penerapan keputusan. Ketidaklengkapan data secara otomatis mengurangi nilai yang seharusnya diperoleh daerah yang dapat berakibat kerugian bagi kabupaten.

Data yang baik akan menjadi pendukung penting bagi daerah sebagai basis informasi serta pusat intervensi pembangunan dan perencanaan oleh pihak eksternal (non pemerintah).

Pemerintah daerah semestinya mulai bergerak taktis dalam memastikan kesadaran untuk menyediakan data di era *open data*. Dengan dukungan pemerintahan yang kuat, maka ketersediaan data yang akurat, mutakhir, akuntabel dan dapat diakses secara bersama diharapkan dapat terwujud.

Kajian ini menghadirkan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai akselerator implementasi komitmen global terkait SDGs.

Rekomendasi KTT G20 menegaskan adanya penguatan komitmen negara untuk mempercepat pencapaian SDGs dalam rangka mewujudkan kemakmuran. Disisi lain, COP 27 (dalam Sharm el-Sheikh Implementation Plan) mengakui prioritas mendasar untuk menjaga ketahanan pangan dan kualitas lingkungan sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan. Bahkan COP 27 menegaskan bahwa pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, tidak boleh dijadikan dalih untuk tidak memprioritaskan aksi iklim dan implementasi pembangunan berkelanjutan.

Pilar Lingkungan Lestari

- **Penguatan pilar lingkungan lestari menjadi agenda prioritas ke depan terutama dalam mendukung pembangun berkelanjutan di daerah. Indeks ini menunjukkan daerah-daerah masih abai pada upaya peningkatan kualitas lingkungan, manajemen sumber daya lingkungan, dan resiliensi lingkungan.** Ketidakseimbangan capaian pada empat pilar daya saing daerah berkelanjutan merupakan indikasi atas proses pembangunan yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Hal ini perlu diperhatikan kedepannya, sebab ketimpangan capaian antar pilar akan menimbulkan dampak stagnansi capaian daya saing daerah berkelanjutan. Bila perlu,

daerah melakukan intervensi pada indikator yang memiliki dampak langsung terhadap capaian indikator yang lain. Proses pembangunan seperti ini amatlah diperlukan ditengah persoalan keterbatasan anggaran di daerah.

- **Dukungan perencanaan dan penganggaran (implementasi TAKE dan pengelolaan sampah) menjadi kunci peningkatan keberlanjutan lingkungan.** Perencanaan dan penganggaran merupakan amunisi daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan serta perwujudan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan yang terjadi di sejumlah daerah diakibatkan oleh kendala anggaran serta kesalahan analisis pada tahap perencanaan. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang realistis dan implementatif untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di tengah berbagai tantangan global.
- **Sedari dini, pembangunan daerah mulai memprioritaskan mitigasi risiko bencana dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim dan dinamika risiko bencana di daerah.** Peristiwa bencana yang terjadi seperti banjir, gempa bumi, badai, dll yang terjadi dengan intensitas tinggi dan tidak terprediksi semestinya menyadarkan semua pihak bahwa mitigasi risiko bencana merupakan urusan prioritas. Dampak perubahan iklim serta eksistensi geografis Indonesia di kawasan *Ring of Fire* sudah cukup jelas menuntut pemerintah daerah untuk mulai fokus terhadap peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.

Pilar Ekonomi Berkelanjutan

- **Penguatan daya dukung wilayah, optimalisasi sektor basis lestari, kemandirian fiskal menjadi agenda prioritas dalam peningkatan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan.** Capaian daya saing daerah berkelanjutan yang tidak optimal (didominasi level sedang) merupakan dampak atas kinerja yang rendah pada tiga variabel di atas. COP mengamatkan adanya perhatian terhadap

isu karbon sehingga penguatan sektor basis lestari yang rendah karbon merupakan jalan menuju penguatan pilar ekonomi berkelanjutan.

- **Kebijakan dan kelembagaan (UU dan Perda PDRD) serta inovasi (sistem dan tarif pajak & retribusi) menentukan kemandirian fiskal daerah.** Penetapan UU No. 1 Tahun 2022 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan kalibrasi ulang kebijakan perpajakan daerah. Sebab, spirit UU baru tersebut adalah melakukan reformulasi kebijakan fiskal daerah dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pada tahap ini, insentif fiskal semestinya digencarkan serta didukung mekanisme perpajakan berbasis digital untuk memastikan terwujudnya tujuan dari UU tersebut.

Pilar Inklusi Sosial

- **Infrastruktur kesehatan perlu mendapatkan perhatian utama dalam penguatan kualitas SDM.** Hal ini dapat diwujudkan melalui kehadiran fasilitas dan layanan kesehatan pada satuan wilayah administrasi terkecil di daerah. Tantangan daerah 3T dalam menguatkan pilar inklusi sosial adalah terkait penyediaan fasilitas kesehatan hingga level desa di pedalaman. Ketiadaan fasilitas kesehatan di wilayah administrasi terkecil akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat secara akumulatif.
- **Perempuan diberikan akses yang lebih luas dalam perumusan kebijakan publik dan aktivitas penguatan daya saing daerah berkelanjutan.** Inovasi yang dilakukan di Trenggalek menjadi inspirasi yang diharapkan mampu diimplementasikan secara nasional. Sebab, peran kaum perempuan di era *modern* amatlah penting karena cakupan keterlibatan perempuan sudah semakin terbuka pada beragam sektor. Penguatan ekonomi di unit masyarakat terkecil (keluarga) akan lebih efektif jika melibatkan kaum perempuan sebab mereka-lah yang lebih memahami dinamika ekonomi rumah tangga.

Pilar Tata Kelola Berkelanjutan

- **Kick off** pertobatan ekologis dimulai dari **pembenahan secara struktural dan komprehensif pada pilar tata kelola berkelanjutan**. Ragam kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (khususnya terkait penguatan daya saing daerah) memiliki dampak terhadap kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial, baik di masa kini maupun masa mendatang. Langkah pertobatan dapat dilakukan oleh perancangan kebijakan publik yang deliberatif, penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan, penyelenggaraan layanan publik berbasis digital, serta penerbitan regulasi yang *pro sustainability*.
- **Daerah perlu melakukan pengembangan inovasi dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pada sisi praktis**. Daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya alam sejatinya sudah memiliki potensi yang kuat sebagai pondasi ekonomi. Hanya saja, pengelolaan sumber daya alam selama ini masih berkuat dengan kecenderungan eksploitatif tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan di daerah. Dampaknya, terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berdampak pada kehidupan generasi di masa mendatang. Kebijakan inovatif di daerah sudah semestinya memperhitungkan kondisi lingkungan yang selama ini diabaikan. Langkah awalnya adalah dengan membukakan pintu partisipatif bagi publik guna merangsang partisipasi dan dukungan publik dalam peningkatan daya saing berkelanjutan di daerah.
- **Pemerintah pusat menerbitkan aturan yang mendorong daerah untuk memprioritaskan kebijakan dan realisasi investasi hijau**. Realisasi investasi hijau di daerah akan memberikan efek domino terhadap penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Sebab, investasi hijau sejatinya menempatkan kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial sebagai bagian yang setara dengan aspek ekonomi. Perubahan paradigma pembangunan ini diharapkan mampu menghadirkan langkah revolutif

bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada secara berkeimbangan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Catatan Lainnya

- **Perlunya penguatan kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkelanjutan pada aspek kewenangan, keuangan, hingga pembinaan dan pengawasan.** Hal ini dilakukan untuk menghadirkan ruang kendali yang luas bagi daerah untuk memperkuat daya saing daerah berdasarkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Lemahnya capaian pada pilar lingkungan lestari hingga inklusi sosial di sejumlah daerah pada umumnya disebabkan oleh pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang lemah. Hal ini terjadi karena rentang kendali dan jarak yang jauh antara instansi pengawas dan pengendalian yang diberikan kewenangan berdasarkan UU dengan ruang berjalanya kegiatan usaha dan sumber daya alam di daerah.
- **Perlunya penguatan sistem penyediaan data (Pusat dan Daerah) sebagai “profil dan portofolio investasi’ daerah.** Dunia kini sedang menghadapi era *open data source* dimana kebutuhan akan data merupakan hal primer yang menentukan analisis sains dan kebijakan pemerintah. Selain itu, kini dunia juga dituntut untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Dua agenda ini akan berjalan dengan baik bilamana pemerintah daerah memiliki *political will* untuk melakukan publikasi data pada kanal-kanal resmi milik daerah. Selain itu, publikasi data pun harus tersedia dalam satu *platform/website* resmi sehingga masyarakat dan investor dapat mengakses data daerah dengan mudah.



Budidaya Ikan Hias (Oleh Hendra Setiawan)

DAFTAR PUSTAKA

- Andreucci, M. B., Marvuglia, A., Milen, B., & Preben, H. (2021). *Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-71819-0>
- Byrne, M. M. (1997). Is growth a dirty word? Pollution, abatement and endogenous growth. *Journal of Development Economics*, 54(2), 261–284. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(97\)00043-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(97)00043-6)
- Darmawan, R. E. (2008). The practices of decentralization in Indonesia and its implication on local competitiveness. *Public Administration-Public Governance Study School*, 57.
- Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review Abridged version. In *London: HM Treasury*.
- Dedi Supriadi & Faisal Jalal. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fedderke, J., & Garlick, R. (2008). Infrastructure Development and Economic Growth in South Africa: A Review of the Accumulated Evidence. *University of Cape Town Policy Paper Number*, 12, 1–28.
- G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli. (1992). *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publication/Baverly Hills,.
- González, S. C., & Numer, E. (2020). *What is climate governance? A guide to understand national climate governance and international climate negotiations*. 1–43. <https://www.unicef.org/lac/media/19651/file/what-is-climate-governance.pdf>
- Huda, N. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusamedia.
- IMD. (2021). *List of Criteria*. <https://www.imd.org/link/ca00a8b4d6b4414896174056948fb5ab.aspx>
- INOBU. (2020). *Terpercaya Inisiatif Terpercaya*

study Menguji indikator Terpercaya: https://www.euredd.efi.int/documents/15552/460846/The+Terpercaya+Initiative+Briefing+6+BAHASA_WEB.pdf/ed73d73f-3984-4384-635f-8544f6161fdb

Jha, S., Sandhu, S. C., & Wachirapunyanont, R. (2018). Inclusive Green Growth Index: A New Benchmark for Quality of Growth. In *Asian Development Bank* (Issue October). <https://www.adb.org/publications/inclusive-green-growth-index>

Kaho, J. R. (2012). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Revisi). PolGov UGM.

Kalin, W. (2001). *Guide To Decentralization*. SDC Decentralization Team. https://www.shareweb.ch/site/DDLGN/Documents/SDC_Guide_to_Decentralization_2001.pdf

Kambewa, E. V. (2007). *Balancing the people , profit and planet dimensions in international marketing channels*.

Kementerian Keuangan. (2014). *Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*.

Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bina Cipta.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2020). *Daya Saing Berkelanjutan: Studi Pemeringkatan di 356 Kabupaten*. https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Laporan_IDSDB_2020.pdf

Kompas. (2022). *Perubahan Pola Hujan di Jakarta dalam Seabad dan Implikasinya*. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/04/18/perubahan-pola-hujan-di-jakarta-dalam-seabad-dan-implikasinya>

KPPOD. (2005). *Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005 (Persepsi Dunia Usaha)*.

Krugman, P. R. (1996). MAKING SENSE OF THE COMPETITIVENESS DEBATE. Massachusetts Institute of Technology. *The Oxford Review of Economic Policy*, 12(3), 17–25.

Kuenkel, P., Kühn, E., Stucker, D., & Williamson, D. F. (2020). Leading Transformative Change Collectively. In *Leading Transformative Change Collectively*. Routledge. <https://doi>.

org/10.4324/9781003033561

Lavrinenko, O., Ignatjeva, S., Ohotina, A., Rybalkin, O., & Lazdans, D. (2019). The role of green economy in sustainable development (Case study: The eu states). *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(3), 1113–1126. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3\(4\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(4))

Lingkar Temu Kabupaten Lestari. (2019). *JURISDICTIONAL APPROACH INDONESIA: Progress to Date*. November. <https://www.kabupatenlestari.org/dokumen/jurisdictional-approach-indonesia-progress-to-date/>

LTKL. (2019). *Kerangka Daya Saing Daerah*. <https://www.kabupatenlestari.org/dokumen/kerangka-daya-saing-daerah-kdsd-booklet-indo/>

Miller, G. T., & Spoolman, S. T. (2016). *Living In The Environment*. <https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ngsp/livingintheenvironment/index.php#/p/6>

Of, S., & World, T. (2021). *The Sustainable Competitiveness Report, 10th edition*. 1–72.

Porter, M. E. (1991). The Competitive Advantage of Nations. *Journal of Management*, 17(1), 213–215. <https://doi.org/10.1177/014920639101700113>

Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics : Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. Penguin Random House.

Ristek-BRIN. (2020). Panduan Indeks Daya Saing Daerah 2020. *Kementerian Riset Dan Teknologi*, 1–122.

Schwab, K. (2018). The Global Competitiveness Report. In *World Economic Forum*.

Stjepanović, S., Tomić, D., & Škare, M. (2017). A new approach to measuring green gdp: A cross-country analysis. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 4(4), 574–590. [https://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4\(13\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4(13))

UNICEF. (2020). *Tools climate action*.

World Bank. (1995). *The World Bank annual report 1995*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/179751468314378230/The-World-Bank-annual-report-1995>

World Economic Forum. (2018). *The Global Competitiveness Report*.
<http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf>
http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/factsheet_gcr03.pdf

World Economic Forum. (2020). The global competitiveness report: How countries are performing on the road to recovery. In *World Economic Forum*. www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

PROVINSI	KABUPATEN	NILAI IDSDB	PERING-KAT
BALI	BADUNG	72,96	1
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	72,77	2
BALI	KLUNGKUNG	68,95	3
BALI	GIANYAR	67,29	4
JAWA TENGAH	WONOGIRI	66,95	5
BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	66,76	6
RIAU	KUANTAN SINGINGI	66,59	7
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	66,08	8
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	66,06	9
JAWA TENGAH	KEBUMEN	65,26	10
BANGKA BELITUNG	BANGKA	64,95	11
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	64,71	12
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	64,66	13
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	64,01	14
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	63,87	15
BALI	BULELENG	63,80	16
BALI	TABANAN	63,63	17
RIAU	BENGKALIS	63,46	18
KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	63,44	19
JAWA TENGAH	GROBOGAN	63,44	20
LAMPUNG	TANGGAMUS	63,36	21
JAWA BARAT	SUMEDANG	62,93	22
SULAWESI SELATAN	BARRU	62,80	23
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	62,78	24
JAWA BARAT	CIAMIS	62,69	25
ACEH	BIREUEN	62,68	26
BENGKULU	REJANG LEBONG	62,57	27
JAWA TENGAH	SEMARANG	62,40	28
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	62,32	29
JAMBI	BUNGO	62,28	30
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	62,27	31
SUMATERA UTARA	KARO	62,05	32
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	61,97	33
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	61,82	34
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	61,60	35

PROVINSI	KABUPATEN	NILAI IDSDB	PERINGKAT
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	61,59	36
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	61,57	37
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	61,56	38
JAWA TENGAH	MAGELANG	61,42	39
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	61,41	40
SULAWESI TENGAH	SIGI	61,32	41
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	61,31	42
BALI	BANGLI	61,31	43
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	61,27	44
JAWA TENGAH	KLATEN	61,24	45
JAWA TENGAH	WONOSOBO	60,69	46
JAMBI	TEBO	60,67	47
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	60,64	48
BALI	KARANGASEM	60,33	49
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	60,32	50
GORONTALO	GORONTALO	60,29	51
JAWA TIMUR	JOMBANG	60,28	52
JAWA TENGAH	PURWOREJO	60,23	53
KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	60,20	54
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	60,18	55
JAWA TENGAH	SRAGEN	60,15	56
BENGKULU	BENGKULU UTARA	59,99	57
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	59,88	58
DI YOGYAKARTA	BANTUL	59,69	59
ACEH	GAYO LUES	59,65	60
SULAWESI BARAT	MAJENE	59,54	61
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	59,54	62
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	59,45	63
JAWA TENGAH	BANYUMAS	59,41	64
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	59,28	65
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	59,08	66
JAWA TIMUR	LAMONGAN	58,81	67
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	58,68	68
KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	58,47	69
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	58,45	70
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	58,40	71
JAWA BARAT	KUNINGAN	58,27	72
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	58,18	73
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	58,18	74

PROVINSI	KABUPATEN	NILAI IDSDB	PERING-KAT
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	58,12	75
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	58,10	76
JAWA TENGAH	BATANG	58,07	77
BALI	JEMBRANA	57,96	78
SULAWESI TENGGARA	KONAWA KEPULAUAN	57,80	79
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	57,73	80
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	57,65	81
JAWA TENGAH	BOYOLALI	57,53	82
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	57,35	83
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	57,25	84
JAWA BARAT	PANGANDARAN	57,19	85
SUMATERA BARAT	AGAM	57,13	86
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	56,88	87
JAWA TENGAH	KENDAL	56,83	88
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	56,62	89
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	56,56	90
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	56,50	91
JAWA TENGAH	PATI	56,44	92
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	56,33	93
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	56,25	94
SUMATERA BARAT	PASAMAN	56,21	95
SULAWESI SELATAN	BONE	56,08	96
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	56,08	97
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	56,03	98
SUMATERA BARAT	SOLOK	55,88	99
JAWA TENGAH	CILACAP	55,88	100
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	55,77	101
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	55,64	102
GORONTALO	BONE BOLANGO	55,62	103
GORONTALO	POHUWATO	55,57	104
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	55,15	105
JAWA TENGAH	DEMAK	55,02	106
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	54,78	107
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	54,72	108
ACEH	ACEH BARAT	54,65	109
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	54,54	110
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	54,52	111
JAMBI	MUARO JAMBI	54,48	112
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	54,45	113

PROVINSI	KABUPATEN	NILAI IDSDB	PERINGKAT
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	54,44	114
KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	54,38	115
SULAWESI BARAT	MAMUJU	54,36	116
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	54,24	117
JAWA TIMUR	MADIUN	54,03	118
JAWA TENGAH	JEPARA	53,91	119
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	53,73	120
JAWA TENGAH	KUDUS	53,68	121
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	53,55	122
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	53,40	123
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	53,40	124
LAMPUNG	TULANG BAWANG	53,35	125
SULAWESI TENGGARA	KONawe UTARA	53,23	126
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	53,11	127
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	52,99	128
ACEH	ACEH BESAR	52,87	129
JAWA BARAT	INDRAMAYU	52,83	130
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	52,69	131
LAMPUNG	WAY KANAN	52,67	132
RIAU	ROKAN HULU	52,57	133
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	52,42	134
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	52,42	135
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	52,36	136
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	52,30	137
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	52,28	138
LAMPUNG	PESAWARAN	52,22	139
JAWA BARAT	SUBANG	52,20	140
SULAWESI BARAT	MAMASA	52,17	141
JAWA BARAT	BANDUNG	52,05	142
BENGKULU	KEPAHIANG	52,00	143
ACEH	ACEH SELATAN	51,72	144
JAWA BARAT	SUKABUMI	51,71	145
GORONTALO	GORONTALO UTARA	51,61	146
JAWA TENGAH	TEGAL	51,53	147
KALIMANTAN TIMUR	PASER	51,39	148
JAWA BARAT	MAJALENGKA	51,37	149
JAWA BARAT	PURWAKARTA	51,35	150
GORONTALO	BOALEMO	51,19	151
RIAU	PELALAWAN	51,10	152

PROVINSI	KABUPATEN	NILAI IDSDB	PERING-KAT
JAWA TENGAH	REMBANG	50,65	153
BANTEN	TANGERANG	50,63	154
ACEH	ACEH BARAT DAYA	50,27	155
JAWA TIMUR	KEDIRI	50,12	156
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	49,64	157
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	49,45	158
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	49,34	159
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	49,26	160
SUMATERA UTARA	LANGKAT	49,12	161
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	48,56	162
SUMATERA UTARA	ASAHAN	48,49	163
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	48,26	164
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	48,18	165
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	48,12	166
KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	48,07	167
JAWA BARAT	BOGOR	47,94	168
JAWA BARAT	GARUT	47,81	169
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	47,53	170
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	47,34	171
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	46,62	172
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	46,47	173
JAWA TIMUR	TUBAN	46,45	174
JAWA TENGAH	BREBES	46,32	175
RIAU	KAMPAR	45,57	176
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	45,36	177
BANTEN	SERANG	45,21	178
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	44,82	179
BANTEN	LEBAK	44,03	180
JAWA TIMUR	BANGKALAN	42,63	181
JAWA BARAT	CIANJUR	42,46	182
JAWA BARAT	CIREBON	42,32	183

Lampiran 2 Pilar Lingkungan Lestari Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	71,980
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	71,345
GORONTALO	POHUWATO	70,984
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	69,188
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	68,314
JAWA TENGAH	GROBOGAN	68,048
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	67,012
KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	66,776
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	66,284
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	65,939
BALI	KLUNGKUNG	65,070
GORONTALO	GORONTALO	64,998
KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	64,518
BALI	BULELENG	64,515
BALI	BADUNG	64,415
SUMATERA BARAT	SOLOK	64,379
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	64,140
BALI	GIANYAR	63,914
JAMBI	MUARO JAMBI	63,870
BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	63,703
JAWA TENGAH	BANYUMAS	63,664
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	63,557
GORONTALO	BOALEMO	63,529
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	62,571
RIAU	KUANTAN SINGINGI	61,700
SULAWESI TENGAH	SIGI	61,400
LAMPUNG	TANGGAMUS	61,386
JAWA TIMUR	LAMONGAN	61,326
JAWA TENGAH	PURWOREJO	61,215
SULAWESI SELATAN	BARRU	61,122
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	61,102
ACEH	ACEH BARAT	60,903
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	60,658
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	60,651
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	60,635
JAWA BARAT	CIAMIS	60,364
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	60,183
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	60,114

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI
ACEH	ACEH SELATAN	60,021
JAWA TENGAH	WONOGIRI	59,670
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	59,668
BANGKA BELITUNG	BANGKA	59,635
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	59,605
KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	59,562
JAWA BARAT	KUNINGAN	59,202
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	59,103
JAWA BARAT	PURWAKARTA	59,096
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	58,974
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	58,546
ACEH	GAYO LUES	58,010
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	57,774
JAWA BARAT	SUMEDANG	57,518
SUMATERA UTARA	LANGKAT	57,480
JAWA TENGAH	KEBUMEN	57,479
JAWA TENGAH	CILACAP	57,316
ACEH	ACEH BESAR	57,203
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	57,192
BENGKULU	REJANG LEBONG	56,923
ACEH	BIREUEN	56,893
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	56,640
JAMBI	BUNGO	56,583
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	56,329
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	56,268
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	56,013
RIAU	BENGKALIS	55,983
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	55,626
SUMATERA UTARA	KARO	55,386
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	55,370
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	54,879
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	54,848
JAWA TENGAH	WONOSOBO	54,606
JAMBI	TEBO	54,604
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	54,183
JAWA BARAT	INDRAMAYU	54,168
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	54,113
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	53,930
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	53,750

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI
SULAWESI BARAT	MAJENE	53,663
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	53,352
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	53,274
BALI	BANGLI	52,739
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	52,661
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	51,899
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	51,877
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	51,642
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	51,568
JAWA TENGAH	KLATEN	51,281
SULAWESI TENGGARA	KONawe KEPULAUAN	51,175
DI YOGYAKARTA	BANTUL	51,070
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	50,824
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	50,728
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	50,679
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	50,420
BALI	KARANGASEM	50,379
KALIMANTAN TIMUR	PASER	50,205
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	50,175
BENGKULU	BENGKULU UTARA	49,505
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	48,877
JAWA TENGAH	BOYOLALI	48,315
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	48,123
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	47,843
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	47,799
LAMPUNG	WAY KANAN	47,601
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	47,379
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	47,346
JAWA TENGAH	MAGELANG	47,336
JAWA TIMUR	JOMBANG	47,301
JAWA TENGAH	SRAGEN	47,179
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	47,011
KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	46,695
BALI	TABANAN	46,542
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	46,469
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	45,956
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	45,795
GORONTALO	GORONTALO UTARA	45,638
JAWA TIMUR	MADIUN	45,307

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	45,127
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	45,047
SUMATERA BARAT	PASAMAN	44,914
JAWA TENGAH	TEGAL	44,760
JAWA TENGAH	SEMARANG	44,607
KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	44,559
RIAU	PELALAWAN	44,403
JAWA BARAT	MAJALENGKA	43,992
BENGKULU	KEPAHIANG	43,818
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	43,674
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	43,463
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	42,399
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	42,278
SULAWESI TENGGARA	KONawe UTARA	42,245
SULAWESI SELATAN	BONE	41,914
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	41,910
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	41,524
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	41,309
JAWA TIMUR	KEDIRI	41,097
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	40,410
JAWA TENGAH	BATANG	40,374
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	40,373
JAWA TENGAH	KUDUS	40,328
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	39,754
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	39,621
GORONTALO	BONE BOLANGO	39,355
JAWA BARAT	PANGANDARAN	39,129
SULAWESI BARAT	MAMUJU	38,496
BALI	JEMBRANA	37,966
SUMATERA UTARA	ASAHAN	37,709
SULAWESI BARAT	MAMASA	37,643
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	37,108
JAWA BARAT	SUBANG	36,891
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	36,750
ACEH	ACEH BARAT DAYA	36,714
JAWA TENGAH	REMBANG	36,598

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI
BANTEN	TANGERANG	36,101
JAWA TENGAH	KENDAL	35,896
JAWA BARAT	BANDUNG	35,780
JAWA BARAT	SUKABUMI	35,675
BANTEN	LEBAK	35,666
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	35,479
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	34,770
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	34,567
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	34,492
SUMATERA BARAT	AGAM	34,394
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	34,097
JAWA TENGAH	PATI	33,889
JAWA BARAT	BOGOR	33,860
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	33,813
RIAU	ROKAN HULU	33,800
JAWA BARAT	CIREBON	33,664
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	33,395
RIAU	KAMPAR	33,236
JAWA TENGAH	JEPARA	33,064
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	32,868
JAWA BARAT	CIANJUR	32,786
JAWA TIMUR	TUBAN	32,647
JAWA BARAT	GARUT	31,368
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	30,139
LAMPUNG	TULANG BAWANG	30,002
JAWA TIMUR	BANGKALAN	29,642
JAWA TENGAH	DEMAK	29,044
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	28,970
JAWA TENGAH	BREBES	28,872
BANTEN	SERANG	28,533
LAMPUNG	PESAWARAN	26,768

Lampiran 3 Pilar Ekonomi Berkelanjutan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

PROVINSI	KABUPATEN	EKONOMI BERKELANJUTAN
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	78,548
BALI	BADUNG	70,609
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	67,350
RIAU	KUANTAN SINGINGI	66,705
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	65,535
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	65,000
RIAU	BENGGALIS	64,876
JAWA TENGAH	SEMARANG	64,699
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	63,329
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	63,193
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	63,163
BALI	TABANAN	62,619
JAWA BARAT	BANDUNG	62,565
JAWA TENGAH	MAGELANG	62,495
GORONTALO	BONE BOLANGO	62,205
RIAU	ROKAN HULU	62,200
LAMPUNG	TANGGAMUS	62,120
JAWA TENGAH	JEPARA	62,090
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	61,994
JAWA TIMUR	JOMBANG	61,892
JAWA BARAT	PANGANDARAN	61,839
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	61,713
JAWA BARAT	SUKABUMI	61,508
BALI	GIANYAR	61,484
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	61,420
GORONTALO	GORONTALO	61,234
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	61,228
BALI	KLUNGKUNG	61,167
LAMPUNG	PESAWARAN	61,134
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	61,055
DI YOGYAKARTA	BANTUL	61,022
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	60,888
JAWA TENGAH	WONOGIRI	60,873
BENGKULU	REJANG LEBONG	60,799
JAWA TENGAH	PATI	60,769
JAWA TENGAH	DEMAK	60,656
JAWA BARAT	CIANJUR	60,517
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	60,508

PROVINSI	KABUPATEN	EKONOMI BERKELANJUTAN
JAWA BARAT	CIAMIS	60,444
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	60,310
SUMATERA UTARA	KARO	60,250
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	60,249
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	60,020
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	59,711
JAWA TENGAH	GROBOGAN	59,548
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	59,483
JAWA BARAT	GARUT	59,387
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	59,333
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	59,285
BANGKA BELITUNG	BANGKA	59,228
JAWA TENGAH	KEBUMEN	59,091
BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	59,069
BALI	BULELENG	58,734
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	58,689
JAWA TENGAH	WONOSOBO	58,659
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	58,469
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	58,433
SULAWESI BARAT	MAMUJU	58,349
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	58,291
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	58,284
JAWA TENGAH	BATANG	58,242
KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	58,115
SUMATERA BARAT	AGAM	58,101
JAWA BARAT	KUNINGAN	58,051
SULAWESI TENGAH	SIGI	57,959
JAWA TENGAH	KENDAL	57,937
BALI	KARANGASEM	57,864
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	57,857
SULAWESI SELATAN	BONE	57,856
BALI	BANGLI	57,807
JAMBI	TEBO	57,769
BALI	JEMBRANA	57,712
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	57,638
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	57,625
JAWA BARAT	INDRAMAYU	57,440
JAMBI	BUNGO	57,429
SULAWESI SELATAN	BARRU	57,380

PROVINSI	KABUPATEN	EKONOMI BERKELANJUTAN
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	57,372
LAMPUNG	TULANG BAWANG	57,352
KALIMANTAN TIMUR	PASER	57,273
ACEH	GAYO LUES	57,235
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	57,182
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	57,117
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	57,029
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	56,946
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	56,820
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	56,647
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	56,613
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	56,597
KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	56,536
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	56,237
JAWA TENGAH	KLATEN	56,234
JAWA BARAT	SUMEDANG	56,167
SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA	56,166
KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	56,139
SULAWESI BARAT	MAJENE	56,108
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	56,067
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	56,015
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	55,909
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	55,834
GORONTALO	GORONTALO UTARA	55,666
JAWA TENGAH	SRAGEN	55,665
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	55,559
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	55,557
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	55,344
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	55,322
BENGKULU	BENGKULU UTARA	55,225
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	55,199
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	55,061
KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	55,031
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	54,758
JAWA BARAT	SUBANG	54,611
SULAWESI TENGGARA	KONAWE KEPULAUAN	54,392
ACEH	BIREUEN	54,081
SUMATERA BARAT	PASAMAN	53,950
JAWA TENGAH	BREBES	53,504

PROVINSI	KABUPATEN	EKONOMI BERKELANJUTAN
BANTEN	TANGERANG	51,845
JAWA BARAT	BOGOR	49,806
SULAWESI BARAT	MAMASA	48,627
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	46,682
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	46,636
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	45,851
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	45,593
JAWA TENGAH	REMBANG	43,875
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	42,938
JAWA TENGAH	PURWOREJO	42,524
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	42,508
JAWA TIMUR	LAMONGAN	42,419
RIAU	KAMPAR	42,250
SUMATERA UTARA	ASAHAN	42,231
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	42,004
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	41,889
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	41,664
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	41,490
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	41,435
JAWA TENGAH	BANYUMAS	41,370
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	41,058
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	41,027
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	40,540
JAWA BARAT	MAJALENGKA	40,292
BENGKULU	KEPAHIANG	40,164
JAWA TENGAH	BOYOLALI	40,141
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	39,980
JAWA TENGAH	KUDUS	39,891
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	39,882
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	39,849
JAWA BARAT	CIREBON	39,467
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	39,107
BANTEN	SERANG	38,903
JAWA TIMUR	MADIUN	38,435
GORONTALO	POHUWATO	38,374
JAWA TIMUR	KEDIRI	38,300

PROVINSI	KABUPATEN	EKONOMI BERKELANJUTAN
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	38,279
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	38,176
BANTEN	LEBAK	38,014
SUMATERA UTARA	LANGKAT	37,883
JAMBI	MUARO JAMBI	37,876
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	37,673
JAWA TIMUR	TUBAN	37,327
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	37,075
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	37,014
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	36,746
SUMATERA BARAT	SOLOK	36,653
RIAU	PELALAWAN	36,622
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	36,581
JAWA TENGAH	TEGAL	36,000
ACEH	ACEH BARAT DAYA	35,954
LAMPUNG	WAY KANAN	35,656
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	35,639
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	34,874
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	34,593
JAWA TENGAH	CILACAP	34,470
JAWA TIMUR	BANGKALAN	34,381
JAWA BARAT	PURWAKARTA	33,995
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	33,957
GORONTALO	BOALEMO	33,609
ACEH	ACEH BESAR	33,457
ACEH	ACEH BARAT	31,701
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	29,880
ACEH	ACEH SELATAN	29,235
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	28,588
KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	27,871
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	26,727

Lampiran 4 Pilar Inklusi Sosial Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

PROVINSI	KABUPATEN	INKLUSI SOSIAL
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	82,095
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	80,048
BALI	TABANAN	79,593
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	79,517
JAWA TENGAH	SEMARANG	78,460
JAWA TENGAH	PURWOREJO	77,332
BALI	BADUNG	77,315
ACEH	ACEH BESAR	76,767
BALI	GIANYAR	76,554
JAWA TENGAH	KLATEN	75,856
JAWA TENGAH	KUDUS	75,687
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	74,709
JAWA TENGAH	PATI	74,404
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	74,354
BALI	JEMBRANA	74,283
SUMATERA BARAT	AGAM	74,161
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	74,074
JAWA TENGAH	WONOGIRI	74,049
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	73,685
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	73,469
JAWA TENGAH	REMBANG	73,394
JAWA TENGAH	KEBUMEN	73,359
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	73,311
JAWA TENGAH	SRAGEN	73,025
SUMATERA UTARA	KARO	72,911
ACEH	BIREUEN	72,867
JAWA TENGAH	BOYOLALI	72,753
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	72,584
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	72,425
SULAWESI SELATAN	BARRU	72,046
JAWA TENGAH	DEMAK	72,022
JAWA TENGAH	KENDAL	72,001
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	71,565
RIAU	KUANTAN SINGINGI	71,346
BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	71,255
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	71,236
JAWA TIMUR	MADIUN	71,112
BALI	KLUNGKUNG	71,055

PROVINSI	KABUPATEN	INKLUSI SOSIAL
KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	70,937
BALI	BANGLI	70,887
JAWA TENGAH	BATANG	70,649
SUMATERA BARAT	SOLOK	70,637
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	70,156
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	70,109
JAWA TENGAH	MAGELANG	69,797
JAWA BARAT	PANGANDARAN	69,784
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	69,722
KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	69,687
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	69,600
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	69,554
BALI	BULELENG	69,495
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	69,390
BENGKULU	REJANG LEBONG	69,220
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	69,131
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	69,084
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	68,878
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	68,839
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	68,810
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	68,686
BENGKULU	KEPAHIANG	68,664
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	68,586
KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	68,532
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	67,770
JAWA TENGAH	JEPARA	67,709
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	67,667
JAWA BARAT	SUMEDANG	67,418
SULAWESI TENGGARA	KONAWA KEPULAUAN	67,395
ACEH	ACEH BARAT	67,254
JAWA TIMUR	LAMONGAN	67,156
ACEH	ACEH SELATAN	67,125
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	66,687
SULAWESI TENGGARA	KONAWA UTARA	66,681
SULAWESI TENGAH	SIGI	66,633
BENGKULU	BENGKULU UTARA	66,546
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	66,521
ACEH	ACEH BARAT DAYA	66,014
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	65,996

PROVINSI	KABUPATEN	INKLUSI SOSIAL
BALI	KARANGASEM	65,889
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	65,840
KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	65,824
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	65,759
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	65,705
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	65,612
SULAWESI BARAT	MAJENE	65,556
JAWA TENGAH	WONOSOBO	65,448
SULAWESI BARAT	MAMASA	65,429
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	65,388
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAU- AN	65,370
JAWA TENGAH	GROBOGAN	65,307
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	65,267
GORONTALO	BONE BOLANGO	65,192
SUMATERA BARAT	PASAMAN	65,085
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	64,931
JAWA TIMUR	KEDIRI	64,920
JAWA TENGAH	TEGAL	64,902
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	64,686
BANGKA BELITUNG	BANGKA	64,595
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	64,470
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	64,422
JAMBI	TEBO	64,107
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	64,049
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	63,999
JAWA TIMUR	JOMBANG	63,819
LAMPUNG	PESAWARAN	63,663
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	63,627
LAMPUNG	TULANG BAWANG	63,547
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	63,531
GORONTALO	POHUWATO	63,452
JAWA TENGAH	BANYUMAS	63,257
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	63,249
LAMPUNG	WAY KANAN	63,211
JAWA BARAT	SUBANG	62,954

PROVINSI	KABUPATEN	INKLUSI SOSIAL
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	62,721
JAMBI	BUNGO	62,694
JAWA BARAT	KUNINGAN	62,604
JAWA TENGAH	CILACAP	62,544
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	62,395
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	62,379
BANTEN	SERANG	62,315
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	61,923
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	61,909
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	61,865
SULAWESI BARAT	MAMUJU	61,842
ACEH	GAYO LUES	61,782
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	61,740
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	61,735
JAWA TIMUR	TUBAN	61,618
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	61,452
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	61,420
JAWA BARAT	MAJALENGKA	61,070
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	61,051
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	60,756
RIAU	PELALAWAN	60,692
RIAU	BENGKALIS	60,596
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	60,486
JAWA BARAT	CIAMIS	60,467
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	60,425
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	60,409
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	60,385
LAMPUNG	TANGGAMUS	60,284
JAWA TENGAH	BREBES	60,253
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	60,251
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	60,051
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	59,969
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	59,949
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	59,884
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	58,908
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	58,807
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	58,611
SULAWESI SELATAN	BONE	58,523

PROVINSI	KABUPATEN	INKLUSI SOSIAL
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	58,443
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	58,391
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	58,387
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	58,014
JAMBI	MUARO JAMBI	57,794
KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	57,788
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	57,487
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	57,388
GORONTALO	GORONTALO UTARA	55,794
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	55,603
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	55,569
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	55,049
JAWA BARAT	BANDUNG	54,773
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	54,697
GORONTALO	BOALEMO	54,534
JAWA BARAT	PURWAKARTA	53,550
GORONTALO	GORONTALO	53,050
DI YOGYAKARTA	BANTUL	53,023
SUMATERA UTARA	ASAHAN	52,980
JAWA BARAT	SUKABUMI	52,802
JAWA TIMUR	BANGKALAN	51,837
BANTEN	TANGERANG	51,660
RIAU	ROKAN HULU	50,475
KALIMANTAN TIMUR	PASER	50,384
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	50,063
JAWA BARAT	INDRAMAYU	49,758
JAWA BARAT	GARUT	49,038
RIAU	KAMPAR	48,455
JAWA BARAT	CIREBON	48,128
JAWA BARAT	BOGOR	47,505
BANTEN	LEBAK	46,653
SUMATERA UTARA	LANGKAT	45,947
JAWA BARAT	CIANJUR	32,595

Lampiran 5 Pilar Tata Kelola Berkelanjutan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

PROVINSI	KABUPATEN	TATA KELOLA BERKELANJUTAN
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	81,001
BALI	BADUNG	80,567
BALI	KLUNGKUNG	79,916
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	79,042
JAWA TENGAH	CILACAP	78,895
BANGKA BELITUNG	BANGKA	77,996
JAWA TENGAH	BOYOLALI	77,626
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	77,248
DI YOGYAKARTA	BANTUL	76,809
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	76,489
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	76,324
JAWA TENGAH	BANYUMAS	74,781
JAWA TENGAH	WONOGIRI	74,677
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	74,615
LAMPUNG	TULANG BAWANG	74,102
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	74,079
BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	74,068
JAMBI	BUNGO	73,858
RIAU	BENGGALIS	73,694
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	73,339
ACEH	ACEH BARAT DAYA	73,275
JAWA TENGAH	KEBUMEN	72,785
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	72,726
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	72,659
JAWA TENGAH	DEMAK	72,239
JAWA BARAT	SUMEDANG	72,017
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	72,006
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	71,984
RIAU	ROKAN HULU	71,973
SUMATERA BARAT	AGAM	71,869
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	71,816
LAMPUNG	WAY KANAN	71,758
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	71,381
LAMPUNG	PESAWARAN	71,360
BENGKULU	BENGKULU UTARA	71,202
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	71,087
JAWA TIMUR	JOMBANG	70,692
BALI	TABANAN	70,684

PROVINSI	KABUPATEN	TATA KELOLA BERKELANJUTAN
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	70,650
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	70,455
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	70,164
LAMPUNG	TANGGAMUS	70,098
JAWA BARAT	CIAMIS	69,987
SULAWESI SELATAN	BONE	69,696
JAWA TENGAH	KENDAL	69,657
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	69,490
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	69,347
BALI	JEMBRANA	69,326
RIAU	PELALAWAN	69,094
BALI	KARANGASEM	68,948
JAWA TENGAH	MAGELANG	68,905
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	68,881
ACEH	BIREUEN	68,841
JAWA TIMUR	MADIUN	68,827
ACEH	ACEH BARAT	68,715
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	68,594
JAWA TIMUR	LAMONGAN	68,494
JAWA TENGAH	BATANG	68,464
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	68,416
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	68,385
JAWA TENGAH	SRAGEN	68,274
JAWA TENGAH	KUDUS	68,185
BALI	GIANYAR	68,165
BANTEN	TANGERANG	67,971
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	67,898
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	67,666
JAWA TENGAH	TEGAL	67,409
JAMBI	TEBO	66,989
JAWA TENGAH	SEMARANG	66,968
RIAU	KUANTAN SINGINGI	66,943
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	66,928
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	66,736
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	66,631
KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	66,577
JAWA TENGAH	PATI	66,209
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	66,090

PROVINSI	KABUPATEN	TATA KELOLA BERKELANJUTAN
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	65,917
JAWA BARAT	BOGOR	65,906
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	65,694
SUMATERA UTARA	ASAHAN	65,544
JAWA TENGAH	PURWOREJO	65,392
BALI	BANGLI	65,383
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	65,028
JAWA TENGAH	WONOSOBO	64,726
JAWA BARAT	PURWAKARTA	64,625
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	64,436
JAWA BARAT	MAJALENGKA	64,350
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	64,321
JAWA TENGAH	KLATEN	64,315
BENGKULU	REJANG LEBONG	63,985
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	63,958
SULAWESI BARAT	MAJENE	63,667
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	63,542
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	63,482
JAWA BARAT	PANGANDARAN	63,365
RIAU	KAMPAR	63,358
SUMATERA BARAT	PASAMAN	63,277
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	63,218
JAMBI	MUARO JAMBI	63,018
BALI	BULELENG	62,899
SULAWESI BARAT	MAMUJU	62,869
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	62,861
KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	62,833
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	62,816
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	62,624
GORONTALO	GORONTALO	62,556
JAWA TIMUR	BANGKALAN	62,535
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	62,476
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	62,381
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	62,333
JAWA TIMUR	TUBAN	62,005
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	61,928
SULAWESI BARAT	MAMASA	61,868
JAWA TIMUR	KEDIRI	61,759
JAWA BARAT	SUKABUMI	61,724

PROVINSI	KABUPATEN	TATA KELOLA BERKELANJUTAN
ACEH	GAYO LUES	61,710
SULAWESI SELATAN	BARRU	61,538
JAWA TENGAH	GROBOGAN	61,203
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	61,074
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	61,019
SUMATERA UTARA	KARO	60,912
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	60,878
JAWA TENGAH	JEPARA	60,778
ACEH	ACEH SELATAN	60,735
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	60,530
BENGKULU	KEPAHIANG	60,496
BANTEN	SERANG	60,418
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	60,170
GORONTALO	BONE BOLANGO	59,971
JAWA BARAT	BANDUNG	59,858
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	59,745
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	59,647
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	59,630
SULAWESI TENGAH	SIGI	59,621
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	59,560
SULAWESI TENGGARA	KONawe KEPULAUAN	59,505
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	59,472
BANTEN	LEBAK	59,432
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	59,310
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	59,280
GORONTALO	BOALEMO	58,957
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	58,884
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	58,838
JAWA BARAT	SUBANG	58,536
SUMATERA BARAT	SOLOK	58,495
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	58,424
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	58,262
SUMATERA UTARA	LANGKAT	58,167
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	57,723
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	57,420
JAWA BARAT	GARUT	57,182
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	56,897
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	56,657

PROVINSI	KABUPATEN	TATA KELOLA BERKELANJUTAN
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	56,446
JAWA TENGAH	REMBANG	55,862
KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	55,681
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	55,607
GORONTALO	POHUWATO	55,163
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	53,684
JAWA BARAT	KUNINGAN	53,589
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	53,389
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	53,321
ACEH	ACEH BESAR	53,184
KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	52,841
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	52,627
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	52,053
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	51,890
SULAWESI TENGGARA	KONawe UTARA	50,736
JAWA BARAT	INDRAMAYU	50,317
JAWA BARAT	CIANJUR	50,261
JAWA BARAT	CIREBON	50,180
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	50,110
GORONTALO	GORONTALO UTARA	50,043
JAWA TENGAH	BREBES	49,448
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	48,456
KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	48,455
KALIMANTAN TIMUR	PASER	48,146
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	47,814
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	47,363
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	46,787
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	45,612
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	42,206
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	33,081

Lampiran 6 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan – Indonesia Barat

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Baik	Nilai IDSDB
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	66,28	78,55	69,72	77,25	72,77
JAWA TENGAH	WONOGIRI	59,67	60,87	74,05	74,68	66,95
BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	63,70	59,07	71,25	74,07	66,76
RIAU	KUANTAN SINGINGI	61,70	66,71	71,35	66,94	66,59
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	61,10	55,20	79,52	71,09	66,08
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	62,57	56,01	80,05	67,90	66,06
JAWA TENGAH	KEBUMEN	57,48	59,09	73,36	72,79	65,26
BANGKA BELITUNG	BANGKA	59,63	59,23	64,59	78,00	64,95
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	67,01	57,03	72,58	63,22	64,71
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	48,12	60,89	82,10	72,66	64,66
RIAU	BENGKALIS	55,98	64,88	60,60	73,69	63,46
JAWA TENGAH	GROBOGAN	68,05	59,55	65,31	61,20	63,44
LAMPUNG	TANGGAMUS	61,39	62,12	60,28	70,10	63,36
JAWA BARAT	SUMEDANG	57,52	56,17	67,42	72,02	62,93
JAWA BARAT	CIAMIS	60,36	60,44	60,47	69,99	62,69
ACEH	BIREUEN	56,89	54,08	72,87	68,84	62,68
BENGKULU	REJANG LEBONG	56,92	60,80	69,22	63,99	62,57
JAWA TENGAH	SEMARANG	44,61	64,70	78,46	66,97	62,40
JAMBI	BUNGO	56,58	57,43	62,69	73,86	62,28
SUMATERA UTARA	KARO	55,39	60,25	72,91	60,91	62,05
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	71,34	59,48	64,47	53,39	61,82
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	52,66	63,19	54,70	79,04	61,59
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	50,68	59,71	63,63	74,62	61,57
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	59,10	65,54	69,55	53,32	61,56
JAWA TENGAH	MAGELANG	47,34	62,50	69,80	68,91	61,42
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	47,84	61,99	74,07	64,32	61,31
JAWA TENGAH	KLATEN	51,28	56,23	75,86	64,31	61,24
JAWA TENGAH	WONOSOBO	54,61	58,66	65,45	64,73	60,69
JAMBI	TEBO	54,60	57,77	64,11	66,99	60,67
JAWA TIMUR	JOMBANG	47,30	61,89	63,82	70,69	60,28
JAWA TENGAH	PURWOREJO	61,21	42,52	77,33	65,39	60,23
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	53,35	63,33	58,91	65,92	60,18

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Baik	Nilai IDSDB
JAWA TENGAH	SRAGEN	47,18	55,67	73,02	68,27	60,15
BENGKULU	BENGKULU UTARA	49,50	55,23	66,55	71,20	59,99
DI YOGYAKARTA	BANTUL	51,07	61,02	53,02	76,81	59,69
ACEH	GAYO LUES	58,01	57,23	61,78	61,71	59,65
JAWA TENGAH	BANYUMAS	63,66	41,37	63,26	74,78	59,41
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	50,17	61,05	60,25	66,93	59,28
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	58,97	55,32	65,61	56,90	59,08
JAWA TIMUR	LAMONGAN	61,33	42,42	67,16	68,49	58,81
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	47,38	57,64	69,60	62,38	58,68
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	65,94	59,29	50,06	59,63	58,45
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	59,67	56,61	61,92	55,61	58,40
JAWA BARAT	KUNINGAN	59,20	58,05	62,60	53,59	58,27
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	48,88	57,12	65,84	62,33	58,18
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	51,57	57,37	65,76	58,88	58,18
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	57,77	40,54	68,88	70,65	58,10
JAWA TENGAH	BATANG	40,37	58,24	70,65	68,46	58,07
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	56,33	58,28	58,61	57,42	57,65
JAWA TENGAH	BOYOLALI	48,31	40,14	72,75	77,63	57,53
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	34,49	60,25	71,56	72,73	57,35
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	60,18	42,51	68,81	61,02	57,25
JAWA BARAT	PANGANDARAN	39,13	61,84	69,78	63,36	57,19
SUMATERA BARAT	AGAM	34,39	58,10	74,16	71,87	57,13
JAWA TENGAH	KENDAL	35,90	57,94	72,00	69,66	56,83
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	51,90	56,24	67,67	52,05	56,62
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	42,28	60,31	61,45	65,03	56,50
JAWA TENGAH	PATI	33,89	60,77	74,40	66,21	56,44
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	39,62	58,69	67,77	63,54	56,25
SUMATERA BARAT	PASAMAN	44,91	53,95	65,08	63,28	56,21
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	45,05	54,76	68,59	58,26	56,03

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Baik	Nilai IDSDB
SUMATERA BARAT	SOLOK	64,38	36,65	70,64	58,49	55,88
JAWA TENGAH	CILACAP	57,32	34,47	62,54	78,89	55,88
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	41,91	46,68	68,69	71,98	55,77
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	57,19	39,85	58,39	72,01	55,64
JAWA TENGAH	DEMAK	29,04	60,66	72,02	72,24	55,02
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	39,75	41,66	71,24	76,32	54,78
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	51,64	61,23	59,88	47,36	54,72
ACEH	ACEH BARAT	60,90	31,70	67,25	68,72	54,65
JAMBI	MUARO JAMBI	63,87	37,88	57,79	63,02	54,48
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	54,18	37,01	61,05	71,82	54,45
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	41,31	55,91	60,49	62,86	54,44
JAWA TIMUR	MADIUN	45,31	38,43	71,11	68,83	54,03
JAWA TENGAH	JEPARA	33,06	62,09	67,71	60,78	53,91
JAWA TENGAH	KUDUS	40,33	39,89	75,69	68,19	53,68
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	45,96	41,43	70,16	60,88	53,40
LAMPUNG	TULANG BAWANG	30,00	57,35	63,55	74,10	53,35
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	45,13	55,83	58,81	53,68	53,11
ACEH	ACEH BESAR	57,20	33,46	76,77	53,18	52,87
JAWA BARAT	INDRAMAYU	54,17	57,44	49,76	50,32	52,83
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	37,11	58,47	62,72	56,66	52,69
LAMPUNG	WAY KANAN	47,60	35,66	63,21	71,76	52,67
RIAU	ROKAN HULU	33,80	62,20	50,48	71,97	52,57
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	30,14	58,29	58,01	74,08	52,42
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	41,52	57,18	69,39	45,61	52,36
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	47,01	39,11	66,52	61,07	52,28
LAMPUNG	PESAWARAN	26,77	61,13	63,66	71,36	52,22
JAWA BARAT	SUBANG	36,89	54,61	62,95	58,54	52,20
JAWA BARAT	BANDUNG	35,78	62,57	54,77	59,86	52,05
BENGKULU	KEPAHIANG	43,82	40,16	68,66	60,50	52,00
ACEH	ACEH SELATAN	60,02	29,23	67,12	60,73	51,72
JAWA BARAT	SUKABUMI	35,67	61,51	52,80	61,72	51,71
JAWA TENGAH	TEGAL	44,76	36,00	64,90	67,41	51,53
JAWA BARAT	MAJALENGKA	43,99	40,29	61,07	64,35	51,37

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Baik	Nilai IDSDB
JAWA BARAT	PURWAKARTA	59,10	34,00	53,55	64,62	51,35
RIAU	PELALAWAN	44,40	36,62	60,69	69,09	51,10
JAWA TENGAH	REMBANG	36,60	43,87	73,39	55,86	50,65
BANTEN	TANGERANG	36,10	51,85	51,66	67,97	50,63
ACEH	ACEH BARAT DAYA	36,71	35,95	66,01	73,27	50,27
JAWA TIMUR	KEDIRI	41,10	38,30	64,92	61,76	50,12
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	51,88	26,73	60,41	71,38	49,45
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	33,39	39,88	64,05	69,49	49,34
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	43,67	34,59	62,40	62,48	49,26
SUMATERA UTARA	LANGKAT	57,48	37,88	45,95	58,17	49,12
SUMATERA UTARA	ASAHAN	37,71	42,23	52,98	65,54	48,49
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	34,57	39,98	57,39	68,42	48,26
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	33,81	41,89	61,42	61,93	48,18
JAWA BARAT	BOGOR	33,86	49,81	47,51	65,91	47,94
JAWA BARAT	GARUT	31,37	59,39	49,04	57,18	47,81
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	36,75	36,58	60,43	62,82	47,53
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	35,48	28,59	57,49	81,00	46,62
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	32,87	37,67	58,44	64,44	46,47
JAWA TIMUR	TUBAN	32,65	37,33	61,62	62,00	46,45
JAWA TENGAH	BREBES	28,87	53,50	60,25	49,45	46,32
RIAU	KAMPAR	33,24	42,25	48,45	63,36	45,57
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	53,27	29,88	55,60	47,81	45,36
BANTEN	SERANG	28,53	38,90	62,31	60,42	45,21
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	54,11	35,64	63,25	33,08	44,82
BANTEN	LEBAK	35,67	38,01	46,65	59,43	44,03
JAWA TIMUR	BANGKALAN	29,64	34,38	51,84	62,53	42,63
JAWA BARAT	CIANJUR	32,79	60,52	32,60	50,26	42,46
JAWA BARAT	CIREBON	33,66	39,47	48,13	50,18	42,32

Lampiran 7 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan – Indonesia Tengah

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Baik	Nilai IDSDB
BALI	BADUNG	64,415	70,609	77,315	80,567	72,957
BALI	KLUNGKUNG	65,070	61,167	71,055	79,916	68,949
BALI	GIANYAR	63,914	61,484	76,554	68,165	67,293
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	58,546	60,508	69,084	68,594	64,009
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	68,314	67,350	55,049	65,694	63,868
BALI	BULELENG	64,515	58,734	69,495	62,899	63,795
BALI	TABANAN	46,542	62,619	79,593	70,684	63,634
SULAWESI SELATAN	BARRU	61,122	57,380	72,046	61,538	62,795
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	64,140	63,163	60,385	63,482	62,776
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	63,557	57,857	59,969	68,385	62,316
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	60,658	55,559	73,685	60,530	62,266
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	71,980	55,557	61,735	59,745	61,972
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	56,013	60,020	73,311	58,424	61,601
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	53,750	56,820	68,839	67,666	61,415
SULAWESI TENGAH	SIGI	61,400	57,959	66,633	59,621	61,319
BALI	BANGLI	52,739	57,807	70,887	65,383	61,311
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	56,640	65,000	55,569	68,881	61,269
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	60,114	56,647	65,996	60,170	60,641
BALI	KARANGASEM	50,379	57,864	65,889	68,948	60,325
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	55,370	61,713	61,865	62,624	60,320
GORONTALO	GORONTALO	64,998	61,234	53,050	62,556	60,285
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	59,605	56,597	63,999	59,560	59,883

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Baik	Nilai IDSDB
SULAWESI BARAT	MAJENE	53,663	56,108	65,556	63,667	59,540
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	60,635	46,636	66,687	66,631	59,537
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	50,824	56,067	65,705	66,736	59,454
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	53,930	42,938	64,422	76,489	58,120
BALI	JEMBRANA	37,966	57,712	74,283	69,326	57,958
SULAWESI TENGGARA	KONAWE KEPULAUAN	51,175	54,392	67,395	59,505	57,802
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	46,469	58,433	61,909	66,090	57,733
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	54,848	41,490	65,267	70,455	56,876
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	40,410	61,420	69,131	59,647	56,561
SULAWESI SELATAN	BONE	41,914	57,856	58,523	69,696	56,080
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	69,188	45,593	64,686	48,456	56,075
GORONTALO	BONE BOLANGO	39,355	62,205	65,192	59,971	55,621
GORONTALO	POHUWATO	70,984	38,374	63,452	55,163	55,568
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	56,268	45,851	63,531	56,446	55,151
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	60,651	33,957	72,425	59,310	54,537
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	55,626	36,746	73,469	58,838	54,521
SULAWESI BARAT	MAMUJU	38,496	58,349	61,842	62,869	54,362
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	47,346	41,027	60,756	73,339	54,240
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	40,373	55,061	64,931	57,723	53,726
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	50,728	41,058	61,740	63,958	53,552

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Baik	Nilai IDSDB
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	47,799	42,004	58,391	69,347	53,398
SULAWESI TENGGARA	KONAWA UTARA	42,245	56,166	66,681	50,736	53,228
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	54,879	37,075	74,709	51,890	52,995
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	43,463	55,344	74,354	42,206	52,416
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	34,097	59,333	62,379	59,280	52,299
SULAWESI BARAT	MAMASA	37,643	48,627	65,429	61,868	52,173
GORONTALO	GORONTALO UTARA	45,638	55,666	55,794	50,043	51,607
KALIMANTAN TIMUR	PASER	50,205	57,273	50,384	48,146	51,391
GORONTALO	BOALEMO	63,529	33,609	54,534	58,957	51,187
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	34,770	34,874	65,370	70,164	48,562
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	45,795	38,279	65,388	46,787	48,123
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	28,970	57,625	60,051	50,110	47,343

Lampiran 8 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (Kelengkapan Data 80 persen)

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
BALI	BADUNG	62,603	71,608	88,153	82,782	75,628	1
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	50,698	60,003	74,393	76,952	74,943	2
BALI	KLUNGKUNG	65,659	62,168	79,882	81,837	71,873	3
BALI	GIANYAR	61,874	62,735	85,570	71,327	69,767	4
JAWA TENGAH	WONOGIRI	59,404	61,316	78,109	78,816	68,814	5
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	66,097	67,333	72,030	67,853	68,293	6
BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	60,802	60,064	77,202	76,601	68,171	7
BANGKA BELITUNG	BANGKA	56,977	60,718	77,524	79,592	67,972	8
RIAU	BENGKALIS	54,807	65,983	76,144	77,410	67,948	9
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	60,153	56,516	82,944	75,071	67,830	10
JAWA TENGAH	KEBUMEN	57,885	60,725	76,957	76,234	67,388	11
BALI	BULELENG	64,451	59,906	79,980	66,455	67,306	12
SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT	62,257	59,647	79,837	69,032	67,260	13
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	54,997	63,930	71,885	80,710	67,205	14
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	60,093	64,577	81,829	63,892	67,114	15
RIAU	KUANTAN SINGINGI	58,824	66,457	73,930	69,901	67,043	16
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	61,565	56,695	81,052	70,875	66,916	17
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	64,918	58,451	77,073	67,970	66,772	18
JAWA BARAT	SUMEDANG	58,377	58,488	75,996	75,736	66,581	19
KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	61,502	57,808	76,385	71,223	66,318	20
JAWA TENGAH	GROBOGAN	66,079	60,651	73,869	65,196	66,282	21
BALI	TABANAN	48,641	63,063	85,558	73,420	66,254	22
LAMPUNG	TANGGAMUS	59,296	62,692	69,319	73,672	66,008	23
JAWA BARAT	CIAMIS	60,367	61,538	70,283	72,563	65,975	24
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	67,257	60,337	72,535	64,223	65,939	25
SUMATERA UTARA	KARO	56,133	60,848	82,435	66,740	65,840	26
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	55,638	61,135	76,219	72,432	65,829	27
BENGKULU	REJANG LEBONG	57,373	61,511	76,897	69,084	65,801	28
JAWA TENGAH	SEMARANG	48,280	65,403	82,506	71,832	65,772	29
DI YOGYAKARTA	BANTUL	54,200	61,641	70,856	78,782	65,715	30

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	62,278	63,936	67,793	68,782	65,642	31
JAMBI	BUNGO	55,007	59,320	74,175	76,498	65,596	32
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	49,385	61,382	81,141	75,208	65,582	33
JAWA BARAT	BEKASI	47,766	68,888	82,097	68,088	65,489	34
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	56,657	65,740	69,302	70,885	65,403	35
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	59,471	58,629	71,934	72,343	65,266	36
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	57,343	67,105	81,325	57,323	65,080	37
SULAWESI SELATAN	BARRU	58,106	59,024	77,960	67,022	65,063	38
JAWA TENGAH	MAGELANG	50,514	63,471	74,263	73,532	64,686	39
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	50,698	60,003	74,393	76,952	64,599	40
BALI	BANGLI	53,727	58,004	80,391	69,240	64,536	41
BALI	KARANGASEM	53,487	58,566	76,106	72,742	64,532	42
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	61,466	57,390	75,318	65,110	64,492	43
JAWA TIMUR	JOMBANG	33,226	38,802	67,976	52,575	64,455	44
SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	45,497	69,437	70,301	77,495	64,410	45
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	54,675	57,043	77,639	70,690	64,322	46
JAWA TENGAH	KLATEN	54,098	57,487	79,057	69,611	64,320	47
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	67,097	61,859	71,354	57,350	64,197	48
SULAWESI TENGAH	SIGI	59,767	58,732	72,626	66,465	64,159	49
GORONTALO	GORONTALO	64,266	62,167	63,078	66,667	64,022	50
JAWA TENGAH	WONOSOBO	55,807	59,854	71,653	70,009	63,980	51
LAMPUNG	PRINGSEWU	49,222	62,221	78,962	69,154	63,949	52
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	54,078	62,070	73,766	66,728	63,756	53
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	58,164	55,996	78,677	64,075	63,656	54
RIAU	INDRAGIRI HILIR	58,234	62,494	67,635	66,032	63,494	55
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	55,057	61,042	75,660	63,745	63,451	56

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	49,227	62,353	77,410	68,184	63,443	57
JAMBI	TEBO	52,983	58,570	74,271	69,872	63,348	58
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	50,215	61,737	72,390	71,513	63,294	59
ACEH	BIREUEN	54,934	55,162	73,583	71,826	63,261	60
SULAWESI SELATAN	BANTAENG	50,718	63,453	76,519	64,976	63,246	61
SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	56,804	61,820	81,115	55,933	63,178	62
JAWA TENGAH	SRAGEN	48,703	56,581	77,676	73,664	63,015	63
KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	63,576	57,870	72,758	58,690	62,958	64
BENGKULU	BENGKULU UTARA	49,541	56,201	75,405	74,470	62,881	65
JAWA TENGAH	PEMALANG	50,454	61,219	71,822	70,459	62,877	66
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	57,375	60,720	73,446	60,501	62,726	67
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	64,162	60,923	62,215	63,534	62,696	68
JAWA TIMUR	PONOROGO	54,200	61,641	70,856	78,782	62,658	69
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	53,399	61,009	67,809	69,725	62,647	70
ACEH	GAYO LUES	58,290	57,378	69,080	65,787	62,440	71
JAWA TIMUR	SITUBONDO	39,795	35,534	72,876	57,123	62,375	72
BALI	JEMBRANA	42,936	58,423	82,724	72,859	62,356	73
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	59,145	57,123	75,661	58,989	62,315	74
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	57,612	46,901	76,881	72,268	62,247	75
JAWA TENGAH	BANYUMAS	61,865	42,666	73,256	77,559	62,230	76
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	54,997	63,930	71,885	80,710	62,114	77
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	52,134	58,370	78,011	62,672	62,106	78
JAWA BARAT	KUNINGAN	58,554	60,973	71,430	58,314	62,099	79
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	50,128	56,899	74,087	70,286	62,080	80
KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	47,496	58,026	79,803	67,481	62,068	81
JAWA TIMUR	NGANJUK	38,571	42,099	71,274	49,207	61,898	82
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	49,503	58,835	75,527	66,673	61,884	83
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	57,021	57,976	68,095	64,908	61,827	84

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
JAWA TIMUR	BANYUWANGI	45,644	39,273	75,041	67,492	61,761	85
JAWA TENGAH	KENDAL	42,280	59,490	77,720	73,984	61,668	86
JAWA BARAT	PANGANDARAN	43,880	62,416	76,138	69,086	61,608	87
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	55,250	60,169	70,978	60,750	61,531	88
SULAWESI BARAT	MAJENE	51,686	56,764	73,383	66,457	61,503	89
JAWA TIMUR	BLITAR	55,766	37,187	71,619	65,069	61,393	90
SULAWESI TENGAH	POSO	71,531	40,010	82,372	59,792	61,273	91
JAWA TENGAH	PURWOREJO	60,628	43,194	75,150	71,303	61,205	92
SUMATERA BARAT	AGAM	37,106	59,171	82,558	76,813	61,085	93
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	38,196	61,064	77,348	77,103	61,070	94
JAWA TENGAH	BATANG	42,285	59,680	75,614	72,805	61,051	95
JAWA TIMUR	LAMONGAN	57,062	42,693	78,534	55,455	60,956	96
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	47,644	59,270	69,756	69,938	60,924	97
MALUKU	MALUKU TENGAH	52,988	59,025	82,448	52,763	60,734	98
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	44,049	60,135	73,229	69,547	60,605	99
SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	64,970	59,404	78,121	44,143	60,400	100
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	57,148	41,183	76,595	73,463	60,325	101
SULAWESI TENGGARA	KONawe KEPULAUAN	52,242	54,578	70,219	66,143	60,325	102
JAWA TENGAH	PATI	38,797	61,676	76,534	71,874	60,233	103
JAWA TENGAH	DEMAK	35,151	61,878	79,781	75,811	60,225	104
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	53,203	43,204	71,820	79,552	60,199	105
SUMATERA BARAT	PASAMAN	45,811	55,556	76,328	67,256	60,121	106
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	46,282	56,646	78,146	63,707	60,106	107
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	44,478	58,420	76,545	65,234	60,017	108
KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	51,728	59,390	72,492	58,049	59,963	109
SULAWESI SELATAN	BONE	43,840	59,444	66,824	73,884	59,892	110
KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	54,665	58,448	72,290	55,570	59,855	111
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	43,207	61,021	72,564	67,076	59,852	112

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
SULAWESI SELATAN	SINJAI	42,249	61,059	75,855	65,551	59,846	113
JAWA BARAT	INDRAMAYU	57,424	59,682	65,831	56,615	59,783	114
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	50,467	56,960	77,370	56,704	59,592	115
JAWA TENGAH	CILACAP	58,467	36,578	72,476	80,867	59,501	116
JAWA TENGAH	BOYOLALI	49,436	41,081	76,091	80,767	59,438	117
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	59,236	43,463	73,478	65,812	59,401	118
BENGKULU	KAUR	50,643	56,664	72,694	59,442	59,341	119
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	51,382	64,121	77,662	48,314	59,296	120
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	53,977	42,164	73,440	73,715	59,246	121
JAWA TIMUR	SIDOARJO	57,707	40,815	66,889	74,221	59,177	122
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	48,084	57,582	75,240	58,697	59,134	123
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	42,807	62,539	70,570	64,603	59,106	124
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	54,209	46,812	77,291	62,205	59,101	125
RIAU	ROKAN HULU	37,298	62,834	69,308	74,718	59,023	126
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	43,302	47,140	79,645	74,590	59,011	127
JAWA TENGAH	JEPARA	39,716	62,992	74,505	64,560	58,898	128
RIAU	SIAK	51,092	65,540	79,431	45,224	58,892	129
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	51,110	61,521	73,214	52,170	58,869	130
JAWA BARAT	BANDUNG	39,872	64,350	70,758	65,648	58,756	131
JAMBI	MUARO JAMBI	62,923	39,753	71,972	66,132	58,741	132
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	43,428	56,500	72,533	66,410	58,634	133
SUMATERA BARAT	SOLOK	61,234	38,049	79,453	63,601	58,577	134
GORONTALO	BONE BOLANGO	41,251	62,776	69,676	65,178	58,560	135
SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	47,370	54,143	75,549	60,680	58,557	136
LAMPUNG	TULANG BAWANG	34,279	57,987	77,370	76,250	58,519	137
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	65,803	46,018	74,803	51,717	58,503	138
JAWA BARAT	SUKABUMI	39,643	64,117	67,498	68,197	58,485	139
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	36,098	65,370	63,524	57,701	58,477	140

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	44,895	55,449	73,368	62,861	58,210	141
KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	56,105	59,293	68,391	50,252	58,149	142
JAWA TIMUR	BOJONEGORO	64,688	60,059	76,024	49,699	58,110	143
MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	69,042	43,046	70,407	54,458	58,100	144
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	51,279	42,733	71,928	72,069	58,055	145
JAWA BARAT	SUBANG	41,538	57,597	72,847	65,065	58,030	146
KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	47,157	58,772	76,708	53,328	58,027	147
GORONTALO	POHUWATO	65,974	38,798	71,013	61,877	57,911	148
BANTEN	TANGERANG	41,329	53,559	71,236	71,032	57,851	149
SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI	60,891	39,407	73,754	63,168	57,823	150
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	48,480	41,772	72,418	75,893	57,760	151
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	42,410	42,295	79,113	78,317	57,738	152
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	37,574	62,185	71,790	65,818	57,643	153
LAMPUNG	PESISIR BARAT	57,012	41,110	75,294	62,531	57,635	154
SULAWESI BARAT	MAMUJU	40,075	59,207	70,765	65,340	57,552	155
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	34,365	59,971	69,975	75,291	57,403	156
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	52,683	37,924	73,409	73,941	57,386	157
SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	45,777	57,392	71,173	57,683	57,308	158
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	40,245	59,352	74,704	59,820	57,159	159
JAWA TENGAH	KUDUS	45,382	39,794	81,594	72,192	57,110	160
KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR	65,388	57,682	73,756	38,239	57,110	161
JAWA TIMUR	MADIUN	58,472	44,190	77,062	61,586	57,093	162
JAWA TIMUR	MAGETAN	48,988	39,696	75,060	66,802	57,072	163
SULAWESI SELATAN	LUWU	46,592	55,593	75,987	53,865	57,062	164
SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	38,442	60,845	66,128	67,843	56,916	165

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
SUMATERA UTARA	DAIRI	49,958	47,521	82,043	53,734	56,878	166
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	30,159	59,741	77,416	74,629	56,801	167
KALIMANTAN TIMUR	PASER	49,332	57,741	67,563	54,067	56,795	168
LAMPUNG	PESAWARAN	30,988	61,767	73,241	74,132	56,778	169
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	42,508	59,123	78,083	52,823	56,742	170
JAWA TIMUR	SAMPANG	36,261	38,076	70,271	67,176	56,588	171
JAWA BARAT	PURWAKARTA	57,488	37,291	68,362	69,365	56,465	172
LAMPUNG	MESUJI	60,229	37,537	71,827	62,530	56,450	173
ACEH	ACEH BARAT	59,413	33,233	71,592	71,749	56,433	174
SUMATERA UTARA	ASAHAN	40,603	50,688	70,546	69,827	56,427	175
RIAU	PELALAWAN	47,216	37,820	76,086	74,613	56,426	176
SUMATERA UTARA	SAMOSIR	52,236	38,241	80,017	63,151	56,366	177
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	50,809	41,311	72,847	65,729	56,305	178
ACEH	PIDIE JAYA	40,277	55,871	77,311	57,529	56,246	179
SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA	43,674	56,652	69,658	58,004	56,230	180
JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	35,884	58,591	71,083	66,527	56,153	181
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	54,270	37,491	78,099	62,545	56,147	182
KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN	51,338	56,615	74,957	45,484	56,106	183
JAWA BARAT	MAJALENGKA	47,483	41,656	70,946	70,564	56,096	184
JAWA TENGAH	BLORA	55,499	37,551	72,136	65,586	56,036	185
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	47,141	42,127	76,175	64,619	55,915	186
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	53,169	56,075	68,336	74,299	55,880	187
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	44,377	57,401	77,886	48,927	55,818	188
BENGKULU	MUKOMUKO	47,005	57,837	74,475	47,889	55,802	189
JAWA TIMUR	PACITAN	42,410	42,295	79,113	78,317	55,756	190
JAWA TENGAH	TEGAL	47,818	38,440	73,994	69,649	55,478	191
JAWA BARAT	BOGOR	39,053	52,389	65,979	70,061	55,455	192
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	54,807	38,586	75,563	58,868	55,381	193

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
LAMPUNG	WAY KANAN	49,054	36,502	70,358	74,376	55,327	194
SULAWESI SELATAN	MAROS	40,932	59,884	71,699	53,222	55,302	195
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	60,014	34,214	71,262	63,620	55,236	196
SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	48,976	59,225	69,587	46,030	55,210	197
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA	46,995	60,506	67,026	48,085	55,021	198
SULAWESI BARAT	MAMASA	40,150	50,281	70,085	64,695	55,004	199
GORONTALO	GORONTALO UTARA	46,635	56,613	63,897	54,171	54,982	200
SUMATERA SELATAN	LAHAT	43,954	62,203	76,054	43,791	54,933	201
JAWA TIMUR	KEDIRI	44,942	63,305	76,920	70,434	54,892	202
JAWA BARAT	GARUT	36,324	61,530	64,112	63,022	54,819	203
ACEH	ACEH BESAR	54,791	35,282	77,759	60,045	54,811	204
GORONTALO	BOALEMO	61,106	35,042	66,110	63,756	54,811	205
BENGKULU	KEPAHIANG	45,751	41,432	75,458	63,097	54,810	206
JAWA TIMUR	GRESIK	39,360	41,116	78,027	66,536	54,638	207
SULAWESI TENGAH	BUOL	40,351	60,199	73,302	49,615	54,519	208
SUMATERA UTARA	LANGKAT	56,195	38,870	65,160	62,019	54,507	209
JAWA TIMUR	MALANG	64,653	78,879	76,825	80,515	54,231	210
SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	31,891	58,184	65,395	70,946	54,167	211
SULAWESI SELATAN	PINRANG	48,724	55,937	70,890	44,493	54,148	212
JAMBI	SAROLANGUN	43,555	55,594	73,639	48,163	54,134	213
KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	39,627	59,319	68,710	52,588	53,985	214
JAMBI	BATANGHARI	35,312	61,371	72,125	54,023	53,906	215
JAWA TIMUR	NGAWI	49,318	63,282	74,329	74,401	53,838	216
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	36,350	42,601	73,735	73,211	53,770	217
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	34,147	59,586	76,403	53,389	53,674	218
NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	39,263	62,623	71,442	47,242	53,672	219

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
ACEH	ACEH TENGAH	52,341	37,034	77,997	54,526	53,584	220
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	51,122	31,772	68,700	73,485	53,512	221
ACEH	ACEH SELATAN	56,502	30,826	71,980	65,353	53,502	222
KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	57,501	33,793	68,253	61,667	53,477	223
JAWA TIMUR	PAMEKASAN	60,484	43,483	73,718	71,208	53,472	224
JAWA TENGAH	REMBANG	40,144	44,407	72,776	62,809	53,428	225
BANTEN	PANDEGLANG	31,775	59,126	62,935	68,746	53,395	226
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	49,736	39,370	72,224	57,461	53,392	227
JAWA BARAT	KARAWANG	31,771	61,977	65,335	63,115	53,380	228
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	45,248	37,198	71,776	66,966	53,332	229
JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	37,174	55,954	73,381	52,991	53,329	230
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU	52,760	45,366	75,190	44,678	53,250	231
ACEH	ACEH BARAT DAYA	39,450	36,662	72,323	76,112	53,118	232
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	36,604	42,925	74,995	67,177	53,043	233
SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	37,580	57,513	74,288	49,238	53,025	234
SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	37,412	60,157	75,545	46,299	52,968	235
MALUKU	MALUKU TENGGARA	43,082	33,787	79,605	67,930	52,968	236
SULAWESI SELATAN	GOWA	42,238	59,161	69,857	44,694	52,851	237
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	37,501	41,043	70,131	72,215	52,839	238
NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	39,975	58,929	66,133	49,588	52,720	239
ACEH	ACEH JAYA	53,135	33,923	72,144	59,118	52,656	240
SULAWESI SELATAN	SINDERENG RAPPANG	48,832	37,526	79,341	52,787	52,634	241
KALIMANTAN BARAT	LANDAK	38,324	53,868	71,071	52,171	52,599	242
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR	60,561	35,587	69,110	50,904	52,474	243
SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	36,925	57,748	75,948	46,656	52,429	244

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
JAWA BARAT	CIANJUR	38,326	63,672	54,245	56,933	52,395	245
SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	43,872	59,458	70,420	40,998	52,386	246
ACEH	BENER MERIAH	32,387	55,598	77,962	53,514	52,354	247
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	39,056	33,512	68,815	83,337	52,342	248
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	33,094	58,611	70,070	54,982	52,284	249
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	33,226	63,056	69,042	51,649	52,281	250
KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	37,786	51,900	71,813	52,809	52,222	251
JAWA TENGAH	BREBES	33,630	56,008	70,719	55,473	52,137	252
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	39,206	62,745	71,887	41,747	52,126	253
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	37,457	35,615	74,425	73,957	52,055	254
RIAU	INDRAGIRI HULU	56,830	45,906	69,875	39,763	51,887	255
SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR	35,032	58,328	74,728	47,266	51,831	256
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	35,789	38,835	75,802	68,176	51,769	257
MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	47,281	58,773	62,783	41,061	51,735	258
RIAU	ROKAN HILIR	53,532	37,896	70,157	49,969	51,641	259
RIAU	KAMPAR	36,365	42,595	68,564	66,594	51,569	260
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	38,838	39,768	69,063	66,149	51,540	261
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	48,084	39,179	70,584	52,672	51,444	262
JAWA TIMUR	SUMENEP	43,230	45,422	73,356	61,875	51,401	263
MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	33,577	53,197	69,818	55,967	51,400	264
SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	43,531	58,530	76,859	35,605	51,386	265
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	51,809	33,300	79,143	50,940	51,355	266
NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	45,394	37,683	72,160	56,225	51,327	267
PAPUA BARAT	FAKFAK	37,457	59,206	70,562	44,250	51,297	268

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
KALIMANTAN BARAT	SEKADAU	34,709	54,649	68,166	53,475	51,279	269
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	48,925	37,593	67,954	54,359	51,054	270
JAMBI	KERINCI	28,460	65,193	70,776	51,316	50,950	271
BANTEN	SERANG	34,765	41,134	72,144	64,875	50,863	272
MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	41,969	61,769	76,674	33,555	50,819	273
PAPUA	SUPIORI	39,460	57,417	65,078	45,005	50,754	274
SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA	44,675	37,128	73,202	54,538	50,728	275
SULAWESI SELATAN	TAKALAR	37,140	38,911	70,927	64,264	50,661	276
JAWA TIMUR	TUBAN	48,093	39,577	77,584	71,951	50,526	277
PAPUA BARAT	MANOKWARI	39,645	61,081	70,840	37,870	50,485	278
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	54,804	37,952	74,759	41,754	50,478	279
SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	37,749	57,585	72,929	40,658	50,387	280
BENGKULU	LEBONG	41,693	40,597	70,698	53,382	50,274	281
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA	54,406	35,114	70,532	47,151	50,205	282
JAWA BARAT	CIREBON	39,662	42,263	64,705	58,569	50,204	283
PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	51,176	38,410	57,058	55,693	49,992	284
BANTEN	LEBAK	38,729	40,054	61,987	64,939	49,989	285
PAPUA	MERAUKE	38,635	60,617	72,875	36,302	49,891	286
SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	37,817	45,521	73,245	47,890	49,572	287
JAWA TIMUR	JEMBER	49,176	60,199	77,672	61,783	49,505	288
SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	37,949	38,919	66,789	60,871	49,501	289
ACEH	ACEH TAMIANG	37,130	55,783	67,720	42,707	49,472	290
SULAWESI UTARA	BOL. MONGONDOW SELATAN	52,825	35,320	65,224	48,908	49,393	291
ACEH	ACEH SINGKIL	39,825	51,168	70,233	41,332	49,317	292
JAWA TIMUR	LUMAJANG	49,503	58,542	77,438	66,327	49,257	293
SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	28,443	56,058	66,768	54,662	49,115	294
SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	37,872	27,887	81,018	67,868	49,090	295

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	51,354	32,326	64,271	54,333	49,068	296
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	31,909	54,012	72,027	46,649	49,055	297
SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	49,339	32,940	70,762	50,231	49,026	298
PAPUA BARAT	KAIMANA	36,565	57,323	68,198	39,919	48,875	299
JAWA TIMUR	PASURUAN	55,673	60,828	61,822	69,497	48,851	300
NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	46,129	38,151	73,058	44,200	48,825	301
MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	36,523	54,722	78,464	36,162	48,799	302
JAWA TIMUR	BANGKALAN	60,231	62,409	72,339	41,934	48,735	303
KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	45,964	37,183	72,733	45,269	48,705	304
SULAWESI TENGGARA	KONAWE	35,057	59,342	74,275	35,772	48,488	305
MALUKU	BURU	35,869	54,837	75,928	36,972	48,475	306
SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA	40,067	35,832	75,777	50,714	48,465	307
SULAWESI TENGGARA	MUNA BARAT	36,033	56,193	72,457	37,443	48,412	308
SULAWESI BARAT	PASANGKAYU	35,548	54,917	71,143	39,326	48,343	309
SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	29,170	57,131	71,518	45,721	48,315	310
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	41,595	33,138	72,981	53,917	48,259	311
SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA	35,780	40,385	72,235	51,874	48,238	312
JAMBI	MERANGIN	26,105	61,351	72,066	46,081	48,023	313
ACEH	NAGAN RAYA	33,009	55,427	75,577	37,625	47,759	314
SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	39,546	39,942	72,628	45,229	47,727	315
SULAWESI TENGAH	DONGGALA	37,629	57,721	73,163	32,577	47,699	316
KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA	36,192	40,660	73,461	47,698	47,652	317
PAPUA	MIMIKA	34,688	59,470	74,137	33,617	47,618	318

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
SULAWESI SELATAN	WAJO	30,425	56,591	69,897	42,626	47,591	319
NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	32,891	42,945	74,194	48,817	47,559	320
ACEH	ACEH UTARA	32,369	54,450	71,251	40,228	47,409	321
NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	42,391	55,935	66,562	31,925	47,378	322
PAPUA	JAYAPURA	28,480	40,978	74,991	57,000	47,260	323
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	47,218	37,879	70,143	39,657	47,228	324
SULAWESI TENGGARA	BUTON SELATAN	44,858	38,369	56,854	50,567	47,164	325
SULAWESI TENGGARA	BOMBANA	37,675	35,782	69,564	52,372	47,076	326
SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR	42,169	38,669	79,482	37,771	47,037	327
KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	36,372	39,167	74,000	45,979	46,922	328
PAPUA	NABIRE	33,627	39,803	80,042	44,864	46,823	329
SULAWESI TENGGARA	BUTON	49,808	36,896	68,621	38,086	46,814	330
BENGKULU	BENGKULU TENGAH	28,239	34,680	72,773	64,717	46,342	331
JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	60,085	37,584	60,077	44,269	46,330	332
SUMATERA SELATAN	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	49,797	38,555	76,960	30,600	46,112	333
SUMATERA UTARA	NIAS	42,838	31,554	62,795	52,585	45,964	334
MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	49,293	33,604	76,415	35,044	45,893	335
KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA	41,675	37,216	72,963	38,563	45,706	336
SUMATERA UTARA	LABUANBATU UTARA	44,116	37,552	79,438	32,559	45,497	337
SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	45,782	32,067	63,857	44,582	45,215	338
SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA	32,947	39,354	75,169	42,878	45,214	339
MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	39,074	54,803	70,242	27,770	45,208	340

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
KALIMANTAN BARAT	MELAWI	37,052	37,550	65,865	45,383	45,158	341
BENGKULU	SELUMA	37,944	37,908	70,383	40,594	45,024	342
SULAWESI TENGGARA	MUNA	25,047	62,457	72,173	36,306	44,996	343
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SITARO	40,866	38,629	76,658	33,412	44,842	344
SULAWESI UTARA	MINAHASA	37,133	44,553	72,336	33,665	44,802	345
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	34,700	36,789	74,116	42,498	44,780	346
SULAWESI TENGAH	MOROWALI	27,196	43,328	73,227	46,495	44,755	347
KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	26,686	45,552	77,655	42,464	44,745	348
SUMATERA UTARA	LABUHANBATU SELATAN	26,209	35,907	80,173	52,485	44,609	349
SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	37,437	37,232	72,468	39,093	44,578	350
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	32,906	63,115	70,781	26,451	44,406	351
NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	36,793	35,441	77,078	38,549	44,366	352
SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA	39,073	37,654	79,291	32,984	44,290	353
ACEH	PIDIE	38,165	53,129	69,824	27,103	44,259	354
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN	36,239	54,726	63,302	30,378	44,191	355
PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	33,527	51,425	62,064	35,034	44,002	356
SUMATERA UTARA	BATU BARA	26,462	36,049	66,476	58,075	43,807	357
PAPUA	ASMAT	61,872	33,482	43,246	41,000	43,778	358
KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	43,443	31,831	71,215	37,192	43,747	359
MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA	30,257	58,982	77,567	26,459	43,747	360
NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR	41,067	38,094	66,178	34,627	43,513	361
JAWA BARAT	TASIKMALAYA	38,941	40,733	68,736	32,708	43,456	362

PROVINSI	KABUPATEN	LINGKUNGAN LESTARI	EKONOMI BERKELANJUTAN	INKLUSI SOSIAL	TATA KELOLA BERKELANJUTAN	NILAI IDSDB	RANK
PAPUA	BIAK NUMFOR	34,195	42,423	73,047	33,571	43,429	363
PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN	41,280	36,328	57,084	40,939	43,267	364
SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	25,134	57,648	68,197	35,411	43,250	365
PAPUA	KEEROM	35,488	32,247	68,031	44,507	43,250	366
PAPUA	JAYAWIJAYA	31,541	42,363	51,400	49,668	42,976	367
ACEH	ACEH TIMUR	41,274	32,009	67,204	37,795	42,800	368
MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	46,716	32,002	73,434	30,372	42,732	369
SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	26,733	32,861	70,375	53,759	42,697	370
NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA	43,756	39,822	67,093	26,368	41,902	371
PAPUA BARAT	SORONG	30,409	35,766	68,046	41,171	41,780	372
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	24,492	54,842	73,982	29,939	41,531	373
ACEH	ACEH TENGGARA	39,111	29,665	69,979	35,955	41,335	374
BENGKULU	BENGKULU SELATAN	15,639	36,941	77,427	56,276	39,832	375
PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI	30,958	35,353	69,223	32,186	39,516	376
MALUKU	KEPULAUAN ARU	26,214	49,747	67,545	25,011	38,526	377
PAPUA	SARMI	30,382	37,482	66,488	27,798	38,089	378
ACEH	SIMEULUE	28,227	32,363	67,809	31,143	37,268	379
PAPUA	MAPPI	33,279	34,325	61,441	26,924	37,076	380
MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	33,676	31,709	66,982	26,295	37,033	381
NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	28,621	31,612	72,364	28,211	36,866	382
SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	34,625	26,231	57,344	35,192	36,795	383
PAPUA	BOVEN DIGOEL	34,555	30,052	60,161	28,026	36,376	384
SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR	36,368	19,435	79,880	27,590	35,328	385
SUMATERA UTARA	NIAS UTARA	20,604	35,005	65,473	28,777	34,143	386
PAPUA	WAROPEN	32,982	30,703	60,229	7,681	26,162	387

Lampiran 9 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan – Indonesia Barat (Data 80 persen)

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
JAWA TIMUR	TRENGGALEK	74,943	50,698	60,003	74,393	76,952
JAWA TENGAH	WONOGIRI	68,814	59,404	61,316	78,109	78,816
BANGKA BE-LITUNG	BANGKA TENGAH	68,171	60,802	60,064	77,202	76,601
BANGKA BE-LITUNG	BANGKA	67,972	56,977	60,718	77,524	79,592
RIAU	BENGKALIS	67,948	54,807	65,983	76,144	77,410
JAWA TENGAH	KARANGANYAR	67,830	60,153	56,516	82,944	75,071
JAWA TENGAH	KEBUMEN	67,388	57,885	60,725	76,957	76,234
SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT	67,260	62,257	59,647	79,837	69,032
DI YOGYAKARTA	SLEMAN	67,205	54,997	63,930	71,885	80,710
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	67,114	60,093	64,577	81,829	63,892
RIAU	KUANTAN SINGINGI	67,043	58,824	66,457	73,930	69,901
SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	66,916	61,565	56,695	81,052	70,875
JAWA TENGAH	PURBALINGGA	66,772	64,918	58,451	77,073	67,970
JAWA BARAT	SUMEDANG	66,581	58,377	58,488	75,996	75,736
KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	66,318	61,502	57,808	76,385	71,223
JAWA TENGAH	GROBOGAN	66,282	66,079	60,651	73,869	65,196
LAMPUNG	TANGGAMUS	66,008	59,296	62,692	69,319	73,672
JAWA BARAT	CIAMIS	65,975	60,367	61,538	70,283	72,563
SUMATERA UTARA	KARO	65,840	56,133	60,848	82,435	66,740
BENGKULU	REJANG LEBONG	65,801	57,373	61,511	76,897	69,084
JAWA TENGAH	SEMARANG	65,772	48,280	65,403	82,506	71,832
DI YOGYAKARTA	BANTUL	65,715	54,200	61,641	70,856	78,782
JAMBI	BUNGO	65,596	55,007	59,320	74,175	76,498
JAWA TENGAH	SUKOHARJO	65,582	49,385	61,382	81,141	75,208
JAWA BARAT	BEKASI	65,489	47,766	68,888	82,097	68,088
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	65,080	57,343	67,105	81,325	57,323
JAWA TENGAH	MAGELANG	64,686	50,514	63,471	74,263	73,532
DI YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	64,599	50,698	60,003	74,393	76,952
JAWA TIMUR	JOMBANG	64,455	33,226	38,802	67,976	52,575
SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	64,410	45,497	69,437	70,301	77,495
JAWA TENGAH	KLATEN	64,320	54,098	57,487	79,057	69,611

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	64,197	67,097	61,859	71,354	57,350
JAWA TENGAH	WONOSOBO	63,980	55,807	59,854	71,653	70,009
LAMPUNG	PRINGSEWU	63,949	49,222	62,221	78,962	69,154
RIAU	INDRAGIRI HILIR	63,494	58,234	62,494	67,635	66,032
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG	63,443	49,227	62,353	77,410	68,184
JAMBI	TEBO	63,348	52,983	58,570	74,271	69,872
SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	63,294	50,215	61,737	72,390	71,513
ACEH	BIREUEN	63,261	54,934	55,162	73,583	71,826
SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	63,178	56,804	61,820	81,115	55,933
JAWA TENGAH	SRAGEN	63,015	48,703	56,581	77,676	73,664
KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	62,958	63,576	57,870	72,758	58,690
BENGKULU	BENGKULU UTARA	62,881	49,541	56,201	75,405	74,470
JAWA TENGAH	PEMALANG	62,877	50,454	61,219	71,822	70,459
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	62,726	57,375	60,720	73,446	60,501
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	62,696	64,162	60,923	62,215	63,534
JAWA TIMUR	PONOROGO	62,658	54,200	61,641	70,856	78,782
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	62,647	53,399	61,009	67,809	69,725
ACEH	GAYO LUES	62,440	58,290	57,378	69,080	65,787
JAWA TIMUR	SITUBONDO	62,375	39,795	35,534	72,876	57,123
KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	62,315	59,145	57,123	75,661	58,989
JAWA TENGAH	BANYUMAS	62,230	61,865	42,666	73,256	77,559
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	62,114	54,997	63,930	71,885	80,710
SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	62,106	52,134	58,370	78,011	62,672
JAWA BARAT	KUNINGAN	62,099	58,554	60,973	71,430	58,314
KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	62,068	47,496	58,026	79,803	67,481
JAWA TIMUR	NGANJUK	61,898	38,571	42,099	71,274	49,207
SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	61,884	49,503	58,835	75,527	66,673
JAWA TIMUR	BANYUWANGI	61,761	45,644	39,273	75,041	67,492
JAWA TENGAH	KENDAL	61,668	42,280	59,490	77,720	73,984
JAWA BARAT	PANGANDARAN	61,608	43,880	62,416	76,138	69,086
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	61,531	55,250	60,169	70,978	60,750

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
JAWA TIMUR	BLITAR	61,393	55,766	37,187	71,619	65,069
JAWA TENGAH	PURWOREJO	61,205	60,628	43,194	75,150	71,303
SUMATERA BARAT	AGAM	61,085	37,106	59,171	82,558	76,813
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	61,070	38,196	61,064	77,348	77,103
JAWA TENGAH	BATANG	61,051	42,285	59,680	75,614	72,805
JAWA TIMUR	LAMONGAN	60,956	57,062	42,693	78,534	55,455
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	60,605	44,049	60,135	73,229	69,547
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	60,325	57,148	41,183	76,595	73,463
JAWA TENGAH	PATI	60,233	38,797	61,676	76,534	71,874
JAWA TENGAH	DEMAK	60,225	35,151	61,878	79,781	75,811
SUMATERA BARAT	PASAMAN	60,121	45,811	55,556	76,328	67,256
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	60,106	46,282	56,646	78,146	63,707
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	60,017	44,478	58,420	76,545	65,234
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	59,852	43,207	61,021	72,564	67,076
JAWA BARAT	INDRAMAYU	59,783	57,424	59,682	65,831	56,615
BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	59,592	50,467	56,960	77,370	56,704
JAWA TENGAH	CILACAP	59,501	58,467	36,578	72,476	80,867
JAWA TENGAH	BOYOLALI	59,438	49,436	41,081	76,091	80,767
SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	59,401	59,236	43,463	73,478	65,812
BENGKULU	KAUR	59,341	50,643	56,664	72,694	59,442
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	59,296	51,382	64,121	77,662	48,314
JAWA TIMUR	SIDOARJO	59,177	57,707	40,815	66,889	74,221
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	59,134	48,084	57,582	75,240	58,697
RIAU	ROKAN HULU	59,023	37,298	62,834	69,308	74,718
BANGKA BELITUNG	BELITUNG	59,011	43,302	47,140	79,645	74,590
JAWA TENGAH	JEPARA	58,898	39,716	62,992	74,505	64,560
RIAU	SIAK	58,892	51,092	65,540	79,431	45,224
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	58,869	51,110	61,521	73,214	52,170
JAWA BARAT	BANDUNG	58,756	39,872	64,350	70,758	65,648
JAMBI	MUARO JAMBI	58,741	62,923	39,753	71,972	66,132
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	58,634	43,428	56,500	72,533	66,410

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
SUMATERA BARAT	SOLOK	58,577	61,234	38,049	79,453	63,601
LAMPUNG	TULANG BAWANG	58,519	34,279	57,987	77,370	76,250
JAWA BARAT	SUKABUMI	58,485	39,643	64,117	67,498	68,197
JAWA TIMUR	BONDOWOSO	58,477	36,098	65,370	63,524	57,701
JAWA TIMUR	BOJONEGORO	58,110	64,688	60,059	76,024	49,699
JAWA BARAT	SUBANG	58,030	41,538	57,597	72,847	65,065
KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	58,027	47,157	58,772	76,708	53,328
BANTEN	TANGERANG	57,851	41,329	53,559	71,236	71,032
DI YOGYAKARTA	KULONPROGO	57,738	42,410	42,295	79,113	78,317
LAMPUNG	PESISIR BARAT	57,635	57,012	41,110	75,294	62,531
KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	57,403	34,365	59,971	69,975	75,291
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	57,386	52,683	37,924	73,409	73,941
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	57,159	40,245	59,352	74,704	59,820
JAWA TENGAH	KUDUS	57,110	45,382	39,794	81,594	72,192
KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR	57,110	65,388	57,682	73,756	38,239
JAWA TIMUR	MADIUN	57,093	58,472	44,190	77,062	61,586
JAWA TIMUR	MAGETAN	57,072	48,988	39,696	75,060	66,802
SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	56,916	38,442	60,845	66,128	67,843
SUMATERA UTARA	DAIRI	56,878	49,958	47,521	82,043	53,734
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	56,801	30,159	59,741	77,416	74,629
LAMPUNG	PESAWARAN	56,778	30,988	61,767	73,241	74,132
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	56,742	42,508	59,123	78,083	52,823
JAWA TIMUR	SAMPANG	56,588	36,261	38,076	70,271	67,176
JAWA BARAT	PURWAKARTA	56,465	57,488	37,291	68,362	69,365
LAMPUNG	MESUJI	56,450	60,229	37,537	71,827	62,530
ACEH	ACEH BARAT	56,433	59,413	33,233	71,592	71,749
SUMATERA UTARA	ASAHAN	56,427	40,603	50,688	70,546	69,827
RIAU	PELALAWAN	56,426	47,216	37,820	76,086	74,613
SUMATERA UTARA	SAMOSIR	56,366	52,236	38,241	80,017	63,151
ACEH	PIDIE JAYA	56,246	40,277	55,871	77,311	57,529
JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	56,153	35,884	58,591	71,083	66,527

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN	56,106	51,338	56,615	74,957	45,484
JAWA BARAT	MAJALENGKA	56,096	47,483	41,656	70,946	70,564
JAWA TENGAH	BLORA	56,036	55,499	37,551	72,136	65,586
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	55,915	47,141	42,127	76,175	64,619
JAWA TIMUR	MOJOKERTO	55,880	53,169	56,075	68,336	74,299
BENGKULU	MUKOMUKO	55,802	47,005	57,837	74,475	47,889
JAWA TIMUR	PACITAN	55,756	42,410	42,295	79,113	78,317
JAWA TENGAH	TEGAL	55,478	47,818	38,440	73,994	69,649
JAWA BARAT	BOGOR	55,455	39,053	52,389	65,979	70,061
LAMPUNG	WAY KANAN	55,327	49,054	36,502	70,358	74,376
SUMATERA SELATAN	LAHAT	54,933	43,954	62,203	76,054	43,791
JAWA TIMUR	KEDIRI	54,892	44,942	63,305	76,920	70,434
JAWA BARAT	GARUT	54,819	36,324	61,530	64,112	63,022
ACEH	ACEH BESAR	54,811	54,791	35,282	77,759	60,045
BENGKULU	KEPAHIANG	54,810	45,751	41,432	75,458	63,097
JAWA TIMUR	GRESIK	54,638	39,360	41,116	78,027	66,536
SUMATERA UTARA	LANGKAT	54,507	56,195	38,870	65,160	62,019
JAWA TIMUR	MALANG	54,231	64,653	78,879	76,825	80,515
SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	54,167	31,891	58,184	65,395	70,946
JAMBI	SAROLANGUN	54,134	43,555	55,594	73,639	48,163
KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	53,985	39,627	59,319	68,710	52,588
JAMBI	BATANGHARI	53,906	35,312	61,371	72,125	54,023
JAWA TIMUR	NGAWI	53,838	49,318	63,282	74,329	74,401
SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	53,770	36,350	42,601	73,735	73,211
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	53,674	34,147	59,586	76,403	53,389
ACEH	ACEH TENGAH	53,584	52,341	37,034	77,997	54,526
KALIMANTAN BARAT	SINTANG	53,512	51,122	31,772	68,700	73,485
ACEH	ACEH SELATAN	53,502	56,502	30,826	71,980	65,353
KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	53,477	57,501	33,793	68,253	61,667
JAWA TIMUR	PAMEKASAN	53,472	60,484	43,483	73,718	71,208
JAWA TENGAH	REMBANG	53,428	40,144	44,407	72,776	62,809
BANTEN	PANDEGLANG	53,395	31,775	59,126	62,935	68,746

Provinsi	Kabupaten	IDSD	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	53,392	49,736	39,370	72,224	57,461
JAWA BARAT	KARAWANG	53,380	31,771	61,977	65,335	63,115
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	53,332	45,248	37,198	71,776	66,966
JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	53,329	37,174	55,954	73,381	52,991
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU	53,250	52,760	45,366	75,190	44,678
ACEH	ACEH BARAT DAYA	53,118	39,450	36,662	72,323	76,112
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	53,043	36,604	42,925	74,995	67,177
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	52,839	37,501	41,043	70,131	72,215
ACEH	ACEH JAYA	52,656	53,135	33,923	72,144	59,118
KALIMANTAN BARAT	LANDAK	52,599	38,324	53,868	71,071	52,171
JAWA BARAT	CIANJUR	52,395	38,326	63,672	54,245	56,933
ACEH	BENER MERIAH	52,354	32,387	55,598	77,962	53,514
KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	52,342	39,056	33,512	68,815	83,337
KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	52,222	37,786	51,900	71,813	52,809
JAWA TENGAH	BREBES	52,137	33,630	56,008	70,719	55,473
RIAU	INDRAGIRI HULU	51,887	56,830	45,906	69,875	39,763
BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	51,769	35,789	38,835	75,802	68,176
RIAU	ROKAN HILIR	51,641	53,532	37,896	70,157	49,969
RIAU	KAMPAR	51,569	36,365	42,595	68,564	66,594
SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	51,540	38,838	39,768	69,063	66,149
JAWA TIMUR	SUMENEP	51,401	43,230	45,422	73,356	61,875
SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	51,386	43,531	58,530	76,859	35,605
KALIMANTAN BARAT	SEKADAU	51,279	34,709	54,649	68,166	53,475
JAMBI	KERINCI	50,950	28,460	65,193	70,776	51,316
BANTEN	SERANG	50,863	34,765	41,134	72,144	64,875
JAWA TIMUR	TUBAN	50,526	48,093	39,577	77,584	71,951
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	50,478	54,804	37,952	74,759	41,754
BENGKULU	LEBONG	50,274	41,693	40,597	70,698	53,382
JAWA BARAT	CIREBON	50,204	39,662	42,263	64,705	58,569

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
BANTEN	LEBAK	49,989	38,729	40,054	61,987	64,939
SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	49,572	37,817	45,521	73,245	47,890
JAWA TIMUR	JEMBER	49,505	49,176	60,199	77,672	61,783
SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	49,501	37,949	38,919	66,789	60,871
ACEH	ACEH TAMIANG	49,472	37,130	55,783	67,720	42,707
ACEH	ACEH SINGKIL	49,317	39,825	51,168	70,233	41,332
JAWA TIMUR	LUMAJANG	49,257	49,503	58,542	77,438	66,327
SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	49,115	28,443	56,058	66,768	54,662
SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	49,090	37,872	27,887	81,018	67,868
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	49,068	51,354	32,326	64,271	54,333
SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	49,026	49,339	32,940	70,762	50,231
JAWA TIMUR	PASURUAN	48,851	55,673	60,828	61,822	69,497
JAWA TIMUR	BANGKALAN	48,735	60,231	62,409	72,339	41,934
KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	48,705	45,964	37,183	72,733	45,269
SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	48,315	29,170	57,131	71,518	45,721
JAMBI	MERANGIN	48,023	26,105	61,351	72,066	46,081
ACEH	NAGAN RAYA	47,759	33,009	55,427	75,577	37,625
KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA	47,652	36,192	40,660	73,461	47,698
ACEH	ACEH UTARA	47,409	32,369	54,450	71,251	40,228
KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	46,922	36,372	39,167	74,000	45,979
BENGKULU	BENGKULU TENGAH	46,342	28,239	34,680	72,773	64,717
JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	46,330	60,085	37,584	60,077	44,269
SUMATERA SELATAN	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	46,112	49,797	38,555	76,960	30,600
SUMATERA UTARA	NIAS	45,964	42,838	31,554	62,795	52,585
KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA	45,706	41,675	37,216	72,963	38,563
SUMATERA UTARA	LABUANBATU UTARA	45,497	44,116	37,552	79,438	32,559
SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	45,215	45,782	32,067	63,857	44,582

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
KALIMANTAN BARAT	MELAWI	45,158	37,052	37,550	65,865	45,383
BENGKULU	SELUMA	45,024	37,944	37,908	70,383	40,594
SUMATERA UTARA	LABUHANBATU SELATAN	44,609	26,209	35,907	80,173	52,485
SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	44,578	37,437	37,232	72,468	39,093
ACEH	PIDIE	44,259	38,165	53,129	69,824	27,103
SUMATERA UTARA	BATU BARA	43,807	26,462	36,049	66,476	58,075
KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	43,747	43,443	31,831	71,215	37,192
JAWA BARAT	TASIKMALAYA	43,456	38,941	40,733	68,736	32,708
ACEH	ACEH TIMUR	42,800	41,274	32,009	67,204	37,795
SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	42,697	26,733	32,861	70,375	53,759
ACEH	ACEH TENGGARA	41,335	39,111	29,665	69,979	35,955
BENGKULU	BENGKULU SELATAN	39,832	15,639	36,941	77,427	56,276
ACEH	SIMEULUE	37,268	28,227	32,363	67,809	31,143
SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	36,795	34,625	26,231	57,344	35,192
SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR	35,328	36,368	19,435	79,880	27,590
SUMATERA UTARA	NIAS UTARA	34,143	20,604	35,005	65,473	28,777

Lampiran 10 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan – Indonesia Tengah (Data 80 persen)

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
BALI	BADUNG	75,628	62,603	71,608	88,153	82,782
BALI	KLUNGKUNG	71,873	65,659	62,168	79,882	81,837
BALI	GIANYAR	69,767	61,874	62,735	85,570	71,327
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	68,293	66,097	67,333	72,030	67,853
BALI	BULELENG	67,306	64,451	59,906	79,980	66,455
BALI	TABANAN	66,254	48,641	63,063	85,558	73,420
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	65,939	67,257	60,337	72,535	64,223
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	65,829	55,638	61,135	76,219	72,432
KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	65,642	62,278	63,936	67,793	68,782
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	65,403	56,657	65,740	69,302	70,885
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	65,266	59,471	58,629	71,934	72,343
SULAWESI SELATAN	BARRU	65,063	58,106	59,024	77,960	67,022
BALI	BANGLI	64,536	53,727	58,004	80,391	69,240
BALI	KARANGASEM	64,532	53,487	58,566	76,106	72,742
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	64,492	61,466	57,390	75,318	65,110
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	64,322	54,675	57,043	77,639	70,690
SULAWESI TENGAH	SIGI	64,159	59,767	58,732	72,626	66,465
GORONTALO	GORONTALO	64,022	64,266	62,167	63,078	66,667
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	63,756	54,078	62,070	73,766	66,728
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	63,656	58,164	55,996	78,677	64,075
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	63,451	55,057	61,042	75,660	63,745
SULAWESI SELATAN	BANTAENG	63,246	50,718	63,453	76,519	64,976
BALI	JEMBRANA	62,356	42,936	58,423	82,724	72,859
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	62,247	57,612	46,901	76,881	72,268

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	62,080	50,128	56,899	74,087	70,286
KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	61,827	57,021	57,976	68,095	64,908
SULAWESI BARAT	MAJENE	61,503	51,686	56,764	73,383	66,457
SULAWESI TENGAH	POSO	61,273	71,531	40,010	82,372	59,792
KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	60,924	47,644	59,270	69,756	69,938
SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	60,400	64,970	59,404	78,121	44,143
SULAWESI TENGGARA	KONAWE KEPULAUAN	60,325	52,242	54,578	70,219	66,143
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	60,199	53,203	43,204	71,820	79,552
KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	59,963	51,728	59,390	72,492	58,049
SULAWESI SELATAN	BONE	59,892	43,840	59,444	66,824	73,884
KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	59,855	54,665	58,448	72,290	55,570
SULAWESI SELATAN	SINJAI	59,846	42,249	61,059	75,855	65,551
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	59,246	53,977	42,164	73,440	73,715
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	59,106	42,807	62,539	70,570	64,603
KALIMANTAN TIMUR	BERAU	59,101	54,209	46,812	77,291	62,205
GORONTALO	BONE BOLANGO	58,560	41,251	62,776	69,676	65,178
SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	58,557	47,370	54,143	75,549	60,680

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	58,503	65,803	46,018	74,803	51,717
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	58,210	44,895	55,449	73,368	62,861
KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	58,149	56,105	59,293	68,391	50,252
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	58,055	51,279	42,733	71,928	72,069
GORONTALO	POHUWATO	57,911	65,974	38,798	71,013	61,877
SULAWESI TENGGARA	WAKATOBİ	57,823	60,891	39,407	73,754	63,168
KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	57,760	48,480	41,772	72,418	75,893
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	57,643	37,574	62,185	71,790	65,818
SULAWESI BARAT	MAMUJU	57,552	40,075	59,207	70,765	65,340
SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	57,308	45,777	57,392	71,173	57,683
SULAWESI SELATAN	LUWU	57,062	46,592	55,593	75,987	53,865
KALIMANTAN TIMUR	PASER	56,795	49,332	57,741	67,563	54,067
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	56,305	50,809	41,311	72,847	65,729
SULAWESI TENGGARA	KONAWĒ UTARA	56,230	43,674	56,652	69,658	58,004
SULAWESI SELATAN	SOPPENG	56,147	54,270	37,491	78,099	62,545
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	55,818	44,377	57,401	77,886	48,927
SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	55,381	54,807	38,586	75,563	58,868
SULAWESI SELATAN	MAROS	55,302	40,932	59,884	71,699	53,222
KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	55,236	60,014	34,214	71,262	63,620
SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	55,210	48,976	59,225	69,587	46,030
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA	55,021	46,995	60,506	67,026	48,085
SULAWESI BARAT	MAMASA	55,004	40,150	50,281	70,085	64,695
GORONTALO	GORONTALO UTARA	54,982	46,635	56,613	63,897	54,171
GORONTALO	BOALEMO	54,811	61,106	35,042	66,110	63,756
SULAWESI TENGAH	BUOL	54,519	40,351	60,199	73,302	49,615

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
SULAWESI SELATAN	PINRANG	54,148	48,724	55,937	70,890	44,493
NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	53,672	39,263	62,623	71,442	47,242
SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	53,025	37,580	57,513	74,288	49,238
SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	52,968	37,412	60,157	75,545	46,299
SULAWESI SELATAN	GOWA	52,851	42,238	59,161	69,857	44,694
NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	52,720	39,975	58,929	66,133	49,588
SULAWESI SELATAN	SINDERENG RAPPANG	52,634	48,832	37,526	79,341	52,787
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR	52,474	60,561	35,587	69,110	50,904
SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	52,429	36,925	57,748	75,948	46,656
SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	52,386	43,872	59,458	70,420	40,998
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	52,284	33,094	58,611	70,070	54,982
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	52,281	33,226	63,056	69,042	51,649
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	52,126	39,206	62,745	71,887	41,747
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	52,055	37,457	35,615	74,425	73,957
SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR	51,831	35,032	58,328	74,728	47,266
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	51,444	48,084	39,179	70,584	52,672
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	51,355	51,809	33,300	79,143	50,940
NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	51,327	45,394	37,683	72,160	56,225
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	51,054	48,925	37,593	67,954	54,359
SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA	50,728	44,675	37,128	73,202	54,538
SULAWESI SELATAN	TAKALAR	50,661	37,140	38,911	70,927	64,264

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	50,387	37,749	57,585	72,929	40,658
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA	50,205	54,406	35,114	70,532	47,151
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	49,393	52,825	35,320	65,224	48,908
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	49,055	31,909	54,012	72,027	46,649
NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	48,825	46,129	38,151	73,058	44,200
SULAWESI TENGGARA	KONAWE	48,488	35,057	59,342	74,275	35,772
SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA	48,465	40,067	35,832	75,777	50,714
SULAWESI TENGGARA	MUNA BARAT	48,412	36,033	56,193	72,457	37,443
SULAWESI BARAT	PASANGKAYU	48,343	35,548	54,917	71,143	39,326
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	48,259	41,595	33,138	72,981	53,917
SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA	48,238	35,780	40,385	72,235	51,874
SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	47,727	39,546	39,942	72,628	45,229
SULAWESI TENGAH	DONGGALA	47,699	37,629	57,721	73,163	32,577
SULAWESI SELATAN	WAJO	47,591	30,425	56,591	69,897	42,626
NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	47,559	32,891	42,945	74,194	48,817
NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	47,378	42,391	55,935	66,562	31,925
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	47,228	47,218	37,879	70,143	39,657
SULAWESI TENGGARA	BUTON SELATAN	47,164	44,858	38,369	56,854	50,567
SULAWESI TENGGARA	BOMBANA	47,076	37,675	35,782	69,564	52,372
SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR	47,037	42,169	38,669	79,482	37,771
SULAWESI TENGGARA	BUTON	46,814	49,808	36,896	68,621	38,086
SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA	45,214	32,947	39,354	75,169	42,878

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
SULAWESI TENGGARA	MUNA	44,996	25,047	62,457	72,173	36,306
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SITARO	44,842	40,866	38,629	76,658	33,412
SULAWESI UTARA	MINAHASA	44,802	37,133	44,553	72,336	33,665
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	44,780	34,700	36,789	74,116	42,498
SULAWESI TENGAH	MOROWALI	44,755	27,196	43,328	73,227	46,495
KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	44,745	26,686	45,552	77,655	42,464
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	44,406	32,906	63,115	70,781	26,451
NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	44,366	36,793	35,441	77,078	38,549
SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA	44,290	39,073	37,654	79,291	32,984
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN	44,191	36,239	54,726	63,302	30,378
NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR	43,513	41,067	38,094	66,178	34,627
SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	43,250	25,134	57,648	68,197	35,411
NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA	41,902	43,756	39,822	67,093	26,368
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	41,531	24,492	54,842	73,982	29,939
NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	36,866	28,621	31,612	72,364	28,211

Lampiran 11 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan – Indonesia Timur (Data 80 persen)

Provinsi	Kabupaten	IDSDB	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan
MALUKU	MALUKU TENGAH	60,734	52,988	59,025	82,448	52,763
MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	58,100	69,042	43,046	70,407	54,458
MALUKU	MALUKU TENGGARA	52,968	43,082	33,787	79,605	67,930
MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	51,735	47,281	58,773	62,783	41,061
MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	51,400	33,577	53,197	69,818	55,967
PAPUA BARAT	FAKFAK	51,297	37,457	59,206	70,562	44,250
MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	50,819	41,969	61,769	76,674	33,555
PAPUA	SUPIORI	50,754	39,460	57,417	65,078	45,005
PAPUA BARAT	MANOKWARI	50,485	39,645	61,081	70,840	37,870
PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	49,992	51,176	38,410	57,058	55,693
PAPUA	MERAUKE	49,891	38,635	60,617	72,875	36,302
PAPUA BARAT	KAIMANA	48,875	36,565	57,323	68,198	39,919
MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	48,799	36,523	54,722	78,464	36,162
MALUKU	BURU	48,475	35,869	54,837	75,928	36,972
PAPUA	MIMIKA	47,618	34,688	59,470	74,137	33,617
PAPUA	JAYAPURA	47,260	28,480	40,978	74,991	57,000
PAPUA	NABIRE	46,823	33,627	39,803	80,042	44,864
MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	45,893	49,293	33,604	76,415	35,044
MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	45,208	39,074	54,803	70,242	27,770
PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	44,002	33,527	51,425	62,064	35,034
PAPUA	ASMAT	43,778	61,872	33,482	43,246	41,000
MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA	43,747	30,257	58,982	77,567	26,459
PAPUA	BIAK NUMFOR	43,429	34,195	42,423	73,047	33,571
PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN	43,267	41,280	36,328	57,084	40,939
PAPUA	KEEROM	43,145	35,488	32,247	68,031	44,507
PAPUA	JAYAWIJAYA	42,976	31,541	42,363	51,400	49,668
MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	42,732	46,716	32,002	73,434	30,372
PAPUA BARAT	SORONG	41,780	30,409	35,766	68,046	41,171
PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI	39,516	30,958	35,353	69,223	32,186
MALUKU	KEPULAUAN ARU	38,526	26,214	49,747	67,545	25,011
PAPUA	SARMI	38,089	30,382	37,482	66,488	27,798
PAPUA	MAPPI	37,076	33,279	34,325	61,441	26,924
MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	37,033	33,676	31,709	66,982	26,295
PAPUA	BOVEN DIGOEL	36,376	34,555	30,052	60,161	28,026
PAPUA	WAROPEN	26,162	32,982	30,703	60,229	7,681



KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Alamat:

Gedung Permata Kuningan Lt. 10
Jl Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Kontak:

kppod@kppod.org | 021 8378 0642

www.kppod.org